



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur Dumai, Riau 28882,
Telepon (0765) 4300009, Faksimile (0765) 440093,
Laman dumaikota.go.id, Pos-el umum@dumaikota.go.id

2023

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023



LPPD

Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul
dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)"



[email. bag.tapendumai@gmail.com](mailto:bag.tapendumai@gmail.com)



PEMKO DUMAI

*K*ata Pengantar

*P*uji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatNya sehingga diberikan kekuatan serta kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*S*esuai dengan amanah Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut dan sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah berkewajiban melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah setiap tahunnya dalam bentuk LPPD. Dalam memenuhi amanah tersebut Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Dumai Tahun 2023 disusun dan disampaikan kepada Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki.

*T*entunya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan, namun demikian dengan semangat dan tekad yang bulat serta dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki dan adanya dukungan dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Adalah menjadi harapan kita semua, bahwa kuantitas dan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat semakin baik dan meningkat setiap tahunnya. Amin.

Dumai, **Maret 2024**

WALIKOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM, MARS

**DAFTAR ISI**

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	2
b. Data Geografis Wilayah	2
c. Jumlah Penduduk	2
d. Jumlah Kecamatan	4
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah; dan	5
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	8
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	26
a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah	26
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	27
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah; dan	33
d. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan (RKPD)	38
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	39
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	43
2.1 Capaian Kinerja Makro	43
1. Indeks Pembangunan Manusia	43
2. Angka Kemiskinan	45
3. Angka pengangguran	47
4. Pertumbuhan Ekonomi	48
5. Pendapatan Per Kapita	53
6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)	55
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	59
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	59
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	113
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	129
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	132
a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	132
b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja	148
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	335
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	335
2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan di Propinsi	335
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	335
3.1 Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pusat	335
3.1.1 Target Kinerja	336
3.1.2 Realisasi	336
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	336
3.2.1 Target Kinerja	336
3.2.2 Realisasi	337
3.3 Permasalahan dan Kendala	338
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	339



BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	340
4.1	Urusan Pendidikan	340
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	340
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	341
4.1.3	Realisasi	342
4.1.4	Alokasi Anggaran	344
4.1.5	Dukungan Personil	346
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	347
4.2	Urusan Kesehatan	348
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	348
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	350
4.2.3	Realisasi	351
4.2.4	Alokasi Anggaran	362
4.2.5	Dukungan Personil	363
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	364
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	364
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	364
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	367
4.3.3	Realisasi	371
4.3.4	Alokasi Anggaran	372
4.3.5	Dukungan Personil	373
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	374
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	375
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	376
4.4.3	Realisasi	376
4.4.4	Alokasi Anggaran	377
4.4.5	Dukungan Personil	377
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	378
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat.	
	Satuan Polisi Pamong Praja	379
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	379
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	381
4.5.3	Realisasi	382
4.5.4	Alokasi Anggaran	387
4.5.5	Dukungan Personil	388
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	388
	Badan penanggulangan Bencana Daerah	390
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	390
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	391
4.5.3	Realisasi	395
4.5.4	Alokasi Anggaran	402
4.5.5	Dukungan Personil	404
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	404
4.6	Urusan Sosial	406
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	406
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	407
4.6.3	Realisasi	408
4.6.4	Alokasi Anggaran	410
4.6.5	Dukungan Personil	411
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	412
4.7	Program dan Kegiatan	413
4.7.1	Urusan Pendidikan	413
4.7.2	Urusan kesehatan	415
4.7.3	Urusan Pekerjaan Umum	417
4.7.4	Urusan Perumahan Rakyat	418



PEMKO DUMAI

4.7.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban, Keamanandan Perlindungan Masyarakat	418
4.7.6	Urusan Sosial	420
BAB V	P E N U T U P	422



DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel	1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2023	3
Tabel	2	Jumlah Penduduk menurut Wajib KTP Kota Dumai Tahun 2023	3
Tabel	3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023	4
Tabel	4	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Dumai	4
Tabel	5	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2023	7
Tabel	6	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Setiap Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2023	9
Tabel	7	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Visi : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)	38
Tabel	8	Sinkronisasi SPM Tahun 2023 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	42
Tabel	9	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2018 - 2023	43
Tabel	10	Kondisi IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2023	44
Tabel	11	Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2023	45
Tabel	12	Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun, 2017–2023	48
Tabel	13	Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (miliar rupiah), 2018-2023	48
Tabel	14	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (persen), 2018–2023	49
Tabel	15	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (2010=100), 2018–2023	51
Tabel	16	Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (persen), 2017–2021	52
Tabel	17	Rata-rata Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017-2023	54
Tabel	18	Indeks Gini di Kota Dumai Tahun 2017-2023	55
Tabel	18	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	133
Tabel	19	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023	137



PEMKO DUMAI

Tabel	20	Skala Penilaian Kinerja Kota Dumai Tahun 2023	148
Tabel	21	Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2023	149
Tabel	22	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	151
Tabel	23	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	152
Tabel	24	Perbandingan Realisasi SPM Kota Dumai dengan Target Nasional	153
Tabel	25	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	154
Tabel	26	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	154
Tabel	27	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	156
Tabel	28	Prestasi dan Penghargaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023	157
Tabel	29	Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023	158
Tabel	30	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023	159
Tabel	31	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA	160
Tabel	32	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	161
Tabel	33	Prestasi dan Penghargaan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023	162
Tabel	34	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	163
Tabel	35	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	164
Tabel	36	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	164
Tabel	37	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	165
Tabel	38	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	166
Tabel	39	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	166
Tabel	40	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	168
Tabel	41	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	168
Tabel	42	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	169
Tabel	43	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	170
Tabel	44	Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023	170
Tabel	45	Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023 Dinas Perkimtan	172
Tabel	46	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	173



PEMKO DUMAI

Tabel	47	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	172
Tabel	48	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	174
Tabel	49	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	175
Tabel	50	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	177
Tabel	51	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	178
Tabel	52	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	178
Tabel	53	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	179
Tabel	54	Capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021	179
Tabel	55	Sasaran Strategist dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	180
Tabel	56	Pencapaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	181
Tabel	57	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	182
Tabel	58	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	182
Tabel	59	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Akhir Periode Renstra	183
Tabel	60	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	183
Tabel	61	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	184
Tabel	62	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	185
Tabel	63	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	186
Tabel	64	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	187
Tabel	65	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	187
Tabel	66	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	187
Tabel	67	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	188
Tabel	68	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	189
Tabel	69	Prestasi dan Penghargaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023	190
Tabel	70	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	190
Tabel	71	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	191
Tabel	72	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	192
Tabel	73	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	192
Tabel	74	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Prioritas)	193



PEMKO DUMAI

Tabel	75	Pencapaian Kinerja dan Anggaran 2023	193
Tabel	76	Prestasi dan Penghargaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023	196
Tabel	77	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	197
Tabel	78	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	198
Tabel	79	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	198
Tabel	80	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	199
Tabel	81	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	199
Tabel	82	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	200
Tabel	83	Prestasi dan Penghargaan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023	201
Tabel	84	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	202
Tabel	85	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	202
Tabel	86	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	203
Tabel	87	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	203
Tabel	88	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	204
Tabel	89	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	205
Tabel	90	Prestasi dan Penghargaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023	207
Tabel	91	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	207
Tabel	92	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	208
Tabel	93	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	208
Tabel	94	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	209
Tabel	95	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	210
Tabel	96	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	210
Tabel	97	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	211
Tabel	98	Prestasi dan Penghargaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2023	212
Tabel	99	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	212
Tabel	100	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	213
Tabel	110	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	213
Tabel	111	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	213



PEMKO DUMAI

Tabel	112	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	214
Tabel	113	Pencapaian kinerja dan anggaran	214
Tabel	114	Prestasi dan Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023	216
Tabel	115	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	217
Tabel	116	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	217
Tabel	117	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	218
Tabel	118	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	218
Tabel	119	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	219
Tabel	120	Pencapaian kinerja dan anggaran	220
Tabel	121	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	221
Tabel	122	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	221
Tabel	123	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	222
Tabel	124	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	222
Tabel	125	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	223
Tabel	126	Prestasi dan Penghargaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023	224
Tabel	127	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	224
Tabel	128	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	225
Tabel	129	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	226
Tabel	130	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	226
Tabel	131	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	227
Tabel	132	Pencapaian kinerja dan anggaran	227
Tabel	133	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	228
Tabel	134	Prestasi dan Penghargaan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023	229
Tabel	135	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	229
Tabel	136	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	230
Tabel	137	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	230
Tabel	138	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	231
Tabel	139	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	232



PEMKO DUMAI

Tabel	140	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	232
Tabel	141	Prestasi dan Penghargaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2023	234
Tabel	142	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	235
Tabel	143	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	235
Tabel	144	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	236
Tabel	145	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	236
Tabel	146	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	237
Tabel	147	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	238
Tabel	148	Prestasi dan Penghargaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023	241
Tabel	149	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	241
Tabel	150	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023	242
Tabel	151	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	242
Tabel	152	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	243
Tabel	153	sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023	244
Tabel	154	Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023	244
Tabel	155	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	246
Tabel	156	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	247
Tabel	157	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	247
Tabel	158	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi	248
Tabel	159	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	249
Tabel	160	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	249
Tabel	161	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	251
Tabel	162	Prestasi dan Penghargaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023	251
Tabel	163	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	252
Tabel	164	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	253
Tabel	165	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	253
Tabel	166	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	254



PEMKO DUMAI

Tabel	167	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	255
Tabel	168	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	255
Tabel	169	Prestasi dan Penghargaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023	257
Tabel	170	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	257
Tabel	171	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023	258
Tabel	172	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	258
Tabel	173	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	259
Tabel	174	realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023	259
Tabel	175	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai	260
Tabel	176	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	261
Tabel	177	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	262
Tabel	178	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	263
Tabel	179	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	264
Tabel	180	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	265
Tabel	181	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	265
Tabel	182	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	267
Tabel	183	Prestasi dan Penghargaan	268
Tabel	184	Capaian Target Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	268
Tabel	185	Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023	269
Tabel	186	Perbandingan realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Akhir Rencana Strategis	270
Tabel	187	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	271
Tabel	188	Sasaran Strategis dan Anggaran (Program Prioritas)	271
Tabel	189	Pencapaian kinerja dan anggaran	272
Tabel	190	Prestasi dan penghargaan	273
Tabel	191	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	273
Tabel	192	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	274



PEMKO DUMAI

Tabel	193	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	274
Tabel	194	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	274
Tabel	195	Tabel 195 Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	275
Tabel	196	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	275
Tabel	197	Prestasi dan Penghargaan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023	276
Tabel	198	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	276
Tabel	199	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	277
Tabel	200	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	277
Tabel	201	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	277
Tabel	202	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	278
Tabel	203	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	278
Tabel	204	Prestasi dan Penghargaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2023	279
Tabel	205	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	280
Tabel	206	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	280
Tabel	207	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir Renstra	281
Tabel	208	Indikator dan Target Nasional Sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	282
Tabel	209	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	282
Tabel	210	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	283
Tabel	211	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	285
Tabel	212	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	286
Tabel	213	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	287
Tabel	214	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	288
Tabel	215	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	289
Tabel	216	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	293
Tabel	217	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	294
Tabel	218	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	295



PEMKO DUMAI

Tabel	219	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	296
Tabel	220	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	297
Tabel	221	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	298
Tabel	222	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	300
Tabel	223	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	301
Tabel	224	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	301
Tabel	225	Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM)	302
Tabel	226	Sasaran Strategis dan Anggaran Program Prioritas Tahun 2023	303
Tabel	227	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	303
Tabel	228	Prestasi dan Penghargaan Inspektorat Daerah Tahun 2023	305
Tabel	229	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	305
Tabel	230	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	306
Tabel	231	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA	306
Tabel	232	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	307
Tabel	233	Pencapaian kinerja dan anggaran	307
Tabel	234	Efisiensi penggunaan Sumber Daya	308
Tabel	235	Prestasi dan penghargaan	309
Tabel	236	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	309
Tabel	237	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	309
Tabel	238	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	310
Tabel	239	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	310
Tabel	240	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	311
Tabel	241	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	311
Tabel	242	Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2023	312
Tabel	243	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	313
Tabel	244	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	313
Tabel	245	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	314
Tabel	246	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi	314



PEMKO DUMAI

Tabel	247	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	315
Tabel	248	Pencapaian kinerja dan anggaran	315
Tabel	249	Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2023	316
Tabel	250	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	317
Tabel	251	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	317
Tabel	252	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	318
Tabel	253	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi	318
Tabel	254	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	319
Tabel	255	Pencapaian kinerja dan anggaran	319
Tabel	256	Prestasi dan Penghargaan Tahun 2023	321
Tabel	257	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	322
Tabel	258	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	322
Tabel	259	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	323
Tabel	260	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	323
Tabel	261	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	324
Tabel	262	Pencapaian kinerja dan anggaran	324
Tabel	263	Prestasi dan Penghargaan Tahun 2023	325
Tabel	264	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	326
Tabel	265	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	326
Tabel	266	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	327
Tabel	267	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	327
Tabel	268	Pencapaian kinerja dan anggaran	328
Tabel	269	Prestasi dan Penghargaan Tahun 2023	329
Tabel	270	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	330
Tabel	271	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	330
Tabel	272	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	331
Tabel	273	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	331
Tabel	274	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Priorita)	332
Tabel	275	Pencapaian kinerja dan anggaran	332



PEMKO DUMAI

Tabel	276	Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Dumai timur Tahun 2023	334
Tabel	277	Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Propinsi	338
Tabel	278	Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Permerintahan Kabupaten/Kota	341
Tabel	279	Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini	341
Tabel	280	Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar	342
Tabel	281	Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	342
Tabel	282	Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini	342
Tabel	283	Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar	343
Tabel	284	Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	343
Tabel	285	Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan TA.2023	344
Tabel	286	Susunan Organisasi dan Data Tenaga Pendidik Kota Dumai Tahun 2023	346
Tabel	287	Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	348
Tabel	288	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	350
Tabel	289	Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Dumai	358
Tabel	290	Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM	362
Tabel	291	Jumlah Tenaga Medis Di Puskesmas Kota Dumai Tahun 2020 S/D 2023	363
Tabel	292	Jumlah Para Medis Di Puskesmas Kota Dumai Tahun 2020 S/D 2023	363
Tabel	293	Jenis Pelayanan Dasar	363
Tabel	294	Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota	364
Tabel	295	Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	367
Tabel	296	Perhitungan Kebutuhan Pelayanan Dasar Air Minum	368
Tabel	297	Kondisi Sarana dan Prasarana SPAM Jaringan Perpipaan Kota Dumai	369
Tabel	298	Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2023	371
Tabel	299	Alokasi Anggaran yang mendukung Pencapaian SPM	372
Tabel	300	PNS Dinas PUPR Kota Dumai Menurut Tingkat Pendidikan Formal	374
Tabel	301	PNS Dinas PUPR Kota Dumai Menurut Jabatan Tahun 2023	374
Tabel	302	Indikator dan Nilai SPM Serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional	375



PEMKO DUMAI

Tabel	303	Target Capaian SPM Daerah Kota Dumai Tahun 2023	376
Tabel	304	Realisasi Capaian SPM Daerah Kota Dumai Tahun 2023	376
Tabel	305	Alokasi Anggaran yang Mendukung Capaian SPM	377
Tabel	306	Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	383
Tabel	307	Pencapaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023	388
Tabel	308	Target Capaian SPM Daerah Tahun 2023	391
Tabel	309	Target Capaian SPM Tahun 2023	394
Tabel	310	Luas Kecamatan Kota Dumai Tahun 2023	396
Tabel	311	Pencapaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023	402
Tabel	312	Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional	407
Tabel	313	Pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2023	407
Tabel	314	Realisasi Pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2023	408
Tabel	315	Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Dumai	410



DAFTAR GRAFIK

			Hal
Grafik	1	Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2017-2023	44
Grafik	2	Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai 2017-2023	46
Grafik	3	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Dumai Tahun 2017-2023	46
Grafik	4	Indek Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai 2017-20223	47
Grafik	5	Pencapaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2019 sampai dengan 2023	352
Grafik	6	Pencapaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2019-2023	352
Grafik	7	Pencapaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2019-2023	353
Grafik	8	Pencapaian Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2019 s.d 2023	353
Grafik	9	Pencapaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar Tahun 2019 sampai dengan 2023	354
Grafik	10	Pencapaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Tahun 2019 sampai dengan 2023	354
Grafik	11	Pencapaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Tahun 2019 sampai dengan 2023	353
Grafik	12	Pencapaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2019 sampai dengan 2023	353
Grafik	13	Pencapaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus Tahun 2019 sampai dengan 2023	354
Grafik	14	Pencapaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Tahun 2019 sampai dengan 2023	356
Grafik	15	Pencapaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terduga Tuberkulosis Tahun 2019 sampai dengan 2023	357
Grafik	16	Pencapaian Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Tahun 2019 sampai dengan 2023	358

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Landasan hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6632);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2021–2026;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri A)



a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.

Secara geografis, Kota Dumai berada pada posisi antara $101^{\circ}0'38''$ - $101^{\circ}43'33''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}26'50''$ - $2^{\circ}15'40''$ Lintang Utara. Kota Dumai memiliki luas wilayah sebesar **2.065,6km²** dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Rimba Melintang,



Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis

- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

b. Data Geografis Daerah

Daerah Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian Utara dan sebagian dataran tinggi di sebelah Selatan. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan endapan, aluvial, dan tanah organosol dan glei hums dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Di wilayah Kota Dumai terdapat 53 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan, dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Sungai Buluala, Sungai Senepis, dan Sungai Masjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

Dumai beriklim tropis dengan suhu udara pada tahun 2023 berkisar antara $21,4^{\circ}\text{C}$ - $36,4^{\circ}\text{C}$ dan terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Curah hujan terbanyak di Kota Dumai selama tahun 2023 terjadi pada bulan November yaitu $366,8\text{mm}^3$, sedangkan yang terkecil terjadi pada bulan Maret yaitu $69,1\text{mm}^3$. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan September dan November sebanyak 25 hari dan terkecil pada bulan Maret yaitu sebanyak 11 hari.

c. Jumlah penduduk

Penduduk Kota Dumai berdasarkan data konsolidasi bersih semester 2 Tahun 2023 dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berjumlah



sebanyak 343.597 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 176.619 jiwa dan perempuan sebanyak 166.978 jiwa yang tergabung didalam 103.964 Kepala Keluarga dengan laju pertumbuhan sebesar 1,02 persen. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Kota yaitu 3.334,9 jiwa per-km² dan terendah di kecamatan Bukit Kapur dengan kepadatan 264,6 jiwa per-km².

Untuk lebih jelasnya jumlah dan penyebaran penduduk di Kota Dumai per Semester 2 Tahun 2023 sebagaimana tergambar pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kota Dumai Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)			JLH KK	KEPADATAN PENDUDUK (Km ²)	LAJU PERTUM- BUHAN (%)
		LK	PR	JML			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dumai Barat	23.792	22.823	46.615	14.901	982,9	0,49
2.	Dumai Timur	38.376	36.518	74.894	22.591	1.469,4	0,88
3.	Bukit Kapur	28.756	27.154	55.910	16.692	264,6	1,46
4.	Sei Sembilan	25.157	23.101	48.258	14.386	43,3	2,36
5.	Medang Kampai	10.215	9.443	19.658	5.772	45,5	2,71
6.	Dumai Kota	21.361	20.407	41.768	13.258	3.334,9	-0,52
7.	Dumai Selatan	28.962	27.532	56.494	17.174	728,8	0,89
Jumlah		176.619	166.978	343.597	103.964		

Sumber : Disdukcapil Kota Dumai

Komposisi penduduk Kota Dumai menurut Wajib KTP sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Wajib KTP
Kota Dumai -Tahun 2023

NO	KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	WAJIB KTP
1		2	3
1	147201	Dumai Barat	32.621
2	147202	Dumai Timur	52.613
3	147203	Bukit Kapur	37.696
4	147204	Sungai Sembilan	32.117
5	147205	Medang Kampai	12.877
6	147206	Dumai Kota	30.392
7	147207	Dumai Selatan	40.064
J U M L A H			238.380

Sumber : Disdukcapil Kota Dumai



Komposisi penduduk Kota Dumai menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan sebagaimana pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Per Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai
Tahun 2023

NO	Kec	PENDIDIKAN TERAKHIR (JIWA)										Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Tdk/ Bim Skih	Tidak Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III/ S. Muda	Diplom a IV/ Strata I	Strata II	Strata III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	DUMAI BARAT	17.927	3.429	6.316	4.784	10.692	270	915	2.172	106	4	46.615
2	DUMAI TIMUR	29.680	5.822	7.463	7.555	18.997	323	1.660	3.259	133	2	74.894
3	BUKIT KAPUR	30.517	4.138	5.198	4.841	9.276	162	505	1.237	36	3	55.913
4	SUNGAI SEMBILAN	20.677	4.008	11.970	4.722	6.009	98	218	539	16	1	48.258
5	MEDANG KAMPAI	8.548	1.472	3.486	1.904	3.472	78	212	473	12	1	19.658
6	DUMAI KOTA	15.366	3.324	4.948	4.706	10.422	214	893	1.816	76	3	41.768
7	DUMAI SELATAN	20.695	4.267	5.508	5.559	14.613	425	1.735	3.536	155	1	56.494
	JUMLAH	143.410	26.460	44.889	34.071	73.481	1.570	6.138	13.032	534	15	343.603

Sumber : Disdukcapil Kota Dumai

Kota Dumai didiami oleh beraneka ragam etnis dan suku bangsa. Sedikitnya terdapat 15 suku bangsa yang saat ini hidup berdampingan dan saling berbaur satu dengan yang lain secara damai, rukun dan harmonis. Heterogenitas ini menjadikan Kota Dumai semakin kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan norma-norma yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat, dimana semuanya itu dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar.

d. Jumlah Kecamatan

Sebagaimana telah disebutkan diatas, Kota Dumai memiliki 7 (tujuh) Kecamatan dan 36 (tiga puluh enam) Kelurahan yang terdapat didalamnya, hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ;

Tabel 4
Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Dumai

No	Nama Kecamatan / Kelurahan		Luas (Km ²)	Jumlah RT
1	2		3	4
1	Kecamatan Dumai Barat;		36,01	70
	1.1	Kelurahan Purnama;	11,57	25
	1.2	Kelurahan Pangkalan Sesai;	3,71	16
	1.3	Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan	2,9	15
	1.4	Kelurahan bagan Keladi.	17,84	14
2	Kecamatan Dumai Timur;		28,81	90
	2.1	Kelurahan Tanjung Palas	12,72	15
	2.2	Kelurahan Jaya Mukti	3,73	23
	2.3	Kelurahan Buluh Kasap	1,61	17
	2.4	Kelurahan Teluk Binjai	2,65	20
	2.5	Kelurahan Bukit Batrem	8,1	15
3	Kecamatan Bukit Kapur;		336,04	94
	3.1	Kelurahan Bagan Besar	38,44	19
	3.2	Kelurahan Bukit Nenas	61,6	13
	3.3	Kelurahan Bukit Kayu Kapur	15,94	12
	3.4	Kelurahan Gurun Panjang	84,76	10



	3.5	Kelurahan Kampung Baru	63,25	13
	3.6	Kelurahan Bukit Kapur	58,02	15
	3.7	Kelurahan Bagan Besar Timur	14,03	12
4	Kecamatan Medang Kampai		169,74	32
	4.1	Kelurahan Mundam	28,19	6
	4.2	Kelurahan Teluk Makmur	28,64	7
	4.3	Kelurahan Guntung	15,73	6
	4.4	Kelurahan Pelintung	97,18	13
5	Kecamatan Sungai Sembilan		1423,79	90
	5.1	Kelurahan Bangsal Aceh	201,48	10
	5.2	Kelurahan Lubuk Gaung	96,66	25
	5.3	Kelurahan Basilam Baru	141,37	15
	5.4	Kelurahan Batu Teritip	543,21	13
	5.5	Kelurahan Tanjung Penyembal	116,96	19
	5.6	Sungai Geniot	324,11	8
6	Kecamatan Dumai Kota		4,24	87
	6.1	Kelurahan Rimba Sekampung	1,47	24
	6.2	Kelurahan Laksamana	0,74	7
	6.3	Kelurahan Sukajadi	0,64	23
	6.4	Kelurahan Bintan	0,6	18
	6.5	Kelurahan Dumai Kota	0,79	15
7	Kecamatan Dumai Selatan		66,96	89
	7.1	Kelurahan Bukit Datuk	20,45	26
	7.2	Kelurahan Bukit Timah	16,17	15
	7.3	Kelurahan Mekar Sari	21,07	12
	7.4	Kelurahan Ratu Sima	4,72	20
	7.5	Kelurahan Bumi Ayu	4,55	16
J u m l a h			2.065,59	552

e. Jumlah Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, Kota Dumai memiliki Perangkat Daerah (PD) yang terdiri dari 20 Dinas, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 1 RSUD, 6 Badan dan 7 OPD Kecamatan dengan jumlah pegawai/ Sumber Daya Aparatur secara keseluruhan sebesar 3.950 orang.

Adapun Perangkat Daerah (PD) yang ada antara lain sebagai berikut;

1. Sekretariat Daerah, Tipe A, merupakan unsur staf membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan publik;
2. Sekretariat DPRD, Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
3. Inspektorat Daerah, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;



- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan Pertanahan;
- e. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. Dinas Perdagangan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- l. Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
- m. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, sub bidang urusan peternakan dan sub bidang urusan perkebunan;
- n. Dinas Tenaga Kerja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- p. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olah raga dan bidang pariwisata;
- q. Dinas Perikanan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah dan bidang perindustrian;
- s. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman dan ketertiban umum;



5. Badan Daerah terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah;
 - c. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Besar, melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai sebagaimana pada tabel 5 sebagai berikut;

Tabel 5
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Golongan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai
Tahun 2023

Dinas/Instansi Pemerintahan Institution/Office		Golongan/Rank				Jumlah Total
		IV	III	II	I	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sekretariat Daerah	24	82	17	0	125
2	Sekretariat DPRD	8	28	9	0	45
3	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	7	18	3	0	28
4	Inspektorat Daerah	14	37	2	0	53
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	18	3	0	28
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	12	24	3	0	39
7	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	13	1	0	18
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	24	2	0	34
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	27	13	0	42
10	Dinas Kesehatan (Termasuk Puskesmas)	38	317	139	0	494
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Termasuk Sd Dan Smp)	356	1108	867	4	1532
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6	24	0	0	30
13	Badan Pendapatan Daerah	3	54	16	0	73
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4	52	10	0	66
15	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	4	24	0	0	29
16	Dinas Perhubungan	5	53	25	0	83
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	3	21	2	0	26
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8	18	4	0	30



Dinas/Instansi Pemerintahan Institution/Office		Golongan/Rank				Jumlah Total
		IV	III	II	I	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	7	19	5	0	31
20	Dinas Perdagangan	3	25	5	0	33
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	12	45	2	0	57
22	Dinas Perikanan	3	14	1	0	18
23	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	4	19	2	0	25
24	Dinas Tenaga Kerja	5	17	3	0	25
25	RSUD Kota Dumai	47	229	32	0	308
26	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4	13	3	0	20
27	Satuan Polisi Pamong Praja	2	41	10	0	53
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Intensitas Besar	7	10	2	0	19
29	Dinas Lingkungan Hidup	4	22	0	2	28
30	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	2	22	3	1	28
31	Kecamatan Bukit Kapur (Termasuk Kelurahan)	24	31	4	0	58
32	Kecamatan Dumai Barat (Termasuk Kelurahan)	2	36	2	0	40
33	Kecamatan Dumai Kota (Termasuk Kelurahan)	2	42	3	0	47
34	Kecamatan Dumai Selatan (Termasuk Kelurahan)	2	40	4	1	47
35	Kecamatan Dumai Timur (Termasuk Kelurahan)	1	40	8	0	49
36	Kecamatan Medang Kampai (Termasuk Kelurahan)	2	36	5	0	43
37	Kecamatan Sungai Sembilan (Termasuk Kelurahan)	3	47	6	0	55
Total		646	2715	416	8	3785

Sumber : BPKSDM Kota Dumai 2024

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor Tahun tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023, merupakan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja seluruh Perangkat Daerah (PD) yang terdiri dari 19 Dinas, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 1 RSUD, 6 badan, dan 7 PD Kecamatan Kecamatan yang terbagi dalam 2 urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

Adapun Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel rekapitulasi, sebagai berikut :



Tabel 6
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Setiap Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2023

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 1.01.2.22.0.00.01.0000. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	431.645.823.163,00	409.930.810.833,03	94,97	326.083.984.482,00
5.1.	BELANJA OPERASI	384.380.876.419,00	363.593.213.174,83	94,59	290.428.138.136,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	281.393.598.449,00	262.798.071.442,00	93,39	229.987.353.709,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	88.136.357.970,00	85.840.867.229,83	97,40	59.790.784.427,00
5.1.05.	Belanja Hibah	14.850.920.000,00	14.954.274.503,00	100,70	650.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	47.264.946.744,00	46.337.597.658,20	98,04	35.655.846.346,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.097.672.572,00	9.202.548.330,00	101,15	11.878.159.249,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.569.616.297,00	31.481.144.261,62	96,66	19.990.845.953,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	836.000.000,00	828.941.834,58	99,16	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.761.657.875,00	4.824.963.232,00	101,33	3.786.841.144,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(431.645.823.163,00)	(409.930.810.833,03)	94,97	(326.083.984.482,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(431.645.823.163,00)	(409.930.810.833,03)	94,97	(326.083.984.482,00)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 1.02.0.00.0.00.01. - DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	145.546.075.879,00	154.420.841.271,36	106,10	192.479.014.394,14
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.546.075.879,00	154.420.841.271,36	106,10	192.479.014.394,14
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	145.546.075.879,00	154.420.841.271,36	106,10	192.479.014.394,14
5.	BELANJA DAERAH	429.615.180.993,00	425.512.287.338,51	99,04	447.623.317.455,90
5.1.	BELANJA OPERASI	365.097.202.305,00	362.133.741.171,45	99,19	397.394.867.300,90
5.1.01.	Belanja Pegawai	157.027.997.064,00	166.650.964.949,60	106,13	189.318.561.368,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	207.519.205.241,00	194.932.776.221,85	93,93	207.876.305.932,90
5.1.05.	Belanja Hibah	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	200.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	64.517.978.688,00	63.378.546.167,06	98,23	50.228.450.155,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.463.060.438,00	52.794.908.169,00	98,75	40.273.414.207,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.592.918.250,00	10.122.012.598,06	95,55	8.672.366.348,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000,00	399.643.000,00	99,91	1.282.669.600,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	62.000.000,00	61.982.400,00	99,97	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(284.069.105.114,00)	(271.091.446.067,15)	95,43	(255.144.303.061,76)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(284.069.105.114,00)	(271.091.446.067,15)	95,43	(255.144.303.061,76)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 1.03.0.00.2.10.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	16.505.000.000,00	16.312.622.540,00	98,83	6.363.880.145,17
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.505.000.000,00	16.312.622.540,00	98,83	6.363.880.145,17
4.1.02.	Retribusi Daerah	16.505.000.000,00	16.312.622.540,00	98,83	6.363.880.145,17
5.	BELANJA DAERAH	456.240.533.524,00	433.995.981.781,20	95,12	205.603.703.843,68
5.1.	BELANJA OPERASI	115.780.685.724,00	111.481.755.859,25	96,29	80.156.674.389,08
5.1.01.	Belanja Pegawai	9.124.949.440,00	8.857.669.334,00	97,07	8.312.693.579,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.871.231.315,00	88.091.927.978,36	95,89	65.014.675.837,00
5.1.05.	Belanja Hibah	14.784.504.969,00	14.532.158.546,89	98,29	6.829.304.973,08
5.2.	BELANJA MODAL	340.459.847.800,00	322.514.225.921,95	94,73	125.447.029.454,60
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.455.437.500,00	4.205.706.050,00	94,39	8.939.119.113,04
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.176.148.501,00	68.703.786.263,45	91,39	51.845.191.783,01
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	260.828.261.799,00	249.604.733.608,50	95,70	64.598.116.558,55
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	64.602.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(439.735.533.524,00)	(417.683.359.241,20)	94,99	(199.239.823.698,51)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(439.735.533.524,00)	(417.683.359.241,20)	94,99	(199.239.823.698,51)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 1.04.0.00.0.00.01.0000. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	15.550.235.262,00	14.890.068.848,68	95,75	29.364.083.743,00
5.1.	BELANJA OPERASI	12.656.996.703,00	12.003.249.658,00	94,83	25.984.211.443,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.857.137.419,00	3.571.708.119,00	92,60	3.524.583.879,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.799.859.284,00	8.431.541.539,00	95,81	12.715.627.564,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	9.744.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	2.893.238.559,00	2.886.819.190,68	99,78	3.379.872.300,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.120.501,00	175.968.000,00	98,79	112.872.300,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	696.372.158,00	694.991.600,00	99,80	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.018.200.000,00	2.015.859.590,68	99,88	3.267.000.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	545.900,00	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.550.235.262,00)	(14.890.068.848,68)	95,75	(29.364.083.743,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.550.235.262,00)	(14.890.068.848,68)	95,75	(29.364.083.743,00)



PEMKO DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	12.294.971.059,00	12.021.903.148,00	97,78	8.795.649.835,00
5.1.	BELANJA OPERASI	11.454.943.509,00	11.183.875.598,00	97,63	8.758.432.943,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.715.703.800,00	6.459.537.769,00	96,19	5.969.554.432,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.739.239.709,00	4.724.337.829,00	99,69	2.788.878.511,00
5.2.	BELANJA MODAL	840.027.550,00	838.027.550,00	99,76	37.216.892,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	840.027.550,00	838.027.550,00	99,76	37.216.892,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.294.971.059,00)	(12.021.903.148,00)	97,78	(8.795.649.835,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.294.971.059,00)	(12.021.903.148,00)	97,78	(8.795.649.835,00)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 1.05.0.00.0.00.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	12.591.035.840,00	11.514.950.559,00	91,45	12.458.100.131,00
5.1.	BELANJA OPERASI	10.818.633.449,00	9.766.678.559,00	90,28	6.292.407.831,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.397.189.696,00	4.119.421.574,00	93,68	3.364.369.706,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.421.443.753,00	5.647.256.985,00	87,94	2.928.038.125,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.772.402.391,00	1.748.272.000,00	98,64	6.165.692.300,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.772.402.391,00	1.748.272.000,00	98,64	6.165.692.300,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.591.035.840,00)	(11.514.950.559,00)	91,45	(12.458.100.131,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.591.035.840,00)	(11.514.950.559,00)	91,45	(12.458.100.131,00)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 1.05.8.01.0.00.01.0000. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	28.999.184.022,00	28.037.458.805,00	96,68	7.724.149.796,00
5.1.	BELANJA OPERASI	28.710.359.022,00	27.752.219.805,00	96,66	7.679.303.096,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.168.525.812,00	3.013.785.305,00	95,12	3.079.912.413,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.441.560.950,00	2.138.162.240,00	87,57	1.729.827.883,00
5.1.05.	Belanja Hibah	23.100.272.260,00	22.600.272.260,00	97,84	2.869.562.800,00
5.2.	BELANJA MODAL	288.825.000,00	285.239.000,00	98,76	44.846.700,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.878.000,00	234.439.000,00	98,55	44.846.700,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.947.000,00	50.800.000,00	99,71	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(28.999.184.022,00)	(28.037.458.805,00)	96,68	(7.724.149.796,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(28.999.184.022,00)	(28.037.458.805,00)	96,68	(7.724.149.796,00)



PEMKO DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 1.06.0.00.2.13.01.0000. - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	13.904.271.740,00	13.628.836.667,00	98,02	6.821.356.900,00
5.1.	BELANJA OPERASI	13.849.393.240,00	13.574.117.667,00	98,01	6.817.356.900,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.141.812.340,00	4.084.546.382,00	98,62	3.389.596.313,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.812.980.900,00	6.723.121.285,00	98,68	2.968.160.587,00
5.1.05.	Belanja Hibah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	2.874.600.000,00	2.746.450.000,00	95,54	459.600.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	54.878.500,00	54.719.000,00	99,71	4.000.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.878.500,00	54.719.000,00	99,71	4.000.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.904.271.740,00)	(13.628.836.667,00)	98,02	(6.821.356.900,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.904.271.740,00)	(13.628.836.667,00)	98,02	(6.821.356.900,00)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 2.08.0.00.0.00.01.0000. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	7.666.892.538,00	7.338.057.658,00	95,71	6.501.885.491,00
5.1.	BELANJA OPERASI	7.525.246.046,00	7.198.027.658,00	95,65	6.501.885.491,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.647.417.571,00	4.430.304.654,00	95,33	4.274.910.701,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.877.828.475,00	2.767.723.004,00	96,17	2.226.974.790,00
5.2.	BELANJA MODAL	141.646.492,00	140.030.000,00	98,86	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.646.492,00	140.030.000,00	98,86	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.666.892.538,00)	(7.338.057.658,00)	95,71	(6.501.885.491,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.666.892.538,00)	(7.338.057.658,00)	95,71	(6.501.885.491,00)



PEMKO DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 2.09.3.27.0.00.02.0000. - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	25.440.000,00	17.960.000,00	70,60	18.160.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.440.000,00	17.960.000,00	70,60	18.160.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	25.440.000,00	17.960.000,00	70,60	18.160.000,00
5.	BELANJA DAERAH	24.327.938.812,00	23.982.089.278,00	98,58	18.327.280.462,00
5.1.	BELANJA OPERASI	23.130.489.912,00	22.787.685.278,00	98,52	17.468.054.462,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	8.837.015.660,00	8.591.446.868,00	97,22	8.261.260.341,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.261.189.952,00	11.187.931.130,00	99,35	6.689.668.170,00
5.1.05.	Belanja Hibah	3.032.284.300,00	3.008.307.280,00	99,21	2.517.125.951,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.197.448.900,00	1.194.404.000,00	99,75	859.226.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	546.916.720,00	544.466.500,00	99,55	171.843.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	650.532.180,00	649.937.500,00	99,91	199.690.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	487.693.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(24.302.498.812,00)	(23.964.129.278,00)	98,61	(18.309.120.462,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(24.302.498.812,00)	(23.964.129.278,00)	98,61	(18.309.120.462,00)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 2.11.0.00.0.00.02.0000. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	787.438.000,00	78,74	717.640.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	787.438.000,00	78,74	717.640.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	787.438.000,00	78,74	717.640.000,00
5.	BELANJA DAERAH	36.554.398.949,00	35.315.931.972,69	96,61	25.667.573.338,00
5.1.	BELANJA OPERASI	28.429.830.430,00	27.229.125.056,00	95,78	20.506.217.338,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.645.417.209,00	4.238.711.773,00	91,25	4.541.158.409,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.784.413.221,00	22.990.413.283,00	96,66	15.965.058.929,00
5.2.	BELANJA MODAL	8.124.568.519,00	8.086.806.916,69	99,54	5.161.356.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.780.903.413,00	1.743.141.813,00	97,88	5.161.356.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.332.153.806,00	6.332.153.803,69	100,00	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.511.300,00	1.511.300,00	100,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(35.554.398.949,00)	(34.528.493.972,69)	97,11	(24.949.933.338,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(35.554.398.949,00)	(34.528.493.972,69)	97,11	(24.949.933.338,00)



PEMKO DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	8.955.501.115,00	8.700.220.833,00	97,15	7.309.900.521,00
5.1.	BELANJA OPERASI	8.004.760.558,00	7.812.517.183,00	97,60	6.746.400.521,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.601.198.040,00	4.465.376.375,00	97,05	4.173.534.256,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.403.562.518,00	3.347.140.808,00	98,34	2.572.866.265,00
5.2.	BELANJA MODAL	950.740.557,00	887.703.650,00	93,37	563.500.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	950.740.557,00	887.703.650,00	93,37	563.500.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.955.501.115,00)	(8.700.220.833,00)	97,15	(7.309.900.521,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.955.501.115,00)	(8.700.220.833,00)	97,15	(7.309.900.521,00)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 2.14.0.00.0.00.01.0000. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	9.220.272.782,00	8.838.452.715,00	95,86	7.588.010.878,00
5.1.	BELANJA OPERASI	8.936.991.782,00	8.555.320.215,00	95,73	6.843.680.878,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.037.328.622,00	2.833.713.762,00	93,30	3.041.688.521,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.899.663.160,00	5.721.606.453,00	96,98	3.801.992.357,00
5.2.	BELANJA MODAL	283.281.000,00	283.132.500,00	99,95	744.330.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	283.281.000,00	283.132.500,00	99,95	744.330.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.220.272.782,00)	(8.838.452.715,00)	95,86	(7.588.010.878,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.220.272.782,00)	(8.838.452.715,00)	95,86	(7.588.010.878,00)



PEMKO DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 2.15.0.00.0.00.02.0000. - DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	39.406.475.000,00	24.751.627.036,00	62,81	25.844.794.449,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.406.475.000,00	24.751.627.036,00	62,81	25.844.794.449,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	38.406.475.000,00	24.751.627.036,00	64,45	23.844.794.450,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	1.000.000.000,00	-	-	1.999.999.999,00
5.	BELANJA DAERAH	74.605.852.140,00	73.969.713.462,39	99,15	51.042.171.358,62
5.1.	BELANJA OPERASI	63.942.061.307,00	63.346.121.405,57	99,07	43.285.000.674,43
5.1.01.	Belanja Pegawai	9.648.706.360,00	9.552.994.943,00	99,01	7.642.845.726,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.524.604.947,00	53.097.876.462,57	99,20	35.405.154.948,43
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	768.750.000,00	695.250.000,00	90,44	237.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	10.663.790.833,00	10.623.592.056,82	99,62	7.757.170.684,19
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	3.505.260.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.873.718.345,00	6.862.644.282,15	99,84	2.285.609.856,59
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.185.072.488,00	3.156.420.253,58	99,10	417.313.581,60
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	295.000.000,00	294.859.721,09	99,95	885.000.586,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	310.000.000,00	309.667.800,00	99,89	663.986.660,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(35.199.377.140,00)	(49.218.086.426,39)	139,83	(25.197.376.909,62)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(35.199.377.140,00)	(49.218.086.426,39)	139,83	(25.197.376.909,62)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 2.16.2.21.2.20.02.0000. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	592.852.000,00	59,29	525.197.100,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	592.852.000,00	59,29	525.197.100,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	592.852.000,00	59,29	525.197.100,00
5.	BELANJA DAERAH	13.754.940.358,00	13.516.553.021,00	98,27	11.314.885.363,00
5.1.	BELANJA OPERASI	12.702.365.528,00	12.475.149.021,00	98,21	10.772.205.150,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.064.589.678,00	3.929.430.218,00	96,67	4.021.175.726,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.637.775.850,00	8.545.718.803,00	98,93	6.751.029.424,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.052.574.830,00	1.041.404.000,00	98,94	542.680.213,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	793.503.790,00	783.839.000,00	98,78	428.017.213,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.493.440,00	138.465.000,00	99,98	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	120.577.600,00	119.100.000,00	98,77	114.663.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.754.940.358,00)	(12.923.701.021,00)	101,32	(10.789.688.263,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.754.940.358,00)	(12.923.701.021,00)	101,32	(10.789.688.263,00)



PEMKO DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 2.17.3.31.0.00.02.0000. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	8.729.827.382,00	8.392.017.867,00	96,13	7.235.794.888,00
5.1.	BELANJA OPERASI	8.672.547.382,00	8.334.737.867,00	96,10	7.235.794.888,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.523.305.442,00	4.273.323.344,00	94,47	4.197.023.520,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.473.881.940,00	2.427.054.523,00	98,11	1.704.771.368,00
5.1.05.	Belanja Hibah	209.360.000,00	209.360.000,00	100,00	-
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.466.000.000,00	1.425.000.000,00	97,20	1.334.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	57.280.000,00	57.280.000,00	100,00	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.280.000,00	57.280.000,00	100,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.729.827.382,00)	(8.392.017.867,00)	96,13	(7.235.794.888,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.729.827.382,00)	(8.392.017.867,00)	96,13	(7.235.794.888,00)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 2.18.0.00.2.17.02.0000. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	11.873.362.971,00	9.707.274.491,00	81,76	10.949.829.438,00
5.1.	BELANJA OPERASI	10.901.230.971,00	8.767.638.004,00	80,43	7.845.308.438,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.741.961.356,00	5.171.915.193,00	90,07	5.590.773.077,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.159.269.615,00	3.595.722.811,00	69,69	2.254.535.361,00
5.2.	BELANJA MODAL	972.132.000,00	939.636.487,00	96,66	3.104.521.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	773.112.000,00	740.636.487,00	95,80	3.104.521.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.020.000,00	199.000.000,00	99,99	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.873.362.971,00)	(9.707.274.491,00)	81,76	(10.949.829.438,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.873.362.971,00)	(9.707.274.491,00)	81,76	(10.949.829.438,00)



PEMKO DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 2.19.3.26.0.00.01.0000. - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	428.000.000,00	345.000.000,00	80,61	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	428.000.000,00	345.000.000,00	80,61	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	428.000.000,00	345.000.000,00	80,61	-
5.	BELANJA DAERAH	25.403.927.309,00	24.939.151.700,09	98,17	14.460.147.345,79
5.1.	BELANJA OPERASI	17.371.143.634,00	17.126.632.108,65	98,59	11.633.338.712,62
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.589.865.540,00	3.499.143.177,00	97,47	3.409.499.984,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.090.291.275,00	11.936.502.112,65	98,73	6.996.741.546,62
5.1.05.	Belanja Hibah	1.690.986.819,00	1.690.986.819,00	100,00	1.227.097.182,00
5.2.	BELANJA MODAL	8.032.783.675,00	7.812.519.591,44	97,26	2.826.808.633,17
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	4.614.332.200,00	4.444.830.000,00	96,33	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	961.725.310,00	961.288.000,00	99,95	355.678.800,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.220.000.000,00	2.169.777.382,43	97,74	2.072.600.806,73
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.161.765,00	235.072.209,01	99,96	398.529.026,44
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.564.400,00	1.552.000,00	99,21	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(24.975.927.309,00)	(24.594.151.700,09)	98,47	(14.460.147.345,79)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(24.975.927.309,00)	(24.594.151.700,09)	98,47	(14.460.147.345,79)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 2.23.2.24.0.00.02.0000. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	5.845.456.760,00	5.384.096.300,00	92,11	4.901.218.316,00
5.1.	BELANJA OPERASI	5.782.556.760,00	5.322.802.344,00	92,05	4.570.296.236,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.369.684.080,00	2.994.795.117,00	88,87	3.253.331.350,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.412.872.680,00	2.328.007.227,00	96,48	1.316.964.886,00
5.2.	BELANJA MODAL	62.900.000,00	61.293.956,00	97,45	330.922.080,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	28.394.000,00	94,65	330.922.080,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.900.000,00	32.899.956,00	100,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.845.456.760,00)	(5.384.096.300,00)	92,11	(4.901.218.316,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.845.456.760,00)	(5.384.096.300,00)	92,11	(4.901.218.316,00)



PEMKO DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 3.25.0.00.0.00.02.0000. - DINAS PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	25.000.000,00	26.300.000,00	105,20	26.009.600,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000,00	26.300.000,00	105,20	26.009.600,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	25.000.000,00	26.300.000,00	105,20	26.009.600,00
5.	BELANJA DAERAH	8.056.886.679,00	7.754.853.716,57	96,25	7.436.540.150,00
5.1.	BELANJA OPERASI	7.397.327.473,00	7.108.879.518,57	96,10	7.245.838.150,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.187.283.500,00	2.969.818.145,00	93,18	3.047.806.860,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.535.979.628,00	3.481.145.123,57	98,45	2.513.263.190,00
5.1.05.	Belanja Hibah	674.064.345,00	657.916.250,00	97,60	547.560.000,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	1.137.208.100,00
5.2.	BELANJA MODAL	659.559.206,00	645.974.198,00	97,94	190.702.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.277.270,00	398.337.000,00	96,85	190.702.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	248.281.936,00	247.637.198,00	99,74	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.031.886.679,00)	(7.728.553.716,57)	96,22	(7.410.530.550,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.031.886.679,00)	(7.728.553.716,57)	96,22	(7.410.530.550,00)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 3.30.0.00.0.00.02.0000. - DINAS PERDAGANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.509.950.000,00	625.927.000,00	41,45	681.737.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.509.950.000,00	625.927.000,00	41,45	681.737.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	1.509.950.000,00	625.927.000,00	41,45	681.737.000,00
5.	BELANJA DAERAH	10.328.107.745,00	9.527.658.313,39	92,25	9.914.998.722,68
5.1.	BELANJA OPERASI	9.814.737.402,00	9.134.114.228,06	93,07	6.711.964.983,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.531.879.342,00	4.309.468.265,00	95,09	4.284.292.738,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.282.858.060,00	4.824.645.963,06	91,33	2.427.672.245,00
5.2.	BELANJA MODAL	513.370.343,00	393.544.085,33	76,66	3.203.033.739,68
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.665.800,00	286.453.000,00	99,23	53.790.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	224.704.543,00	107.091.085,33	47,66	3.149.243.739,68
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.818.157.745,00)	(8.901.731.313,39)	100,95	(9.233.261.722,68)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.818.157.745,00)	(8.901.731.313,39)	100,95	(9.233.261.722,68)



PEMKO DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000. - SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	50.000.000,00	16.350.000,00	32,70	28.950.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000,00	16.350.000,00	32,70	28.950.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	50.000.000,00	16.350.000,00	32,70	28.950.000,00
5.	BELANJA DAERAH	98.575.166.924,00	93.874.609.881,00	95,23	63.531.192.220,00
5.1.	BELANJA OPERASI	89.543.642.468,00	85.745.774.976,00	95,76	59.112.853.058,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	20.818.465.068,00	20.228.831.762,00	97,17	18.679.576.055,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.752.326.400,00	56.571.440.014,00	94,68	31.991.011.010,00
5.1.05.	Belanja Hibah	8.972.851.000,00	8.945.503.200,00	99,70	8.442.265.993,00
5.2.	BELANJA MODAL	9.031.524.456,00	8.128.834.905,00	90,01	4.418.339.162,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.140.359.176,00	8.038.174.625,00	98,74	4.329.621.162,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	89.995.000,00	99,99	86.000.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	800.500.000,00	-	-	2.718.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	665.280,00	665.280,00	100,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(98.525.166.924,00)	(93.858.259.881,00)	95,26	(63.502.242.220,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(98.525.166.924,00)	(93.858.259.881,00)	95,26	(63.502.242.220,00)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 4.02.0.00.0.00.01.0000. - SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	60.564.973.578,00	53.779.927.308,26	88,80	42.684.718.587,00
5.1.	BELANJA OPERASI	58.686.373.428,00	52.085.909.088,26	88,75	42.273.921.287,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	27.522.372.059,00	22.149.068.603,00	80,48	20.863.062.287,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.164.001.369,00	29.936.840.485,26	96,06	21.410.859.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.878.600.150,00	1.694.018.220,00	90,17	410.797.300,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.878.600.150,00	1.694.018.220,00	90,17	410.797.300,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(60.564.973.578,00)	(53.779.927.308,26)	88,80	(42.684.718.587,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(60.564.973.578,00)	(53.779.927.308,26)	88,80	(42.684.718.587,00)



PEMKO DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 5.01.0.00.0.00.05.0000. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	12.916.850.257,00	12.140.881.109,00	93,99	9.393.400.419,00
5.1.	BELANJA OPERASI	12.184.826.757,00	11.428.914.109,00	93,80	9.189.508.225,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.208.380.260,00	5.886.768.206,00	94,82	5.192.968.080,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.976.446.497,00	5.542.145.903,00	92,73	3.996.540.145,00
5.2.	BELANJA MODAL	732.023.500,00	711.967.000,00	97,26	203.892.194,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	732.023.500,00	711.967.000,00	97,26	203.892.194,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.916.850.257,00)	(12.140.881.109,00)	93,99	(9.393.400.419,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.916.850.257,00)	(12.140.881.109,00)	93,99	(9.393.400.419,00)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000. - BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	349.012.723.810,00	359.425.198.352,00	102,98	228.202.063.148,36
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	349.012.723.810,00	359.425.198.352,00	102,98	228.202.063.148,36
4.1.01.	Pajak Daerah	344.012.723.810,00	358.508.134.419,00	104,21	226.332.093.315,36
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	5.000.000.000,00	917.063.933,00	18,34	1.869.969.833,00
5.	BELANJA DAERAH	39.049.135.188,00	35.979.245.374,14	92,14	24.505.432.187,00
5.1.	BELANJA OPERASI	36.044.266.824,00	33.288.789.274,14	92,36	23.111.324.903,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	21.688.012.443,00	19.694.287.642,00	90,81	15.223.209.827,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.356.254.381,00	13.594.501.632,14	94,69	7.888.115.076,00
5.2.	BELANJA MODAL	3.004.868.364,00	2.690.456.100,00	89,54	1.394.107.284,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.564.169.500,00	1.380.832.000,00	88,28	1.394.107.284,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	294.748.864,00	234.099.100,00	79,42	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	763.750.000,00	703.525.000,00	92,11	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	382.200.000,00	372.000.000,00	97,33	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	309.963.588.622,00	323.445.952.977,86	104,35	203.696.630.961,36
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	309.963.588.622,00	323.445.952.977,86	104,35	203.696.630.961,36



PEMKO DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 5.02.0.00.0.00.05.0000. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.410.786.337.309,00	1.352.874.051.852,64	95,90	915.311.002.629,19
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.595.361.665,00	8.710.156.169,64	26,72	9.116.297.482,19
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.598.930.665,00	1.215.970.725,00	16,00	1.079.761.191,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	24.996.431.000,00	7.494.185.444,64	29,98	8.036.536.291,19
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.378.190.975.644,00	1.344.163.895.683,00	97,53	906.194.705.147,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.154.682.091.884,00	1.176.303.738.791,00	101,87	778.721.000.729,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	223.508.883.760,00	167.860.156.892,00	75,10	127.473.704.418,00
5.	BELANJA DAERAH	53.019.419.721,00	50.884.301.379,00	95,97	43.120.970.189,00
5.1.	BELANJA OPERASI	50.423.249.137,00	48.393.191.307,00	95,97	41.517.631.312,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	29.730.380.076,00	29.021.443.148,00	97,62	26.993.557.043,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.992.869.061,00	15.232.232.714,00	95,24	13.463.697.199,00
5.1.03.	Belanja Bunga	4.700.000.000,00	4.139.515.445,00	88,07	1.060.377.070,00
5.2.	BELANJA MODAL	2.464.062.332,00	2.388.949.349,00	96,95	1.343.049.860,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	45.000.650,00	29.850.000,00	66,33	29.021.800,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.779.551.490,00	1.722.006.349,00	96,77	1.121.378.060,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.827.586,00	389.900.000,00	99,76	192.650.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	248.682.606,00	247.193.000,00	99,40	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	132.108.252,00	102.160.723,00	77,33	260.289.017,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	132.108.252,00	102.160.723,00	77,33	260.289.017,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.357.766.917.588,00	1.301.989.750.473,64	95,89	872.190.032.440,19
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.417.609.614,33	107.418.399.044,33	100,00	262.260.776.307,14
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.417.609.614,33	107.417.399.044,33	100,00	168.196.735.341,25
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	94.060.540.965,89
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	1.000.000,00	-	3.500.000,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	62.417.609.614,33	62.418.399.044,33	100,00	244.260.776.307,14
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.420.184.527.202,33	1.364.408.149.517,97	96,07	1.116.450.808.747,33



PEMKO DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 5.03.0.00.5.04.01.0000. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	10.070.867.140,00	9.761.775.684,00	96,93	7.650.267.173,00
5.1.	BELANJA OPERASI	9.949.394.762,00	9.641.943.684,00	96,91	7.650.267.173,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.476.000.780,00	4.337.227.372,00	96,90	4.162.067.688,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.473.393.982,00	5.304.716.312,00	96,92	3.488.199.485,00
5.2.	BELANJA MODAL	121.472.378,00	119.832.000,00	98,65	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.472.378,00	119.832.000,00	98,65	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.070.867.140,00)	(9.761.775.684,00)	96,93	(7.650.267.173,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.070.867.140,00)	(9.761.775.684,00)	96,93	(7.650.267.173,00)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000. - INSPEKTORAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	16.023.276.948,00	15.160.300.040,85	94,61	12.867.287.746,00
5.1.	BELANJA OPERASI	15.670.762.560,00	14.811.168.822,34	94,51	12.301.016.896,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	10.360.339.752,00	9.976.621.031,00	96,30	8.770.566.096,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.310.422.808,00	4.834.547.791,34	91,04	3.530.450.800,00
5.2.	BELANJA MODAL	352.514.388,00	349.131.218,51	99,04	566.270.850,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.089.000,00	163.080.000,00	98,19	386.502.850,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	186.425.388,00	186.051.218,51	99,80	179.768.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.023.276.948,00)	(15.160.300.040,85)	94,61	(12.867.287.746,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.023.276.948,00)	(15.160.300.040,85)	94,61	(12.867.287.746,00)



PEMKO DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 7.01.0.00.0.00.01. - KECAMATAN DUMAI BARAT.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	10.524.299.300,00	10.156.509.099,00	96,51	8.886.542.573,00
5.1.	BELANJA OPERASI	9.969.639.470,00	9.602.274.749,00	96,32	8.282.041.773,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.243.016.820,00	4.952.663.500,00	94,46	4.887.807.465,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.726.622.650,00	4.649.611.249,00	98,37	3.394.234.308,00
5.2.	BELANJA MODAL	554.659.830,00	554.234.350,00	99,92	604.500.800,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.301.350,00	183.934.350,00	99,80	443.287.500,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	340.358.480,00	340.300.000,00	99,98	161.213.300,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.524.299.300,00)	(10.156.509.099,00)	96,51	(8.886.542.573,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.524.299.300,00)	(10.156.509.099,00)	96,51	(8.886.542.573,00)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 7.01.0.00.0.00.02. - KECAMATAN DUMAI TIMUR.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	12.763.150.960,00	12.572.858.329,00	98,51	10.228.597.526,00
5.1.	BELANJA OPERASI	11.668.738.708,00	11.483.756.385,00	98,41	9.757.490.050,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.050.383.160,00	5.915.652.867,00	97,77	5.366.498.858,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.618.355.548,00	5.568.103.518,00	99,11	4.390.991.192,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.094.412.252,00	1.089.101.944,00	99,51	471.107.476,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	368.321.219,00	363.147.944,00	98,60	471.107.476,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.491.033,00	159.354.000,00	99,91	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	566.600.000,00	566.600.000,00	100,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.763.150.960,00)	(12.572.858.329,00)	98,51	(10.228.597.526,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.763.150.960,00)	(12.572.858.329,00)	98,51	(10.228.597.526,00)



PEMKO DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 7.01.0.00.0.00.03. - KECAMATAN DUMAI SELATAN.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	12.127.953.813,00	11.826.532.808,00	97,51	10.178.026.757,00
5.1.	BELANJA OPERASI	11.297.371.413,00	11.001.382.808,00	97,38	9.435.841.294,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.919.035.021,00	5.736.603.030,00	96,92	5.349.931.632,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.378.336.392,00	5.264.779.778,00	97,89	4.085.909.662,00
5.2.	BELANJA MODAL	830.582.400,00	825.150.000,00	99,35	742.185.463,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.582.400,00	155.150.000,00	96,62	631.112.463,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	111.073.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	670.000.000,00	670.000.000,00	100,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.127.953.813,00)	(11.826.532.808,00)	97,51	(10.178.026.757,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.127.953.813,00)	(11.826.532.808,00)	97,51	(10.178.026.757,00)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 7.01.0.00.0.00.04. - KECAMATAN DUMAI KOTA.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	12.325.495.500,00	11.852.520.103,00	96,16	10.944.772.000,00
5.1.	BELANJA OPERASI	11.645.033.700,00	11.324.610.103,00	97,25	9.877.987.000,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.913.938.580,00	5.768.819.576,00	97,55	5.559.762.761,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.731.095.120,00	5.555.790.527,00	96,94	4.318.224.239,00
5.2.	BELANJA MODAL	680.461.800,00	527.910.000,00	77,58	1.066.785.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.461.800,00	245.920.000,00	89,28	767.105.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	299.680.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	405.000.000,00	281.990.000,00	69,63	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.325.495.500,00)	(11.852.520.103,00)	96,16	(10.944.772.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.325.495.500,00)	(11.852.520.103,00)	96,16	(10.944.772.000,00)



PEMKO DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 7.01.0.00.0.00.05. - KECAMATAN BUKIT KAPUR.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	14.757.315.520,00	14.333.958.369,28	97,13	11.511.371.758,00
5.1.	BELANJA OPERASI	13.086.521.884,00	12.678.923.369,28	96,89	10.515.949.449,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.445.541.550,00	7.187.433.817,00	96,53	6.792.345.050,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.640.980.334,00	5.491.489.552,28	97,35	3.723.604.399,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.670.793.636,00	1.655.035.000,00	99,06	995.422.309,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	481.173.636,00	465.415.000,00	96,72	131.709.809,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.800.000,00	79.800.000,00	100,00	56.400.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.109.820.000,00	1.109.820.000,00	100,00	777.530.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	29.782.500,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.757.315.520,00)	(14.333.958.369,28)	97,13	(11.511.371.758,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.757.315.520,00)	(14.333.958.369,28)	97,13	(11.511.371.758,00)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 7.01.0.00.0.00.06. - KECAMATAN MEDANG KAMPAL.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	9.054.048.938,00	8.876.182.851,58	98,04	7.574.545.065,00
5.1.	BELANJA OPERASI	8.067.797.938,00	7.910.373.851,58	98,05	7.184.890.065,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.200.963.566,00	5.145.832.328,00	98,94	4.885.249.307,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.866.834.372,00	2.764.541.523,58	96,43	2.299.640.758,00
5.2.	BELANJA MODAL	986.251.000,00	965.809.000,00	97,93	389.655.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	490.251.000,00	469.809.000,00	95,83	49.640.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.000.000,00	163.000.000,00	100,00	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	333.000.000,00	333.000.000,00	100,00	340.015.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.054.048.938,00)	(8.876.182.851,58)	98,04	(7.574.545.065,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.054.048.938,00)	(8.876.182.851,58)	98,04	(7.574.545.065,00)

PEMERINTAH KOTA DUMAI
SKPD : 7.01.0.00.0.00.07. - KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	13.082.258.840,00	12.584.658.948,00	96,20	10.471.023.827,00
5.1.	BELANJA OPERASI	11.571.521.960,00	11.142.511.066,00	96,29	9.283.283.765,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.867.185.040,00	6.684.788.074,00	97,34	6.293.496.508,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.704.336.920,00	4.457.722.992,00	94,76	2.989.787.257,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.510.736.880,00	1.442.147.882,00	95,46	1.187.740.062,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.736.880,00	392.147.882,00	97,86	37.700.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	870.000.000,00	810.000.000,00	93,10	1.140.000.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	10.040.062,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.082.258.840,00)	(12.584.658.948,00)	96,20	(10.471.023.827,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.082.258.840,00)	(12.584.658.948,00)	96,20	(10.471.023.827,00)

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Rencana Strategis Pembangunan Kota Dumai disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021–2026, telah dilegalitaskan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021. Dokumen RPJMD tersebut merupakan dokumen bersifat taktis strategis untuk periode lima tahun yang menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Kota Dumai.

Dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dijabarkan pernyataan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah serta memuat Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan Menurut Fungsinya, serta Program Pembangunan Daerah, sehingga RPJMD menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya.

RPJMD juga menjadi acuan resmi bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Dengan berpedoman pada Renstra-PD dan mengacu pada RKPD, serta setiap PD menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) sebagai bahan penyusunan RAPBD.



b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai. Dalam penetapan Visi dan Misi rancangan teknokratik Pembangunan Kota Dumai mengacu kepada Peraturan daerah kota Dumai nomor 13 Tahun 2014 tentang RPJPD Kota Dumai Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2019-2024 dan Peraturan presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024.

Dalam penetapan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai mengacu kepada Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2019-2024. Adapun Visi Pembangunan Propinsi Riau adalah *"Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)"*.

Mengacu kepada Visi Propinsi Riau dan bertolak pada kondisi empirik maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2026.

"Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)"

Pernyataan Visi tersebut memiliki makna:

- 1) Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak dipesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sector pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri
- 2) Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
- 3) Tahun 2026: Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan..

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai di atas, berdasarkan komitmen pembangunan jangka menengah Kota Dumai, ditetapkan Misi Pembangunan Kota Dumai sebagai berikut:

- Pertama** : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
- Kedua** : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
- Ketiga** : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
- Keempat** : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik



Misi di atas disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik. Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Kota Dumai, yakni melalui upaya mewujudkan akuntabilitas publik sebagai salah satu pilar dari *good governance*, bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Kota Dumai dengan jalan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada segenap jajaran instansi pemerintahan dan melalui pemberian layanan akuntabilitas yang prima.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan analisis dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 di atas maka diperlukan strategi yang mewujudkan visi pembangunan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada 4 (Empat) misi sebagaimana yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai pada masa 5 (Lima) tahun mendatang. Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah :

1. **Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri:**

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional. Adapun Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai *supporting agent* bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai

sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdayasaing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional. Disisi lain, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari sisi



penyediaan infrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha. Untuk menunjang dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang komprehensif akan ditunjang melalui penguatan data dan peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergikan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Dumai.

2. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu.**

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.

Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan. Misi kedua ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki

pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai. Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing ditengah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.



3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas.

Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (*Liveable*). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin

kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industry (*Investability dan Visitability*). Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; Drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional. Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pembangunan daerah

4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan visi dan misi diatas, maka *taglines* pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah Kota IDAMAN yang merupakan akronim dari kota tujuan Investasi yang ber**D**aya saing dengan pemerintahan **A**manah yang didukung oleh masyarakat **M**andiri dan ber**A**dab serta lingkungan yang **N**yaman.



Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

I. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

II. Arah Kebijakan Daerah

Strategi Pembangunan Daerah sebagaimana disebutkan diatas dijabarkan dalam arah kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan. Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang dijabarkan setiap misi sebagai berikut :

Misi Pertama: Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri.

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1) Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh Stake Holder
- 2) Peningkatan Produktivitas masyarakat
- 3) Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha
- 4) Peningkatan perlindungan sosial
- 5) Peningkatan Peluang Kerja Bagi Masyarakat
- 6) Peningkatan Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah.



Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pertama adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai
3. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Misi Kedua : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1.) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas.
- 2) Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas.
- 3) Peningkatan daya beli Masyarakat.
- 4) Peningkatan penerapan budaya melayu di kehidupan masyarakat dan pemerintahan

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kedua diatas adalah sebagai berikut

- 1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai
- 2) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai
- 3) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai
- 4) Meningkatnya penerapan budaya melayu

Misi Ketiga : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas.

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1) Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah
- 2) Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
- 4) Peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman
- 5) Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur
- 6) Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai
- 7) Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
- 8) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari
- 9) Optimalisasi upaya penanganan saat kejadian bencana
- 10) Optimalisasi penanganan pasca kejadian bencana



Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi ketiga diatas adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan infrastruktur Kota
2. Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana

Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1) Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 2) Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi keempat diatas adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD

Mempedomani Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka perubahan RPJMD kota Dumai Tahun 2021-2026 mempunyai visi sebagai berikut: ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”*** RKPD Kota Dumai Tahun 2022 Bab IV – 1 Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak dipesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sector pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri
- 2) Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah
- 3) Tahun 2026: Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan

Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik

Misi 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional. Adapun Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai *supporting agent* bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya di dalam masyarakat. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipadukan dengan menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional. Di sisi lain, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari sisi penyediaan infrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha.

Untuk menunjang dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang komprehensif akan ditunjang melalui penguatan data dan peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergikan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Dumai.



Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunanyang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil,kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.

Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengantuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pementapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi kedua ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .

Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing ditengah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas

Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baikmerupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalamrangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (*Liveable*). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investoruntuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung



perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industry (Investability dan Visitability).

Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; Drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungankawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjaminkelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.

Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pemangunan daerah

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Berdasarkan analisis dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 di atas maka diperlukan strategi yang mewujudkan visi pembangunan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada 4 (Empat) misi sebagaimana yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai pada masa 5 (Lima) tahun mendatang. Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi.

Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:

- a) Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita
- b) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat kemiskinan, Indeks Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka



- c) Terjaminnya ketersediaan pangan daerah dengan indikator keberhasilan yaitu ketersediaan pangan utama
2. Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan
 - b) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan
 - c) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pengeluaran
 - d) Meningkatnya penerapan budaya melayu dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan
3. Mewujudkan infrastruktur dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Infrastruktur Kota Dumai dan Cakupan wilayah penanganan bencana.
Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya infrastruktur Kota dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat pelayanan infrastruktur daerah ;
 - b) Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks kualitas lingkungan Hidup, penurunan emisi gas rumah kaca, Cakupan pelayanan persampahan dan Cakupan Jenis Bencana Daerah yang diselesaikan
4. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi.
Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
 - a) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator keberhasilan yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
 - b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 7
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Visi : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
1	Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri	Mewujudkan Perekonomian Yang Mandiri Dan Masyarakat Yang Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Perekonomian Dan Daya Saing Daerah • Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai • Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu	Membangun Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saing Dan Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai • Meningkatkan derajat Pendidikan masyarakat Kota Dumai • Meningkatkan Standar Hidup Layak masyarakat Kota Dumai • Meningkatnya penerapan Budaya Melayu
3.	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas	Mewujudkan Infrastruktur Dan Ruang Kota Dumai Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Infrastruktur Kota • Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten • Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan Bencana
4.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah • Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

d. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai merupakan kumpulan rencana kerja seluruh Perangkat Daerah (PD) yang terdiri dari 19 Dinas, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 1 RSUD, 6 badan, 1 Kantor dan 7 PD Kecamatan Kecamatan yang terbagi dalam 2 urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut memuat Rencana Kerangka Ekonomi Daerah, Kebijakan Umum APBD Tahun 2023, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah
 - b. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai
 - c. Terjaminnya ketersediaan pangan daerah



2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayudengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai
 - b. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai
 - c. Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai
3. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi dengan sasaran :
 - a. MeningkatnyainfrastrukturKota
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana, dengan sasaran :
 - a. Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - c. Meningkatnya pelayanan kebencanaan
5. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas PemerintahDaerah

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dasar Pertimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan menjadi 3(tiga) bagian, yaitu; Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, Dan Urusan Pemerintahan Umum, dimana Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sedangkan untuk urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, penyelenggaraan pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas pelaksanaan yang didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.



Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM, disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh karena itu baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan ketepatan sasaran serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM digunakan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sesuai dengan secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa, serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, Pemerintah Kota Dumai menerapkan standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar guna untuk peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah, dikarenakan:

1. Kemampuan masing-masing daerah berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumberdaya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur, SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatur sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Dasar Penerapan

Landasan hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487);



3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68).

Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan SPM

Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Walikota menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Dumai untuk **terhadap pelaksanaan SPM tahun 2023** yang mana telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang termaktub pada pasal 3 tentang urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dengan memperhatikan bersifat mutlak dan mudah distandarkan.



Berikut sinkronisasi antara Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan yang ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 bab II jenis SPM bagian kesatu sampai bagian ketujuh kedalam prioritas pembangunan daerah kota dumai tahun 2023.

Tabel 8
Sinkronisasi SPM Tahun 2023 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
1	2	3
1.	Bidang Pendidikan : 1. Pendidikan anak usia dini 2. Pendidikan dasar 3. Pendidikan kesetaraan	Pengembangan kualitas Sumber daya Manusia yang berbudaya Melayu
2.	Bidang Kesehatan ; 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari; 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Peningkatan ekstra teritorialitas untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi.
4.	Bidang Perumahan Rakyat : 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota Dumai 2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Dumai	
5.	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Pelayanan informasi rawan bencana 3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
6.	Bidang Sosial : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kota Dumai	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Selama periode 2018-2023 IPM Kota Dumai terus meningkat namun mengalami penurunan pada tahun 2020 karena menurunnya pendapatan perkapita yang disesuaikan (daya beli Masyarakat) dikarenakan tekanan perekonomian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sejak tahun 2018 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2023 adalah sebesar 74,06 ; 74,64 ; 74,40; 74,75; 75,26; 76,45.

Pada tahun 2023 IPM Kota Dumai adalah 76,45. Jika dibandingkan tahun 2022 (75,26) maka IPM Kota Dumai naik sebesar 1,19. Kenaikan ini diakibatkan naiknya nilai seluruh komponen IPM Kota Dumai yaitu Angka harapan hidup (naik 0,013 tahun) Harapan Lama sekolah (naik 0.067 tahun), Rata-rata lama sekolah (naik 0,03 tahun) dan Pengeluaran perkapita yang disesuaikan (naik Rp.69.276,-). Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara perlahan mulai terjadi kenaikan kualitas Sumber daya manusia yang terjadi saat ini.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi. Berikut tabel. 9 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2023.

Tabel. 9
Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional
Tahun 2018-2023

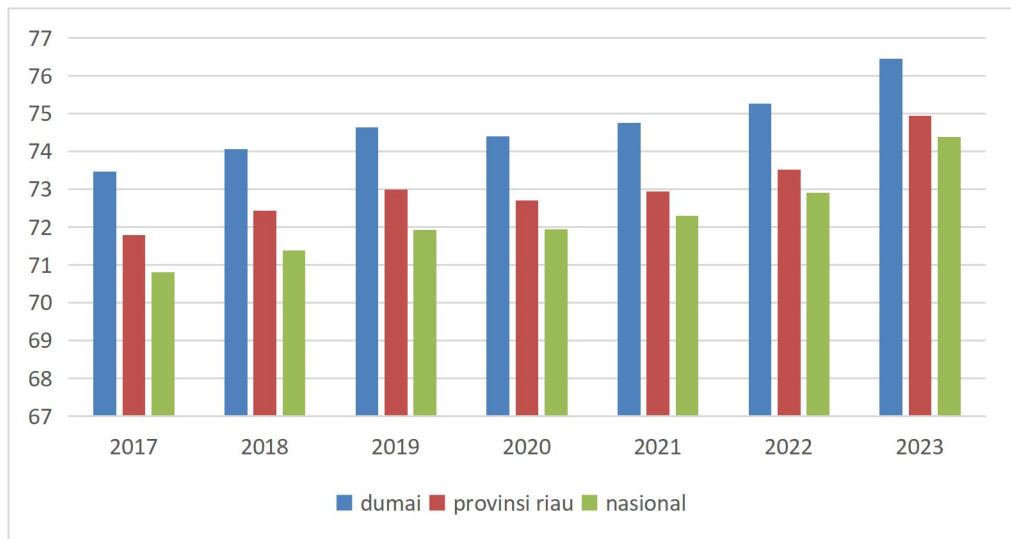
Cakupan Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Dumai	74,06	74,64	74,40	74,75	75,26	76,45
Provinsi Riau	72,44	73,00	72,71	72,94	73,52	74,95
Nasional	71,39	71,92	71,92	72,29	72,91	74,39

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2024)



Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2017-2023, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 10 dibawah. Pada tahun 2023, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, Pekanbaru yang memiliki angka IPM dengan kategori sangat tinggi, sedangkan Dumai, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Siak, Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir memiliki angka IPM dengan kategori tinggi. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti yang tersaji pada Tabel. 10

Grafik. 1
Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional
Tahun 2017-2023



(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2024)

Tabel. 10
Kondisi IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau
Tahun 2020-2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/ Regency				
1. Kuantan Singingi	72,12	72,4	72,78	73,35
2. Indragiri Hulu	70,98	71,25	71,69	72,28
3. Indragiri Hilir	68,43	68,49	69,12	69,64
4. Pelalawan	72,77	73,28	74,15	74,69
5. Siak	74,72	75,03	75,53	75,97
6. Kampar	74,23	74,41	75,21	75,59
7. Rokan Hulu	70,95	71,19	71,7	72,28
8. Bengkalis	74,49	74,6	75,38	75,96
9. Rokan Hilir	70,42	70,61	71,35	71,98
10. Kepulauan Meranti	67,39	67,59	68,31	68,96
Kota/Municipality				
1. Pekanbaru	82,67	82,93	83,38	83,67
2. Dumai	75,34	75,67	76,2	76,45
Riau	73,67	73,89	74,45	74,95

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2024)



2. Angka Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut.

Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (headcount) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2016-2023 cenderung menurun dimana kenaikan hanya terjadi pada tahun 2021 sebagai akibat Pandemi Covid 19 seperti yang tersaji pada Tabel dibawah ini.

Tabel. 11

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Dumai, 2016–2023

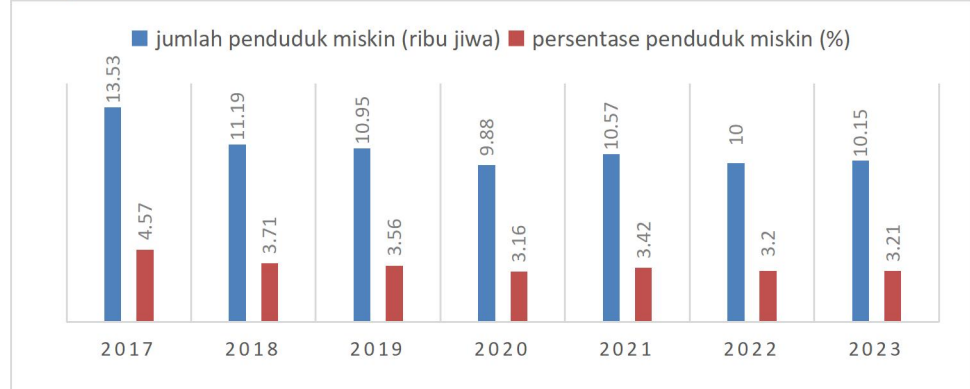
Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	369.624	13,76	4,74
2017	403.244	13,53	4,57
2018	418.597	11,19	3,71
2019	439.152	10,95	3,56
2020	484.609	9,88	3,16
2021	509.002	10,57	3,42
2022	543.182	10,00	3,20
2023	601.348	10,15	3,21

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2024)



Jika kita perhatikan tabel diatas, tingkat kemiskinan kota Dumai selama kurun waktu 2016-2023 cenderung menurun namun pada tahun 2021 tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kota Dumai naik 0,26 persen dari 3,16% menjadi 3,42% atau dari 9.880 jiwa menjadi 10.570 jiwa penduduk miskin.

Grafik. 2
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2023

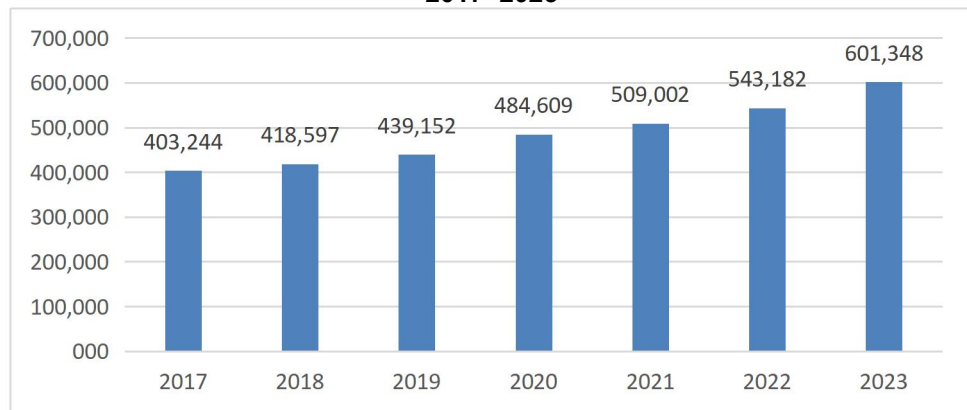


(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2024)

Sedangkan garis kemiskinan kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.601.348/kapita/bulan. Dapat dijelaskan bahwa garis kemiskinan digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. Menurut BPS dalam Muta'ali (2015), garis kemiskinan dihitung dari hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan dibawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh worldbank yaitu US\$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk developing countries. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskina dan indeks keparahan kemiskinan.

Grafik. 3
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Dumai, 2017-2023



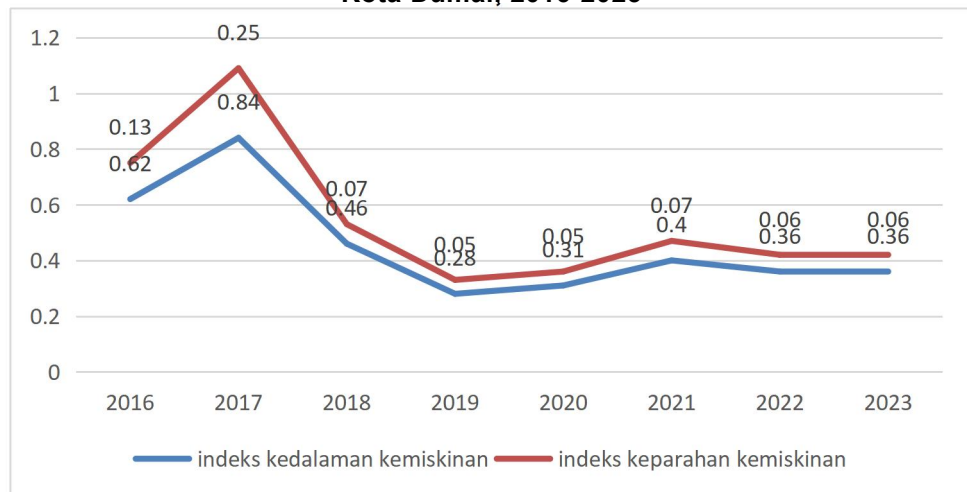
(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2024)



Pada grafik 4 berikut menyajikan data indeks kedalaman kemiskinan/poverty gap index atau yang sering dinotasikan dengan P1. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Kemudian grafik yang sama juga menyajikan indeks keparahan kemiskinan/poverty severity index atau yang sering dinotasikan dengan P2. Indeks keparahan kemiskinan menjelaskan tentang kondisi penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskina, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran iantara penduduk miskin.

Grafik. 4
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kota Dumai, 2016-2023



(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2024)

Adapun perkiraan tingkat kemiskinan tahun 2024 adalah sebesar 2,93%-3,07%

3. Angka pengangguran

Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Adapun beberapa data dan informasi yang butuhkan terkait dengan ketenagakerjaan adalah Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan elastisitas kesempatan kerja (EKK).



Tabel. 12
Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2023

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/Economically Active	103.313	53.477	156.790
1. Bekerja/Working	97.514	51.196	148.710
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment	5.799	2.281	8.080
II. Bukan Angkatan Kerja/Not Economically Active	18.242	62.291	80.533
1. Sekolah/Attending School	7.720	9.398	17.118
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	4.916	51.122	56.038
3. Lainnya/Others	5.606	1.771	7.377
Jumlah/Total	121.555	115.768	237.323
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Economically Active Participation Rate	84,99	46,19	66,07
Tingkat Pengangguran Unemployment Rate	5,61	4,27	5,15

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2024)

4. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang mengGrafikkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang mengGrafikkan andil masing-masing sektor.

PDRB atas harga harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Adapun PDRB atas dasar berlaku tahun 2018-2023 Kota Dumai sebagai berikut :

Tabel. 13
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (miliarrupiah), 2019–2023

Lapangan Usaha Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1.923,59	2.079,11	2.303,17	2.452,76	2.616,28
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	128,17	129,55	132,99	139,35	151,51
C Industri Pengolahan/Manufacturing	20.867,98	21.772,85	24.294,17	27.839,96	30.032,69
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	31,77	73,72	92,98	140,55	149,18
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	5,33	5,60	6,04	6,60	7,86
F Konstruksi/Construction	4.049,17	3.941,63	3.995,66	4.510,78	5.335,39
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	5.736,01	5.258,19	5.873,68	6.350,00	6.847,75
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	1.055,62	726,59	757,62	889,95	1.002,21
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	319,40	260,31	314,99	335,60	360,64



Lapangan Usaha Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	418,39	457,24	478,07	500,69	529,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	397,13	409,20	449,22	517,34	544,49
L	Real Estat/Real Estate Activities	161,76	164,08	168,40	182,03	194,52
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	2,06	1,63	1,65	1,74	1,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	587,76	590,24	605,35	667,05	702,39
P	Jasa Pendidikan/Education	177,13	185,34	192,27	199,18	212,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	65,84	77,38	86,28	93,68	103,79
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	220,03	181,04	193,57	225,57	242,03
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		36.147,15	36.313,73	39.946,11	45.052,81	49.034,29

Catatan/Note: * Angka Sementara/ Preliminary Figures, ** Angka sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Berdasarkan publikasi BPS kota Dumai, PDRB ADHK tahun dasar tahun 2010 kota Dumai tahun 2023 adalah 29.402,610,00 (Juta Rupiah) sedangkan pada tahun 2022 adalah 27.725,87 ,00 (juta rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel. 14

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (persen), 2019–2023

Lapangan Usaha Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1.247,92	1.299,76	1.351,37	1.353,31	1.378,77



B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	78,51	77,47	77,97	79,58	83,60
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	14.581,61	15.020,31	16.006,04	17.241,07	18.253,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	19,14	45,61	57,81	82,60	82,99
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	3,95	4,11	4,43	4,79	5,49
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2.458,03	2.383,80	2.384,99	2.502,10	2.756,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4.158,87	3.730,30	4.066,73	4.202,23	4.472,74
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	712,13	465,48	467,44	510,17	540,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	180,83	145,58	173,38	181,31	191,16
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	308,20	336,68	350,59	360,50	377,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	270,75	280,07	292,58	307,31	317,26
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	108,66	110,43	113,30	119,37	124,23
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,34	1,05	1,06	1,08	1,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	442,43	432,88	442,18	482,18	503,63
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	107,28	108,79	111,57	114,00	119,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	40,22	46,10	50,86	53,09	56,89
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	137,02	109,57	115,97	131,19	137,70
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		24.856,90	24.597,99	26.068,28	27.725,87	29.402,61

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2024)

Indeks implisit di Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 166,77 yang artinya bahwa terjadi kenaikan harga produsen barang dan jasa di Kota Dumai sebesar 53,44 persen terhadap harga produsen barang dan jasa pada tahun 2010. Selanjutnya laju indeks implisit pada tahun 2022 sebesar 162,49 persen yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan harga barang dan jasa



di sisi produsen sebesar 3,90 persen terhadap harga barang dan jasa di sisi produsen tahun sebelumnya dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbanyak sebesar 6,55 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel. 15
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
di Kota Dumai (2010=100), 2019–2023

Lapangan Usaha Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	154,14	159,96	170,43	181,24	189,76
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	163,26	167,23	170,56	175,11	181,24
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	143,11	144,96	151,78	161,47	164,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	165,96	161,64	160,83	170,16	179,75
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	134,75	136,43	136,38	137,86	143,00
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	164,73	165,35	167,53	180,28	193,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	137,92	140,96	144,43	151,11	153,10
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	148,23	156,10	162,08	174,44	185,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	176,63	178,81	181,68	185,10	188,66
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	135,75	135,81	136,36	138,89	140,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	146,68	146,11	153,54	168,35	171,62
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	148,87	148,59	148,63	152,49	156,57
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	153,12	155,84	155,08	161,09	167,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	132,85	136,35	136,90	138,34	139,46
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	165,11	170,36	172,34	174,72	177,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	163,71	167,85	169,65	176,46	182,45



R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	160,59	165,23	166,91	171,95	175,77
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		145,42	147,63	153,24	162,49	166,77

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2024)

Tabel. 16

Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (persen), 2019–2023

Lapangan Usaha Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	0,56	3,77	6,55	6,34	4,70
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	4,37	2,43	1,99	2,67	3,50
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	4,34	1,29	4,71	6,39	1,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	5,36	- 2,60	-0,50	5,80	5,63
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	2,84	1,25	-0,04	1,08	3,73
F	Konstruksi/Construction	2,67	0,38	1,32	7,61	7,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2,99	2,20	2,46	4,62	1,32
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	2,89	5,30	3,83	7,63	6,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	1,39	1,24	1,60	1,88	1,92
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	2,63	0,04	0,41	1,85	1,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	1,70	- 0,39	5,09	9,64	1,95
L	Real Estat/Real Estate Activities	0,38	- 0,19	0,03	2,60	2,67
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	3,49	1,78	-0,49	3,88	3,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1,01	2,64	0,40	1,05	0,81
P	Jasa Pendidikan/Education	3,56	3,18	1,16	1,38	1,59



Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	4,57	2,53	1,07	4,01	3,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,85	2,89	1,02	3,02	2,23
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		3,49	1,52	3,80	6,04	2,63

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2024)

5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah. Sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan. Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan regional. bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai determinasi kemajuan wilayah. Satu hal yang perlu diperhatikan bersama bahwa kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan oleh besaran pendapatan regional. tapi juga tergantung dari banyaknya jumlah penduduk.

Oleh karena itu. salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan per kapita dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. PDRB per kapita secara agregatif menunjukkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi.

Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Ini dapat digunakan bersamaan dengan data soal harga sandang. pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang. pangan dan papan oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga perilaku yang beradab. Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha mewujudkan mimpi agar menjadi nyata. sedangkan Papan (tempat tinggal) bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna dalam peranan kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang. pangan dan papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Selama periode 2022–2023 pengeluaran konsumsi rumah tangga pada harga berlaku terus mengalami peningkatan Rp 35,90 juta/Kapita tahun 2022 meningkat menjadi Rp 43,67 juta/kapita pada tahun 2023. Selama periode ini, rata- rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi RT per kapita sebesar 4,06% per tahun.



Demikian juga halnya dengan rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita pada harga konstan selama periode 2022-2023 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita harga konstan sebesar Rp 23,92 juta/Kapita dan meningkat menjadi Rp. 24,86 juta/kapita pada tahun 2023. Selama periode tersebut rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Dumai meningkat sebesar 0,81% per tahun.

Pada tabel berikut menyajikan perbandingan PDRB perkapita Kota Dumai dengan Provinsi Riau selama kurun waktu tahun 2022-2023.

Tabel 17
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kota Dumai (rupiah), 2022 dan 2023

Kelompok Komoditas/Commodity Group (1)	2022 (2)	2023 (3)
Makanan/Food		
Padi-padian/Cereals	Rp 77.591	Rp 78.766
Umbi-umbian/Tubers	Rp 9.310	Rp 9.858
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	Rp 98.590	Rp 93.913
Daging/Meat	Rp 40.818	Rp 33.348
Telur dan susu/Eggs and milk	Rp 48.901	Rp 47.902
Sayur-sayuran/Vegetables	Rp 74.902	Rp 71.808
Kacang-kacangan/Legumes	Rp 13.646	Rp 15.402
Buah-buahan/Fruits	Rp 33.887	Rp 35.771
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	Rp 35.429	Rp 26.707
Bahan minuman/Beverage stuffs	Rp 19.890	Rp 21.044
Bumbu-bumbuan/Spices	Rp 13.250	Rp 12.590
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	Rp 13.314	Rp 14.547
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	Rp 207.409	Rp 220.865
Rokok/Cigarettes	Rp 117.224	Rp 104.226
Jumlah makanan/Total food	Rp 804.161	Rp 786.747
Bukan makanan/Non-food		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	Rp 418.781	Rp 436.305
Aneka barang dan jasa/Goods and services	Rp 169.605	Rp 167.545
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	Rp 49.253	Rp 55.299
Barang tahan lama/Durable goods	Rp 67.704	Rp 95.683
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	Rp 58.115	Rp 64.884
Keperluan pesta dan upacara/Parties and ceremonies	Rp 10.496	Rp 36.307
Jumlah bukan makanan/Total non-food	Rp 773.954	Rp 856.023
Jumlah/Total	Rp 1.578.115	Rp 1.642.770

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2024)

Pengembangan ekonomi wilayah merupakan sebuah tuntutan perubahan perekonomian suatu wilayah yang menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat suatu wilayah dalam jangka panjang (arsyad, 1992 dalam muta'ali, 2015). Oleh sebab itu proses pembangunan wilayah disebut juga dengan proses pengembangan ekonomi wilayah karena output sebuah pembangunan wilayah secara umum adalah tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut.

Pendapatan perkapita didefinisikan sebagai pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap penduduk suatu wilayah yang dihasilkan dari membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk.

$$\begin{aligned}
 \text{PDRB perkapita}_{(ADHB)} &= \frac{\text{PDRB}}{\sum \text{Penduduk}} \\
 &= \frac{45.056.390.000.000}{331.832} \\
 &= \text{Rp. 135.781.000/Kapita}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{PDRB perkapita}_{(ADHB)} &= \frac{\text{PDRB}}{\sum \text{Penduduk}} \\
 &= \frac{27.725.880.000.000}{331.832} \\
 &= \text{Rp. 83.554.000/Kapita}
 \end{aligned}$$



Secara umum, semakin tinggi nilai PDRB perkapita maka perekonomian wilayah tersebut akan semakin baik. Berdasarkan rumus perhitungan diatas, ternyata tingkat perekonomian suatu wilayah tidak hanya tergantung pada PDRB semata namun juga ditentukan oleh jumlah penduduk, dimana semakin banyak jumlah penduduk maka PDRB perkapita akan semakin rendah (muta'ali, 2015). Lebih jauh dijelaskan, PDRB/kapita tidak menggambarkan kondisi pendapatan masyarakat dan distribusi pendapatan secara riil. Adapun perkiraan Pendapatan perkapita pada tahun 2024 untuk ADHB berkisar antara 141,187 juta/kapita-147,232 juta/kapita sedangkan untuk ADHK 85,21 juta/kapita-85,66 juta/kapita.

6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Distribusi Pendapatan adalah ukuran yang mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah terhadap penduduknya (muta'ali, 2015). Distribusi pendapatan merupakan kriteria yang menunjukkan mengenai penyebaran pembagian pendapatan/kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya dalam wilayah tertentu.

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin.

Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna) (muta'ali, 2015). Artinya, semakin mendekati angka satu (1) nilai indeks gini maka tingkat ketimpangan penduduk semakin lebar (Perfect inequality). Menurut Oshima dalam Muta'ali (2015), nilai indeks gini dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: $G > 0,5$ ketimpangan tinggi, $0,35 < G < 0,5$ ketimpangan sedang, $G < 0,35$ ketimpangan ringan

Tabel 18
Indeks Gini di Kota Dumai Tahun 2016-2023

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2016	0,62	0,13
2017	0,84	0,25
2018	0,46	0,07
2019	0,28	0,05
2020	0,31	0,05
2021	0,40	0,07
2022	0,36	0,06
2023	0,36	0,06

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2024)

**CAPAIAN KINERJA MAKRO KOTA DUMAI**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahunan 2022	Capaian Tahunan 2023	Penjelasan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	76.20%	76,45%	Terjadi perbaikan capaian pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, dengan adanya beberapa program yang menyentuh masyarakat secara langsung baik dibidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya
2.	Angka Kemiskinan	3.20 %	3,21%	Relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya dengan adanya beberapa program yg dilaksanakan pemerintah Kota Dumai secara berkelanjutan.
3.	Angka Pengangguran	5.38%	5,15%	Mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2022. Dengan ada beberapa program pemberdayaan ekonomi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dapat meningkatkan serapan tenaga kerja
4.	Pertumbuhan Ekonomi	6,36%	6,05%	Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai pada Tahun 2023 jauh melebihi target yang diperkirakan oleh Pemerintah Kota Dumai. Pada tahun 2023 ditargetkan pada kisaran 4,19%-4,90% sedangkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 adalah 6,05%. Jika dilakukan perbandingan, Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2023 tidak setinggi tahun 2022 namun tetap melebihi 6% dan jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari pertumbuhan lapangan usaha, maka dapat dilihat bahwa lapangan usaha industry pengolahan tumbuh 5,87%, angka ini lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 7,72%. Hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota Dumai pada tahun 2023 karena sector industry pengolahan merupakan sector yang memiliki nilai PDRB tertinggi dari seluruh sector pembentuk PDRB Kota Dumai.
5.	Pendapatan Perkapita	135,78 (Juta Rp./Jiwa)	149,08 (Juta Rp./Jiwa)	Mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring dengan meningkatnya tingkat pengeluaran masyarakat.
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,324	0,36	

a. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, pada Urusan Wajib dibagi atas Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang tidak terkat Pelayanan Dasar.

Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar meliputi :

- 1) pendidikan
- 2) kesehatan



PEMKO DUMAI

- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- 6) sosial

 Urusan Wajib tidak terkait Pelayanan Dasar meliputi :

- a) tenaga kerja,
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- c) pangan,
- d) pertanahan,
- e) lingkungan hidup,
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g) pemberdayaan masyarakat dan desa,
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
- i) perhubungan,
- j) komunikasi dan informatika,
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah,
- l) penanaman modal,
- m) kependudukan dan olahraga,
- n) statistik,
- o) persandian,
- p) kebudayaan,
- q) perpustakaan, dan
- r) kearsipan.

 Urusan pemerintahan pilihan meliputi :

1. kelautan dan perikanan,
2. pariwisata,
3. pertanian,
4. kehutanan,
5. energi dan sumber daya mineral,
6. perdagangan,
7. perindustrian, dan
8. transmigrasi.

 Urusan penunjang urusan pemerintahan meliputi :

- a) perencanaan,
- b) keuangan,
- c) kepegawaian,
- d) pendidikan dan pelatihan



PEMKO DUMAI

e) penelitian dan pengembangan

Dalam pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2023 berpedoman pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Dumai sebagai alat ukur untuk melihat pencapaian Visi RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 yaitu *“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”*.



2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

a) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	RUMUS	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi Negeri/swasta	<i>Sudah cukup jelas</i>	92	DISDIK	PAUD 115 SP
		2	Jumlah peserta didik PAUD Negeri/swasta yg menerima pelengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK	
		3	Jumlah peserta didik PAUD Negeri/swasta yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	-	DISDIK	
		4	Jumlah kebutuhan kebutuhan minimal pendidik PAUD Negeri/sawsta	<i>sda</i>	348	DISDIK	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri/swasta)	<i>sda</i>	482	DISDIK	
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Diploma IV / S.1 bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan lain / psikologi dan sertifikat profesi guru pendidik anak usia dini	<i>sda</i>	216		
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki jazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	<i>sda</i>	76	DISDIK	
		8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	<i>sda</i>	145	DISDIK	
		9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>Sda</i>	-	DISDIK	
		10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	-	DISDIK	



		yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah				
11		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	31.714	DISDIK	
12		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	10.651	DISDIK	
13		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	114	DISDIK	
14		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	181	DISDIK	
15		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	2.409	DISDIK	
16		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	964	DISDIK	
17		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	-	DISDIK	
18		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	-	DISDIK	
19		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	576	DISDIK	
20		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	337	DISDIK	
21		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		2.128	DISDIK	
22		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		861	DISDIK	
23		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat		109	DISDIK	



		pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah				
	24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		36	DISDIK	
	25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<i>sda</i>	152	DISDIK	
	26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<i>sda</i>	78	DISDIK	
	27	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	<i>sda</i>	145	DISDIK	
	28	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK	
	29	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK	
	30	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	31.714	DISDIK	
	31	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	10.651	DISDIK	
	32	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	114	DISDIK	
	33	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	<i>sda</i>	181	DISDIK	
	34	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	2.409	DISDIK	
	35	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	<i>sda</i>	964	DISDIK	
	36	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	-	DISDIK	



PEMKO DUMAI

37	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	<i>sda</i>	-	DISDIK	
38	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	576	DISDIK	
39	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	<i>sda</i>	337	DISDIK	
40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	<i>sda</i>	2.128	DISDIK	
41	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	<i>sda</i>	861	DISDIK	
42	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	<i>sda</i>	109	DISDIK	
43	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	<i>sda</i>	36	DISDIK	
44	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<i>sda</i>	152	DISDIK	
45	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<i>sda</i>	78	DISDIK	
46	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan swasta)	<i>sda</i>	6	DISDIK	
47	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK	
48	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	86	DISDIK	



PEMKO DUMAI

		49	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	-	DISDIK		
		50	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	24	DISDIK		
		51	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	<i>sda</i>	216	DISDIK		
		52	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	<i>sda</i>	109	DISDIK		
		53	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	<i>sda</i>	5	DISDIK		
2	Kesehatan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	<i>sda</i>	3	RSUD		
		2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	<i>sda</i>	5	RSUD		
		3	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	9.590	Diskes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	<i>sda</i>	591	Diskes	
		4	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	9.154	Diskes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	<i>sda</i>	591	Diskes	
		5	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	8.718	Diskes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	<i>sda</i>	591	Diskes	
		6	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	44.931	Diskes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<i>sda</i>	591	Diskes	



PEMKO DUMAI

		7	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	55.082	Diskes			
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	<i>sda</i>	646	Diskes			
		8	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	209.297	Diskes			
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	646	Diskes			
		9	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	15.356	Diskes			
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	646	Diskes			
		10	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	72.263	Diskes			
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	622	Diskes			
		11	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	3.819	Diskes			
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	622	Diskes			
		12	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	498	Diskes			
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	10	Diskes			
		13	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	8.208	Diskes			
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	330	Diskes			
		14	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	9.851	Diskes			
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	330	Diskes			
		3	PU dan PR	1	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten / Kota (ha)	<i>sda</i>	724 ha	PUPR	
					2	Panjang sungai di kawasan permukiman	<i>sda</i>	-	PUPR	Tidak



		yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten / Kota (m)				ada kewenangan Kota
	3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten / Kota (ha)	<i>sda</i>	-	PUPR	Tidak ada kewenangan Kota
	4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten / Kota (m)	<i>sda</i>	-	PUPR	Tidak ada kewenangan Kota
	5	Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan Kabupaten / Kota	<i>Ada/tidak</i>	-	PUPR	
	6	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten / Kota	<i>Ada/tidak</i>	-	PUPR	
	7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah</i>	21 pintu air 18 rumah pompa	PUPR	
2	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	<i>Sudah cukup jelas</i>	100%	PUPR	(19.400/ 19.400)x 100%
	2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten / Kota (m)	<i>sda</i>	100%	PUPR	(17.410/ 17.410)x 100%
	3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kabupaten/Kota (ha)	<i>sda</i>	-	PUPR	
	4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	<i>sda</i>	-	PUPR	
	5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Ada/tdk</i>	-	PUPR	
	6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan	<i>Ada/tdk</i>	-	PUPR	



PEMKO DUMAI

			Kabupaten/Kota					
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah</i>	-		PUPR	
	3	1	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	<i>Ada/tdk</i>	1 Dok		PUPR	
		2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	<i>Ada/tdk</i>	Tidak		PUPR	
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaraan SPAM	<i>Sudah cukup jelas</i>	1		PUPR	
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	<i>Sda</i>	1		PUPR	
		5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	<i>Sda</i>	3		PUPR	KBPU, B TOEL IKK MEDANG KAMPAT DAN NUWSP
	4	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	<i>Sda</i>	81.272		PUPR	
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	<i>Sda</i>	1.003		PUPR	
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	<i>Sda</i>	82.275		PUPR	
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	<i>Sda</i>	-		PUPR	data ada di Dinkes
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	<i>Sda</i>	-		PUPR	
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	<i>Sda</i>	300.260		PUPR	
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Σ Rumah yg memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki seftik	81%		PUPR	



PEMKO DUMAI

				Rumah diwilayah pengembangan spald dg kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 Σ X 100 %				
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Σ rumah yg lumpur tinjanya yg telah diolah di IPLT		-	PUPR	
				Rumahdiwilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pd wilayah terbangun > 25 Σ Jiwa/ha				
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Σ rumah yangmemiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD		1%	PUPR	
				Σ rumah diwilayah pengembangan SPALDT sda x100%				
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Σ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat x100%		81%	PUPR	
				Σ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S				
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Σ jumlah sarana pengangkutan yang tersedia		2	PUPR	
				Σ jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota x100%				



PEMKO DUMAI

		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Σ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia $\times 100\%$	1 Unit kapasitas 10 m ³ /hari	50%	PUPR	
				Σ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota				
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Σ jumlah rumah yangmemilikisambungan rumah yangtersambungdenganIPA LD $\times 100\%$	450 rumah	82%	PUPR	
				jumlah rumah yangdilayani Σ dengan SPALD-T pada kab/kota				
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Σ jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot $\times 100\%$		-	PUPR	data ada di Dinkes
				Σ jumlah rumah yang termasukdalam wilayah pengembangan SPADLD-S				
	6	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang layak fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsiyangberlaku		-	PUPR	
				Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)				
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Sudah cukup jelas		-	PUPR	data ada di DPMPTSP
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada/tdk		Perda no 1 tahun	PUPR	



					2016 tentang bangunan gedung		
	4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	<i>Ada/tdk</i>		Tim Pengkaji Ahli (TPA)	PUPR	
	5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	<i>Sudahcukupjelas</i>		-	PUPR	
	6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	<i>sda</i>		-	PUPR	
	7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	<i>sda</i>		13	PUPR	
	8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/ kota yang dipelihara/dirawat	<i>sda</i>		8	PUPR	
7	1	Panjang jalan berdasarkan SK Kepala Daerah tentang panjang jalan kewenangan Kab/Kota	<i>Sudah cukup jelas</i>		1.198.243 KM	PUPR	
	2	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan kota			-		
	3	Panjang jalan yang dibangun	<i>Sudah cukup jelas</i>		25,30 km	PUPR	
	4	Panjang jembatan yang dibangun	<i>sda</i>		50 mtr	PUPR	
	5	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	<i>sda</i>		0	PUPR	
	6	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	<i>sda</i>		0	PUPR	
	7	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	<i>sda</i>		0	PUPR	
	8	Panjang jembatan yang direhabilitasi	<i>sda</i>		50 mtr	PUPR	
	9	Panjang jalan yang dipelihara	<i>sda</i>		2,79 km	PUPR	
	10	Panjang jembatan yang dipelihara	<i>sda</i>		-	PUPR	
8	1	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknis/analisis di wilayah Kab/Kota	<i>Sudah cukup jelas</i>		-	PUPR	
	2	Jumlah tenaga kerja operator/teknis/analisis yang terlatih di wilayah Kab/Kota	<i>sda</i>		-	PUPR	
	3	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi	<i>sda</i>		-	PUPR	



		operator/teknis/analisis di wilayah Kab/Kota			
	4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan Kab/Kota yang aktif dengan data termutakhir	<i>Ada/tdk</i>	-	PUPR
	5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR
	6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	<i>sda</i>	-	PUPR
	7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	<i>sda</i>	-	PUPR
	8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	<i>sda</i>		PUPR
	9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	<i>sda</i>	-	PUPR
	10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	<i>sda</i>	-	PUPR
	11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan	<i>sda</i>	-	PUPR



			teknisi/analisis				
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	<i>sda</i>	-	PUPR	
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikas usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-	PUPR	
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-	PUPR	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-	PUPR	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	<i>sda</i>	-	PUPR	
		23	Jumlah pengawasan terkait	<i>sda</i>		PUPR	



PEMKO DUMAI

				ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
			24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-		PUPR
			25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang	<i>sda</i> -	-		PUPR
4	Perumahan Rakyat	1	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	<i>Sudah cukup jelas sda</i>	1.430		Perkimtan
			2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	<i>sda</i>	0		Perkimtan
			3	Jumlah RT, KK, dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0		Perkimtan
			4	Jumlah unit rumah korban bencana alam yang direhabilitasi	<i>sda</i>	0		Perkimtan
			5	Jumlah unit rumah korban bencana alam yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	<i>sda</i>	0		Perkimtan
			6	Jumlah unit rumah korban bencana alam yang dibangun baru/direlokasi sesuai dengan rencana aksi	<i>sda</i>	0		Perkimtan
			7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara bagi korban bencana	<i>sda</i>	0		Perkimtan
			8	Jumlah RT, KK, dan Jiwa korban bencana yang tergasilitasi	<i>sda</i>	0		Perkimtan
			9	Jumlah, luasan dan lokasi percadangan lahan	<i>sda</i>	17,34 ha		Perkimtan
		2	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<i>Sudah cukup jelas</i>	0		Perkimtan



PEMKO DUMAI

		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
		5	Jumlah rumah tangga Penerima layanan yang Belum mendapatkan Penyediaan rumah layak Huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
		6	Jumlah total luasan (Ha) Pengadaan tanah	<i>sda</i>	0 Ha	Perkimtan	
	3	1	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh \geq 10-15 Ha	<i>Sudahcukupjelas</i>	12.98 Ha	Perkimtan	
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	<i>sda</i>	213	Perkimtan	
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	<i>sda</i>	24.85 Ha	Perkimtan	
	4	1	Jumlah rumah di kab/kota	<i>Sudahcukupjelas</i>	48.888	Perkimtan	
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	<i>sda</i>	213	Perkimtan	
		3	Jumlah rumah tidak Layak huni	<i>sda</i>	9.739	Perkimtan	
		4	Jumlah rumah yang Tidak dihuni	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
		5	Rasio rumah dan KK	<i>Jumlah KK Jumlah total unit rumah x 100%</i>	$\frac{(79.151}{48.888) \times 100\% = 1.6\%$	Perkimtan	
		6	Jumlah rumah Pembangunan baru	<i>sda</i>	65	Perkimtan	



PEMKO DUMAI

		5	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	<i>Sudah cukup jelas</i>	59	Perkimtan	
			2	Jumlah unit rumah yang Sudah difasilitasi air minum	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
			3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
			4	Jumlah unit rumah yang Terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
			5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
			6	Jumlah unit rumah yang Terfasilitasi akses PJU	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
			7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
			8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
			9	Jumlah pengembang yang mendapat Penyuluhan atau pelatihan	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani	<i>Sudah cukup jelas</i>	1755	SATPOL PP	
			2	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	<i>sda</i>	0	SATPOL PP	
			3	Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dipenuhi	<i>sda</i>	11	SATPOL PP	
			4	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	<i>sda</i>	16	SATPOL PP	
			5	Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS	<i>Ada/tdk</i>	3	SATPOL PP	
			6	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	<i>sda</i>	6	SATPOL PP	
	2	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun		100%	BPBD	



PEMKO DUMAI

				Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan					
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}$	$\frac{3.056}{3.056}$	100%	BPBD		
		3	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}}$	$\frac{0}{0}$	0%	BPBD	
			2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}}$	$\frac{0}{0}$	0%	BPBD	
			3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelathan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana}}$	$\frac{58}{51}$	0.0009 %	BPBD	
			4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}}$	$\frac{270}{3.056}$	8.84%	BPBD	
			5	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}}$	$\frac{772}{3.056}$	25,26%	BPBD	
			6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}}$	$\frac{168}{3.056}$	4,50%	BPBD	



				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana				
	4	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}}$	$\frac{0}{0}$	0%	BPBD	
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}}$	$\frac{0}{0}$	0%	BPBD	
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}}$	$\frac{36}{36}$	100%	BPBD	
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{\text{jumlah korban yang berhasil di cari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}}$	$\frac{8}{8}$	100%	BPBD	
	5	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Sudah cukup jelas		160	BPBD	
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada/tidak		Tidak	BPBD	
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Dibuat dalam bentuk daftar		0	BPBD	
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Dibuat dalam bentuk daftar		0	BPBD	



PEMKO DUMAI

			5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	<i>Sudah cukup jelas</i>	247	BPBD	
			6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	<i>Sudah cukup jelas</i>	9	BPBD	
			7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	<i>Sudah cukup jelas</i>	127	BPBD	
			8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Sudah cukup jelas	9	BPBD	
6	Sosial	1	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sudah cukup jelas	1.860	DINAS SOSIAL	
			2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	<i>sda</i>	2.283	DINAS SOSIAL	
			3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
			4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	<i>sda</i>	2.283	DINAS SOSIAL	
			5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
			6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket pemukiman sesuai standar gizi	<i>sda</i>	261	DINAS SOSIAL	
			7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	<i>sda</i>	1	DINAS SOSIAL	
			8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	<i>sda</i>	141	DINAS SOSIAL	
			9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	<i>sda</i>	76	DINAS SOSIAL	



PEMKO DUMAI

		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	<i>sda</i>	6	DINAS SOSIAL	
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	<i>sda</i>	141	DINAS SOSIAL	
	2	16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	<i>sda</i>	1	DINAS SOSIAL	
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	<i>sda</i>	36	DINAS SOSIAL	
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	<i>sda</i>	141	DINAS SOSIAL	
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	<i>sda</i>	141	DINAS SOSIAL	



PEMKO DUMAI

		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	<i>sda</i>	105	DINAS SOSIAL	
	3	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	<i>sda</i>	468	DINAS SOSIAL	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	<i>sda</i>	468	DINAS SOSIAL	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	<i>Ada/tidak</i>	0	DINAS SOSIAL	
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	<i>sda</i>	132	DINAS SOSIAL	

b) Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	RUMUS	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Tenaga Kerja	1	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	1	Disnaker		
			2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Realisasi indikator} - \text{target indikator}}{\text{realisasi}}$	0	Disnaker		
			3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	0	Disnaker		
		2	1	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun } n}{\text{keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun } n}$	$\frac{(5)}{(5)} \times 100\%$	100%	Disnaker	
			2	Persentase instruktur bersertifikasi kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{(3)}$	$\frac{(1)}{(3)}$	33,33%	Disnaker	



				<i>Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n</i>	X 100%			
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap jumlah peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah instruktur pada tahun } n}{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun } n} \times 100\%$	$\frac{(3)}{(80)} \times 100\%$	3,75%	Disnaker	
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun } n}{\text{Jumlah seluruh LPK pada tahun } n} \times 100\%$	$\frac{(1)}{(25)} \times 100\%$	4%	Disnaker	
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun } n}{\text{Jumlah LPK yang terdata pada tahun } n} \times 100\%$	$\frac{(13)}{(25)} \times 100\%$	52%	Disnaker	
		6	Jumlah penganggur yang dilatih	Sudah cukup jelas		50	Disnaker	
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun } n}{\text{jumlah orang yang dilatih pada tahun } n} \times 100\%$	$\frac{(80)}{(80)} \times 100\%$	100%	Disnaker	
		8	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun } n}{\text{Jumlah lulusan pada tahun } n} \times 100\%$	$\frac{(38)}{(80)} \times 100\%$	47.50%	Disnaker	
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun } n} \times 100\%$	$\frac{(48)}{(80)} \times 100\%$	60%	Disnaker	
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\Sigma \text{CPMI dilatih}}{\Sigma \text{CPMI terdaftar}}$		25	Disnaker	
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Sudah cukup jelas		1	Disnaker	
	3	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas pada tahun } n} \times 100\%$		0	Disnaker	



				<i>Jumlah perusahaan pada tahun n</i>					
		2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi di kurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).		0	Disnaker		
	4	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100\%$	(12 312)	4,17%	Disnaker		
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100\%$	(0 50)	0%	Disnaker		
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Sudah cukup jelas		61 SP/SB	Disnaker	Diluar perusahaan 6 SP/SB Didlm Perh 55 SP/SB	
		4	Persentase perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun strujktur dan skala upah}}{\text{Jumah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)}} \times 100\%$	(0 0)	0%	Disnaker		
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajibl apor}} \times 100\%$	(501 550)	91.09%	Disnaker		
		6	Persentase perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun } n} \times 100\%$	(42 550)	7.63%	Disnaker		
		7	Jumlah mogok kerja	Sudah cukup jelas		0	Disnaker		



PEMKO DUMAI

	8	Jumlah penutupan perusahaan	<i>sda</i>	0	Disnaker	
	9	Jumlah perselisihan kepentingan	<i>sda</i>	3	Disnaker	
	10	Jumlah perselisihan antar SP/SB dalam 1 (satu) perusahaan	<i>sda</i>	0	Disnaker	
	11	Jumlah perselisihan PHK	<i>sda</i>	22 Kasus	Disnaker	
	12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	<i>sda</i>	28 org	Disnaker	
	13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	<i>sda</i>	22 Kasus	Disnaker	
	14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	<i>Ada/tdk</i>	Tidak	Disnaker	
	15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}}$	$\frac{(6}{42)} \times 100\%$	14,29%	Disnaker
	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	<i>Sudah cukup jelas</i>	61 Lowongan	Disnaker	
	2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	<i>sda</i>	1.832 Orang	Disnaker	
	3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	<i>sda</i>	12	Disnaker	
	4	Jumlah Tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	<i>sda</i>	1	Disnaker	
	5	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	<i>sda</i>	2	Disnaker	
	6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah satu wilayah kab/kota	<i>sda</i>	1 Lembaga	Disnaker	
	7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kab/kota	<i>sda</i>	6 Perjanjian Kerja	Disnaker	
	8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) online/Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)	<i>sda</i>	568 Orang	Disnaker	



PEMKO DUMAI

			9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\Sigma CPM/CTKI \text{ yang mendapatkan sosialisasi}}{\Sigma CPM/CTKI}$		15	Disnaker	
			10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Sudah cukup jelas		15	Disnaker	
			11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\Sigma \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\Sigma \text{PMI yang pulang}}$		688	Disnaker	
			12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\Sigma \text{PMI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan TKI}}{\Sigma \text{PMI/TKI}}$		0	Disnaker	
			13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia purna dan keluarganya	$\frac{\Sigma \text{PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\Sigma \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}}$	(25/46) x 100%	54,34%	Disnaker	
			14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\Sigma \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}}$		0	Disnaker	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah dilatih PUG}}{\text{Jumlah OPD seluruh Kota Dumai}}$	37/37 X 100%	100%	Dinas PP & PA	
			2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender ditingkat kabupaten/kota}}{\text{Jumlah seluruh program/kegiatan pada perangkat daerah tingkat kabupaten/kota}}$	65/560 X 100 %	11,51%		



PEMKO DUMAI

		2	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	sda	2 media massa	Dinas PP & PA	
			2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	sda	4 lembaga (UPTD)	Dinas PP & PA	
			3	Persentase korban layanan anak yang terlayani	$\frac{\text{jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi}}$	95/95 X 100 %	100%	Dinas PP & PA
			4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	Sudah cukup jelas	50 lembaga (UPTD)	Dinas PP & PA	
			5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah kabupaten/kota (ABPD Kab/Kota)	Sudah cukup jelas	4 lembaga (UPTD)	Dinas PP & PA	
		3	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Sudah cukup jelas	31	Dinas PP & PA	
			2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	sda	0	Dinas PP & PA	
			3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pelatihan	sda	0	Dinas PP & PA	
			4	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan pelatihan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	sda	0	Dinas PP & PA	
			5	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	sda	1	Dinas PP & PA	
			6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah	sda	1 lembaga (UPTD)	Dinas PP & PA	



			7	terstandarisasi Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}}$	20/20 X 100% 100 %	Dinas PP & PA	
3	Pangan	1	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tdk	Tidak ada	Dinas Pertanian	
			2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tdk	Tidak ada	Dinas Pertanian	
			3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tdk	Tidak ada	Dinas Pertanian	
			4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tdk	Ada	Dinas Pertanian	
			5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tdk	Ada	Dinas Pertanian	
			6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tdk	Ada	Dinas Pertanian	
			7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tdk	Tidak ada	Dinas Pertanian	
			8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tdk	Ada	Dinas Pertanian	
4	Pertanahan	1	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1tahun}} \times 100\%$	0	Bidang pertanahan	Data blm tersedia
			2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{\text{Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1tahun}} \times 100\%$	0	Bidang pertanahan	Data blm tersedia



					<i>Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform</i> <i>x 100%</i>			
			3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	<i>Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee</i>	0-	Bidang pertanahan	Data blm tersedia
					<i>Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek</i> <i>x 100%</i>			
			4	Dokumen Izin membuka tanah	<i>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka Tanah yang ditolak</i>	0	Bidang pertanahan	Data blm tersedia
					<i>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun</i> <i>x 100%</i>			
			5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik</i>	0	Bidang pertanahan	Data blm tersedia
					<i>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun</i> <i>x 100%</i>			
5	Lingkungan Hidup	1	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Hasil perhitungan Kota terhadap Indeks kualitas air (IKA)	45,56	Dinas LH	
			2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Hasil perhitungan Kota terhadap Indeks kualitas udara (IKU)	89,69	Dinas LH	
			3	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Hasil perhitungan Kota terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	54,93	Dinas LH	
			4	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	Ada	Dinas LH	



PEMKO DUMAI

		2	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota	Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi		100	Dinas LH	
			2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{jumlah PPLHD yang ada}}{\text{jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}}$		100	Dinas LH	
			3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah MHA yg diakui}}{\text{Jumlah usulan MHA}}$		-	Dinas LH	
			4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{Jumlah MHA yg mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yg ada}}$		-	Dinas LH	
			5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat	$\frac{\text{jmlh lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana}}{\text{target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat} \times 100\%}$		0	LH	
			6	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	$\frac{\text{Pengaduan Masyarakat yg ditangani}}{\text{total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}}$	$\frac{6}{6}$	100	LH	
6	Admindak dan Capil	1	1	Penerbitan akta perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}}$	$\frac{(4.574}{4.574) \times 100\%}$	100 %	Data Agregat Kependudukan	
			2	Penerbitan akta perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}}$	$\frac{(172}{172) \times 100\%}$	100 %	Data Agregat Kependudukan	



PEMKO DUMAI

			3	Penerbitan akta kematian	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa kematian yang dilaporkan}}$	$\frac{(12.633)}{12.633} \times 100\%$	100 %	Data Agregat Kependudukan	
			4	Penyajian data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun}}{2 \text{ tahun}}$	$\frac{(2)}{2} \times 100\%$	100 %	Data Agregat Kependudukan	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	<i>Sudah cukup jelas</i>		Tdk ada	Dinas Sosial & PM	Kota Dumai Tidak Ada Desa
			2	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa (tahun n - tahun (n-1))	<i>sda</i>		Tdk ada	Dinas Sosial & PM	Kota Dumai Tidak Ada Desa
			3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	<i>sda</i>		Tdk Ada	Dinas Sosial & PM	Kota Dumai Tidak Ada Desa
			4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	<i>sda</i>		Tdk ada	Dinas Sosial & PM	Kota Dumai Tidak Ada Desa
8	Pengendalian Penduduk dan KB	1	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDDPK) yang di Perda-kan	Ada/tdk		Tidak ada	Dinas PP & KB	
			2	Median Usia kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	<i>Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend Usia kawin pertama penting untuk</i>		22.36	Dinas PP & KB	



				<i>Menentukan polafertilitas di Indonesia.</i>				
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun ((ASFR)	$ASFRi = \frac{bi}{pf \times k}$ <p>ASFR adalah angka kelahiran di Kelompok usia 15-19 tahun ASFR adalah angka kelahiran di Kelompok usia 15-19 tahun</p>	<u>169</u> 13.329 X 1000	13	Dinas PP & KB	
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	<p><i>Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)</i></p> <p><i>jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)</i> x 100%</p>	60.974 71.282	86%	Dinas PP & KB	
		5	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam ppengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		24 OPD	Dinas PP & KB	
	2	1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	<p><i>Jumlah faskes yang siap melayani KBMKJP</i></p> <p><i>Jumlah faskes</i> x 100%</p>	<u>38</u> 38	100%	Dinas PP & KB	
		2	Persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<p><i>Jumlah Peserta KBAktif</i> Jumlah PUS x 100%</p>	<u>30.301</u> 45.899	66.02%	Dinas PP & KB	
		3	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	1	100%	Dinas PP & KB	
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	<p><i>jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern</i> x 100%</p> <p><i>jumlah sasaran peserta KB</i></p>	<u>1.876</u> 2.598	72.21%	Dinas PP & KB	



				<i>pasca persalinan</i>					
		3	1	Persentase kesertaan KB di kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah	KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari	$\frac{6.083}{9.881}$	61.6%	Dinas PP & KB	
					Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah				
			2	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	<p><i>jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI</i></p> <p><i>jumlah Keluarga PBI x 100%</i></p> <p><i>Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah</i></p>	$\frac{31.334}{45.899}$	46.48%	Dinas PP & KB	
9	Perhubungan	1	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	<p><i>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia</i></p> <p><i>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan lansesuidenganstandarpelayananpenyelenggaraanterminalangkutanjalan x 100%</i></p>		0	Perhubungan	
			2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	<p><i>Jumlah kendaraan yang diuji pertahun</i></p> <p><i>Jumlah kendaraan wajib uji x 100%</i></p>	$\frac{3.664}{4.121} \times 100$	88.91%	Perhubungan	



PEMKO DUMAI

			3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	<i>Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan</i> <i>Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota</i> x 100%		0	Perhubungan	Kota Dumai tidak memiliki terminal Tipe C
			4	Persentase pelaksanaan manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	<i>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota</i> <i>Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota</i> x 100%	1.721 1.615 X 100	88%	Perhubungan	Lintas Penyebrangan yang ada antar kab/kota dan penempatannya menjadi kewenangan Provinsi
10	Komunikasi, informatika, statistik dan persandian	1	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	<i>Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i> <i>jumlah perangkat daerah</i>	(75 85)x 100%	79,80%	Dinas Kominfotik san	
			2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	<i>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo</i> <i>Jumlah perangkat daerah</i>	(75 85)x 100%	79,80%	Dinas Kominfotik san	
			3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, dan sinyal lainnya) dengan	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).		Ada	Dinas Kominfotik san	



			memanfaatkan jaringan intra pemerintah					
2	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	<p><i>Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah</i></p>		Tidak Ada	Dinas Kominfotik san		
	2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	<p><i>Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah Perangkat Daerah</i></p>	$\frac{(217)}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	181%	Dinas Kominfotik san		
	3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	<p><i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</i></p> <hr/> <p><i>jumlah Perangkat Daerah</i></p>	$\frac{(35/37)}{\text{jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	95%	Dinas Kominfotik san		
	4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	<p><i>Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah layanan</i></p>	$\frac{(97/97)}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	100%	Dinas Kominfotik san		
	5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	<p><i>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</i></p>	$\frac{(135)}{\text{Jumlah layanan SPBE}} \times 100\%$	260%	Dinas Kominfotik san		



			<i>Jumlah layanan</i>			
6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah layanan}}$	$\frac{1}{1}$	1 Kegiatan (Command Centre)	Dinas Kominfotik san	
7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan}}$	$\frac{(15)}{15} \times 100\%$	100%	Dinas Kominfotik san	
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah layanan}}$	$\frac{(37)}{37} \times 100\%$	100%	Dinas Kominfotik san	
9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}}$	$\frac{(37)}{37} \times 100\%$	100%	Dinas Kominfotik san	
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis data}}{\text{Jumlah perangkat daerah}}$	$\frac{(37)}{37} \times 100\%$	100%	Dinas Kominfotik san	
11	Persentase data yang dapat dibagi pakai	$\frac{\text{Jumlah data yang dapat dibagi pakai}}{\text{Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah}}$	$\frac{(37)}{37} \times 100\%$	100%	Dinas Kominfotik san	
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}}$	$\frac{(1)}{1} \times 100\%$	100%	Dinas Kominfotik san	
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah ASN Pengelola TIK}}$	$\frac{(3)}{27} \times 100\%$	11%	Dinas Kominfotik san	
14	Tersedianya Peraturan Daerah	(Ada atau Tidak ada):	2	Ada	Dinas	



			atau Peraturan Kepala Daerah terkait implemtasi e-government	1. Dokumen Master Plan Poindalam master plan paling sedikit memuat: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Penganggaran Strategi Peta Jalan Arah Kebijakan Cetakbiruteknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkadatentangpengelolaa nTIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggungjawab			Kominfo- tik- san	
	3	1	Persentase Komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah provinsi	$\frac{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atau mitras strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atatau mitra strategis pemerintah daerah provinsi}}$	$\frac{0}{0}$	0%	Dinas Kominfo- tik- san	
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\Sigma \text{ konteni nformasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\Sigma \text{ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi}}$	$\frac{(3102}{3102)}{100\%}$	100%	Dinas Kominfo- tik- san	
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi public yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	$\frac{\Sigma \text{ Diseminasi dan layanan informasi public yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{\Sigma \text{ Diseminasi dan layanan informasi public}}$	$\frac{0}{0}$	0%	Dinas Kominfo- tik- san	



11	Koperasi dan UKM	1	1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$	0/61	0 %	Dinas Koperasi & UKM	
			2	Persentase fasilitasi penerbitan izin izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasus usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasus simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100\%$	-	0 %	Dinas Koperasi & UKM	
			3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	8/288 x 100	2,78 %	Dinas Koperasi & UKM	
			4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$	8/61 X 100 %	13,11 %	Dinas Koperasi & UKM	
			5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	30/288 x 100%	10,42%	Dinas Koperasi & UKM	



			6	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	<p><i>Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah anggota koperasi yang ada</i> x 100%</p>	33/179 25x 100%	0,18 %	Dinas Koperasi & UKM	
			7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	<p><i>Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah koperasi yang ada</i> x 100%</p>	22/288 x 100%	7,64 % %	Dinas Koperasi & UKM	
			8	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	<p><i>Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah koperasi yang ada</i> x 100%</p>	70/288 x 100%	24,31 %	Dinas Koperasi & UKM	
			9	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	<p><i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah koperasi yang ada</i> x 100%</p>	-	0 %	Dinas Koperasi & UKM	
			10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	<p><i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah koperasi yang ada</i> x 100%</p>	-	0 %	Dinas Koperasi & UKM	
			11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	<p><i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah koperasi yang ada</i> x 100%</p>	180/288	62.50 %	Dinas Koperasi & UKM	
			12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah	<p><i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan</i></p>	-	0 %	Dinas Koperasi & UKM	



			keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang ada</i> x 100%				
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	<i>Jumlah pertumbuhan wirausaha baru</i> <i>Jumlah wirausaha yang ada</i> x 100%	2264/8779 x 100%	25,79 %	Dinas Koperasi & UKM	
		2	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput kedalam sistem online data sistem (ODS)	<i>Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem data online (ODS)</i> <i>Jumlah usaha mikro yang ada</i> x 100%	0/8779	0 %	Dinas Koperasi & UKM	
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	<i>Jumlah usaha mikro yang bermitra</i> <i>Jumlah usaha mikro yang ada</i> x 100%	70/9779 x 100%	0,80 %	Dinas Koperasi & UKM	
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi</i> <i>Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk</i> x 100%	187/8779 x 100%	2,13 %	Dinas Koperasi & UKM	
		5	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran produk usaha	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</i> <i>Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran</i> x 100%	67/8779 x 100%	0,76 %	Dinas Koperasi & UKM	
		6	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan</i> <i>Jumlah usaha mikro yang ada</i> x 100%	690/8779 x 100%	7,86 %	Dinas Koperasi & UKM	
		7	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha</i>	0/8779 x 100%	0 %	Dinas Koperasi &	



				kelembagaan dan usaha	<i>Jumlah usaha mikro yang ada</i> x 100%			UKM	
12	Penanaman Modal	1	1	Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah fasilitas/insentif di Bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bias diberikan kepada investor		1 Perda	Penanaman Modal	
			2	SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP Pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal		0	Penanaman Modal	
			3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi Pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun		0	Penanaman Modal	
			4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting		0	Penanaman Modal	
			5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal		0	Penanaman Modal	
			6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan Misi penanaman modal		0	Penanaman Modal	
			7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		0	Penanaman Modal	
			8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan		5.274	Penanaman Modal	
			9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota		3.386.922.760.000	Penanaman Modal	
			10	Pembinaan apartur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Jumlah aparaturnya dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal		0	Penanaman Modal	
			11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal		320 Pelaku Usaha	Penanaman Modal	
			12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima		13	Penanaman Modal	



13	Kepemudaan dan Olahraga	1	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	<i>Sudah jelas</i>	72	DISKOPAR	
			2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	<i>Sudah jelas</i>	0	DISKOPAR	
			3	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian. Kesukarelawanan dan pelaporan pemuda	<i>Sudah jelas</i>	9	DISKOPAR	
		2	1	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	<i>Sudah jelas</i>	0	DISKOPAR	
			2	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	<i>Sudah jelas</i>	30 orang	DISKOPAR	
			3	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	<i>Sudah jelas</i>	1	DISKOPAR	
14	Statistik	1	1	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tdk	Ada	Dinas Kominfotik san	
			2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	<i>Sudah jelas</i>	Ada	Dinas Kominfotik san	37 PD
			3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	<i>Sudah jelas</i>	Ada	Dinas Kominfotik san	37 PD
			4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	<i>Sudah jelas</i>	Ada	Dinas Kominfotik san	17 PD
			5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	<i>Sudah jelas</i>	Ada	Dinas Kominfotik san	17 PD
			6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	<i>Jumlah meta data kegiatan statistik sektoral</i> <i>Jumlah kegiatan statistik sektoral</i> $\times 100\%$	100%	Dinas Kominfotik san	



			7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	$\frac{37}{37} \times 100\%$ <p><i>Jumlah meta data indikator statistik sektoral</i> <i>Jumlah indikator statistik sektoral</i> $\times 100\%$ $\frac{37}{37} \times 100\%$</p>	100%	Dinas Kominfotik san	
15	Persandian	1	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	<p><i>Jumlah kegiatan strategis teramankan</i> <i>Jumlah kegiatan strategis yang ada</i> $\times 100\%$</p> <p>0/0*100%</p>	0 %	Dinas Kominfotik san	
			2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	<p><i>Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian</i> <i>Jumlah SE yang ada</i> $\times 100\%$</p>	Tidak Ada	Dinas Kominfotik san	
			3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan risiko kategori rendah	<p><i>Jumlah titik teramankan</i> <i>Jumlah titik pada PHKS</i> $\times 100\%$</p>	(1/1)*100 % = 100%	Diskominfo	
			4.	Presentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada PHKS yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	<p><i>Jumlah titik teramankan</i></p> <p><i>Jumlah titik pada PHKS</i> $\times 100\%$</p>	100 %		
					<p>1/1*100%</p>			
16	Kebudayaan	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	9	DISDIK		
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	9	DISDIK		
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan	Jumlah objek dimanfaatkan	5	DISDIK		



			meningkatkan kesejahteraan masyarakat)			
	4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah Lembaga distandarisasi + Jumlah Lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlahpranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	1	DISDIK	
	5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	5	DISDIK	
	6	Perlindungan cagar budaya Kab/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	-	DISDIK	
	7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izinkeluar Kabupaten/Kota	-	DISDIK	
	8	Pengembangan cagar budaya (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	-	DISDIK	
	9	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	5	DISDIK	
	10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	-	DISDIK	
	11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah pengunjung museum	-	DISDIK	
	12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		-	DISDIK	
	13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	-	DISDIK	
	14	Pembentukan tim ahli cagar	Jumlah pembentukan tim ahli CB	-	DISDIK	



PEMKO DUMAI

				budaya kota					
		15		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	-		DISDIK	
		16		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	-		DISDIK	
		17		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	-		DISDIK	
		18		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	-		DISDIK	
		19		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang Melibatkan masyarakat	-		DISDIK	
17	Perpustakaan	1	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	<i>Koleksi perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan diwilayahnya (dalam eksemplar)</i>	$\frac{54.723}{343.597}$	15,93%	Perpustakaan	
					<i>Jumlah penduduk diwilayahnya (dalam jiwa)</i>				
			2	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	<i>Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite</i>	$\frac{33.418}{343.597}$	9,73%	Perpustakaan	
					<i>Jumlah penduduk diwilayahnya x 100%</i>				
					<i>Ketersediaan tenaga perpustakaan diberbagai perpustakaan diwilayahnya</i>	$\frac{394}{343.597}$	0,011%	Perpustakaan	
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	<i>Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</i>	$\frac{2}{246}$	2,85%	Perpustakaan				
		<i>Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat diwilayahnya x 100%</i>							
5	Jumlah permasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca dimasyarakat		28.816	Perpustakaan	Tidak Ada Keg			



			1	Jumlah naskah kuno yang diakuisi sisi/dialihkan media (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		1	Perpustakaan		
			2	Jumlah naskah kuno yang dialihkan aksara dan dialih Bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		0	Perpustakaan	Tidak Ada Keg	
		2	3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksibudaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		0	Perpustakaan	Tidak Ada Keg	
18	Kearsipan	1	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<i>Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i>	855	100%	Perpustakaan		
					<i>Jumlah seluruh arsip aktif</i> x 100%	855				
			2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<i>Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i> <i>Jumlah seluruh arsip inaktif</i> x 100%	294	294	100%	Perpustakaan	
			3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	<i>Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</i> <i>Jumlah seluruh arsip statis</i> x 100%	0	3.369	0%	Perpustakaan	
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	<i>Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</i>	102	3.369	3,03	Perpustakaan		
				<i>Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi</i> x 100%	3.369					
		2	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip			841	Perpustakaan	
			2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan Penyelamatan arsip dari Bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana			0	Perpustakaan	Tidak Ada Keg
			3	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran Perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI46/2015			0	Perpustakaan	Tidak Ada Keg



PEMKO DUMAI

			daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di Kab/Kota	tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah			
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang di Kelola oleh Lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip meruju pada Peraturan Kepala ANR20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	102	Perpustakaan	Tidak Ada Keg
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaanya menjafi kewenangan daerah Kab/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	0	Perpustakaan	Tidak Ada Keg
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah Kab/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	0	Perpustakaan	Tidak Ada Keg

c) Urusan Pemerintahan pilihan

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	RUMUS	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
1	2	3	4		5	6	7
1	Kelautan Perikanan	1	1 Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang Melakukan diversifikasi usaha (RTP)	46 RTP	Kelautan Perikanan	
		2	2 Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada diwilayah Kabupaten Kota}} \times 100\%$	1	Kelautan Perikanan	
		3	3 Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	28	Kelautan Perikanan	
		4	4 Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	Jumlah pembudidayaan ikan yang Memperoleh kegiatan pemberdayaan pertahun	47 kelompok	Kelautan Perikanan	



PEMKO DUMAI

				(pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)				
			5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	467.500		Kelautan Perikanan
2	Pariwisata	1	1	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	2		DISKOPAR
			2	Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar,Fasilitas Umum Dan Fasilitas Pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	56		DISKOPAR
			3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	0		DISKOPAR
			4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	6.031		DISKOPAR
			5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	2 event		DISKOPAR
			6	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	0		DISKOPAR
			7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industry pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	0		DISKOPAR
			8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikas	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersersifikat}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}}$	0		DISKOPAR
			9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sector kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sector kepariwisataan}}$	$30/30 \times 100\% = 100\%$		DISKOPAR
			10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaa masyarakat dan pembinaan kemitraan usah masyarakat	0		DISKOPAR
3	Pertanian	1	1	Jumlah sarana prasarana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	24		Dinas Pertanian
			2	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	24		Dinas Pertanian
			3	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	-		Dinas Pertanian



PEMKO DUMAI

			4	Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$	$\frac{(24}{24}) \times 100\%$	100 %	Dinas Pertanian	
			5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	$\frac{0}{0}$	0 %	Dinas Pertanian	
			6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$	$\frac{409.7}{126.22}$	324.59%	Dinas Pertanian	
4	Kehutanan	1	1	Dokumen penataan hutan wilayah KPH			Tdk ada		
			2	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka Panjang dan jangka pendek			Tdk ada		
			3	Luas lahan kritis yang direhabilitasi			Tdk ada		
			4	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi			Tdk ada		
			5	Penurunan luas gangguan Kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal longing dan peramabahan)			Tdk ada		
			6	Jumlah hasil usaha industry primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif			Tdk ada		
			7	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan			Tdk ada		
			8	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			Tdk ada		
			9	Pemulihan ekosistem pada talura			Tdk ada		
			10	Menurunnya gangguan kawasan talura			Tdk ada		
			11	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan			Tdk ada		
			12	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan			Tdk ada		
			13	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan			Tdk ada		
			14	Fasilitas kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok			Tdk ada		



PEMKO DUMAI

				perhutanan social			
			15	Terusnya rencana pengelolaan das lintas daerah kabupaten /kota dalam 1 provinsi		Tdk ada	
			16	Terbentuknya forum komunikasi das yang mendukung keterpaduan lintas sektor		Tdk ada	
5	ESDM	1	1	Perda/pegub terkait zonasi Kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi		Tdk ada	
			2	Peta konsevasi air tanah dalam daerah provinsi		Tdk ada	
			3	Perda/pegub terkait izin penggalian,pemakaian dan izin pengusaha air tanah dalam area provinsi		Tdk ada	
			4	Perda/pegub terkait izin penggalian ,pemakaian dan izin pengusaha air tanah dalam area provinsi		Tdk ada	
			5	Perda/pegub terkait pentapan nilai perolehan air tanah		Tdk ada	
			6	Perda/pegub terkait pentapan nilai perolehan air tanah		Tdk ada	
			7	Perda/pegub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi		Tdkada	
			8	Perda/pegub terkait IUJP		Tdk ada	
			9	Perda/pegub terkait penetapan harga patokan menral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009		Tdk ada	
			10	Izin pemanfattan langsung yang diterbitkan		Tdk ada	
			11	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun		Tdk ada	
			12	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati		Tdk ada	
			13	Perda/pegub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara pernebitan,pembinaan dan pengawasan)		Tdk ada	



PEMKO DUMAI

			14	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalansinya dalam daerah provinsi		Tdk ada		
			15	Perda/pegub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang di tetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi		Tdk ada		
			16	Surat persetujuan gubernur terkait harga jual tenga listrik dan sewa, jaringan tenga listrik dari pemegang izin yang di tetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi		Tdk ada		
			17	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenga listik bagi badan usaha dalam negri /mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegang rendah		Tdk ada		
			18	Pelaksanaan pembangunan listrik pedesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu		Tdk ada		
6	Perdagangan	1	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	<i>Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5hari kerja</i>	0	Dinas Perdagangan	
					<i>Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar</i>			
					$\times 100\%$			
					<i>Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5hari kerja</i>			
		<i>Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar</i>	2	Dinas Perdagangan				
		$\times 100\%$						
2	Persentase penerbitan TDG	<i>Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja</i>	0	Dinas Perdagangan				
		<i>Jumlah permohonan penerbitan TDG</i>						
				$\times 100\%$				
3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	<i>Jumlah penerbitan TDG</i>	0	Dinas Perdagangan				
		$\times 100\%$						
				<i>Jumlah gudang yang ada di KabKota</i>				



PEMKO DUMAI

		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	<i>Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri :</i>		0	Dinas Perdagangan	
			a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	<i>Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap danataubbenar</i> <i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</i> \times 100%		0	Dinas Perdagangan	
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	<i>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri :</i> <i>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i> <i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</i> $\times 100\%$		0	Dinas Perdagangan	
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	<i>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri :</i> <i>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i> <i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</i> $\times 100\%$		0	Dinas Perdagangan	



			5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkatdaerah Kab/Kota	<p><i>Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat Daerah KabKota</i></p> <p><i>Jumlah permohonan S IUP Bahan Berbahaya agi Pengecer</i></p> <p>$\times 100\%$</p>		0	Dinas Perdagangan	
			6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	<p><i>Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1x24jam)</i></p> <p><i>Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar</i></p> <p>$\times 100\%$</p>	6921/7291 x 100%	94,93	Dinas Perdagangan	
			7	persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	<p>$K = (a + b) \times 100\%$</p> <p><i>K = Persentase pengembangan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</i></p> <p><i>a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)</i></p> <p><i>b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</i></p>		0	Dinas Perdagangan	
			8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<i>Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok</i>		0	Dinas Perdagangan	
			1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	<p>$aX = bxc$</p> <p>$\times 100\%$</p>	(568,55/1.940,67) x 100%	29,30%	Dinas Perdagangan	
			1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	<p><i>Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan</i></p> <p><i>Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah KabKota</i></p> <p>$\times 100\%$</p>	(1073/1765) x 100%	60,79%	Dinas Perdagangan	
			2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang Berlaku	<p><i>Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku</i></p> <p><i>Total sampel BDKT yang diawasi</i></p>	(4/12) x 100%	33.33%	Dinas Perdagangan	



PEMKO DUMAI

					<i>dalam tahun berjalan x 100%</i>				
7	Perindustria n	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya didaerah kabupaten/kota	<i>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan</i>	(0/73)X 100% %	0%			
				<i>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100%</i>					
		2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkan menjadi perda	<i>Capaian target tahapan penyelesaian RPIK</i> <i>Tahapan :</i> <i>a) Tersusunnya naskah akademik (30%)</i> <i>b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)</i> <i>c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)</i> <i>d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)</i> <i>e) Penetapan Perda RPIK (10%)</i>		-	Dinas Koperasi & UKM		
		3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	<i>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan</i>	(39/73)X 100%	53.42%	Dinas Koperasi & UKM		
				<i>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100%</i>					
4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	<i>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan</i>	(0/73)X 100% %	0%	Dinas Koperasi & UKM				
		<i>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100%</i>							
5	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di	<i>Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kotadi SIINas</i>	(63/532) x 100%	11.84 %	Dinas Koperasi & UKM				



PEMKO DUMAI

			Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	<i>Totalpopulasiperusahaanindustri kecil,menengahdanperusahaan kawasanindustri diKabKota x 100%</i>					
8	Transmigrasi	1	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	<i>Sudah cukup jelas</i>		Tdkada	Disnaker	
			2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	<i>Sudah cukupj elas</i>		Tdkada	Disnaker	
			3	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	<i>Sudah cukup jelas</i>		Tdkada	Disnaker	



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	RUMUS		Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5 - 6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	(5.317/13.492) x 100%	39,40%	DISDIK	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	(36.699/41.684) x 100%	88,04%	DISDIK	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	(14.500/20.354) x 100%	71,23%	DISDIK	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	(1.009/1.009) x 100%	100%	DISDIK	
		5	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budayayang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budayayang terdata}} \times 100\%$	(5/24) x 100%	20.83%	DISDIK	
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung rumah sakit	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di kabupaten/kota}}$	595 / 343.597	1,73 %	DISKES	



PEMKO DUMAI

		2	Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di kabupaten/kota}} \times 100\%$	(4/5) x 100	80 %	RSUD	
		3	persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota}} \times 100\%$	(8.688 / 9.590) x 100	90,59 %	DISKES	
		4	persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota}} \times 100\%$	(8.319 / 9.154) x 100	90,88 %	DISKES	
		5	persentasi bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir dikabupaten/kota}} \times 100\%$	(8.166 / 8.718) x 100	93,67%	DISKES	
		6	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita dikabupaten/kota}} \times 100\%$	(38.172 / 44.931) x 100	84,96 %	DISKES	
		7	persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar dikabupaten/kota}} \times 100\%$	(41.397 / 55.082) x 100	75,16%	DISKES	
		8	persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skining kesehatan	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun dikabupaten/kota}} \times 100\%$	(196.643 / 209.297) x 100	93,95%	DISKES	
		9	persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas dikabupaten/kota}} \times 100\%$	(14.382 / 15.356) x 100	93,66%	DISKES	
		10	persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}} \times 100\%$	(38.374 / 72.563) x 100	52,88 %	DISKES	



PEMKO DUMAI

				<i>Jumlah penderita hipertensi dikabupaten/kota x 100%</i>	100			
		11	persentase penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan	<i>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	$(3.736 / 3.819) \times 100$	97,83 %	DISKES	
				<i>Jumlah penderita DM dikabupaten/kota x 100%</i>				
		12	persentase ODGJ berat mendapatkkan pelayanan kesehatan jiwa	<i>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	$(531/ 498) \times 100$	106,63 %	DISKES	
				<i>Jumlah penderita ODGJ dikabupaten/kota x 100%</i>				
		13	persentase orang yang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan TBC	<i>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	$(14.344/ 8.208) \times 100$	174,76 %	DISKES	
				<i>Jumlah penderita TBC dikabupaten/kota x 100%</i>				
		14	persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV	<i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>	$(11.368/ 9.851) \times 100$	115,40%	DISKES	
				<i>Jumlah orang dengan resikot erinfeksi HIV dikabupaten/kota x 100%</i>				
3	PU dan PR	15	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	<i>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i>	$(1/1) \times 100\%$	100%	Dinas PUPR	Kota Tidak memiliki kewenangan atas WS
				<i>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) x 100</i>				
		16	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota	<i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)</i>	$(1/1) \times 100\%$	100%	Dinas PUPR	Kota Tidak memiliki kewenangan Pengamanan Pantai
				<i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha) x 10</i>				



		17	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	<p><i>Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha)</i></p> <p><i>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota x 100%</i></p>	$(1/1) \times 100\%$	100%	Dinas PUPR	
		10	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	<p><i>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota</i></p> <p><i>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut x 100%</i></p>	$(92.676/97.423) \times 100\%$	95.12%	Dinas PUPR	
		11	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	<p><i>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</i></p> <p><i>Jumlah rumah di Kabupaten Kota x 100%</i></p>	$(64.248/77.342) \times 100\%$	83.07%	Dinas Kesehatan	
		12	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	<p><i>Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya</i></p> <p><i>Jumlah IMB yang berlaku x 100%</i></p>	$(189/189) \times 100\%$	100%	Dinas PUPR	
		13	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	<p><i>Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap</i></p> <p><i>Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota x 100%</i></p>	$(636.129/1.198.243) \times 100\%$	53.08%	Dinas PUPR	
		14	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	<p><i>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</i></p> <p><i>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota</i></p>	$(0/0) \times 100\%$	0%	Dinas PUPR	
		15	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan	<p><i>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</i></p>	$(859/859) \times 100\%$	100%	Dinas PUPR	



PEMKO DUMAI

			konstruksi	<i>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</i> $\times 100\%$	100%			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14	Peyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	<i>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</i>	$\frac{0}{1}$	0	Dinas Perkim	Pada th 2023 tdk bencana alam dan relokasi
				<i>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n</i> $\times 100\%$				
		15	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi progam pemerintah kabupaten/kota	<i>Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</i>	$\frac{0}{1}$	0	Dinas Perkim	Pada th 2023 tdk bencana alam (uu no.24 th 2007) dan relokasi
				<i>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</i> $\times 100\%$				
		16	Persentasi kawasan kumuh 10 – 15 Ha di kab/kota yang ditangani	<i>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</i>	$\frac{(24.85}{41.53)} \times 100\%$	59.84%	Dinas Perkim	
				<i>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha</i> $\times 100\%$				
17	Berkurangnya jumlah unit RTLH	<i>Jumlah unit rumah tidak layak huni</i>	$\frac{(6.444}{48.888)} \times 100\%$	13,18%	Dinas Perkim			
		<i>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota</i> $\times 100\%$						
18	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	<i>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU</i>	$\frac{(0}{48.888)} \times 100\%$	0	Dinas Perkim			
		<i>Jumlah unit rumah kab/kota</i> $\times 100\%$						
5	Trantibum dan Linmas	18	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{(45}{45)} \times 100\%$	100%	Satpol PP	
		19	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada Pergub yang memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{(49}{49)} \times 100\%$	100%	Satpol PP	



PEMKO DUMAI

		20	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sudah jelas		3.056	BPBD	
		21	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sudah jelas		3.056	BPBD	
		22	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Sudah jelas		772	BPBD	
		23	Persentase jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<p><i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota x 100%</i></p>	$\frac{(42}{46}) \times 100\%$	91.30%	BPBD	
		24	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Sudah jelas		15 Menit	BPBD	
6	Sosial	23	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	<p><i>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i></p> <hr/> <p><i>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100%</i></p>	$\frac{2.283}{2.283} \times 100\%$	100%	DINAS SOSIAL	
		24	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap	<p><i>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</i></p>	$\frac{468}{468} \times 100\%$	100%	DINAS SOSIAL	



PEMKO DUMAI

			darurat bencana daerah kabupaten/kota	<i>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota</i> $\times 100\%$				
7	Tenaga Kerja	28	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	<i>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD</i>	(9/9) X 100%	100	Disnaker	
				<i>jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota</i> $\times 100\%$				
		29	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	<i>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</i>	(80 148.506) X 100%	0.054%	Disnaker	
				<i>Jumlah tenaga kerja keseluruhan</i> $\times 100\%$				
		30	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	<i>PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)</i>	(49.034,29 I 156.790) X 100%	31,27	Disnaker	
				<i>jumlah tenaga kerja</i> $\times 100\%$				
31	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	<i>Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</i>	(514/ 550) X 100%	93,45%	Disnaker			
		<i>Jumlah perusahaan</i> $\times 100\%$						
32	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme e layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan</i>	(765 1.832) X 100%	41,7%	Disnaker			
		<i>Jumlah pencaker yang terdaftar</i> $\times 100\%$						
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	<i>Jumlah ARG pada belanja langsung APBD</i>	243.003. 764.096 2.016.62 8.913.66 2	12,05 %	Badan PP & PA	
				<i>Jumlah seluruh belanja langsung di APBD</i> $\times 100\%$				
		35	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	<i>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi</i>	95 111.558	0,09 %	Badan PP & PA	
				<i>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)</i> $\times 100\%$				



PEMKO DUMAI

		36	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan} \times 100.000}$	$\frac{20}{109.398}$	18,28 %	Badan PP & PA	
9	Pangan	37	Mengukur persentase ketersediaan pangan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan} \times 100\%}$	$\frac{(7.786,59}{25.409,60)}{x100\%}$	30,64%	Dinas Pertanian	
10	Pertanahan	38	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100 \%$	$\frac{(7.692.858}{7.692.858)}{x100 \%$	100%	Dinas PUPR	
		39	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah utk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah utk pembangunan fasilitas umum}} \times 100 \%$	$\frac{(1/1)}{1} \times 100 \%$	100%	Dinas Perkimtan	
		40	persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanam modal	$\frac{\text{Luas tanah yg telah dimanfaatkan dgn peruntukannya diatas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100 \%$	$\frac{(7.692.858}{7.692.858)}{x100 \%$	100%	Dinas PUPR	
		41	Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dgn luasan yg diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100 \%$	$\frac{(1/1)}{1} \times 100 \%$	100%	Dinas Perkimtan	
		42	persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas tanah yg telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yg diterbitkan}} \times 100 \%$	$\frac{(0/0)}{1} \times 100 \%$	0%	Dinas Perkimtan	Kewenangan BPN
		43	persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yg ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100 \%$	$\frac{(0/0)}{1} \times 100 \%$	0%	Dinas Perkimtan	
		11	Lingkungan Hidup	41	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) IKA= Indeks Kualitas Air	- IKA = 45,56 - IKU = 89,69	65,12



PEMKO DUMAI

				IKD= Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	- ITH = 56,32			
		42	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Total Volume sampah yang dapat ditangani total volume timbunan sampah kabupaten/kota	$\frac{38.925,06}{60.559,34} \times 100\%$	64,27 %	LH	
		43	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	$\frac{11}{11} \times 100\%$	100 %	LH	
12	Adminduk dan Capil	43	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP Jumlah penduduk 17 tahun keatas	$\frac{(230.922)}{231.967} \times 100\%$	99,54%	Data Agregat Kependudukan	
		44	Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA Jumlah anak usia 0-17 tahun	$\frac{(56.678)}{109.088} \times 100\%$	51.96%	Data Agregat Kependudukan	
		45	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0 - 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir Jumlah anak usia 0-18 tahun	$\frac{(112.373)}{112.998} \times 100\%$	99.45%	Data Agregat Kependudukan	
		46	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Jumlah OPD	$\frac{(14)}{27} \times 100\%$	51.85%	Data Agregat Kependudukan	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab/Kota	45	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi criteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun 2022)	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100 %	Dinas Sosial & PM	Karena Kota Dumai tidak memiliki Desa



PEMKO DUMAI

		46	Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi criteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun 2023)}} \times 100\%$	1/1 x 100%	100 %	Dinas Sosial & PM	Karena Kota Dumai tidak memiliki Desa
14	Pengendalian Penduduk dan KB	47	TFR (Angka Kelahiran Total)		$\frac{2285}{1000}$	2.29	Dinas PPKB	
		48	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	$\frac{30.301}{45.899}$	66.02 %	Dinas PPKB	
		49	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	$\frac{5.977}{45.899}$	13.02%	Dinas PPKB	
15	Perhubungan	50	rasio konektivitas Kabupaten/Kota	<p><i>Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</i></p> <p><i>IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)</i></p> <p><i>IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)</i></p> <p><i>Keterangan:</i></p> <p><i>IK1 (Angkutan Jalan)</i> <i>Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP</i></p> <p><i>Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</i></p> <p><i>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</i></p>		0,8	Dinas Perhubungan	



				<p><i>Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</i></p> <p><i>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</i></p> <p><i>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</i></p> <p><i>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</i></p> <p><i>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</i></p> <p><i>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas:</i></p> <p><i>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</i></p> <p><i>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</i></p> <p><i>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</i></p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



PEMKO DUMAI

		51	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan kab/kota		0,30	Dinas Perhubungan	
16	Kominfotiksan	52	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah OPD	$\times 100\%$	$(37/37) \times 100\%$	100%	Dinas Kominfotiksan
		53	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah Layanan Publik	$\times 100\%$	$(15/15) \times 100\%$	100%	Dinas Kominfotiksan
		54	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi Jumlah penduduk	$\times 100\%$	$(220.039/316.782) \times 100\%$	69,46%	Dinas Kominfotiksan
17	Koperasi dan UKM	55	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset Jumlah seluruh koperasi	$\times 100\%$	$(68/310) \times 100\%$	21,94 %	KOPEARSI & UKM
		56	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha Jumlah usaha kecil keseluruhan	$\times 100\%$	$(2.495/11.274) \times 100\%$	22.13 %	KOPEARSI & UKM
18	Penanaman Modal	57	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	(Jumlah Investasi Tahun n - jumlah investasi tahun n - 1) di kab/kota Jumlah investasi tahun n-1 kab/kota	$\times 100\%$	$(3.386.920/2.760.000) \times 100\%$	-74%	Dinas PMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	58	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	$\times 100\%$	$72/109.588$	0,065 %	DISKOPAR



PEMKO DUMAI

		59	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	<i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten / kota</i> <i>jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten / kota</i>	$\frac{550}{109.588} \times 100\%$	0,50 %	DISKOPAR	
		60	Peningkatan prestasi olahraga	<i>Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional (tahun 2023 - tahun 2022)</i> <i>Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional pada tahun 2022</i>	$\frac{(2-1)}{1} \times 100\%$	100%	DISKOPAR	
20	Statistik	61	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah jumlah OPD	$\frac{37}{37} \times 100\%$	100%	Dinas Kominfortiksan	
		62	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	<i>Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</i> <i>jumlah OPD</i>	$\frac{37}{37} \times 100\%$	100%	Dinas Kominfortiksan	
21	Persandian	63	Tingkat keamanan informasi pemerintah	<i>Jumlah nilai per area keamanan informasi</i> <i>Jumlah area penilaian</i>	$\frac{310}{645} \times 100\%$	48,06%	Dinas Kominfortiksan	
22	Kebudayaan	64	Terlestarikannya Cagar Budaya	<i>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</i> <i>Jumlah cagar budaya yang ditetapkan</i>	$\frac{5}{24} \times 100\%$	20,83%	Disdik	
23	Perpustakaan	65	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	<i>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat</i>		68,42	Dinas Perpustakaan	
		66	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<i>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</i>		68,42	Dinas Perpustakaan	



PEMKO DUMAI

				<p><i>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan</i> <i>UPLM 2 = Ketercukupan koleksi</i> <i>UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan</i> <i>UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan</i> <i>UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP</i> <i>UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan</i> <i>UPLM 7 = Anggota perpustakaan</i></p>				
24	Kearsipan	67	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)Ps40 dan 59 U 43/2009)	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	(100+100+0+33,03)/4	58,26	Dinas Perpustakaan	
		68	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekar daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	(100+0+0+100+0+0)/6	33,33	Dinas Perpustakaan	
25	Kelautan Perikanan	69	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produk Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota Target Produksi Ikan (sumber data: one data KKP)	1.401.505/1.050.000	133,48%	Dinas Perikanan	



PEMKO DUMAI

26	Pariwisata	71	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun 2023} - \text{Jumlah wisatawan tahun 2022}}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2022}}$	$\frac{6.031 - 5.113}{5.113}$	17.95 %	DISKOPAR	
		72	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten / kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun 2023} - \text{Jumlah wisatawan tahun 2022}}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2022}}$	$\frac{78.481 - 123.541}{123.541}$	-36.47%	DISKOPAR	
		73	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}}$	$\frac{84.512}{1.168}$	7.235.6 %	DISKOPAR	
		74	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sector pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}}$	$\frac{25.569.796.203}{5.086.180.625}$	169.5 %	DISKOPAR	
		75	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{\text{Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD}}{\text{PAD}}$	$\frac{25.569.796.203}{96.203}$	25.569.796.203	DISKOPAR	
27	Pertanian	75	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$	$\frac{7.679,14}{1.536,70}$	500%	Dinas Pertanian	
		76	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan } (t) - \text{jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya } (t-1)} \times 100\%$	$\frac{(9-10)}{10} \times 100\%$	-10%	Dinas Pertanian	
30	Perdagangan	82	Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{6921}{7291}$	94,93%	Dinas Perdagangan	
		83	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi RDKK}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	$\frac{568,55}{1.940,67}$	29.30%	Dinas KP & Pertanian	
		84	Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota}}$	$\frac{1073}{1765}$	60,79%	Dinas Perdagangan	
31	Perindustrian	89	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	$\frac{\text{Jumlah Industri kecil dan menengah tahun } n - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1} \times 100\%$	$\frac{469 - 432}{432} \times 100\%$	8,56 %	Dinas Koperasi dan UKM	



PEMKO DUMAI

		90	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indicator pembangunan industry dalam RPIK maka nilai masing-masing Bobot indicator adalah $(100/N)\%$ Untuk masing-masing penilaian indicator adalah persentase capaian indicator dibagi target dikali $(100/N)\%$ Nilai akhir adalah akumulasi dari N indicator tersebut	0	0 %	Dinas Koperasi dan UKM	
		91	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	<i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i> <i>Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%</i>	$(12/39) \times 100 \%$	30,77 %	Dinas Koperasi dan UKM	
		92	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPUI) bagi Industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	<i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i> <i>Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%</i>	$(0/39) \times 100 \%$	0 %	Dinas Koperasi dan UKM	
		93	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i> <i>Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%</i>	$(0/39) \times 100 \%$	0 %	Dinas Koperasi dan UKM	
		94	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industry dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) -tersedianya informasi industry dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industry meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)		50%	Dinas Koperasi dan UKM	



2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	RUMUS	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket	
1	2	3	4		5	6	7	
1	Perencanaan dan Keuangan	95	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}}$	$\frac{(247.527.831.453}{1.947.054.859.802,66)} \times 100$	12,71%	BPKAD	
		96	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD}}$	$\frac{(566.032.694.369}{1.910.196.168.052)} \times 100$	29,63%	BPKAD	
		97	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}}$	$\frac{(1.377.134.227.355,1-}{1947.054.859.802,7.}$	70,73%	BPKAD	
		98	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP 7 Kali	BPKAD	
		99	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		Level 3	INSPEKTOR AT	
		100	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		Level 3	INSPEKTOR AT	
2	Pengadaan	101	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2022}}$	$\frac{0}{204} \times 100\%$	0	Bag. PBJ	
		102	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}}$	$\frac{222}{1.916}$	11,59%	Bag. PBJ	



PEMKO DUMAI

		103	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan Total belanja langsung	<u>175.067.459.075</u> 249.839.825.893.68	70,07%	Bag. PBJ	
		104	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah nilai pbj yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n) – jumlah nilai pbj yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n-1) jumlah nilai pbj yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n-1)	<u>(100.564.338.445,15)</u> 5.964.422.274	1.686%		
3	Kepegawaian	104	Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah PNS yang berpendidikan PT keatas Jumlah PNS yang berpendidikan menengah/dasar	<u>1.443</u> 1.867	77.29	BKPSDM	
		105	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<u>357</u> 1.867	19.12	BKPSDM	
		106	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi Seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<u>75</u> 1.510	4.97	BKPSDM	
4	Manajemen Keuangan	107	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolute dari Total belanja dalam realisasi Total belanja APBD	<u>(1.947.054.859.802,66)</u> 1.507.041.615.158,67)x100	29,19%	BPKAD	



PEMKO DUMAI

		108	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{\text{Nilai absolute dari Total PAD dalam realisasi}}{\text{Dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu}} \times 100$	$\frac{(566.032.694.369 - 464.003.743.318,86)}{43.318,86} \times 100$	21,99%	BPKAD	
		109	Assets management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);		Ya	BPKAD	
		110	Rasio anggaran SiLPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja dalam APBD tahun sebelumnya}} \times 100$	$\frac{25.561.507.293,67}{1.507.041.615.158,67} \times 100$	1,70%	BPKAD	
5	Transparansi	111	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses website pemda}} \times 100$	$\frac{(13.516.553.021 - 13.754.940.358)}{13.754.940.358} \times 100$	98,26%	Dinas Kominfotiksan	
		112	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda}}{\text{total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100$	$\frac{11}{12} \times 100\%$	91,67%	BPKAD	

2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2023 berpedoman pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Dumai tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel TC.17 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Capaian Kinerja terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Dumai dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD menurut target dan realisasi serta kategori capaian kinerja IKU Kota Dumai tahun 2022 tertuang dalam Tabel 3.1. Sedangkan penjelasan masing-masing capaian kinerja indikator sasaran sesuai dengan IKU menurut capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dan capaian kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD di jelaskan pada masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh Badan, Dinas dan PD lainnya di Kota Dumai tahun 2022.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Sebagaimana disampaikan pada Bab terdahulu bahwa visi dan misi Kota Dumai tertuang pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 73 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026, yaitu ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”***.

Adapun keterkaitan visi dan misi tersebut dapat disampaikan sebagaimana tabel tersebut dibawah ini :

Tabel 18

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020						Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu											
Misi1	Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri										
	Tujuan	Mewujudkan Perekonomian Yang Mandiri Dan Masyarakat Yang Sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,05	3,54	4,36	4,7	4,8	5,04	5,04
	Sasaran	Meningkatnya Perekonomian Dan Daya Saing Daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	24,6	26,29	27,44	28,73	30,11	31,63	31,63
			Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	36,32	38,9	41,52	43,52	46,61	48,93	48,93
			PDRB Perkapita ADHK	Rp. Juta	77,64	80,98	83,48	86,34	89,37	92,73	92,73
			PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	114,66	119,809	126,301	130,794	138,351	143,466	143,466
	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,19	7,79	7,54	7,29	7,04	6,79	6,79



			Tingkat Kemiskinan	%	3,16	3,51	3,49	3,47	3,45	3,43	3,43
Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020						Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
	Sasaran	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harap	Skor	82,91	83,75	84,58	85,41	86,24	87,07	87,07
			Ketersediaan Pangan Utama	%	32,78	36,03	37,7	39,37	41,03	42,7	42,7
Misi2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu										
	Tujuan	Membangun Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saing Dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,4	74,826	75,04	75,254	75,468	75,683	75,683
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,784	0,785	0,786	0,786	0,787	0,788	0,788
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,7	0,706	0,709	0,712	0,715	0,718	0,718
	Sasaran	Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,751	0,756	0,759	0,762	0,764	0,767	0,767
	Sasaran	Meningkatnya penerapan budaya melayu	Persentase penerapan 4 Jenis Budaya melayu	Persentase	25	50	50	75	75	100	100
Misi3	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas										
	Tujuan	Mewujudkan Infrastruktural Dan Ruang Kota Dumai Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	39,27	52,46	59,26	64,41	69,3	74,21	74,21



PEMKO DUMAI

	Sasaran	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	%	32,71	60,77	66,33	71,18	75,51	80,01	80,01
	Sasaran	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah Yang Konsisten	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai	%	10	20	30	45	60	75	75
Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020						Kondisi Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026		
			Dengan Aturan								
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Indeks	61	69,97	70,19	70,41	70,41	70,41	70,41
			Cakupan pelayanan persampahan	%	51	57	63	69	75	81	81
			Penurunan Emisi gas rumah kaca	GgCO2-e	N/A	7.195,43	7.194,06	6.826,22	6.758,14	6.573,53	6.573,53
			Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	%	60	75	80	85	90	95	95
Misi 4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik										
	Tujuan	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	CC	B	B	B	B	B



	Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun,	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B
Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020						Kondisi Akhir	
					2022	2023	2024	2025	2026		
			Daerah								
			Indeks Manajemen Resiko	Indeks	2	2	3	3	3	3	3
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	81	81	82	82	82	82
			Indeks Layanan SPBE	Indeks	2,25	2,83	2,85	2,9	2,96	3	3



Tabel 19
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023

Urusan	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	99,28
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	78,38
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	92,78
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	66,66
		5	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	37,46
		6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD	%	96,55
		7	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP	%	92,55
		8	Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SD	%	53,55
		9	Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SMP	%	51,55
	Terwujudnya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan wewenang Kota	1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	%	28,91
		2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	%	31
	Terpenuhinya lulusan yang memiliki kompetensi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar	1	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Sikap	%	100
		2	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Pengetahuan	%	100
		3	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Ketrampilan	%	100
	Kebudayaan	Terlestarikannya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	1	Persentase penerapan unsur kebudayaan melayu pada fasilitas umum/ruang publik	%
2			Persentase Penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	95
3			Persentase Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	%	90
4			Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan	%	85
5			Persentase pelaksanaan pembangunan museum	%	100
6			Persentase Penetapan Objek Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	%	50



Urusan	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1.	indeks kesehatan	Indeks	0,788-0,789
		1.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	71,31
		1.2	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	17
		1.3	Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	24
		1.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101
		2.	Umur Harapan Hidup	tahun	71,31
		2.1	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	Per 1.000 penduduk	0,8
		2.2	Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88
		2.3	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	1
		2.4	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	55
		3.	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1
		3.1	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	3
		3.2	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	97
		Kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	1	BOR , Prosentase Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD
2	AVLOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai			hari	4,2
3	TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai			hari	2
4	BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur			kali	44
5	NDR , Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit			o/oo	22



Urusan	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
Pekerjaan Umum	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1	Persentase penduduk berakses air	%	53,72 %
	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100 %
	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	3	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	%	66,27%
	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	4	Persentase kemantapan jalan	%	54,12%
	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	5	Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun	Ha	39,92%
	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	6	Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah	%	100%
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	7	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya	%	7,75%
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman		Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	69,98
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	39,96
	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	2	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	%	100
	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan permukiman		Persentase Peningkatan PSU	%	48,23
	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	1	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	48,2
	Meningkatkan Pelayanan Pertanahan		Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	40
	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	1	Penyelesaian Kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	%	40
Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan	1	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	%	100



Urusan	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
Perlindungan Masyarakat	Perlindungan Masyarakat	2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan).	%	100
		3	Persentase Penegakan Peraturan Daerah.	%	100
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Wilayah Manajemen Kebakaran	1	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah Yang Ditangani	%	80
		2	Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	%	78,21
		3	Response Time Rate Kejadian Bencana	%	100
		4	Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	%	56,42
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	1	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024	%	90
		2	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	%	95
Sosial	Meningkatnya kesejahteraan sosial	1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (INDIKATOR SPM)	%	100
	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	2	Persentase Pengentasan Desa/Kelurahan Tertinggal	%	42
		3	Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi/Aktif	%	100
	Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana	4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	%	100
Tenaga Kerja	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	15%
		2	Persentase penempatan tenaga kerja	%	10%
	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	1	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	%	30
		1	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	%	100%



Urusan	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan	1	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standart	%	95
		2	Skor Pencapaian Kota Layak Anak	Skor	750
		3	Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Skor	810
Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	1	indeks kualitas air	Indeks	53,3
		2	Indeks kualitas udara	Indeks	71
		3	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	61
		4	Persentase sampah yang tertangani	%	65,7
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	1.1	Persentase Jenis Data Kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	%	100
	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	2.1	Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	%	69
	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi dan Pencatatan Sipil	Indeks	88
	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	4.1	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	73
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangsa Kencana	1.1	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	%	46,6
		2.1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	%	19,93
Perhubungan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana serta Keselamatan Perhubungan	1.1	Persentase Prasarana Transportasi	%	56%
		1.2	Persentase Kepemilikan Kir	%	61%



Urusan	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
			Angkutan Umum dan Barang		
		1.3	Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	60%
		4	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Km/unit	1.198,23 km : 90.081 unit
Komunikasi Dan Informatika	Terwujudnya Pengelolaan Dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah Yang Baik	1	Indeks Layanan SPBE	Indeks	2,85
		2	akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	Akses	94
		3	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media	%	88
		4	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	75
		5	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	%	75
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Anggota Koperasi Dan UKM	1	Persentase Koperasi Yang Aktif	%	70,58
		2	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	45
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Sebagai Sektor Unggulan Dalam Mendukung Perekonomian Daerah	1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	63,9
		2	Persentase Cakupan Kelompok Pengrajin	%	13
Penanaman Modal	Meningkatnya investor di Kota Dumai	1.1	Jumlah Investor baru Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	1
	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	1.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	9.450.000.000.000
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	2.1	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	81
Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	1.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	60
		1.2	Presentase Wirausaha Muda	%	70
	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	2.1	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	25
		2.2	Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang	3
	Kunjungan Wisata Ke Kota Dumai	3.1	Kunjungan wisata	%	39.718
		3.2	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2
		3.3	PAD Sektor Pariwisata	Rp	15.086.180.625



Urusan	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
Statistik	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	1.1	Indeks Perencanaan	%	84
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	2.1	Indeks Perencanaan	%	85
	Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	2.2	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	%	100
		2.3	Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	%	100
		2.4	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	%	100
		2.5	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan	%	100
	Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.1	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	%	25
Perpustakaan	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kota Dumai	1.1	Persentase perpustakaan yang sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	%	40
		1.2	Persentase naskah kuno yang diakuisisi / dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai	%	40
Kearsipan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1	Persentase OPD/ Instansi Pemerintah/ perusahaan/ organisasi social/ politik/ ormas/ perseoranganyang melaksanakan penyelenggaraan kearsipan secara NSPK	%	38
		2.2	Indeks Pengawasan Kearsipan terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	poin	75
Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	1.1	Produksi Perikanan Tangkap	ton	742
		1.2	Produksi Perikanan Budidaya	ton	308
		1.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	kelompok	20
		1.4	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya	kelompok	34
	Pencapaian target nilai	2.1	Angka konsumsi ikan	kg/kapita	42



Urusan	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
	konsumsi ikan			/ tahun	
Pangan	Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina dan Diberi Bantuan	2.1	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok	170
	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.1	Produksi Komoditi Pertanian	Ton	85.750
	Menurunnya Kasus Hewan Menular	3.2	Produksi Komoditi Perkebunan	Ton	21.500
		3.3	Populasi Ternak	ternak	6.800
		3.4	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lainnya	ton / Ha	3,6
		3.5	Jumlah Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian	Unit	14
		4.1	Jumlah Kasus Hewan Menular	Kasus	11
	4.2	Jumlah Kasus Cemaran Pangan Asal Hewan (PAH)	Kasus	6	
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat		Angka Kecukupan Protein	Gr/Kap /Hari	52,75
Perdagangan	Meningkatkannya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	1.1	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	14,73 %
		1.2	Ekspor bersih perdagangan	Milyar	6339,03 Milyar
		1.3	Cakupan Pembinaan pedagang usaha informal	%	20,43 %
		1.4	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	Kelompok	72,07 %
		1.5	Capaian Pelayanan, pengawasan dan penyuluhan tera/tera ulang kemetrolgian	%	10,00 %
		1.6	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	%	100 %
	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	2.1	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	Kecamatan	7
Transmigrasi	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	1.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	15
		1.2	Persentase penempatan tenaga kerja	%	10
	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	2.1	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	%	30
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	3.1	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	%	100



Urusan	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
			Kabupaten/Kota		
Statistik	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	1.1	Indeks Perencanaan	%	84
	Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	2.1	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	%	100
		2.2	Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	%	100
		2.3	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	%	100
		2.4	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan	%	100
	3.1	Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	%	20
Keuangan	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	1.1	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	52
Keuangan	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	1.1	Persentase SILPA	%	13,70
		1.2	Opini BPK	Hasil Opini	WTP
Kepegawaian	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur	1.1	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	100
		1.2	Persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator dan fungsional sesuai dengan peta jabatan	%	84
		1.3	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin	%	93.5
		1.4	Persentase pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan	%	5
Pendukung	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	1.1	Terlaksananya Kerja Sama antar Daerah	Naskah Kerja sama	2



Urusan	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
		1.2	Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	Naskah Kerja sama	6
		1.3	Terlaksananya Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	Naskah Kerja sama	1
	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/ BUMD	2.1	Tercapainya Pembinaan BUMD	BUMD	3
	Meningkatnya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi	3.1	Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	Mahasiswa	30
	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	4.1	Jumlah Kerja Sama Dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	Naskah Mahasiswa	6
	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	4.1	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Perangkat Daerah	29.2
	Meningkatnya Penataan Organisasi	5.1	Jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan	Perangkat Daerah	30
Pendukung	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	1	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	95
		2	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD satuan RKT	Ada	Ada
		3	Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada	Ada
		4	Terintegrasinya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada
Pengawasan	Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	1.1	Level Maturitas SPIP	Level	3
		1.2	Level Kapabilitas APIP	Level	3
		1.3	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A



Urusan	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
		1.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	%	95
		1.5	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	%	95
		1.6	Persentase Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	%	100
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	%
Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Dumai Barat	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87%
		1.2	Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibun	%	100
		1.3	Persentase pelaksanaan kewenangan kepada camat.	%	100
Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Dumai Timur	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87
		1.2	Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibun	%	100
		1.3	Persentase pelaksanaan kewenangan kepada camat.	%	100
Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Bukit Kapur	1.1	Indeks Kepuasan masyarakat	Person	87
		1.2	Persentase Pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan Trantibum	Person	100
		1.3	Persentase Pelaksanaan Kewenangan kepada camat	Person	100
Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Dumai Selatan	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87
		1.2	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		1.3	Persentase pelaksanaan kewenangan kepada camat	%	100
Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Medang Kampai	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87
		2	Persentasi pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum	%	100



Urusan	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
		3	Persentase pelaksanaan kewenangan pelimpahan kepada Camat	%	100
Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87
		1.2	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		1.3	Persentase Pelaksanaan Kewenangan Pelimpahan Kepada Camat	%	100
Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,87
		2	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	Persen	100
		3	Persentase Pelaksanaan Kewenangan Pelimpahan Kepada Camat	Persen	100

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2023 berpedoman pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Dumai tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel TC.17 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 20

Skala Penilaian Kinerja Kota Dumai Tahun 2023

No	Interval Kinerja Tahun 2022	Kriteria Kinerja Tahun 2022	Kode
1	91 ≤	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	



Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Metode ini bermanfaat untuk memberikan Grafikan kepada pihak- pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, sangat disadari bahwa kedua metode yang digunakan tersebut membutuhkan perumusan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi hasil.

Capaian Kinerja Urusan Wajib Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Urusan:

- 1) Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 5) Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 6) Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 7) Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

1.1.1.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.1.1.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis/Kinerja Utama dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 21
Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	93,10	95,70	99,28	95,81	96,50	berhasil
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	83,07	108,76	78,38	84,50	107,81	sangat berhasil
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	90,94	100,18	92,78	88,04	94,89	sangat berhasil
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	72,14	111,57	66,66	71,24	106,87	berhasil
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	32,27	91,00	37,46	43,97	117,38	sangat berhasil
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD	97,96	101,46	96,55	92,78	96,10	sangat berhasil



		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP	99,55	107,56	92,55	96,04	103,77	sangat berhasil
		Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SD	47,74	89,15	53,55	48,03	89,69	sangat berhasil
		Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SMP	47,79	92,71	51,55	49,68	96,37	sangat berhasil
2	Terwujudnya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan wewenang kota	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	27,13	81,74	28,91	28,79	99,58	sangat berhasil
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	29,94	85,49	31	30,95	99,84	sangat berhasil
3	Terpenuhinya lulusan yang memiliki kompetensi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Sikap	100	100	100	100	100	sangat berhasil
		Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Pengetahuan	100	100	100	100	100	sangat berhasil
		Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Keterampilan	100	100	100	100	100	sangat berhasil
4	Terlestarikannya keanekaragaman budaya dan kearifan local	Persentase penerapan unsur kebudayaan Melayu pada fasilitas umum/ruang public	0	0	85	50	58,82	cukup berhasil
		Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya	50	58,82	95	95	100	sangat berhasil
		Persentase sanggar seni dan budaya yang dibina	80	84,21	90	90	100	sangat berhasil
		Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan	0	0	85	0	0	tidak berhasil
		Persentase pelaksanaan pembangunan museum	0	0	100	0	0	tidak berhasil
		Persentase penetapan objek Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	0	0	50	50	100	sangat berhasil

1.1.1.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 22
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	97,28	99,28	93,10	95,81	95,70	96,50
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	76,38	78,38	83,07	84,50	108,76	107,81
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	90,78	92,78	90,94	88,04	100,18	94,89



		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	64,66	66,66	72,14	71,24	111,57	106,87
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	35,46	37,46	32,27	43,97	91,00	117,38
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD	96,55	96,55	97,96	92,78	101,46	96,10
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP	92,55	92,55	99,55	96,04	107,56	103,77
		Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SD	53,55	53,55	47,74	48,03	89,15	89,69
		Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SMP	51,55	51,55	47,79	49,68	92,71	96,37
2.	Terwujudnya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan wewenang kota	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	33,19	28,91	27,13	28,79	81,74	99,58
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	35,02	31	29,94	30,95	85,49	99,84
3.	Terpenuhinya lulusan yang memiliki kompetensi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Sikap	100	100	100	100	100	100
		Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Pengetahuan	100	100	100	100	100	100
		Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Keterampilan	100	100	100	100	100	100
4.	Terlestarikannya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	Persentase penerapan unsur kebudayaan Melayu pada fasilitas umum/ruang publik	80	85	0	50	0	58,82
		Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya	95	95	50	95	58,82	100
		Persentase sanggar seni dan budaya yang dibina	85	90	80	90	84,21	100
		Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan	80	85	0	0	0	0
		Persentase pelaksanaan pembangunan museum	25	100	0	0	0	0
		Persentase penetapan objek Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	50	50	0	50	0	100

1.1.1.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021–2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 23
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	105,28	95,81	91,00
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	84,38	84,50	100,14
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,78	88,04	89,13
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	72,66	71,24	98,05
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	43,46	43,97	101,17
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD	98,55	92,78	94,15
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP	93,55	96,04	102,66
		Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SD	57,55	48,03	83,46
		Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SMP	55,55	49,68	89,43
		2	Terwujudnya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan wewenang kota	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	37,19
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	36,02			30,95	85,92
3	Terpenuhinya lulusan yang memiliki kompetensi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Sikap	100	100	100
		Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Pengetahuan	100	100	100
		Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Keterampilan	100	100	100
4	Terlestarikannya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	Persentase penerapan unsur kebudayaan Melayu pada fasilitas umum/ruang publik	95	50	52,63
		Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya	95	95	100
		Persentase sanggar seni dan budaya yang dibina	95	90	94,74
		Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan	100	0	0
		Persentase pelaksanaan pembangunan museum	100	0	0
		Persentase penetapan objek Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	50	50	100

**1.1.1.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 311/M/2022 Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, terdapat 15 (lima belas) Indikator Kinerja Urusan Kabupaten/Kota. Realisasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kota Dumai tahun 2023 dibandingkan dengan target dan realisasi Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24
Perbandingan Realisasi SPM Kota Dumai dengan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja Urusan Kab/Kota	Realisasi	Target Nasional Tahun 2023	Realisasi Nasional
1	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun (PAUD)	50,91	100	75,17
2	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun (Pendidikan Dasar)	98,20	100	98,18
3	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-18 Tahun (Kesetaraan)	27,97	100	20,75
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	61,78	53,94	58,09
5	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	46,25	40,27	46,39
6	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	72,12	63,12	66,60
7	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	62,96	54,80	60,20
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	49,18	62,10	62,12
9	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	66,19	63,00	61,21
10	Indeks Iklim Keamanan SD	73,33	85,07	72,65
11	Indeks Iklim Kebinekaan SD	73,17	87,26	72,74
12	Indeks Inklusivitas SD	55,26	76,38	55,45
13	Indeks Iklim Keamanan SMP	71,36	80,21	68,97
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	74,85	77,33	72,53
15	Indeks Inklusivitas SMP	59,38	76,36	56,37

1.1.1.1.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 431.645.823.163 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) bersumber dari APBD, DAU, DAK dan BANKEU. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 384.380.876.419 (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 47.264.946.744 (Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 409.930.810.833,03 (Empat Ratus Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 363.593.213.174,83 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Belajar Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 46.337.597.658,20 (Empat Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)



Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 25
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	137.566.953.347	134.940.264.087	98,09	
2	Terwujudnya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan wewenang kota					
3	Terpenuhinya lulusan yang memiliki kompetensi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar					
4	Terlestarikannya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	4.046.881.637	3.910.906.201	96,64	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	49.930.727	15.013.880	30,07	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	289.962.757.452	271.064.626.665	93,48	

1.1.1.1.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 26
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PENDIDIKAN							
TUJUAN:							
– Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan	– Angka partisipasi sekolah 7-12 tahun	99,14	98,86	99,72			
	– Angka partisipasi sekolah 13-15 tahun	95,53	93,97	98,37			
– Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	– Pemenuhan SNP sarana dan prasarana	90	89,74	87,78			
– Meningkatkan angka kelulusan pendidikan dasar	– Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100			
	– Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100			
SASARAN:							
– Meningkatkan	– Angka Partisipasi	99,28	95,81	96,50			



a partisipasi pendidikan	Kasar (APK) SD/MI/Paket A						
	– Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	78,38	84,50	107,81			
	– Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	92,78	88,04	94,89			
	– Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	66,66	71,24	106,87			
	– Angka Partisipasi Kasar PAUD	37,46	43,97	117,38			
	– Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD	96,55	92,78	96,10			
	– Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP	92,55	96,04	103,77			
	– Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SD	53,55	48,03	89,69			
	– Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SMP	51,55	49,68	96,37			
– Terwujudnya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan wewenang kota	– Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	28,91	28,79	99,58			
	– Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	31	30,95	99,84			
– Terpenuhinya lulusan yang memiliki kompetensi penjaminan mutu pendidikan dasar	– Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Sikap	100	100	100			
	– Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Pengetahuan	100	100	100			
	– Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Keterampilan	100	100	100			
PROGRAM: – Program Pengelolaan Pendidikan	– Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	100	84.65	84.65	137.56 6.953.3 47	134.940.264. 087	98,09%
URUSAN KEBUDAYAAN							
TUJUAN: – Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian, pengelolaan dan pengembangan nilai-nilai budaya Melayu	– Persentase objek cagar budaya yang ditetapkan	80	37,03	46,29			
	– Persentase partisipasi dan penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta permainan rakyat	95	95	100			
	– Persentase penerapan unsur kebudayaan di setiap fasilitas umum dan ruang publik	80	50	58,82			
SASARAN: – Terlestarikannya keanekaragaman budaya	– Persentase penerapan unsur kebudayaan melayu pada fasilitas	85	50	58,82			



dan kearifan lokal	umum/ruang publik						
	– Persentase Penyelenggaraan festival seni dan budaya	95	95	100			
	– Persentase Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	90	90	100			
	– Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan	85	0	0			
	– Persentase pelaksanaan pembangunan museum	100	0	0			
	– Persentase Penetapan Objek Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	50	50	100			
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	95	95	100	4.046.881.637	3.910.906.201	96,64%
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan Melalui Peraturan Kepala Daerah	80	37,03	46,29	49.930.727	15.013.880	30,07%
URUSAN PENUNJANG SKPD							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	100	100	100	289.982.057.452	271.064.626.665	93,48%

1.1.1.1.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	96,50	98,09	0,98	Kurang
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	107,81	98,09	1,10	Efisien
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,89	98,09	0,97	Kurang
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	106,87	98,09	1,09	Efisien
5	Angka Partisipasi Kasar PAUD	117,38	98,09	1,20	Efisien
6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD	96,10	98,09	0,98	Kurang
7	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP	103,77	98,09	1,06	Efisien
8	Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SD	89,69	98,09	0,91	Kurang
9	Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SMP	96,37	98,09	0,98	Kurang
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	99,58	98,09	1,02	Efisien
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	99,84	98,09	1,02	Efisien
12	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Sikap	100	98,09	1,02	Efisien
13	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Pengetahuan	100	98,09	1,02	Efisien



14	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi Keterampilan	100	98,09	1,02	Efisien
15	Persentase penerapan unsur kebudayaan melayu pada fasilitas umum/ruang publik	50	96,64	0,52	Kurang
16	Persentase Penyelenggaraan festival seni dan budaya	95	96,64	0,98	Kurang
17	Persentase Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	90	96,64	0,93	Kurang
18	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan	0	30,07	0	Kurang
19	Persentase pelaksanaan pembangunan museum	0	0		Kurang
20	Persentase Penetapan Objek Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	50	30,07	1,66	Efisien

1.1.1.1.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 28
Prestasi dan Penghargaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Piagam	Adoption Rate Rapor Pendidikan dan Satuan Pendidikan (Login, Eksplorasi dan Unduh)	Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (Provinsi Riau)
2	Piagam	Jumlah Satuan Pendidikan yang telah membentuk TPPK	Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (Provinsi Riau)
3	Piagam	Dukungan Pemda Terhadap Program Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan	Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (Provinsi Riau)
4	Piagam	Pemanfaatan PMM oleh Guru Pelaksana IKM	Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (Provinsi Riau)
5	Piagam	Pemerintah Daerah yang memiliki Regulasi (Perda/Pergup/Perwako/Perbup) terkait Kebijakan Merdeka Belajar	Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (Provinsi Riau)
6	Piagam	Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kategori Madya	Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (Provinsi Riau)
7	Piagam	Terbaik 3 Atas Komitmen Kemitraan Dalam Pelaksanaan Akreditasi dan Pemenuhan Kuota	Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Balai



		Sekolah/Madrasah Tahun 2023		Penjaminan Mutu Pendidikan (Provinsi Riau)
8	Sertifikat	Penetapan "Layang Kuau Raja Tebuk Isi" sebagai Warisan Budaya Tak Benda	Nasional	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

1.1.1.2 Dinas Kesehatan

1.1.1.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Untuk pengukuran tingkat capaian kinerja IKU Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran IKU menggunakan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana dimuat pada tabel berikut ini:

Tabel 29
Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian Kinerja	Kategori Nilai	
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100	99.45	99.45	Sangat Tinggi
		1.1	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	17	11.36	100	Sangat Tinggi
		1.2	Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	24	13.42	100	Sangat Tinggi
		1.3	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101	103.23	97.79	Sangat Tinggi
		1.4	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,29-71.33	71.67	100	Sangat Tinggi
		2	Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100	30.44	30.44	Sangat Rendah
		2.1	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.8	0.01	100	Sangat Tinggi
		2.2	Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	72	81.82	Tinggi
		2.3	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	0.18	100	Sangat Tinggi
		2.4	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55	198.03	-160.06	Sangat Rendah



		3	Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		3.1	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1	0.07	100	Sangat Tinggi
		3.2	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	3	1.10	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	97	100.02	100	Sangat Tinggi

1.1.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Tabel 30
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

No	Sasaran Strategis	Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
				2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	17,5	17	9,96	11,36	100	100
		Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	24,5	24	11,13	13,42	100	100
		Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101,5	101	58,56	103,23	100	97,79
		Umur Harapan Hidup	Tahun	71,10	71.29-71,33	71,25	71,67	100	100
		Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.9	0.8	0,2	0,01	100	100
		Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	88	41,42	72,00	47,07	81,82
		Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	< 1	0,16	0,18	100	100
		Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55	55	56,64	198,03	97,02	- 160,06
		Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1	1	0,12	0,07	100	100
		Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	3	3	0,69	1,10	100	100



2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	92,20	97	95,80	100,02	100	100
---	--	--	---	-------	----	-------	--------	-----	-----

1.1.1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Tabel 31
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	7.8 per 1.000 KH	11.36 per 1.000 KH	54.36%
		Angka Kematian Balita per 1.000 KH	10 per 1.000 KH	13.42 per 1.000 KH	65.80%
		Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	100 per 100.000 KH	103.23 per 100.000 KH	96.77%
		Umur Harapan Hidup	71.42-71.46 tahun	71.67 tahun	100%
		Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	0.1 per 1.000 penduduk	0.01 per 1.000 penduduk	100%
		Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	88.00%	72.00%	81.82%
		Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	< 1%	0.18%	100%
		Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	54 per 100.000 penduduk	198.03 per 100.000 penduduk	-166.72%
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	1.00%	0.07%	100%
		Persentase Balita dengan Gizi Kurang	2.00%	1.10%	100%
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	100.00%	100.02%	100%

1.1.1.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

No.	Indikator Kinerja Urusan Kab/Kota	Realisasi	Target Nasional Tahun 2023	Realisasi Nasional
1	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun (PAUD)	50,91	100	75,17
2	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun (Pendidikan Dasar)	98,20	100	98,18
3	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-18 Tahun (Kesetaraan)	27,97	100	20,75
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	61,78	53,94	58,09
5	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	46,25	40,27	46,39
6	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	72,12	63,12	66,60



7	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	62,96	54,80	60,20
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	49,18	62,10	62,12
9	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	66,19	63,00	61,21
10	Indeks Iklim Keamanan SD	73,33	85,07	72,65
11	Indeks Iklim Kebinekaan SD	73,17	87,26	72,74
12	Indeks Inklusivitas SD	55,26	76,38	55,45
13	Indeks Iklim Keamanan SMP	71,36	80,21	68,97
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	74,85	77,33	72,53
15	Indeks Inklusivitas SMP	59,38	76,36	56,37

1.1.1.2.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Kesehatan Kota Dumai pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 157,052,544,027.00 (seratus lima puluh tujuh milyar lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah) bersumber dari Perubahan APBD Kota Dumai Tahun 2023. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 143,493.165.605.00 dan Belanja Modal sebesar Rp 13.559.378.422.00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp 130,606,311,981.00 (83.16%) dan untuk UPT BLUD Dinas Kesehatan Kota Dumai yang terdiri dari 10 puskesmas se Kota Dumai dan Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 26,446,232,046.00 (16.84%).

Anggaran tersebut telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 144.396.026.375.59 (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma lima puluh sembilan rupiah) atau sebesar 91.94%. Realisasi anggaran tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 131,615,192,812.53 (91.72%) dan Belanja Modal sebesar Rp 12,780,833,563,06 (94.26%).

1.1.1.2.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 32
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja			Anggaran			
				Target	Realisasi	% Pencapaian Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian Kinerja	
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100	99.45	99.45		75.227.175.612,53	96,19
		1.1	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	17	11.36	100			
		1.2	Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	24	13.42	100			
		1.3	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101	103.23	97.79		65.764.723.944,06	87,34
		1.4	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,29-71.33	71.67	100			



		2	Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100	30.44	30.44		818.758.053	94,67
		2.1	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.8	0.01	100			
		2.2	Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	72	81.82		910.412.127	94,36
		2.3	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	0.18	100			
		2.4	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55	198.03	-160.06		1.674.956.639	97,60
		3	Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100	100			
		3.1	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1	0.07	100			
		3.2	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	3	1.10	100			
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	97	100.02	100			

1.1.1.2.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2023 adalah rata-rata pencapaian kinerja sebesar 74.50%, sementara rata-rata pencapaian realisasi anggaran sebesar 91.94%. Dengan demikian tingkat efisiensinya adalah 81.03% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (74.50%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (91.94%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori efisien.

1.1.1.2.8 Prestasi dan Penghargaan

Selama tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Dumai mendapatkan 7 penghargaan pada tingkat provinsi Riau, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 33
Prestasi dan Penghargaan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1.	Prestasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pada Program Tuberkulosis Seratus Persen Tahun 2022		Provinsi Riau	Gubernur Riau



2.	Pencapaian Tertinggi Pemeriksaan Hepatitis B Pada Ibu Hamil (72%) Tahun 2022		Provinsi Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
3.	Apresiasi Pencapaian Status Desa/Kelurahan Open Defecation Free (ODF) Di atas Target 80% Sebagai Prasyarat Utama Kabupaten Kota Sehat Tahun 2023		Provinsi Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
4.	Penghargaan Terbaik 2 Pencapaian Treatment Coverage Tuberkulosis Tahun 202	Terbaik 2	Provinsi Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
5.	Penghargaan Terbaik 1 Kategori Kab & Kota Dengan Progres Penginputan Capaian di Aplikasi ASIK Terbaik	Terbaik 1	Provinsi Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
6.	Penghargaan Kategori Kelengkapan Laporan Pemetaan Resiko Penyakit Infeksi Emerging Tahun 2023		Provinsi Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
7.	Penghargaan Terbaik 1 Kabupaten dengan Kinerja Program Malaria Terbaik Semester I Tahun 2023	Terbaik 1	Provinsi Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau

1.1.1.3 RSUD

1.1.1.3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai telah menetapkan satu Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan lima Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam table dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 34
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan	BOR , Prosentase Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD	72,22%	96,29%	72%	83,23	115,60%	Sangat Berhasil
		AVLOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	4,56 hari	108,80%	4,2 hari	3,96	105,71%	Sangat Berhasil
		TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	1,87 hari	93,50%	2 hari	1	50%	Berhasil
		BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	54,18 Kali	120,4%	44 kali	70,74	160,78%	Sangat Berhasil
		NDR , Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	22,29 0/00	88,55%	22 0/00	19,65	110,68%	Sangat Berhasil

1.1.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :



Tabel 35
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan	BOR , Prosentase Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD	75%	72%	72,22%	83,23%	96,29%	115,60%
		AVLOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	5 hari	4,2 hari	4,56 hari	3,96 hari	108,80%	105,71%
		TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	2 hari	2 hari	1,87 hari	1 hari	93,50%	50%
		BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	45 kali	44 kali	54,18 kali	70,74 kali	120,4%	160,78%
		NDR , Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	20 ^{0/00}	22 ^{0/00}	22,29 ^{0/00}	19,65 ^{0/00}	88,55%	110,68%

1.1.1.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 36
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan	BOR , Prosentase Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD	73,5%	83.23%	113.24%
		AVLOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	5 hari	3.96 hari	79.2%
		TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	2,5 hari	1 hari	40%
		BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	41 kali	70.74 kali	57.96%
		NDR , Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	20 ^{0/00}	19.65 ^{0/00}	101.78%

1.1.1.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :



Tabel 37
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan	BOR , Prosentase Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD	83.23%	60 – 80 %	Capaian melebihi batasan standar nasional
		AVLOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	3.96 hari	6 – 9 hari	Capaian masih masuk batasan standar nasional
		TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	1 hari	1 – 3 hari	Capaian masuk batasan standar nasional
		BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	70.74 kali	40 – 50 kali	Capaian melebihi batasan standar nasional
		NDR , Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	19.65 ^{0/00}	25 ^{0/00}	Capaian melebihi batasan standar nasional

1.1.1.3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Rumah Sakit Umum Daerah Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar *Rp 272.562.636.966,00* (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) bersumber dari APBD Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar *Rp. 221.619.204.700,00* (*Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar *Rp 50.943.432.266* (*Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar *Rp 281.116.260.964* (*Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Koma Enam Rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi *Rp 230.518.548.359,60* (*Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Enam Rupiah*) dan Belanja Modal terealisasi *Rp 50.597.712.604,00* (*Lima Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:



Tabel 38
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Program penunjang Urusan pemerintah Daerah kab/kota	Rp. 193.658.828.541	Rp. 203.611.260.648	105,14%	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Rp. 76.454.289.840	Rp. 75.121.104.762	98,26%	
		Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Rp. 2.449.518.585	Rp. 2.383.895.554	97,32%	

Total anggaran belanja adalah Rp 272.562.636.966 dengan realisasi Rp 281.116.260.963,60 atau dengan capaian sebesar 103,14% dari total anggaran.

1.1.1.3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 39
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	GDR (Gross Death Rate)	33 ^{0/00}	35.32 ^{0/00}	92.36%	Rp 272.562.636.966	Rp 281.116.260.963,60	103,14%
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan	BOR, Prosentase Pemakaian Tempat Tidur Di RSUD	72%	83.23%	115,60%			
	AVLOS, Lamanya seorang pasien dirawat di RSUD Kota Dumai	4,2 hari	3.96 hari	105,71%			
	TOI, Rata-rata dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi di RSUD Kota Dumai	2 hari	1 hari	50,00%			



	BTO, Frekuensi pemakaian tempat tidur	44 kali	70.74 kali	160,78%			
	NDR, Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	22 _{0/00}	19.65 _{0/00}	110,68%			
Program penunjang Urusan pemerintah Daerah kab/kota	Presentase dukungan untuk administrasi Penunjang urusan kesehatan pada RSUD Kota Dumai	100%	100%	100%	Rp. 193.658.828.541	Rp. 203.611.260.648	105,14%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Presentase dukungan untuk pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	87%	87%	100%	Rp. 76.454.289.840	Rp. 75.121.104.762	98,26%
Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Presentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	90%	90%	100%	Rp. 2.449.518.585	Rp. 2.383.895.554	97,32%

1.1.1.3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu BOR tingkat efisiensinya adalah 1,12 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (115,6%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (103,14%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- 2) Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu AVLOS tingkat efisiensinya adalah 1, berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (105,71%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (103,14%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- 3) Pada Indikator Kinerja Utama 3 yaitu TOI tingkat efisiensinya adalah 0,48 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (50%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (103,14%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori KURANG EFISIEN;
- 4) Pada Indikator Kinerja Utama 4 yaitu BTO tingkat efisiensinya adalah 1,56 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (160,78%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (103,14%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- 5) Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu NDR tingkat efisiensinya adalah 1, berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (110,68%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (103,14%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;



1.1.1.4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.1.1.4.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai telah menetapkan 7 Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 7 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam table dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 40
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	55,26%	100%	53,72 %	58,28%	100%	Sangat Berhasil
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92,83%	92.83%	100 %	82,35%	82,35%	Berhasil
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	70,00%	100%	66,27%	90%	100%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase kemandapan jalan	56,41%	100%	54,12%	53,09%	98,09%	Sangat Berhasil
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun	14,6%	100%	39,92%	39,92%	100%	Sangat berhasil
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah	0	0	100%	0	0	Tidak berhasil
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya	47,53%	100%	7,75%	48,46%	100%	Sangat berhasil

1.1.1.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 41
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air Minum	40,79%	53,72 %	55,26%	58,28%	100%	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air	Persentase penduduk yang memperoleh layanan	100%	100 %	92,83%	82,35%	92.83%	82,35%



	Limbah Domestik	pengolahan air limbah domestic						
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	66,27%	66,27%	70,00%	90%	100%	100%
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase kemantapan jalan	53,82%	54,12%	56,41%	53,09%	100%	98,09%
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun	14,6%	39,92%	14,6%	39,92%	100%	100%
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah	100%	100%	0	0	0	0
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya	5,25%	7,75%	47,53%	48,46%	100%	100%

1.1.1.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 42
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air Minum	74,68%	58,28%	78,04%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	82,35%	82,35%
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	66,27%	90%	100%
4	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Persentase kemantapan jalan	55,02%	53,09%	96,49%
5	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	Tidak terjadi genangan >2 kali dalam setahun	65%	39,92%	61,41%
6	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah	100%	0	0
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang Dengan Peruntukannya	15,25%	48,46%	100%

**1.1.1.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)****1.1.1.4.5 Akuntabilitas Keuangan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.456.240.533.524 bersumber dari APBD Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp.115.780.685.724 dan BELANJA MODAL sebesar Rp.340.459.847.800.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 433.995.981.781,20, terdiri dari Belanja Operasi Rp.111.481.755.859,25 dan Belanja Modal terealisasi Rp.322.514.225.921,95. Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 43
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rata - rata
1		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	59.790.542.360	57.514.856.165	96,19%	
2		Program penyelenggaraan jalan	228.866.388.103	222.889.741.226,84	97,39%	
3		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	12.735.500.000	12.688.574.215,44	99,63%	
4		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	11.171.360.000	11.064.779.110	99,05%	
5		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	693.578.000	562.843.113	81,15%	
6		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	35.653.104.760	30.532.802.583	85,64%	
7		Program penataan bangunan gedung	81.819.509.161	75.245.456.279,34	91,97%	

1.1.1.4.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 44
Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100,00%	100,00%	100,00%	19.222.513.747	17.336.749.219,78	90,19 %
Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase Peningkatan Luas wilayah Banjir yang Ditangani	14,00%	14,00%	100,00%	59.790.542.360	57.514.856.165,36	96,19 %
Program	Persentase	29,68%	29,68%	100,00%	12.735.500.000	12.688.574.215,44	99,63 %



Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Penduduk Terlayani spam Jaringan Perpipaan						
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	100,00%	100,00%	100,00%	11.171.360.000	11.064.779.110	99,05 %
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Rumah tangga Yang mendapat Akses layak Sanitasi	100,00%	100,00%	100,00%	693.578.000	562.843.113	81,15 %
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	40%	40%	100,00%	35.653.104.760	30.532.802.583	85,64 %
Program pengembangan permukiman	Persentase Pengembangan Permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	2.663.379.200	2.652.843.769,44	99,60 %
Program penataan bangunan gedung	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	15,00%	15,00%	100,00%	81.819.509.161	75.245.456.279,34	91,97 %
Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	42,86%	42,86%	100,00%	400.000.000	398.629.950	99,66 %
Program penyelenggaraan jalan	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi baik	4,00%	4,00%	100,00%	228.866.388.103	222.889.741.226,84	97,39 %
Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	100,00%	100,00%	100,00%	201.520.000	190.364.000	94,46 %
Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	59,99%	59,99%	100,00%	3.023.138.193	2.918.342.149	96,53 %

1.1.1.5 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1.1.1.5.1 Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 45
Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023 Dinas Perkimtan

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	94,00	244,00	69,98	94,00	134,32	Sangat berhasil
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	88,00	387,67	39,96	88,00	220,22	Sangat berhasil
		Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat berhasil
2	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Peningkatan PSU	84,00	238,50	48,20	156,00	323,65	Sangat berhasil
	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	84,00	238,50	48,20	156,00	323,65	Sangat berhasil
3	Meningkatkan Pelayanan Pertanahan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	20,00	100,00	40,00	48,00	120,00	Sangat berhasil
	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	20,00	100,00	40,00	48,00	120,00	Sangat berhasil

1.1.1.5.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :



Tabel 46
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI TAHUN 2022	TARGET 2023	REALISASI TAHUN 2023	PERBANDINGAN CAPAIAN	KATEGORI NILAI
1	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	61,35	94,00	69,98	94,00	100,00	Stagnan
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	22,70	88,00	39,96	88,00	100,00	Stagnan
		Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Stagnan
2	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Peningkatan PSU	%	35,20	84,00	48,20	156,00	185,71	Meningkat
	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	35,20	84,00	48,20	156,00	185,71	Meningkat
3	Meningkatkan Pelayanan Pertanahan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	20,00	20,00	40,00	48,00	240,00	Meningkat
	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	20,00	20,00	40,00	48,00	240,00	Meningkat

1.1.1.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 47
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	97,14	94,00	96,77
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	94,28	88,00	93,34
		Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	%	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Peningkatan PSU	%	100,00	156,00	156,00
	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	100,00	156,00	156,00
3	Meningkatkan Pelayanan Pertanahan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	100,00	48,00	48,00
	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun	%	100,00	48,00	48,00

1.1.1.5.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 48
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI SPM NASIONAL	KATEGORI NILAI
Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100,00	100,00	MEMUASKAN
Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	%	100,00	100,00	MEMUASKAN

**1.1.1.5.5 Akuntabilitas Keuangan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 15.550.235.262 (lima belas milyar lima ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) bersumber dari APBD Kota Dumai dan Bankeu Provinsi Riau. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 12.656.996.703 (dua belas milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp 2.893.238.559 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 14.890.068.849 (empat belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp 12.003.249.658 (dua belas milyar tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp 2.886.819.191 (dua milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan dengan total 8 (delapan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan pembagian belanja tidak langsung dan belanja langsung.

1.1.1.5.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 49
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tingkat pelayanan infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	69,98 %	94,00%	134,32%	6.208.390.000	6.082.487.067	97,97%
Sasaran : Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	39,96 %	88,00%	220,22%	5.830.990.000	5.725.080.105	98,18%
	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	377.400.000	357.406.962	94,70%
Program : Program Pengembangan	Persentase penyediaan rehabilitasi,	100%			377.400.000	357.406.962	94,70%



PEMKO DUMAI

Perumahan	rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						
Program : Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	46,55 %			910.050.000	866.246.308	95,19%
Program : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	19%			4.920.940.000	4.858.833.797	98,74%
Tujuan : Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase peningkatan PSU	48,23 %	156,00%	323,65%	2.589.200.000	2.574.717.242	99,44%
Sasaran : Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	48,2%	156,00%	323,65%	2.589.200.000	2.574.717.242	99,44%
Program : Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	48,32 %			2.559.200.000	2.548.457.142	99,58%
Program : Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	40%			30.000.000	26.260.100	87,53%



Permukiman							
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Pertanahan	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan per tahun	40%	48%	120%	495.000.000	314.235.084	63,48%
Sasaran : Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	40%	48%	120%	495.000.000	314.235.084	63,48%
Program : Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	40%			325.021.600	205.724.057	63,30%
Program : Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	40%			169.978.400	108.511.027	63,84%

1.1.1.5.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 50
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5=3/4
Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	220,22%	98,18%	2,24
	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	94,70%	1,06
Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	323,65%	99,44%	3,25
Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	120%	63,48%	1,89

1.1.1.5.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai belum mendapatkan penghargaan.

1.1.1.6 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.1.6.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai telah menetapkan Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023.



Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 51
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Targ	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	37 Laporan	Sangat Berhasil	100 %	45 Laporan	Sangat Berhasil	100%
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	1.164 Kasus	Sangat Berhasil	100 %	1.710 Kasus	Sangat Berhasil	100%
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	21 Perda dari 68 Perda	Tidak Berhasil	100 %	16 Perda dari 49 Perda	Tidak Berhasil	32,65%

1.1.1.6.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 52
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat.	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	37 Laporan	45 Laporan	100%	100%
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	100%	1.164 Kasus	1.710 Kasus	100%	100%
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	21 Perda dari 68 Perda	16 Perda dari 49 Perda	30,88%	32,65%

**1.1.1.6.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**

Perbandingan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 53
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	100%
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	100%	100%
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	32,65%	3,062%

1.1.1.6.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 54
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100%	-	Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Satpol PP
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	-	
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30,88%	-	

**1.1.1.6.5 Akuntabilitas Keuangan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp12.294.971.059,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah) bersumber dari Belanja Daerah Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp11.454.943.50,- (Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp840.027.550,- (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp12.021.903.148,- (Dua Belas Milyar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp11.183.875.598,- (Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp838.027.550,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 55
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp12.294.971.059-	Rp12.021.903.148,-	97.77%	

1.1.1.6.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 56
Pencapaian Realisasi Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Publik Di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Ketertiban Umum, Ketentraman dan	100%	100%	100%	22.800,- Rp688.6	861.800,- Rp685.	99,59%



dan Perlindungan Masyarakat.	Perlindungan Masyarakat						
Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100%	100%	100%			
Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	32,65%	100%	Rp.221.447.000,-	Rp.221.447.000,	100%

1.1.1.6.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN
- 2) Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN
- 3) Pada Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tingkat efisiensinya adalah berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (32,65%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (32,65%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori KURANG

1.1.1.6.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai belum mendapatkan penghargaan.

1.1.1.7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.1.7.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai telah menetapkan Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan empat Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota



Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 57
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	Sasaran		2022		2023			Predikat Capaian
	Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah Yang Ditangani	75 %	100 %	80%	75 %	93,75 %	Sangat Berhasil
		Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	78,21 %	100 %	78,21 %	76,21 %	97,44%	Sangat Berhasil
		Response Time Rate Kejadian Bencana	100 %	100 %	100 %	91,30 %	91,30 %	Sangat Berhasil
		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %	100 %	56,42 %	54,85 %	97,21 %	Sangat Berhasil

1.1.1.7.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 58
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	75 %	80 %	75 %	75 %	100 %	93,75 %
		Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	78,21 %	78,21 %	78,21 %	76,21 %	100 %	97,44%
		Response Time Rate Kejadian Bencana	100 %	100 %	100 %	91,30 %	100 %	91,30 %
		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %	56,42 %	56,42 %	48,44 %	100 %	85,85 %

**1.1.1.7.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**

Perbandingan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 59
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	80%	75 %	93,75 %
		Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	78,21 %	76,21 %	97,44%
		Response Time Rate Kejadian Bencana	100 %	91,30 %	91,30 %
		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %	48,44 %	97,21 %

1.1.1.7.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis.

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 60
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Keterangan
1	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	75 %	-	-
		Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	76,21 %	-	-
		Response Time Rate Kejadian Bencana	91,30 %	-	-
		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	48,44 %	-	-

**1.1.1.7.5 Akuntabilitas Keuangan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 12.591.035.840 (*Dua Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*) bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR). Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 10.818.633.449 (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 1.772.402.391 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.11.514.950.559 (*Sebelas Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi Rp.9.766.678.559 (*Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 1.748.272.000 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 61
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rata Rata
1	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.779.741.862	Rp. 6.240.182.390	92,04	91,45 %
		Program Penanggulangan Bencana	Rp. 4.939.955.790	Rp. 4.412.370.874	89,32	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 871.338.188	Rp. 862.397.295	98,97	

1.1.1.7.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 62
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Dan Penanganan Bencana							
Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	80 %	75 %	93,75 %	80,00%	75%	93,75%
	Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	78,21 %	76,21 %	97,44 %	78,21 %	76,21%	97,44%
	Response Time Rate Kejadian Bencana	100 %	91,30 %	91,30 %	100 %	91,30 %	91,30 %
	Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %	54,85 %	97,21 %	56,42 %	54,85%	97,21%
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	95,13%	95,13%	Rp. 6.779.741.8 62	Rp. 6.240.182.3 90	92,04%
Program : Program Penanggulan n Bencana		85%	83,73%	98,51%	Rp. 4.939.955.7 90	Rp. 4.412.370.8 74	89,32%
Program : Pencegahan, Penanggulan n, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		85%	99,67 %	117,26 %	Rp. 871.338.188	Rp. 862.397.295	98,97%

1.1.1.7.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pada Indikator Kinerja Utama pertama yaitu Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang Ditangani tingkat efisiensinya adalah 105 % berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (93,75%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (89,32%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN;
- 2) Pada Indikator Kinerja Utama kedua yaitu Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana tingkat efisiensinya adalah 109% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (97,44%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (89,32%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN;
- 3) Pada Indikator Kinerja Utama ketiga yaitu Response Time Rate Kejadian Bencana tingkat efisiensinya adalah 101% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (91,30%). Pencapaian



tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN;

- 4) Pada Indikator Kinerja Utama keempat yaitu Cakupan Wilayah Penanganan Bencana tingkat efisiensinya adalah 109% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (97,21%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (89,32%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN.

1.1.1.7.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai belum mendapatkan penghargaan dalam pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penanggulangan Bencana, maupun Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran. Hal ini menjadi catatan bagi Badan Penanggulangan Bencana untuk lebih berdaya dan bersinergi dalam memunculkan inovasi baru terkait pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1.1.1.8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.1.1.8.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 63
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No.	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024	85%	100%	90%	90%	100%	Sangat Berhasil
		Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	90%	100%	95%	95%	100%	Sangat Berhasil

1.1.1.8.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :



Tabel 64
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024	85%	90%	85%	90%	100%	100%
		Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	90%	995%	90%	995%	100%	100%

1.1.1.8.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 65
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024	100%	90%	90%
		Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	100%	95%	95%

1.1.1.8.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 66
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024	90%	-	Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai
		Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	95%	-	

**1.1.1.8.5 Akuntabilitas Keuangan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 28.999.184.022 (*Dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu dua puluh dua rupiah*) bersumber dari bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 28.579.836.022 (*Dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh dua rupiah*) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 419.348.000 (*Empat ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 28.029.298.805 (*Dua puluh delapan milyar dua puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ratus lima rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 27.613.719.805 (*Dua puluh tujuh milyar enam ratus tigabelas juta tujuh ratus sembilanbelas ribu delapan ratus lima rupiah*) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 415.579.000 (*Empat ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 67
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	199.960.600	196.617.632	98,33%
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	20.744.304.260	20.241.801.784	97,58%
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.854.490.000	1.849.370.000	99,72%
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	549.490.000	548.165.999	99,76%
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	897.913.000	707.974.545	78,85%
		JUMLAH	24.246.157.860	23.543.929.960	97,10%

1.1.1.8.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 68
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai	100%					
Sasaran : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024	90%	90%	100%			
	Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri	95%	95%	100%			
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	199.960. 600	196.617. 632	98,33%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	100%	100%	20.744. 304.260	20.241. 801.784	97,58%
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%	1.854. 490.000	1.849. 370.000	99,72%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	100%	100%	549.490. 000	548.165. 999	99,76%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100%	100%	100%	897.913. 000	707.974. 545	78,85%

1.1.1.8.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024 persentase tingkat efisiensinya adalah 1,03 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,66%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori EFISIEN;

- 2) Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase peningkatan Stabilitas Politik Dalam Negeri persentase tingkat efisiensinya adalah 1,03 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,66%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori EFISIEN.

1.1.1.8.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 69
Prestasi dan Penghargaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1.	PIAGAM PENGHARGAAN	Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2022	Kota Dumai	Kepala Kantor KPP Pratama Dumai
				

1.1.1.9 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

1.1.1.9.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 70
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil



2	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang).	73%	155%	42%	75%	179%	Sangat Berhasil
		Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif.	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota.	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

1.1.1.9.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 71
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.	Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang).	47%	42%	73%	75%	155%	179%
		Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.1.1.9.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 72
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%
2	MENINGKATNYA KAPASITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persentase Pengentasan Desa/Kelurahan Tertinggal (KURANG BERKEMBANG)	25%	75%	300%
		Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi/Aktif	100%	100%	100%
3	MENINGKATNYA PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	100%	100%	100%

1.1.1.9.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 73
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	-	Tidak ada
2	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	100%	-	Tidak ada

1.1.1.9.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Dumai pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 13.904.271.740,- (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 13.849.393.240,- (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp 54.878.500,-



(Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 13.628.836.667,- (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp 13.574.117.667 (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp 54.719.000,- (Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 74
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	- Program pemberdayaan sosial.	551.164.140	546.434.280	99,14
		- Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.	2.100.000	2.100.000	100
		- Program rehabilitasi sosial.	3.523.998.700	3.470.356.630	98,48
		- Program perlindungan dan jaminan sosial.	1.932.982.000	1.836.886.900	95,03
		- Program pengelolaan taman makam pahlawan.	17.458.900	15.410.600	88,27
2	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.	- Program administrasi pemerintahan desa.	93.568.000	92.944.034	99,33
		- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat hukum adat.	1.539.632.000	1.529.080.716	99,58
3	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	- Program penanganan bencana	238.280.000	236.647.478	99,31

1.1.1.9.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 75
Pencapaian Kinerja dan Anggaran 2023

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
				%	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial							
Sasaran :							
Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,	100%	100%	100%			



	dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.							
Program : Program rehabilitasi sosial.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator spm)	100%	100%	100%				
Program :								
- Program rehabilitasi sosial.	- Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator spm)	100%	100%	100%	3.523.998.700	3.470.356.630	98,48	
- Program pemberdayaan sosial.	- Persentase (%) potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kab/kota yang diberdayakan	100%	100%	100%	551.164.140	546.434.280	99,14	
- Program perlindungan dan jaminan sosial.	- Persentase (%) pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	1.932.982.000	1.836.886.900	95,03	
- Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	- Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah kab/kota ke desa/kelurahan asal	100%	100%	100%	2.100.000	2.100.000	100	
- Program pengelolaan taman makam pahlawan.	- Persentase (%) pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kab/kota	100%	100%	100%	17.458.900	15.410.600	88,27	
Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan								
Sasaran :								



Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	- Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang)	42%	75%	179%			
	- Persentase lpm (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif	100%	100%	100%			
Program :							
- Program administrasi pemerintahan desa.	- Persentase kinerja dan manajemen aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan	42%	75%	179%	93.568.000	92.944.034	99,33
- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat hukum adat.	- Persentase lpm yang lebih produktif dan mandiri dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	1.539.632.000	1.529.080.716	99,58
Tujuan: Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana							
Sasaran :							
Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)	100%	100%	100%			
Program : Program Penanganan Bencana	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)	00%	100%	100%	238.280.000	236.647.478	99,31

1.1.1.9.7 efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pada Indikator Kinerja Utama pertama yaitu Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar,



anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, tingkat efisiensinya adalah 1,52 % (Rp. 53.642.070,-) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,48%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori efisien;

- 2) Pada Indikator Kinerja Utama ke dua yaitu Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang), tingkat efisiensinya adalah 0,67% (Rp. 623.966,-) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (179%) dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,33%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori efisien;
- 3) Pada Indikator Kinerja Utama ke tiga yaitu Persentase LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif, tingkat efisiensinya adalah 0,69% (Rp. 10.551.284,-) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,58%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori efisien;
- 4) Pada Indikator Kinerja Utama ke empat yaitu Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm), tingkat efisiensinya adalah 0,69% (Rp. 1.632.522,-) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,58%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori efisien.

1.1.1.9.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 76
Prestasi dan Penghargaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Piagam Penghargaan Lomba Desa dan Kelurahan	Juara 1	Provinsi	Gubernur Riau
2	Piagam Penghargaan Lomba Desa dan Kelurahan	Juara 3	Regional	Menteri Dalam Negeri
2	Piagam Penghargaan Lomba LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	Juara 2	Provinsi	Gubernur Riau
4	Sertifikat Karang Taruna Berprestasi	Juara 2	Provinsi	Kepala Dinas Sosial Prov. Riau

1.1.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Capaian Kinerja Urusan pemerintahahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan:

- 1) Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja;
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- 4) Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- 5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Pengendalian



- Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 7) Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
 - 8) Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika dan Persandian;
 - 9) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 10) Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 11) Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
 - 12) Statistik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - 13) Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 14) Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 15) Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.1.2.1 Dinas Tenaga Kerja

1.1.2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai telah menetapkan 3 Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 4 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 77
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	10,6 %	70,7 %	115 %	4,36 %	29,6 %	Tidak Berhasil
		Persentase penempatan tenaga kerja	12,64 %	126,4 %	110 %	41,75 %	141,8 %	Sangat Berhasil
2	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	176,47 %	305,88 %	230 %	80,95 %	269,83 %	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	110 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil

1.1.2.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:



Tabel 78
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	15%	15%	10,6%	4,36%	70,7%	29,6%
		Persentase penempatan tenaga kerja	10%	10%	12,64%	41,75%	126,4%	141,8%
2.	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	25%	30%	76,47%	80,95%	5,88%	69,83%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	0%	100%

1.1.2.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 79
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	IndikatorKinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	15%	4,36%	29,07%
		Persentase penempatan tenaga kerja	10%	41,75%	417,5%
2	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	30%	80,95%	269,83%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

1.1.2.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut:



Tabel 80
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Persentase penempatan tenaga kerja	4,36% 41,75%	- -	Isi dengan Ada/ Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
2	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	80,95%	-	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	-	

1.1.2.1.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp6.693.797.842,- (*Enam milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*) bersumber dari APBD Kota Dumai Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp.6.495.021.942,- (*Enam milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp.198.775.900,- (*Seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.370.429.210,- (*Enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi Rp6.182.457.410,- (*Enam milyar seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah*) dan Belanja Modal terealisasi Rp187.971.800,- (*Seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah*).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 81
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1.		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp 80.000.000	Rp 76.210.000	95,26 %	0,96%
2.	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 626.569.300	Rp 601.632.910	96,02 %	0,96%
3.		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 240.000.000	Rp 236.376.308	98,49 %	0,96%



4.	Terciptanya situasi kerja yang kondusif	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 503.480.400	Rp 489.470.372	97,22 %	0,96%
----	---	-----------------------------	----------------	----------------	---------	-------

1.1.2.1.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 82
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan: Meningkatkan kesempatan kerja dan kondisi kerja							
Sasaran: Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai kebutuhan pasar kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	10%	4,36%	29,60%			
Program: Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan	10%			Rp626.569.300	Rp601.632.910	96,02%
	Persentase penempatan tenaga kerja	15%	41,75%	141,80%			
Program: Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	30%			Rp240.000.000	Rp236.376.308	98,49%
Sasaran: Terciptanya situasi kerja yang kondusif	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	30%	80,95%	269,83%			
Program: Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	85%			Rp503.480.400	Rp489.470.372	97,22%

1.1.2.1.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pada Indikator Kinerja Utama Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yaitu 80 orang tingkat efisiensinya adalah 30,83% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (29,60%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,02%).



Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori KURANG;

- 2) Pada Indikator Kinerja Utama Persentase penempatan tenaga kerja yaitu Penempatan Tenaga Kerja yang ditempatkan sebanyak 765 Orang dari 1.832 Orang yang terdaftar tingkat efisiensinya adalah 143,97% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (141,80%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,49%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- 3) Pada Indikator Kinerja Utama Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan yaitu kasus Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 42 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 34 kasus tingkat efisiensinya adalah 277,54% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (269,83%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (97,22%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN.

1.1.2.1.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 83
Prestasi dan Penghargaan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Implementasi SAKIP Intemal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023	PERINGKAT KETIGA Pada Kluster Pendukung	Kota Dumai	Wali Kota Dumai

1.1.2.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

1.1.2.2.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah menetapkan 1 Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untukdicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam dan dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 84
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	100%	105.3%	95%	100%	105.27%	Sangat berhasil
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	703.5	100.5%	750	754.13	100.55%	Sangat berhasil
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	3862.5	121.2%	810	615	75.93%	Berhasil

1.1.2.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 85
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	95%	95%	100%	100%	105.3%	105.27%
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	700	750	703.5	754.13	105.3%	100.55%
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	3187	810	3862.5	615	121.2%	75.93%

1.1.2.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut :



Tabel 86
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	95%	100%	105.3%
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	900	754.13	83.8%
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	840	615	73.3%

1.1.2.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 87
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	100%	-	Tidak ada
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	705.3	-	Tidak ada
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	3862.5	-	Tidak ada



1.1.2.2.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 7.666.892.538 (*Tujuh Milyar Eam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) bersumber dari dana bagi hasil, pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 7.525.246.046 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Puluh Empat Puluh Enam Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 141.646.492 (*Seratus Empat Pulih Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.338.057.658 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 7.198.027.658 (*Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 140.030.000 (*Seratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 88
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rata Rata
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 263.253.700	Rp. 262.758.000	99.81	
		Program Perlindungan Perempuan	Rp. 185.546.000	Rp. 166.145.600	89.54	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 5.999.300	Rp. 5.997.500	99.97	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 40.524.980	Rp. 39.088.900	96.45	
		Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 188.990.200	Rp. 185.087.161	97.93	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 467.453.580	Rp. 405.093.983	86.65	

1.1.2.2.6 Pencapaian kinerja dan anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 89
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGE T	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALIS ASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	95%	100%	105.27%			
Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan							
Program : Program perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	30%		12.27%	185.546.000	166.145.600	89.54
Program : Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	50%		39.54%	467.453.580	405.093.983	86.65
Tujuan : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Skor pencapaian kota layak anak	750	754.13	100.55%			
Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan							
Program : Program Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya capaian skor kota layak anak	75%		100.55%	188.990.200	185.087.161	97.93
Program : Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	80%			5.999.300	5.997.500	99.97
Tujuan : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak	Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	810	615	75.93%			



perempuan dan anak di Kota Dumai							
Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan							
Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG di Kota Dumai	15%		12.05%	263.253.700	262.758.000	99.81
Program : Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak	35%		44%	40.524.980	39.088.900	96.45

1.1.2.2.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pada *Indikator Kinerja Utama* yaitu cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar tingkat efisiensinya adalah 1.20% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (105.27%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (88.10%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- Pada *Indikator Kinerja Utama* yaitu skor pencapaian kota layak anak tingkat efisiensinya adalah 1.02% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100.55%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98.95%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- Pada *Indikator Kinerja Utama* yaitu skor pencapaian anaugerah parahita ekapraya (APE) tingkat efisiensinya adalah 0.78% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (75.93%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98.13%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG**;

1.1.2.2.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 90
Prestasi dan Penghargaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Kota Layak Anak	Nindya	Nasional	Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
2	Anugerah Parahita Ekapraya	Madya	Nasional	Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

1.1.2.3 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1.1.2.3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai telah menetapkan empat Sasaran Strategis / Kinerja Utama dengan sembilan Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 91
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Protein	59,70 gr/kap/hari	100,00	52,75 gr/kap/hari	62,30 gr/kap/hari	118,10	SangatBerhasil
2	Meningkatnya Jumlah Kelompok Yang Dibinadan Diberi Bantuan	Cakupan Bina Kelompok Tani	166 Kelompok	100,00	170 Kelompok	172 Kelompok	101,18	SangatBerhasil
3	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Komoditi Pertanian	33.054 Ton	100,00	21.500 Ton	32.272 Ton	150,10	Sangat Berhasil
		Produksi Komoditi Perkebunan	87.168 Ton	100,00	85.750 Ton	86.502 Ton	100,88	Sangat Berhasil
		Populasi Ternak	6.760 Satuan Ternak	100,00	6.800 Satuan Ternak	6.806 Satuan Ternak	100,09	SangatBerhasil
		Produktivitas Padi atauBahan Pangan Utama Lainnya	3,5 Ton/Ha	100,00	3,6 Ton/Ha	3,7 Ton/Ha	102,77	SangatBerhasil
		Jumlah Penggunaa n Alat dan Mesin Pertanian	19 Unit	100,00	14 Unit	26 Unit	185,71	SangatBerhasil
4	Menurunnya Kasus Hewan Menular	Jumlah Penurunan Kasus Cemaran pada Pangan Asal Hewan	3 Kasus	100,00	6 Kasus	0 Kasus	200,00	SangatBerhasil
		Jumlah Kasus Hewan Menular	7 Kasus	100,00	11 Kasus	9 Kasus	122,22	SangatBerhasil

**1.1.2.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023**

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 92
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Protein	52,50 gr/kap/hari	52,75 gr/kap/hari	59,70 gr/kap/hari	62,30 gr/kap/hari	100,00	118,10
2.	Meningkatnya Jumlah Kelompok Yang Dibina dan Diberi Bantuan	Cakupan Bina Kelompok Tani	165 Kelompok	170 Kelompok	166 Kelompok	172 Kelompok	100,00	101,18
3.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Sektor Pertanian	21.250 Ton	21.500 Ton	33.054 Ton	32.272 Ton	100,00	150,10
		Produksi Sektor Perkebunan	85.500 Ton	85.750 Ton	87.168 Ton	86.502 Ton	100,00	100,88
		Populasi Ternak	6.600 Satuan Ternak	6.800 Satuan Ternak	6.760 Satuan Ternak	6.806 Satuan Ternak	100,00	100,09
		Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya	3,5 Ton/Ha	3,6 Ton/Ha	3,5 Ton/Ha	3,7 Ton/Ha	100,00	102,77
		Jumlah Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian	12 Unit	14 Unit	19 Unit	26 Unit	100,00	185,71
4.	Menurunnya Kasus Hewan Menular	Jumlah Penurunan Kasus Cemaran pada Pangan Asal Hewan	7 Kasus	6 Kasus	3 Kasus	0 Kasus	100,00	200,00
		Jumlah Kasus Hewan Menular	13 Kasus	11 Kasus	7 Kasus	9 Kasus	1100,00	122,22

1.1.2.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 93
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Protein	53,50 Gr/Kap/hari	62,30 Gr/Kap/hari	116,23 %
2.	Meningkatnya Jumlah Kelompok Yang Dibina dan Diberi Bantuan	Cakupan Bina Kelompok Tani	1.024 Kelompok	535 Kelompok	52,25 %
3.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Sektor Pertanian	129.750 Ton	93.412 Ton	71,99 %
		Produksi Sektor Perkebunan	515.250 Ton	259.510 Ton	50,37 %
		Populasi Ternak	7.400 Satuan Ternak	6.806 Satuan Ternak	91,97 %
		Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya	3,9 Ton/Ha	3,7 Ton/Ha	94,87 %



		Jumlah Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian	90 Unit	55 Unit	61,11 %
4.	Menurunnya Kasus Hewan Menular	Jumlah Penurunan Kasus Cemaran pada Pangan Asal Hewan	3 Kasus	0 Kasus	200,00 %
		Jumlah Kasus Hewan Menular	5 Kasus	9 Kasus	55,56 %

1.1.2.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 94
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KET.
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Protein	62,30 gr/kap/hari	57 Gr/Kap/Hari	-
2.	Meningkatnya Jumlah Kelompok Yang Dibina dan Diberi Bantuan	Cakupan Bina KelompokTani	172 Kelompok	-	Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
3.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Sektor Pertanian	32.272 Ton	53.630.000 Ton	
		Produksi Sektor perkebunan	86.502 Ton	45.580.892 Ton	
		Populasi Ternak	6.806 Satuan Ternak	18.610.000 Satuan Ternak	
		Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya	3,7 Ton/Ha	7,0 Ton/Ha	
		Jumlah Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian	26 Unit	-	Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
4.	Menurunnya Kasus Hewan Menular	Jumlah Penurunan Kasus Cemaran pada Pangan Asal Hewan	0 Kasus	-	Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
		Jumlah Kasus Hewan Menular	9 Kasus	31.113 Kasus	

1.1.2.3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.24.327.938.812,- (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Belas) bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.22.719.830.912,- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp.1.108.107.900,- (Satu Milyar Seratus Delapan Juta Seratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.23.982.089.278,-(Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:



Tabel 95
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat;	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.449.030.446	12.196.735.845	97,97
2.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya;	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.515.297.480	2.487.884.262	98,91
		Penanganan Kerawanan Pangan	204.185.860	204.185.860	100,00
		Pengawasan Keamanan Pangan	134.570.300	134.570.300	100,00
3.	Produksi Komoditi Pertanian.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	781.159.800	780.271.740	99,89
4.	Produksi Komoditi Perkebunan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.496.525.840	3.477.240.115	99,45
5.	Populasi Ternak				
6.	Jumlah Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.712.104.900	1.707.038.173	99,70
7.	Jumlah Penurunan Kasus Cemaran pada Pangan Asal Hewan;	Pengendalian Hewan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.417.298.666	1.377.115.891	97,16
8.	Jumlah Kasus Hewan Menular				
9.	Cakupan Bina Kelompok Tani	Penyuluhan Pertanian	1.617.765.520	1.617.049.238	99,96
			24.327.938.812	23.982.089.278	98,58

1.1.2.3.6 Pencapaian kinerja dan anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 96
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REA.	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan 1 : Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan	25,00 %					
Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Protein	52,75 %	62,30 %	118,10 %			
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	12.449.030.446	12.196.735.845	97,97 %
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penyediaan Peta Kerawanan dan Ketahanan Pangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	2.515.297.480	2.487.884.262	98,91 %
Program Pengawasan Keamanan	Persentase Pengawasan mutu dan keamanan pangan	13,33 %	13,33 %	100,00 %	204.185.860	204.185.860	100,00 %



Pangan	segar						
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjangurusan pemerintah daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	12.449.030.446	12.196.735.845	97,97 %
Tujuan 2: Meningkatkan Pendapatan Petani	Pendapatan Perkapita Petani	Rp.234,54 Juta					
Sasaran 2 : Cakupan Bina Kelompok Tani	Cakupan Bina Kelompok Tani	170 Kelompok	172 Kelompok	101,18 %			
Program PenyuluhanPertanian	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	11,58 %	11,72 %	101,21%	1.617.765.520	1.617.049.238	99,96 %
Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Pertanian;	Produksi Komoditi Pertanian	21.500 Ton	32.272 Ton	150,10 %			
	Produksi Komoditi Perkebunan	85.750 Ton	86.502 Ton	100,88 %			
	Populasi Ternak	6.800 Satuan Ternak	6.806 Satuan Ternak	100,09 %			
	Produktivitas Padi atau Bahan PanganUtama Lainnya	3,6 Ton/Ha	3,7 Ton/Ha	102,77 %			

1.1.2.3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 97
efisiensi penggunaan sumber daya

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI	KET.
1.	Meningkatkan Pendapatan Petani	Produksi sektor perkebunan	150,10	99,45	1,53 %	Efisiensi
		Produksi sektor pertanian	100,88	100,00	1,01 %	Efisiensi
		Populasi ternak	100,09	99,45	1,01%	Efisiensi
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya	102,77	100,00	1,03 %	Efisiensi
		Jumlah Penggunaan Alat Mesin Pertanian	185,71	99,70	1,86 %	Efisiensi
		Cakupan Bina KelompokTani	101,18	99,96	1,01 %	Efisiensi
		Jumlah Kasus Hewan Menular	200,00	97,16	2,06 %	Efisiensi
		Jumlah Kasus Cemaran Pangan Asal Hewan (PAH)	122,22	97,16	1,26 %	Efisiensi
2.	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	118,10	100,00	1,18 %	Efisiensi



1.1.2.3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 98
Prestasi dan Penghargaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Penilaian Balai Penyuluhan Pertanian Terbaik (BPP Bukit Kapur) Kec.Bukit Kapur	Juara I	Provinsi Riau	Gubernur Riau
2	Penilaian Petani Terbaik (Sdr.Ilham Amin Bongsu) Kec.Dumai Selatan	Juara I	Provinsi Riau	Gubernur Riau
3	Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani (LKK Karya Mandiri) Kec.Sungai Sembilan	Juara I	Provinsi Riau	Gubernur Riau

1.1.2.4 Dinas Lingkungan Hidup

1.1.2.4.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 99
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	indeks kualitas air	53.2	100%	53,3	53,3	100%	Sangat Berhasil
2.		Indeks kualitas udara	70	70%	73	73	100%	Sangat Berhasil
3.		Indeks kualitas tutupan lahan	61	98%	61	61	100%	Sangat Berhasil
4.		Persentase jumlah sampah yang tertangani	57	100%	65,7	65,7	100%	Sangat Berhasil

1.1.2.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :



Tabel 100
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	indeks kualitas air	53.2	53.3	53.3	53.3	100%	100%
2.		Indeks kualitas udara	70	71%	71%	71%	100%	100%
3.		Indeks kualitas tutupan lahan	61	61.5	61.5	61.5	100%	100%
4.		Persentase jumlah sampah yang tertangani	57	65.7	65.7	65.7	100%	100%

1.1.2.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 110
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	indeks kualitas air	53.3	100%	100%
		Indeks kualitas udara	71	100%	100%
		Indeks kualitas tutupan lahan	61.5	100%	100%
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	65.7	100%	100%

1.1.2.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 111
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
	Meningkatnya kualitas	indeks kualitas air	53.3	-	Tidak Ada Target Nasional yang
		Indeks kualitas udara	71%	-	



1	dan fungsi lingkungan hidup	Indeks kualitas tutupan lahan	61.5	-	berhubungan langsung dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	65.7	-	

1.1.2.4.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 36.554.398.949 bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 28.288.445. dan BELANJA MODAL sebesar Rp 8.265.953.081. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 35.315.931.972 terdiri dari Belanja Operasi Rp. 27.229.125.056 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp 8.086.806.916 (Delapan Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 112
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	12.117.701.188	11.933.109.953	98,48
2		Program Pengelolaan Persampahan	14.224.600.165	13.855.799.271	97.41

1.1.2.4.6 Pencapaian kinerja dan anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 113
Pencapaian kinerja dan anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan: Mewujudkan Pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas	indeks kualitas air	53.3	53.3	100%			
Sasaran: Meningkatnya	Indeks kualitas udara	71	71	100%			
	Indeks kualitas tutupan lahan	61	61	100%			



kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Persentase jumlah sampah yang tertangani	65.7	65.7	100%			
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	75%	75%	75%	6,674,297,7827	5,574,397,234	99,05 %
Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup	75%	75%	75%	1,792,888,500	1,458.256.651	99,96 %
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	75%	75%	75%	1,262,451,930	1,162,951.250	95,55 %
Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	70%	70%	70%	12,117,701,188	11,065,701,000	95,55%
Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	70%	70%	70%	28,701,700	25,600,700	99,55%
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	73%	73%	73%	133,380,000	125,145,200	97,55%
Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	73%	73%	73%	149,435,087	135,435,257	94.05%



Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	75%	75%	75%	65,479,536	59.025.321	93.25%
Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	75%	75%	75%	55,463,061	50,363,000	99.23
Program pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	65.7%	65.7%	65.7%	14,274,600,165	13,123,978,475	92,67%

1.1.2.4.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk efisiensi penggunaan sumber daya.

- 1) Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Indeks kualitas lingkungan hidup tingkat efisiensinya adalah 1,01 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (61,55) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- 2) Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Jumlah pelayanan persampahan yang tertangani adalah 1,47 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (65,7) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,05%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;

1.1.2.4.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 114
Prestasi dan Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	ADIPURA	Peringkat Pertama Kluster Pendukung	Kota Dumai	Walikota Dumai

1.1.2.5 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.1.2.5.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 4(empat) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 115
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasardan perlindungan sosial .	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100	100%	100%	100%	100%	Sangat berhasil
		Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	40,7%	74%	69%	51,85%	75,07%	Berhasil
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	92,2	107%	88	93,05	105,73%	Sangat berhasil
		Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	86%	191	73%	92,08%	126%	Sangat berhasil

1.1.2.5.2 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 116
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasardan perlindungan sosial .	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100%	100%	100	100%	100%	100%
2.		Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	56%	69%	40,7%	51,85%	74%	75,07%
3.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	86	88	92,2	93,05	107%	105,73%



	terkait pelayanan administrasi kependudukan							
4.		Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	45%	73%	86%	92,08%	191%	126%

1.1.2.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 117
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial .	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100%	100%	Tercapai
2		Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	100%	51,85%	Belum Tercapai
3	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	92	93,05	Tercapai
4		Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	92,08%	Belum Tercapai

1.1.2.5.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 118
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1.	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial .	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100%	100%	Isi dengan Ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
2.					



Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	86%	90%	
---	--	-----	-----	--

1.1.2.5.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.8.955.501.115 (*Delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus satu ribu seratus lima belas rupiah*) bersumber dari APBD Kota Dumai, Anggaran tersebut terdiri dari **BELANJA OPERASI** sebesar Rp. 8.004.760.558 (*delapan milyar empat juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*) dan **BELANJA MODAL** sebesar Rp.950.740.557 (*Sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.700.220.833,-, terdiri dari Belanja Operasi Rp. 7.659.406.183,- dan Belanja Modal terealisasi Rp. 1.040.814.650,-. Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 119
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial.	Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota	Rp.8.502.981.015	Rp.8.267.748.433	97,23%	98,69%
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.237.541.200	Rp.235.657.400	99,20%	
		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp.99.356.000	Rp.98.290.000	98,92%	
		Program PIAK	Rp.79.622.900	Rp.79.160.000	99,41%	

1.1.2.5.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 120
Pencapaian kinerja dan anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : 1.Memantapkan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan data kependudukanyang valid	Persentase jenis data kependudukan yang dapat Diakses oleh pengguna	100%	100%	100%			
Sasaran : 1.Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	69%	51,85%	75,07%			
Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88	93,05	105,73%			
Sasaran Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	73%	92,08%	126%			
Program: Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota					Rp.8.502.981.015	Rp.8.267.748.433	97,23%
Program: Pendaftaran Penduduk					Rp.237.541.200	Rp.235.657.400	99,20%
Program: Pelayanan Pencatatan Sipil					Rp.99.356.000	Rp.98.290.000	98,92%
Program: PIAK					Rp.79.622.900	Rp.79.160.000	99,41%

1.1.2.5.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pada Indikator Kinerja Utama secara keseluruhan yaitu dari keseluruhan Program tingkat



efisiensinya adalah 2,77% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (97,23%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya EFISIEN;

1.1.2.6 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.1.2.6.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai telah menetapkan 1 (Satu) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 121
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			Predikat Capaian
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	53.80%	119.03%	46.6%	66,02%	141,67%	Sangat Berhasil
		Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	27.2%	82.80%	19.93 %	13,02%	153,07%	Sangat Berhasil

1.1.2.6.2 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 122
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	45,2%	46.6%	53.80 %	66,02%	119.03 %	141,67 %
		Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi(unmet need)	22,36%	19.93 %	27.2%	13,02 %	82.80 %	153,07%

**1.1.2.6.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra**

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 123
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	49.9%	66,02%	132,30%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15.30%	13,02%	117,51%

1.1.2.6.4 Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional sebagaimana tabel berikut :

Tabel 124
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	66,02%	62,92%	Target ini diambil dalam Renstra BKKBN Tahun 2020-2024
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	13,02%	7,7%	

1.1.2.6.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 9.220.272.782,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) bersumber dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB – Reguler – KB, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dan DAK Non Fisik-BOKB-KB. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 8.936.991.782,- (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 283.281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.838.452.715 (Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Belas), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 8.555.320.215,- (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta



Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 283.132.500,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 125
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana	Program Pengendalian Penduduk	453.720.000,-	451.329.100,-	99,47%	225.664.550,-
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.600.479.830,-	2.448.718.400,-	94,16%	612.179.600,-
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.721.020.100,-	1.708.887.850,-	99,30%	1.708.887.850,-

1.1.2.6.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

1.1.2.6.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pada Indikator Kinerja Utama 1 Tingkat Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) tingkat efisiensinya adalah 42 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023(141,67%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 (99,47%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN.
- 2) Pada Indikator Kinerja Utama 2 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) tingkat efisiensinya adalah 56 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (153,07%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2022 (96,20%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN.

1.1.2.6.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 126
Prestasi dan Penghargaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berekana Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Duta Genre Putra Indonesia 2023	Juara I	Nasional	BKKBN
2	Pengelola DAK Subbidang KB Tahun 2022	Terbaik I	Provinsi Riau	Gubernur Riau
3	Capaian Pelaksanaan Program Bangga Kencana Dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 Kategori Kota	Terbaik I	Provinsi Riau	Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
4	Kabupaten/Kota dengan Realisasi Anggaran Menu BOKB Audit Kasus Stunting dan BKB Kit Stunting Tertinggi berdasarkan Morena Per 16 Agustus 2023 dalam Kolaborasi Konsolidasi dan Akselerasi menu BOKB Audit Kasus Stunting dan BKB Kit Stunting Indonesia	Terbaik	Nasional	BKKBN

1.1.2.7 Dinas Perhubungan

1.1.2.7.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Perhubungan Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 127
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	60%	100%	-	-	-	-
2.		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	42%	70%	61%	89%	146%	Sangat Berhasil
3.		Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	55%	98%	-	-	-	-
4.		Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	48%	100%	-	-	-	-
5.		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	67.21	-	1.198,23 km : 90.081 unit	1.198,23 km : 94.842 unit	95%	Sangat Berhasil



6.	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	-	-	56%	56%	100%	Sangat Berhasil
7.		Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	-	60%	88%	147%	Sangat Berhasil

1.1.2.7.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 128
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	60%	-	60%	-	100%	-
2.		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	60%	-	42%	-	70%	-
3.		Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	56%	-	55%	-	98%	-
4.		Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	48%	-	48%	-	100%	-
5.		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	50%	-	0.067	-	-	-
6.	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	-	56%	-	56%	-	100%
7.		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	-	61%	-	89%	-	146%
8.		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	60%	-	88%	-	147%
9.		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	-	1.198,23 km : 90.081 unit	-	1.198,23 km: 94.842 unit	-	95%

1.1.2.7.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 129
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	89%	56%	63%
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	82%	89%	109%
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	80%	88%	110%
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km: 102.873 unit	1.198,23 km: 94.842 unit	95%

1.1.2.7.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 130
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	56%	-	Tidak Ada Target Nasional yang berhubungan langsung dengan kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	89%	-	
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	88%	-	
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km: 94.842 unit	-	

1.1.2.7.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 74.605.852.140,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 63.942.061.307,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp 10.663.790.833,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 73.969.713.462,39 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp 63.346.121.405,57 (Enam



Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Koma Lima Puluh Tujuh Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp 10.623.592.056,82 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Sembilan Kota Delapan Puluh Dua Rupiah)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 131
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	46.712.912.299,00	46.268.560.826,80	99,05
2		Program Pengelolaan Pelayaran	150.000.000,00	149.940.230,00	99,96

1.1.2.7.6 Pencapaian kinerja dan anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 132
Pencapaian kinerja dan anggaran

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	65%					
Sasaran: Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Transportasi	56%	56%	100%			
	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	61%	89%	146%			
	Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	60%	88%	147%			
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km: 90.081 unit	1.198,23 km : 94.842 unit	95%			



Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	95%	100%	105%	46.712.912.299,00	46.268.560.826,80	99,05%
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Tersedianya Prasarana Pelayaran sesuai Kewenangan Kota	20%	20%	100%	150.000.000,00	149.940.230,00	99,96%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	100%	100%	100%	27.742.939.841,00	26.508.382.311,59	95,55%

1.1.2.7.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 133
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi		Keterangan
1	2	3	4	5	6		7
1.	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Persentase Prasarana Transportasi	100%	99,05	1,01	Efisien	-
		Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	146%	99,05	1,47	Efisien	-
		Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	147%	99,05	1,48	Efisien	-
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	95%	99,05	0,96	Kurang Efisien	

1.1.2.7.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 134
Prestasi dan Penghargaan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Implementasi SAKIP Internal	Peringkat Pertama Kluster Pendukung	Kota Dumai	Walikota Dumai

1.1.2.8 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1.1.2.8.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 135
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Indeks Layanan SPBE	2,63	92,93%	2,85	3,43	120,35%	Sangat Berhasil
2	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	111	123%	94	121	128,72%	Sangat Berhasil
		Persentase Informasi Daerah yang disampaikan melalui media	85	100%	88	88	100%	Sangat Berhasil
		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	75	100%	75	80	106,66%	Sangat Berhasil
		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	75	100%	75	80	106,66%	Sangat Berhasil

1.1.2.8.2 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :



Tabel 136
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Indeks Layanan SPBE	2,83	2,85	2,63	3,43	92,93%	120,35%
2.	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	90	94	111	121	123,33%	128,72%
		Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan Melalui Media	85	88	85	88	100%	100%
		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	75	75	75	80	100%	106,66%
		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	75	75	75	80	100%	106,66%

1.1.2.8.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 137
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Indeks Layanan SPBE	3 Indeks	3,43	114,33%
2	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	110 Titik akses	121 Titik Akses	110%
		Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media	98%	88%	89,79%
		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80%	80%	100%
		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	80%	80%	100%

**1.1.2.8.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)**

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana table sebagai berikut :

Tabel 138
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Keterangan
1	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Indeks Layanan SPBE	3,43	4,52	-
2	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	121 Titik Akses	-	-
		Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media	88%	-	-
		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80%	-	-
		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	80%	-	-

1.1.2.8.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 13.754.954.358,- (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 12.702.365.528,- (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 1.052.574.830,- (Satu Miliar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 13.516.553.021,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Satu Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 12.475.149.021,- (Dua Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 1.041.404.000,- (Satu Miliar Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:



Tabel 139
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Program Aplikasi Informatika	4.283.897.170,-	4.241.283.719,-	98,95
2	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.213.960.000,-	3.197.290.490,-	99,48

1.1.2.8.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 140
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan: Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Indeks Layanan SPBE	2,85 Indeks	3,43 Indeks	120,35%			
Sasaran: Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	94 Akses	121 Akses	128,72%			
	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media	88%	88%	100%			
	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	75%	80%	106,66%			
	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	75%	80%	106,66%			



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	100%	100%	100%	6.042.820.696,-	5.864.674.012,-	98,29 %
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	88%	88%	100%	3.213.960.000,-	3.197.290.490,-	99,48 %
Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	19%	19%	100%	4.283.897.170,-	4.241.283.719,-	98,42 %
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	75%	80%	106,66%	52.020.000,-	51.612.000,-	99,22 %
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	75%	80%	106,66%	162.242.500,-	161.692.800,-	99,66 %

1.1.2.8.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pada Indikator Kinerja Utama 1 (satu) yaitu Indeks Layanan SPBE tingkat efisiensinya adalah 1,22 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (120,35%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,42%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- 2) Pada Indikator Kinerja Utama 2 (dua) yaitu Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah tingkat efisiensinya adalah 1,30 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (128,72%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,42%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- 3) Pada Indikator Kinerja Utama 3 (tiga) yaitu Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media tingkat efisiensinya adalah 1,00 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,48%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- 4) Pada Indikator Kinerja Utama 4 (empat) yaitu Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral tingkat efisiensinya adalah 1,07 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun



2023 (106,66%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,22%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;

- 5) Pada Indikator Kinerja Utama 5 (lima) yaitu Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi tingkat efisiensinya adalah 1,07 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (106,66%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,66%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;

1.1.2.8.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 141
Prestasi dan Penghargaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Top Digital Award	Bintang 3 Nasional	Nasional	IT Works
2	Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah se- Provinsi Riau	Peringkat I (pertama)	Nasional	Menpan-RB
3	Nominasi KI RIAU AWARD 2023 se- Provinsi Riau : 1. Untuk SMAN 1 Dumai Kategori Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2. Untuk Bawaslu Kota Dumai Kategori Menuju Informatif	Nominasi	Provinsi	Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau
4	terpilih pada Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) periode Tahun 2022.	Peringkat 11 (sebelas) dari seluruh lima puluh (50) kabupaten/kota	Nasional	Menpan-RB

1.1.2.9 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

1.1.2.9.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai telah menetapkan 2 (Dua) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 142
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

N	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi aktif	62,5%	91,20 %	70,58 %	65,16 %	92,32 %	Sangat Berhasil
		Persentase Usaha Mikro Kecil	25,79 %	73,68 %	45 %	22,13 %	49,17 %	Tidak Berhasil
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase kontribusi Industri terhadap PDRB	6,56%	10,59 %	63,9%	7,72%	12,08%	Tidak Berhasil
		Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin	0	0	13%	4.33%	33,31%	Tidak Berhasil

1.1.2.9.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 143
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Aktif	68,53%	70,58%	62,5%	65,16%	91,20%	92,32%
		Persentase Usaha Mikro Kecil	35%	45%	25,79%	22,13%	22,13%	49,17%
2.	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	61,9 %	63,9%	6,56%	7,72%	10,60%	12,08%



	Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin	9%	13%	0%	4,33 %	0%	33,08%
--	--	----	-----	----	--------	----	--------

1.1.2.9.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 144
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Aktif	73%	65,16%	
		Persentase Usaha Mikro Kecil	58%	22,13%	
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	67%	7.72%	
		Persentase Cakupan Kelompok Bina Pengrajin	16%	4.33%	

1.1.2.9.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 145
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM	Persentase Koperasi Aktif	62,5%		Isi dengan Ada/ Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	25,79%		
2	Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	6,56%		
		Persentase Cakupan Kelompok Pengrajin	0%		

**1.1.2.9.5 Akuntabilitas Keuangan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 8.729.827.382 (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) bersumber dari APBD Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 8.672.547.382 (*Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 57.280.000 (*Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.392.017.867 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 8.334.737.867 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) dan Belanja Modal terealisasi 57.280.000 (*Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 146
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.210.455.282	5.790.388.484	93,24	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	185.128.000	183.965.945	99,37	
		Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	100.000.000	96.725.298	96,73	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2.073.834.100	1.855.010.480	89,45	
		Program pengembangan UMKM	130.410.000	130.253.000	99,88	
2	Meningkatkan Perekonomian dan Daya saing daerah	Program Perencanaan Pembangunan Industri	30.000.000	29.970.000	99,90	

1.1.2.9.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 147
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang mandiri masyarakat yang sejahtera							
Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat kota Dumai	Persentase Koperasi Aktif	70,58%	65,16%	92,32%			
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	45%	22,13%	49,17%			
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	100%	100%	100%	6.210.455.282	5.790.388. 484	93,24
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	35,5%	36,13%	101,77%	185.128.000	183.965.94 5	99,37
Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,5%	49,03%	138,11%	100.000.000	96.725.298	96,73
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	15%	13,67%	91.13%	2.073.834.100	1.855.010.4 80	89,45
Program pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang dibina	4%	4%	100%	130.410.000	130.253.00 0	99,88
Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang mandiri masyarakat yang sejahtera							
Sasaran : Meningkatkan Perekonomian dan Daya saing daerah	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	63,90%	7,72%				



	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	13%	4,33%	33,08%	-	-	-
Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Terelesaiannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi perda	75%	40%	53,33%	30.000.000	29.970.000	99,90

1.1.2.9.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Koperasi Aktif yaitu 2* (dua) Program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan anggaran Rp. 185.128.000 dengan realisasi Rp. 183.965.945 atau 99,37% tingkat efisiensinya adalah 102,42 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (101,77%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,37%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT;**

➤ Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.185.128.000 dengan realisasi Rp. 183.965.945 atau 99,37 %

❖ Sub Kegiatan : Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 185.128.000 dengan realisasi Rp. 183.965.945 atau 99,37%. Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembayaran gaji penyuluh atau pendamping koperasi sebanyak 5 (lima) orang yang wilayah kerjanya di 7 (tujuh) kecamatan se Kota Dumai, Pembinaan langsung kepada koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pemeriksaan dan Pengawasan langsung ke lokasi terhadap koperasi di 7 (tujuh) Kecamatan se Kota Dumai sebanyak 56 (lima puluh enam) koperasi, Pembinaan langsung ke lokasi terhadap koperasi sebagai tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan dan Pengawasan di 7 (tujuh) Kecamatan se Kota Dumai sebanyak 56 (lima puluh enam) koperasi, dan sosialisasi penguatan kelembagaan kesehatan koperasi tentang perizinan usaha dan perundang-undangan bagi koperasi sektor TKBM dan usaha simpan pinjam sebanyak 40 (empat puluh) orang peserta dari pengurus/pengelola koperasi.

2. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dengan anggaran Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 96.725.298 atau 96,73% tingkat efisiensinya adalah 142,78 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (138,11%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,73%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT;**

➤ Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 96.725.298 atau 96,73%

❖ Sub Kegiatan : Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya dengan



anggaran Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 96.725.298 atau 96,73% . Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk pelatihan dasar koperasi terhadap pengurus/pengelola koperasi dan pelaku usaha UP2K dibawah binaan PKK Kota Dumai sebanyak 100 (seratus) orang, dan pelatihan teknik Quilting terhadap pengurus/pengelola koperasi dan pelaku usaha UP2K dibawah binaan PKK Kota Dumai sebanyak 52 (lima puluh dua) orang.

b. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Usaha Mikro dan Kecil yaitu 2* (dua) Program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro dengan anggaran Rp.2.073.834.100 dengan realisasi Rp.2.013738.540 atau 97,10% tingkat efisiensinya adalah 93,85 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (91.13%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (97,10%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;

➤ Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Pendataan, Kemitraan, Kemiudahan Perizinan, Penguatan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan anggaran Rp. 2.073.834.100 dengan realisasi Rp. 2.013738.540 atau 97,10%

❖ Sub Kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan anggaran Rp.1.705.474.100 dengan realisasi Rp. 1.645.650.480 atau 96,49%

❖ Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan usaha mikro dengan anggaran Rp.159.000.000 dengan realisasi Rp. 158.728.060 atau 99,83%.

❖ Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro dengan anggaran Rp. 209.360.000 dengan realisasi Rp. 209.360.000 atau 100%.

2. Program Pengembangan UMKM dengan anggaran Rp.130.410.000 dengan realisasi anggaran Rp.130.253.000 atau 99,88% tingkat efisiensinya adalah 100 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,88%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIENSI**;

➤ Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Kecil dengan anggaran Rp.130.410.000 dengan realisasi anggaran Rp.130.253.000 atau 99,88%.

❖ Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi dengan anggaran Rp.130.410.000 dengan realisasi anggaran Rp.130.253.000 atau 99,88%.

c. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB yaitu tidak ada* anggaran yang mendukung indikator tersebut tingkat efisiensinya adalah **0** berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (12,08%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (0%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**; dikarenakan tidak adanya anggaran yang mendukung indikator tersebut.

d. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 1* (satu) Program yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran Rp. 30.000.000 dengan



realisasi anggaran Rp.29,970.000 atau 99,90% tingkat efisiensinya adalah 33,11 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (33,08%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,90%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG;**

- Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 30.000.000 dengan realisasi anggaran Rp.29,970.000 atau 99,90%
- ❖ Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat dengan anggaran Rp. 30.000.000 dengan realisasi anggaran Rp.29,970.000 atau 99,90%.

1.1.2.9.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 148
Prestasi dan Penghargaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023	Peringkat I Jenis Jasa	Provinsi	Gubernur Riau

1.1.2.10 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.1.2.10.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 149
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

N	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Predikat Capaian
1	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA)	1	100	1	1	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah)	13.058.828.385.000	153.54	9.450.000.000.000	3.386.922.760.000	35	Tidak Berhasil



3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	85	105	81	95,40	118	Sangat Berhasil
---	---	----------------------------	----	-----	----	-------	-----	-----------------

1.1.2.10.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 150
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA)	1	1	1	1	100	100
2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rupiah)	5.000.000.000	9.450.000.000	13.058.828.385	3.386.922.760	153,54	35
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	81	81	85	95,5	105	118

1.1.2.10.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 151
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA)	1	1	100



2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rupiah)	9.450.000.000.000	3.386.922.760.000	35
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	81	95,54	118

1.1.2.10.4 perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 152
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA)	1		Tidak Ada
2.	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rupiah)	13.058.828.385.000		Tidak Ada
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	85		Tidak Ada

1.1.2.10.5 akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.873.362.971 (Sebelas Milyar Delapan ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) bersumber dari APBD Kota Dumai Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 10.901.230.971 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 972.132.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.858.096.550 (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 7.763.479.063 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp.969.457.487 (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut :



Tabel 153
sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya investor di Kota Dumai	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	255.000.000	244.524.600	95,89	95,89
		Program Promosi Penanaman Modal	38.279.150	21.327.010	55,71	55,71
2.	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	499.968.000	370.519.014	74,11	74,11
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	159.761.100	158.840.000	99,42	99,42
		Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	9.681.400	9.661.500	99,79	99,79

1.1.2.10.6 Pencapaian kinerja dan anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 154
Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Dumai Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan Investasi	Laju Pertumbuhan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	4,36 %	0 %	0			
Sasaran : Meningkatkan investor di Kota Dumai	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1 Perusahaan	2 Perusahaan	200	293.279.150	265.851.610	75,80
Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	40,26%	40,26%	100	255.000.000	244.524.600	95,89
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investor terhadap peningkatan investasi	10 %	10	200	38.279.150	21.327.010	55,71
Sasaran : Meningkatkan investasi di	Jumlah nilai investasi berskala	9.450.000.000,-	3.386.922.760.000,-	35	499.968.000	370.519.014	74,11



Kota Dumai	nasional (PMDN/PMA) Rupiah)						
Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi Kota Dumai	100 %	35 %	35	499.968.000	370.519.014	74,11
Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Mutu Pelayanan	B	A	100	169.442.500	168.501.500	99,42
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	95,54	118			
Program : Pelayanan Penanaman Modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan	80 %	1.200 Pemohon	100	159.761.100	158.840.000	99,42
Program : Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi	100 %	25%	25	9.681.400	9.661.500	99.79

1.1.2.10.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pada Indikator Kinerja Utama Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) tingkat efisiensinya adalah 132% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (75,80%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN;
- 2) Pada Indikator Kinerja Utama Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rupiah yaitu tingkat efisiensinya adalah 47% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (35%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (74,11%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori KURANG EFISIEN;
- 3) Pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu tingkat efisiensinya adalah 119% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (118%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,42%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN;

**1.1.2.11 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata****1.1.2.11.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023**

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel Pengukuran Kinerja dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 155
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realaisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	62	172 %	60	95	158.33 %	Sangat berhasil
		Persentase Wirausaha Muda	75	0 %	70	80	114.29 %	Sangat Berhasil
		Cakupan Pembinaan Olahraga	28	112 %	25	25	100%	Berhasil
		Jumlah Prestasi Olahraga	4	200%	3	2	66.67%	Cukup berhasil
2	Meningkatnya kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata	298 %	620%	58%	193.8%	334 %	Sangat berhasil
		Domestik	123.541	314%	39.718	78.481	197.5 %	Sangat berhasil
		Mancanegara	19.312	503%	3872	6.031	155.75 %	Sangat berhasil
		Lama Kunjungan	2	2	2	2	100 %	Berhasil
		PAD Sektor Pariwisata	14.936.812.50	18.815.657.89	15.086.180.62	25.569.796.20	169.4 %	Sangat berhasil

1.1.2.11.2 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :



Tabel 156
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
URAIAN								
1	Meningkatnya prestasi Daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	55	60	62	95	172%	158.33%
		Persentase Wirausaha Muda	70	70	75	80	0%	114.29%
		Cakupan Pembinaan Olahraga	25	25	28	25	112%	100%
		Jumlah prestasi Olahraga	2	3	4	2	200%	66.67%
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata	48%	58%	298%	193.8%	620%	334%
		Domestik	39.325	39.718	123.541	78.481	314%	197.5%
		M mancanegara	3.834	3872	19.312	6.031	503%	155.75%
		Lama Kunjungan	2	2	2	2	2	100%
		PAD Sektor Pariwisata	14.936.812.500	15.086.180.625	18.815.657.890	25.569.796.203	126 %	169.4%

1.1.2.11.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 157
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	75	95	126,6 %
		Presentase Wirausaha Muda	90	80	88.8 %
		Cakupan Pembinaan Olahraga	29	25	86,2 %
		Jumlah Prestasi Olahraga	4	2	50 %
	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata	88 %	51.06%	58.02 %
		Domestik	112.998	78.481	69,45%
		M mancanegara	16.205	6.031	37.25 %



		Lama Kunjungan Wisata	3	2	66.67%
		PAD Sektor Pariwisata	17.086.180.625	25.569.796.203	149,65 %

1.1.2.11.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 158
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya Prestasi Daerah dalam Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	95	-	Tidak ada target Nasional yang berhubungan dengan kinerja Diskopar
		Persentase Wirausaha Muda	80	-	
		Cakupan Pembinaan Olahraga	25	-	
		Jumlah Prestasi Olahraga	2	-	
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan Wisata	51.06%	-	
		Domestik	78.481	-	
		Mancanegara	6.031	-	
		Lama Kunjungan Wisata	2	-	
		PAD Sektor Pariwisata	25.569.796.203	-	

1.1.2.11.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 25.403.927.309,- (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah) bersumber dari DAU dan Pendapatan Bagi Hasil. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 17.371.143.634,- (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp 8.032.783.675,- (Delapan Milyar Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 24.594.151.700,09 (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Koma Nol Sembilan Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp 17.126.632.108,65 (Tujuh Belas Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Koma Enam Puluh Lima Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp 7.812.519.591,44 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Empat Puluh Empat Rupiah)



Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 159
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
I	Pemuda				
	Meningkatnya prestasi Daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.903.308.010,00	1.902.164.793,00	99.93%
II	Olahraga				
	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.688.993.819,00	6.505.412.929,00	97.25%
III	Pariwisata				
	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.173.438.700,00	8.065.097.053,99	98.67%
		Program Pemasaran Pariwisata	2.050.424.873,00	2.049.830.668,00	99.97%
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	554.751.370,00	547.141.399,00	98.63%
JUMLAH			19.370.916.772,00	19.069.646.842,99	98.89%

1.1.2.11.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 160
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran %
I	Pemuda							
1.	Meningkatnya prestasi Daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda				1.903.308.010	1.902.164.793	99.93



	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif	75 orang	95 orang	126.6%	1.095.808.010	1.094.804.793	99.95
		Presentase Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader, Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	70 orang	80 orang	114.29 %	807.500.000	654.920.763	99.88
II	Olahraga							
	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Cakupan pembinaan Olahraga Jumlah prestasi Olahraga	3 kegiatan	3 kegiatan		6.688.993.819	6.505.412.929	97.25
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase Dokumen/Laporan Pelaksanaan	3 medali	2 medali	66,67%	6.688.993.819	6.505.412.929	97.25
III	Pariwisata							
	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata Lama Kunjungan PAD Sektor Pariwisata	49%	49%	334 %	10.778.614.943	10.662.072.120	99,92
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara	8 unit	8 unit	100%	8.173.438.700	8.065.097.053,09	98.67%
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 dokumen	2 dokumen	100%	2.050.424.873	2.049.830.668	99.97%
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	55 orang	55 orang	100%	554.751.370	547.141.399	98.63%



	Jumlah				19.069.649.842	75.06
	Belanja Pendukung				6.334.277.467	24.93
	Total belanja				25.403.927.309	

1.1.2.11.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mengukut akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk efisiensi penggunaan sumber daya. Analisi atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 161
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi		Ket
1	Meningkatnya prestasi Daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	158.33%	99.88 %	1.58	efisien	
		Persentase Wirausaha Muda	114.29%	99.95%	1.51	efisien	
		Cakupan Pembinaan Olahraga	100%	97.25%	1.02	efisien	
		Jumlah prestasi Olahraga	66.67 %	98.79 %	0,67	Kurang efisien	
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Kota Dumai	Kunjungan wisata	334 %	99.92 %	3.34	efisien	

1.1.2.11.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 162
Prestasi dan Penghargaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Kejuaraan Sumatera On Stage-II : Marching Art Championship kelas Cultural Parade oleh Gita Wibawa Praja Kota Dumai	Juara 1	Regional Sumatera	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dan KORMI Provinsi Riau
2	Kejuaraan Sumatera On Stage-II : Marching Art Championship kelas Brass & Wind Ensemble oleh Gita Wibawa Praja Kota Dumai	Juara 1	Regional Sumatera	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dan KORMI Provinsi Riau
3	Kejuaraan Sumatera On Stage-II : Marching Art Championship kelas Marching Art Concert oleh Gita Wibawa Praja Kota Dumai	Juara 2	Regional Sumatera	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dan KORMI Provinsi Riau
4	Kejuaraan Sumatera On Stage-II : Marching Art Championship oleh Gita Wibawa Praja Kota	Sebagai Peserta	Regional Sumatera	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau dan KORMI Provinsi Riau



	Dumai			
5	Kegiatan Pemilihan Bujang dan Dara Provinsi Riau	Dara III	Tingkat Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi Riau
6	Kejuaraan Daerah (Kejurda) Pelajar Sepak Takraw Tahun 2023	Juara 2 Inter Regu	Tingkat Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi Riau
7	Kejuaraan Daerah (Kejurda) Pelajar Sepak Takraw Tahun 2023	Juara 2 Double Regu	Tingkat Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi Riau

1.1.2.12 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1.1.2.12.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 163
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

N	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Targe	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Derajat Pendiidikan Masyarakat Kota Dumai	Persentase perpustakaan yang sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	20%	100%	40 %	34%	85%	Tinggi
		Persentase Naskah Kuno yang diakuisisi/ dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai	20%	100%	40%	40%	100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase OPD/ Instansi Pemerintah/ Perusahaan/ Organisasi Sosial Polotik /Ormas/Perseorangan yang melaksanakan Penyelenggaraan Kearsipan Secara NSPK	19%	100 %	38%	38 %	100 %	Sangat Tinggi
		Indeks Pengawasan Kearsipan terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	70 Poin	23,38 poin	75 poin	45,65 poin	60,86 %	Rendah

1.1.2.12.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :



Tabel 164
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Persentase perpustakaan yang sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	20%	40%	320%	34%	100%	85%
		Persentase Naskah Kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di Wilayah Kota Dumai	20%	40%	320%	40%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase OPD/ Instansi Pemerintah/ Perusahaan/ Organisasi Sosial Polotik /Ormas/Perseorangan yang melaksanakan Penyelenggaraan Kearsian Secara NSPK	19%	38%	319%	38%	100%	100%
		Indeks Pengawasan Kearsipan terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	70	75 Poin	323,38	45,65	33,4%	60,86%

1.1.2.12.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 165
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Persentase perpustakaan yang sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	100% (50 perpustakaan)	34% (17 Perpustakaan)	34%



		Persentase Naskah Kuno yang diakuisisi/ dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di Wilayah Kota Dumai	100% (5 Naskah)	40% (2 Perpustakaan)	40%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase OPD/ Instansi Pemerintah/ Perusahaan/ Organisasi Sosial Politik /Ormas/Perseorangan yang melaksanakan Penyelenggaraan Kearsian Secara NSPK	100% (36 OPD)	38% (14 OPD)	38%
		Indeks Pengawasan Kearsipan terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	80 Poin	45,65 Poin	60,86%

1.1.2.12.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional (Target SPM) sebagaimana table Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional sebagai berikut :

Tabel 166
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Persentase perpustakaan yang sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	100%	Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
		Persentase Naskah Kuno yang diakuisisi/ dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di Wilayah Kota Dumai	100%	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase OPD/ Instansi Pemerintah/ Perusahaan/ Organisasi Sosial Politik /Ormas/Perseorangan yang melaksanakan Penyelenggaraan Kearsian Secara NSPK	100%	
		Indeks Pengawasan Kearsipan terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	33,4%	



1.1.2.12.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 5.845.456.760 (*Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*) bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp.5.782.556.760,- (*Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp62.900.000 (*Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 5.384.096.300 (*Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 5.322.802.344 (*Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 61.293.956 (*Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah.*)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 167
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Pembinaan Perpustakaan	498.036.800	490.275.213	98,44%	
		Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	15.000.000	14.880.000	99,20%	
2	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Arsip	230.013.000	223.572.120	97,20%	

1.1.2.12.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 168
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan : Membangun Masyarakat Dumai Yang Produktif,	Persentase perpustakaan yang sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)	40%	38%	85%	Rp. 513.036.800,-	Rp. 505.155.213,-	98,46%



Berdaya Saing dan Sejahtera							
Sasaran : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Persentase Naskah Kuno yang diakuisisi/ dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai	40%	40%	100%			
Tujuan : Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Persentase OPD / Instansi Pemeintah /Perusahaan / Organisasi Sosial Politik/ Ormas/ Perseorangan yang melaksanakan Penyelenggaraan Kearsipn secara NSPK	38%	38%	100%	Rp. 230.013.000,-	Rp. 223.572.120	97,20%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pengawasan Kearsipan terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	75 poin	45,65 poin	60,86%			

1.1.2.12.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Persentase perpustakaan yang sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan) tingkat efisiennya 0,86 adalah berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (98,44%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (85%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori KURANG EFISIEN.
- 2) Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase Naskah Kuno yang diakuisisi/ dialihmedia (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai tingkat efisiensinya 1,00 adalah berasal dari perhitungan capaian kinerja tahun 2023 (99,20%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori EFISIEN.
- 3) Pada Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Persentase OPD / Instansi Pemeintah /Perusahaan / Organisasi Sosial Politik/ Ormas/ Perseorangan yang melaksanakan Penyelenggaraan Kearsipn secara NSPK tingkat efisiensinya 1,03 berasal dari perhitungan capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,26%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori EFISIEN.
- 4) Pada Indikator Kinerja Utama 4 yaitu Indeks Pengawasan Kearsipan terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai tingkat efisiennya 0,61 berasal dari perhitungan capaian kinerja tahun 2023 (60,86%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,42%). Pencapaian Tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya



termasuk dalam kategori KURANG EFISIEN.

1.1.2.12.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 169
Prestasi dan Penghargaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023**

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Sertifikasi Perpustakaan	Sertifikasi Akreditasi "A"	Nasional	Perpusnas RI
2.	Standarisasi PISA	Layanan Ekstensi Perpustakaan Tugu Reformasi	Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

1.1.3 Capaian Kinerja Urusan pemerintahan pilihan

Capaian Kinerja Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari beberapa urusan antara lain:

- 1) Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan;
- 2) Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata;
- 3) Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- 4) Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan;
- 5) Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 6) Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

1.1.3.1 Dinas Perikanan

1.1.3.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target Dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Perikanan Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis/kinerja utama dengan 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar di bawah ini.

**Tabel 170
Pengkuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023**

No	Sasaran		2022		2023			
	Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap (ton)	1.020,3	144,52%	742	1.057,43	142,51%	Sangat Berhasil
		Produksi perikanan budidaya (ton)	382,69	132,88%	308	344,07	111,71%	Sangat Berhasil
		Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	18	100%	20	23	115%	Sangat Berhasil



	Cakupan bina kelompok budidaya (kelompok)	31	100%	34	34	100%	Sangat Berhasil
	Angka Konsumsi Ikan (kg/ kapita/ tahun)	49,64	118,19%	40	N/A	N/A	N/A

1.1.3.1.2 Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya dapat dijabarkan pada Tabel di bawah ini.:

Tabel 171
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	706	742	1.020,3	1.057,43	144,52%	142,51%
		Produksi Perikanan Budidaya (ton)	288	308	382,69	344,07	132,88%	111,71%
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan (kelompok)	18	20	18	23	100%	115%
		Cakupan Bina Kelompok Budidaya (kelompok)	31	34	31	47	100%	138,23%
		Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	42	42	49,64	N/A	118,19%	N/A

1.1.3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 172
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d 2023	Tingkat Kemajuan	Keterangan
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	853	1.057,43	123,96%	Data s/d tahun 2023
		Produksi Perikanan Budidaya (ton)	377	344,07	91,26%	Data s/d tahun 2023
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan (kelompok)	26	23	88,46%	Data s/d tahun 2023
		Cakupan Bina Kelompok Budidaya (kelompok)	43	47	109,30%	Data s/d tahun 2023
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	42	49,64	118,19%	Data s/d tahun 2022

1.1.3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Data capaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kota Dumai perlu dilakukan perbandingan dengan realisasi nasional. Data perbandingan yang dilakukan adalah data realisasi tahun 2022. Hal ini dilakukan karena data pada tahun 2022 sudah divalidasi dan dipublikasi secara nasional.



Adapun data perbandingan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 173
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Provinsi Riau	KKP	Keterangan
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.020,3	139.309,65	7.046.425,53	
		Produksi Perikanan Budidaya (ton)	382,69	120.319,50	14.776.056,93	
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan (kelompok)	18	-	-	Kewenangan Kota
		Cakupan Bina Kelompok Budidaya (kelompok)	31	-	-	Kewenangan Kota
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	49,64	50,31	59,53	

1.1.3.1.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan perikanan, Dinas Perikanan Kota Dumai didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.056.886.679,- (delapan milyar lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Anggaran belanja operasi sebesar Rp. 7.397.327.473,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 659.559.206,- (enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam rupiah).

Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai adalah sebesar Rp 7.754.853.716,57 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah lima puluh tujuh sen). Adapun rincian realisasi anggaran tersebut adalah (1) belanja operasi sebesar Rp. 7.108.879.518,57 (tujuh milyar seratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah lima puluh tujuh sen); dan (2) belanja modal sebesar Rp. 645.974.198,- (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat seratus sembilan puluh delapan rupiah). Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 174
realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap dan Budidaya	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.024.608.581	5.769.386.784	95,76%
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	213.726.500	206.674.265	96,70%
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.743.552.298	1.703.809.367,50	97,72%
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	74.999.300	74.983.300	99,98%
Total			8.056.886.679	7.754.853.716,57	96,25%



1.1.3.1.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 175
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (5)
Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha Perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap	1.050	1.401,5	133,48%			
Sasaran: Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap (ton)	742	1.057,43	142,51%			
	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	308	344,07	111,71%			
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (kelompok)	20	23	115%			
	Cakupan Bina Kelompok Budidaya (kelompok)	34	47	138,23%			
	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	42	N/A	N/A			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100%	100%	100%	6.024.608.581	5.769.386.784	95,76%
Program Pengelolaan Perikanan	Cakupan Kelompok Nelayan Terbina	76,92%	88,46%	115%	213.726.500	206.674.265	96,70%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan Kelompok Aktif Budidaya Terbina	77,5%	117,5%	151,61%	1.743.552.298	1.703.809.367,50	97,72%
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase wilayah sampel AKI	100%	100%	100%	74.999.300	74.983.300	99,98%

1.1.3.1.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1.1.3.1.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023, Dinas Perikanan Kota Dumai mendapatkan penghargaan dari Walikota Dumai dalam Implementasi Kampung Germas. Penghargaan yang diberikan karena Dinas Perikanan melakukan kerja nyata terkait kehidupan germas dalam menurunkan angka keluarga beresiko stunting. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan budidaya ikan dalam ember (budikdamber) kepada keluarga beresiko stunting untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan meningkatkan pendapatan

1.1.3.2 Dinas Perdagangan

1.1.3.2.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Perdagangan Kota Dumai telah menetapkan 2 Sasaran Strategis / Kinerja Utama dengan 8 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis



dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 176
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

N	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predik t Capaian
1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,09 %	95,79 %	14,73 %	Data di BPS terbit bulan Februari 2024	--	-
		Ekspor bersih perdagangan	6637,96 Milyar	105,24 %	6339,03 Milyar	Data di BPS terbit bulan Februari 2024	--	-
		Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	18,06 %	99,12 %	20,43 %	18,94 %	992,71 %	Sangat Berhasil
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	28,65 %	42,86 %	72,07 %	68,28 %	994,74 %	Sangat Berhasil
		Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal	0	0	10,00 %	0	-0	Tidak Berhasil
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	100 %	100%	100 %	100 %	1100 %	Sangat Berhasil
	2	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100 %	100 %	100 %	100 %	1100 %
Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting			7 Kecamatan	100 %	7 Kecamatan	7 Kecamatan	1100 %	Sangat Berhasil



1.1.3.2.2 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 177
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,71 %	14,73 %	14,09 %	Data di BPS terbit bulan Februari 2024	95,79 %	-
		Ekspor bersih perdagangan	6307,49 Milyar	6339,03 Milyar	6637,96 Milyar	Data di BPS terbit bulan Februari 2024	105,24 %	-
		Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	18,22 %	20,43 %	18,06 %	18,94 %	99,12 %	92,71 %
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	66,85 %	72,07 %	28,65 %	68,28 %	42,86 %	94,74 %
		Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal	10,00 %	10,00 %	-	-	-	-
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100%	100 %
2	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100 %	100 %



1.1.3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 178
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,77 %	Data di BPS terbit bulan Februari 2024	-
		Ekspor bersih perdagangan	6434,59 Milyar	Data di BPS terbit bulan Februari 2024	-
		Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	20,48 %	18,94 %	92,48 %
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	85,59 %	68,28 %	79,78 %
		Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal	30,00 %	-	-
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2.	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100,00 %	100,00 %	100,00 %
		Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100,00 %

1.1.3.2.4 Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana table berikut :



Tabel 179
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Data di BPS terbit bulan Februari 2024	Tidak Ada	Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas Perdagangan Kota Dumai
		Ekspor bersih perdagangan	Data di BPS terbit bulan Februari 2024	Tidak Ada	
		Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	18,94 %	Tidak Ada	
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	68,28 %	Tidak Ada	
		Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal	0	Tidak Ada	
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	100,00 %	Tidak Ada	
2	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100,00 %	Tidak Ada	
		Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	7 Kecamatan	Tidak Ada	

1.1.3.2.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Perdagangan Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 10.328.107.745 (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) bersumber dari APBD. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 9.814.737.402 (sembilan milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 513.370.343 (lima ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 9.527.658.313,39 (sembilan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas koma tiga puluh sembilan rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp 9.134.114.228,06 (sembilan milyar seratus tiga puluh empat juta seratus empat belas ribu dua ratus dua puluh delapan koma enam rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp 393.544.085,33 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut :



Tabel 180
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perdagangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang	6.350.603.202	6.018.971.749	94,78	
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	20.000.000	17.133.000	85,67	
		Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	165.000.000	156.567.552	4,89	
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.717.504.543	3.261.598.932,39	87,74	
3	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	75.000.000	73.387.080	97,85	
J U M L A H			10.328.107.745	9.527.658.313,39	92,25%	

1.1.3.2.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 181
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,73 %	Data di BPS terbit bulan Februari 2024				
Sasaran : Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Ekspor bersih perdagangan	6339,03 Milyar	Data di BPS terbit bulan Februari 2024				
	Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrollogian	20,43 %	18,94 %	92,71 %			



	Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrollogian	72,07 %	68,28 %	94,74 %			
	Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal	10,00 %	0	0			
	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	100,00 %	100,00 %	100,00 %			
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase realisasi pelayanan dokumen SKA	5%	-	-	20.000.000	17.133.000	85,67
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang ditera / tera ulang dan dilakukan pengawasan / penyuluhan	16,67%	-	-	165.000.000	156.567.552	94,89
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman	100,00 %	100,00 %	100,00 %	3.717.504.543	3.261.598.932,39	87,74
Tujuan : Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100,00 %	100,00 %	100,00 %			
Sasaran : Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Kestabilan Harga	Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100,00 %			
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 kecamatan	100,00%	100,00%	100,00 %	75.000.000	73.387.080	97,85

**1.1.3.2.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 182
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KET
1	2	3	4	5	6		7
1.	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Data di BPS terbit bulan Februari 2024	85,67			
		Ekspor bersih perdagangan	Data di BPS terbit bulan Februari 2024	85,67			
		Capaian Pelayanan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	92,71	94,89	0,98	Kurang Efisien	-
		Capaian Pengawasan dan Penyuluhan Tera/Tera Ulang Kemetrolgian	94,74	94,89	0,99	Kurang Efisien	-
		Cakupan Pembinaan Pedagang Usaha Informal	0	0	0	Kurang Efisien	-
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	100	87,74	1,13	Efisien	-
2.	Mewujudkan Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	100	97,85	1,02	Efisien	-
		Capaian pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting	100	97,85	1,02	Efisien	-

1.1.3.2.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Perdagangan Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 183
Prestasi dan Penghargaan

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1.	Implementasi SAKIP Internal	B	-	-
2.	Pasar Tertib Ukur	Pasar Tertib Ukur	Nasional	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

1.1.4 Capaian Kinerja Penunjang Urusan, Pendukung dan Pengawasan Pemerintahan yang dilaksanakan.

Capaian kinerja Penunjang Urusan, Pendukung dan Pengawasan yang berkaitan dengan urusan:

- 1) Perencanaan dan Kelitbangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 4) Pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

1.1.4.1 Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

1.1.4.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Tujuan, dan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan antara Target dan Realisasinya.

Tabel 184
Capaian Target Indikator Kinerja Utama BAPPEDALITBANG Kota Dumai Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023			Prediket Capaian
		Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	83,28	99,14%	85	84,01	98,84%	Sangat Berhasil
Sasaran 1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	96,40%	96,40%	100%	95,02%	95,02%	Sangat Berhasil
	Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil



Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	20%	100%	25%	25%	100%	Sangat Berhasil

1.1.4.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut

Tabel 185
Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	84	85	83,28	84,01	99,14	98,84
2.	Sasaran 1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%	100%	96,40%	95,02%	96,40	95,02
		Persentase Dukungan RKPDP Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	100%	100%	100%	100	100
		Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100	100
		Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	100%	100%	100	100
3.	Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	20%	25%	20%	25%	100	100

1.1.4.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 186
Perbandingan realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Akhir Rencana Strategis

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi (s.d. Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	88	84,01	95,45%
Sasaran 1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%	95,02%	95,02%
	Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	100%	100%
	Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	100%	100%
	Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	100%
Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	40%	25%	62,50%

1.1.4.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk kedua urusan penunjang tersebut tidak terdapat target SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang harus dilaksanakan oleh Badan.



Tabel 187
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional	Keterangan
1.	Sasaran 1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	95,02%	-	Tidak ada target nasional yang berhubungan langsung dengan target kinerja Bappedalitbang
		Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi	100%	-	
		Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan	100%	-	
		Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	-	
2.	Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Implementatif	25%	-	Tidak ada target nasional yang berhubungan langsung dengan target kinerja Bappedalitbang

1.1.4.1.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 12.916.850.257,- (dua belas milyar Sembilan ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah,-) bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun 2023. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 12.184.826.757 (dua belas milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 732.023.500 (tujuh ratus tiga puluh dua juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.140.881.109 (dua belas milyar seratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 11.428.914.109 (sebelas milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) dan Belanja Modal Rp. 711.967.000 (tujuh ratus sebelas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Tabel 188
Sasaran Strategis dan Anggaran (Program Prioritas)

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	%	Rata-Rata
1.	Sasaran 1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah	1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.311.363.300	1.046.290.981	79,79	
		2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	1.781.192.210	1.695.165.625	95,17	



		Pembangunan Daerah				
2.	Sasaran 2: Meningkatnya Hasil Kelitbangan didalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	289.800.263	268.760.950	92,74	

1.1.4.1.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 189
Pencapaian kinerja dan anggaran

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Kota Dumai	Indeks Perencanaan	85	84,01	95,45			
Sasaran 1: Terwujudnya Konsistensi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Efektivitas Pembangunan Daerah							
Program:							
1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD 2. Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	95,02%	95,02	1.311.363.300	1.046.290.981	79,79
		100%	100%	100			
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	1. Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas	100%	100%	100	1.781.192.210	1.695.165.625	95,17

1.1.4.1.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pada Indikator Kinerja Utama “Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD” tingkat efisiensinya adalah 1,19 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (95,02%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (79,79%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori Efisien;



b. Pada Indikator Kinerja Utama “Persentase Dukungan RKPD Kota Dumai terhadap Prioritas Nasional dan Propinsi” tingkat efisiensinya adalah 1,05 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (95,17%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori Efisien;

c. Pada Indikator Kinerja Utama “Persentase Kegiatan Prioritas Kepala Daerah yang Diimplementasikan” tingkat efisiensinya adalah 1,05 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (95,17%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori Efisien;

1.1.4.1.8 Prestasi dan Penghargaan

Tabel 190
prestasi dan penghargaan

No.	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1.	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2023	Peringkat Pertama (Terbaik)	Tingkat Kota se- Propinsi Riau	Pemerintah Provinsi Riau
2.	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Nasional Tahun 2023	10 Besar	Tingkat Kota se- Indonesia	Kementerian PPN/Bappenas
3.	Implementasi SAKIP Internal Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023	Peringkat Pertama	Pada Klaster Utama	Pemerintah Kota Dumai (Inspektorat)

1.1.4.2 Badan Pendapatan Daerah

1.1.4.2.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai telah menetapkan satu Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan satu Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam Tabel dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 191
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	48.78 %	95.64 %	52	63.41 %	121.93 %	Sangat Berhasil

1.1.4.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :



Tabel 192
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	51%	52%	48.78%	63.41%	95.64%	121.93%

1.1.4.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 193
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Tercapainya penerimaan pajak daerah	Persentase pajak daerah terhadap PAD	54 %	63,41 %	280,27%

1.1.4.2.4 Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 194
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Tercapainya penerimaan pajak daerah	Persentase pajak daerah terhadap PAD	104,2%	102,8%	Realisasi Nasional merupakan Realisasi Pajak Pusat

1.1.4.2.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 39.049.135.188 (Tiga puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 36.044.266.824 (Tiga puluh Enam Milyar Empat puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp 3.004.868.364 (Tiga Milyar Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).



Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 35.981.045.374 (Tiga Puluh Lima milyar Sembilan ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp 33.290.589.274 (Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp 2.690.456.100 (Dua milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Empat ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 195
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.132.856.912	6.619.705.403	92,88	6.876.281.158

1.1.4.2.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 196
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	31 %	30,59 %	98,68 %	39.049.135.188	35.981.045.374	92,14%
Sasaran : Tercapainya penerimaan pajak daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	52 %	63,41 %	121,94 %			
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pencapaian target pendapatan Daerah Kota	100 %	100 %	100 %	7.132.856.912	6.619.705.403	92,88 %
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan	100 %	100 %	100 %	31.916.278.276	29.377.209.971	91,99%

1.1.4.2.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pada Indikator Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan tingkat efisiensinya adalah 108,7% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (91,99%). Pencapaian tersebut



menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN;

- b. Pada Indikator Persentase pencapaian target pendapatan Daerah Kota tingkat efisiensinya adalah 107,6 % berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (92,88%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN.

1.1.4.2.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 197
Prestasi dan Penghargaan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Pelaksanaan PKS-tripartit antara DJP-DJPK-Pemda	Peringkat 2	Provinsi	DJP Prov. Riau Kemenkeu RI

1.1.4.3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1.1.4.3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai telah menetapkan satu Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan dua Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 198
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah	Persentase SILPA	12,80%	109,37%	13,70%	7,84%	174,74%	Sangat Berhasil
2	daerah sesuai peraturan perundang – undangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	100%	WTP	WTP	100%	Sangat Berhasil

1.1.4.3.2 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :



Tabel 199
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Terlaksananya penatausahaan	Persentase SILPA	14%	13,70%	12,80%	7,84%	109,37%	174,74%
2.	keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang – undangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%

1.1.4.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 200
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang – undangan	Persentase SILPA	12,39%	7,84%	Melampaui dari target yang ditetapkan
		Opini BPK	WTP	WTP	Tercapai

1.1.4.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 201
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang – undangan	Persentase SILPA	12,80%	n/a	
		Opini BPK	WTP	n/a	

1.1.4.3.5 Akuntabilitas keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 53.019.419.721 (lima puluh tiga miliar sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)



bersumber dari APBD Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 50.423.249.137 (lima puluh miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp 2.464.062.332 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 50.884.301.379 (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 48.393.191.307 (empat puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ratus ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 2.388.949.349 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 202
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang – undangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	14.014.775.152	13.042.865.794	93,07	
2		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.470.997.400	2.332.871.460	94,41	

1.1.4.3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 203
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah							
Sasaran : Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang – undangan							
Program : Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	13.042.865.794	93,07%
Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib	100%	100%	100%	100%	2.332.871.460	94,41%



1.1.4.3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pada Indikator Kinerja Utama pertama yaitu Persentase SILPA tingkat efisiensinya adalah 187,34% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (174,74%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (93,27%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- Pada Indikator Kinerja Utama kedua yaitu Opini BPK tingkat efisiensinya adalah 107,21% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (93,27%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN.

1.1.4.3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 204
Prestasi dan Penghargaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Sertifikat	Penghargaan Terbaik I untuk Responden Survei KPKNL Dumai Tahun 2022	Nasional	Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2	Sertifikat	Penghargaan Tertinggi I Produktivitas Lelang Non Eksekusi Tertinggi Tahun 2022	Nasional	Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3	Sertifikat	Penghargaan Tertinggi II Jumlah Objek Penilaian BMN/BMD Tertinggi Tahun 2022	Nasional	Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4	Piagam	Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan tahun 2022	Nasional	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau
5	Plakat	Penghargaan Ketepatan Setoran Iuran I IWP, JKK, JKM Cawu II	Nasional	Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) BUMN

1.1.4.4 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.1.4.4.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 205
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	Sasaran		2022		2023			
	Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalisme sumber daya aparatur	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	97.7%	97.7%	100%	85.8%	85.8%	Sangat Berhasil
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Fungsional sesuai dengan Peta Jabatan	99.4%	121.3%	84%	99.1%	118%	Sangat Berhasil
		Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin	85.7%	87.5%	93.5%	100%	107%	Sangat Berhasil
		Persentase Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	3.7%	92.5%	5%	37.8%	756%	Sangat Berhasil

1.1.4.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 206
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalisme sumber daya aparatur	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	97.7%	85.8%	97.7%	85.8%
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Fungsional sesuai dengan Peta Jabatan	82%	84%	99.4%	99.1%	121.3%	118%
		Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin	98%	93.5%	85.7%	100%	87.5%	107%
		Persentase Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	4%	5%	3.7%	37.8%	92.5%	756%

**1.1.4.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra**

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 207
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalisme sumber daya aparatur	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%	85.8%	85.8%
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Fungsional sesuai dengan Peta Jabatan	90%	99.1%	110.1%
		Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin	98%	100%	102%
		Persentase Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	8%	37.8%	472.5%

1.1.4.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang tugas Wali Kota dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai mendukung terwujudnya Misi kedelapan RPJMN Tahun 2020-2024 “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya”. Serta mendukung pelaksanaan agenda pembangunan ketujuh RPJMN Tahun 2020-2024 “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik” melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Sebagai unsur penunjang dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai mendukung terwujudnya “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola” pada Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik. Adapun indikator dan target nasional yang ditetapkan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai sebagai unsur penunjang dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tersaji pada tabel berikut:



Tabel 208

Indikator dan Target Nasional Sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Sasaran	Indikator	Target 2024
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Indeks Sistem Merit Kategori \geq Baik	300

1.1.4.4.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 10.070.867.140 (sepuluh miliar tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 9.949.394.762 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 121.472.378 (seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.761.775.684 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 9.641.943.684 (sembilan miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 119.832.000 (seratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 209

Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalisme sumber daya aparatur	Kepegawaian Daerah	2.006.492.743	1.868.133.685	93.10
		Pengembangan SDM	1.637.265.100	1.633.886.000	99.79
Total Anggaran			3.643.757.843	3.502.019.685	96.11

1.1.4.4.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 210
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalisme sumber daya aparatur	Indeks Kepuasan Aparatur	84	92.29	118.2%	3.643.757.843	3.502.019.685	96.11%
	Indeks Profesionalitas ASN	70.71	62.13	87.87			
Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalisme sumber daya aparatur	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%	85.8%	85.8%	2.006.492.743	1.868.133.685	93.10
	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Fungsional sesuai dengan Peta Jabatan	84%	99.1%	118%			
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin	93.5%	100%	107%			
	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	5%	37.8%	756%			
Program Kepegawaian Daerah	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai BAIK	94.48%	85.99%	91.01%	1.637.265.100	1.633.886.000	99.79%
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional	5%	37.78%	756%			



1.1.4.4.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Persentase Pelayanan Kepegawaian Yang Diselesaikan Tepat Waktu tingkat efisiensinya adalah 0.92 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (85.8%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (92.87%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori KURANG EFISIEN;
- b. Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Fungsional sesuai dengan Peta Jabatan tingkat efisiensinya adalah 1.2 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (118%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (95.85%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- c. Pada Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin tingkat efisiensinya adalah 1.2 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (107%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (92%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- d. Pada Indikator Kinerja Utama 4 yaitu Persentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat Teknis, Manajerial dan Fungsional tingkat efisiensinya adalah 7.6 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (756%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99.79%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN.

1.1.4.4.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai mendapatkan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Wali Kota Dumai berdasarkan Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 700/1068/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai dengan predikat "BB" (Sangat Baik) dengan nilai 71,80.

Selain itu dalam penerapan manajemen ASN melalui Sistem Merit yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 124/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai memperoleh nilai 279 dengan Indeks 0,68 pada Kategori III (Baik).

1.1.4.5 Sekretariat Daerah

1.1.4.5.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Sekretariat Daerah Kota Dumai telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam Tabel dan dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 211
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan	Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	6	300 %	2	11	550%	Sangat Berhasil
		Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	7	140 %	6	20	333%	Sangat Berhasil
	Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	0	0 %	1	0	0%	Tidak Berhasil
2.	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3	100 %	3	3	100 %	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	15	75 %	30	40	133%	Sangat Berhasil
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lemba ga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	2	40 %	6	5	83%	Berhasil
5.	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	25	100 %	29.2	29.2	100 %	Sangat Berhasil
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan	24	80 %	30	29	97%	Sangat Berhasil

1.1.4.5.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :



Tabel 212
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	2	2	6	11	300%	550%
		Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	5	6	7	20	140%	333%
		Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	1	1	0	0	0%	0%
2	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3	3	3	3	100%	100%
3	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi	20	30	15	40	75%	133%
4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	5	6	2	5	40%	83%
5	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	25	29,2	25	29.2	100%	100%
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan	30	30	24	29	80%	97%

**1.1.4.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra**

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam table berikut ini :

Tabel 213
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	1.Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah	14	11	78.57%
		2.Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga			
		3.Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	36	20	55.55%
			5	0	0%
2	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pemninaan Badan Usaha Milik Daerah	3	3	100%
3	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi	50	40	80%
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Instutusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Instutusi/Lembaga Pendidikan	35	5	14.29%
5.	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah kota Dumai	41.7	29.2	70.02%
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Meningkatnya Penataan Organisasi	30	29	96.66%

1.1.4.5.4 perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM) sebagaimana berikut :



Tabel 214
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	1.Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah 2.Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 3.Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	11 20 0	- - -	Tidak ada Target Nasional yang berhubungan langsung dengan kinerja Sekretariat Daerah Kota Dumai
2	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pemninaan Badan Usaha Milik Daerah	3	-	
3	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Berprestasi	40	-	
4.	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Instutusi/Lembaga Pendidikan	5	-	
5.	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah kota Dumai	29.2	-	
6.	Meningkatnya Penataan Organisasi	Meningkatnya Penataan Organisasi	29	-	

1.1.4.5.5 akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 98.575.166.924,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH). Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 89.543.642.468,- (Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 9.031.524.456,- (Sembilan Milyar Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 93.874.609.881 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan



Puluh Satu Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp. 85.745.774.976,- (Delapan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 8.128.834.905,- (Delapan milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima Rupiah).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas Tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 215
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 303.407.700,-	Rp 290.670.898,-	95,80%	
2	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 256.855.000,-	Rp 249.576.279,-	997,17%	
3	Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 11.250.000.000,-	Rp 10.927.310.804,-	997,13%	
4	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 17.600.000.000,-	Rp 16.571.390.915,-	994,16%	
5	Penegasan batas wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 346.378.100,-	Rp 312.408.224,-	990,19%	
6	Meningkatnya Penataan Organisasi	Program Penunjang urusan Pemerintahan	Rp 449.551.620,-	Rp 401.074.328,-	889,22%	

1.1.4.5.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:



TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGE T	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga	10	32	320%			
Sasaran : Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama antar Daerah	2	11	550%	303.407.700,-	290.670.898,-	95,80%
	Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	6	20	333%			
	Terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri	1	0	0%			
Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase meningkatnya Capaian Kinerja dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100%	100%	30.323.132.240,-	28.901.773.106,-	95,31%
Tujuan : Menjadikan BUMD yang Mandiri dan Profesional	Jumlah BUMD yang dibina dan dikembangkan	3	3	3			
Sasaran : Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	Tercapainya Pembinaan BUMD	3	3	100%	256.855.000,-	249.576.279,-	97,17%
Program : Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase menin gkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan Pembangunan	100 %	100%	100%	6.035.882.866,-	5.799.539.937,-	96,08%
Tujuan : Meningkatkan kualitas Pendidikan Masyarakat yang berkualitas dan punya daya saing dalam IPTEK dan IMTAQ	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh bantuan beasiswa	30	40	30			
	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh	30	40	133%	11.250.000.000,-	10.927.310.804,-	97,13%



Sasaran : Meningkatnya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi	beasiswa berprestasi						
Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase meningkatnya Capaian Kinerja dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100%	100%	30.323.132.240,-	28.901.773.106,-	95,31%
Tujuan : Meningkatkan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi Pendidikan	Jumlah Kerjasama dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	6	5	83%	17.600.000.000,-	16.571.390.915,-	94.16%
Sasaran : Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	Jumlah Kerjasama dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	6	5	83%			
Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100 %	100%	100%	30.323.132.240,-	28.901.773.106,-	95,31%
Tujuan : Mewujudkan tertib administrasi Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	3	3	100%	346.378.100,-	312.408.224,-	90,19%
Sasaran : Penegasan batas wilayah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	Persentase Capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	29,2	29.2	100%			
Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase meningkatnya Capaian Kinerja dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100%	100%	30.323.132.240,-	28.901.773.106,-	



Tujuan : Meningkatnya efisiensi dan efektivitas organisasi pernagkat daerah melalui percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (RINGHTSIZING)	30	29	97%	449.551.620,-	401.074.328,-	89,22%
Sasaran : Meningkatnya Penataan Organisasi	Jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan	30	29	97%			
Program : Program Penunjang urusan Pemerintahan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten /kota	100 %	100%	100%	62.216.151.818,-	59.173.296.838,-	95,11%

1.1.4.5.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pada Indikator Kinerja Utama 1 terlaksananya Kerjasama antar Daerah tingkat efisiensinya adalah 5 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (550%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (97,86%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- Pada Indikator Kinerja Utama 2 terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga tingkat efisiensinya adalah 3 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (333%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (93.16%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- Pada Indikator Kinerja Utama 3 terlaksananya Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga di Luar Negeri tingkat efisiensinya adalah 0 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (0%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (95.25%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori KURANG EFISIEN;
- Pada Indikator Kinerja Utama 4 terlaksananya tercapainya Pembinaan BUMD tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (97.17%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- Pada Indikator Kinerja Utama 5 terlaksananya tercapainya jumlah Mahasiswa yang memperoleh beasiswa berprestasi tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (97.13%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- Pada Indikator Kinerja Utama 6 jumlah Kerjasama dengan Institusi/Lembaga Pendidikan tingkat efisiensinya adalah 0 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (83%)



dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (94.16%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori KURANG EFISIEN;

- g. Pada Indikator Kinerja Utama 7 Persentasee capaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (90.19%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- h. Pada Indikator Kinerja Utama 8 terlaksananya tercapainya jumlah struktur perangkat daerah yang disederhanakan tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja Tahun 2023 (97%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran Tahun 2023 (89.22%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;

1.1.4.6 Sekretariat DPRD Kota Dumai

1.1.4.6.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai telah menetapkan satu Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan empat Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 216
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	100 %	95 %	95 %	100 %	Sangat Berhasil
		Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD satuan RKT	Ada	100%	Ada	Ada	100 %	Sangat Berhasil
		Tersusun dan terintegrasinya Program –	Ada	100%	Ada	Ada	100 %	Sangat Berhasil



		program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan						
		Terintegrasinya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	100%	Ada	Ada	100 %	Sangat Berhasil

1.1.4.6.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Tabel 217
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %	95%	95 %	95 %	100%	100%



		Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD satuan RKT	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%
		Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%
		Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%

1.1.4.6.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 218
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	5%	Signifikan



		Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD satuan RKT	Ada	da	Signifikan
		Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada	da	Signifikan
		Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	da	Signifikan

1.1.4.6.4 perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana table berikut :

Tabel 219
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95 %		Isi dengan Ada/ Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
		Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD satuan RKT	Ada		
		Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada		



		Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada		
--	--	--	-----	--	--

1.1.4.6.5 akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar sebesar Rp 60.574.973.578 (Enam Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah .) bersumber dari Dana Transfer Umum dan Dana Bagi Hasil Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 58.696.373.428 (Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 1.878.600.150 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 53.779.927.308,26- (Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Dua Puluh Enam Sen Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp 52.085.909.088,26 (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Delapan Puluh Delapan Dua Puluh Enam Sen.) dan Belanja Modal terealisasi Rp 1.694.018.220,-. (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah .)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 220
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.916.494.813	40.598.427.813	886,53%	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	13.648.478.765	13.189.499.495	96,85%	

**1.1.4.6.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 221
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	95%	100%			
Sasaran : Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	95%	100%			
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada	Ada	100%			
	Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima	Ada	Ada	100%			



	Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan						
	Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada	100%			
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	40.598.4 27.813	86,53%	86,53%
Program : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%	13.189.4 99.495	96,85%	96,85%

1.1.4.6.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada Indikator Kinerja Utama Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. yaitu tingkat efisiensinya adalah 1,12 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (88,80%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN
- b. Pada Indikator Kinerja Utama Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT. yaitu tingkat efisiensinya adalah 1,12 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (88,80%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN
- c. Pada Indikator Kinerja Utama Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan. yaitu tingkat efisiensinya adalah 1,12 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (88,80%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN
- d. Pada Indikator Kinerja Utama Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD. yaitu tingkat efisiensinya adalah 1,12 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi



dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (88,80%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN

1.1.4.7 Inspektorat

1.1.4.7.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Inspektorat Daerah Kota Dumai telah menetapkan 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 222
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN		2022		2023			
Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	100%	sangat berhasil
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	3,2	3,356	105%	sangat berhasil
	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	100%	sangat berhasil
	Skor Kapabilitas APIP	-	-	3,31	3,31	100%	sangat berhasil
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	A	BB	A	B	80%	berhasil
	Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	72	66,81	93%	sangat berhasil
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	90%	86%	95%	83%	87%	sangat berhasil
				86%	83%	97%	sangat berhasil
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	90%	86%	95%	85%	89%	sangat berhasil
				87%	85%	98%	sangat berhasil
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	90%	0%	100%	0%	0%	tidak berhasil
	(dihapus)	-	-	-	-	-	-
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	sangat berhasil
(dihapus)	-	-	-	-	-	-	

**1.1.4.7.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 223
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	100%	100%
	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	100%	100%
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	A	A	BB	B	88%	80%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	90%	95%	86%	83%	96%	87%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	90%	95%	86%	85%	96%	89%
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	90%	100%	0%	0%	0%	0%
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.1.4.7.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 224
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	4	3	78%
	Level Kapabilitas APIP	4	3	77%
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	A	B	74%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI	95%	83%	87%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP	95%	85%	89%
	Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	100%	0%	0%
	Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah	100%	100%	100%



1.1.4.7.4 perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan Inspektorat Daerah Kota Dumai mendukung terwujudnya Misi kedelapan RPJMN Tahun 2020-2024 “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Serta mendukung pelaksanaan agenda pembangunan ketujuh RPJMN Tahun 2020-2024 “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik” melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, dan peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat mendukung terwujudnya sasaran “Penegakan Hukum Nasional yang Mantap“ dan “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola” pada Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik. Adapun indikator dan target nasional yang ditetapkan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian Sasaran tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersaji pada tabel berikut.

Tabel 225
Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM)

Indikator Nasional	Target Nasional 2024	IKU Inspektorat Daerah Kota Dumai	Target 2026	Realisasi tahun 2023
Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,14	Skor Maturitas SPIP → Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,275	SPIP 3,356 dengan IEPK 2,874
Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Skor SAKIP ≥ B	80	Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	75	66,81 “B” (89% OPD memiliki nilai SAKIP ≥ B)

1.1.4.7.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 16.023.276.948,- (*enam belas milyar dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*) bersumber dari APBD. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 15.670.762.560,- (*lima belas milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 352.514.388,- (*tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*).

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 15.160.300.040,85 (*lima belas milyar seratus enam puluh juta tiga ratus ribu empat puluh koma delapan puluh lima rupiah*), terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 14.811.168.822,34 (*empat belas milyar delapan ratus sebelas juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua koma tiga puluh empat rupiah*) dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 349.131.218,51 (*tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan belas koma lima puluh satu rupiah*).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:



Tabel 226
Sasaran Strategis dan Anggaran Program Prioritas Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	RATA-RATA (%)
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	13.011.311.248,00	12.439.125.420,85	95,60	94,61
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.983.183.100,00	1.804.362.910,00	90,98	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.028.782.600,00	916.811.710,00	89,12	

1.1.4.7.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 227
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan: Meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Sasaran: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Level Maturitas SPIP;	3 3	3 3	100% 100%	16.023.276.948,00	15.160.300.040,85	94,61%
	2. Level Kapabilitas APIP;	A 95%	B 83%	80% 87%			
	3. Nilai SAKIP OPD;	95%	85%	89%			
	4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI;	100% 100%	0% 100%	0% 100%			
	5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP;						
	6. Persentase WBK dan WBBM;						
	7. Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah.						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota Dumai	100%	100%	100%	13.011.311.248,00	12.439.125.420,85	95,60%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100%	156%	156%	1.983.183.100,00	1.804.362.910,00	90,98%



Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%	1.028.782.600,00	916.811.710,00	89,12%
---	--	------	------	------	------------------	----------------	--------

1.1.4.7.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada Indikator Kinerja Utama Level Maturitas SPIP tingkat efisiensinya adalah 106% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN.
2. Pada Indikator Kinerja Utama Level Kapabilitas APIP tingkat efisiensinya adalah 106% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN.
3. Pada Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP OPD tingkat efisiensinya adalah 85% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (80%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN.
4. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI tingkat efisiensinya adalah 92% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (87%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN.
5. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP tingkat efisiensinya adalah 94% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (89%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN.
6. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tingkat efisiensinya adalah 0% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (0%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori KURANG EFISIEN.
7. Pada Indikator Kinerja Utama Cakupan pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah tingkat efisiensinya adalah 106% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (94,61%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN.

1.1.4.7.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Dumai mendapatkan penghargaan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 228
Prestasi dan Penghargaan Inspektorat Daerah Tahun 2023

No.	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1.	Piagam	Peringkat Terbaik Kesatu Sebagai Kabupaten/Kota yang telah optimal menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan tahun sebelumnya. 	Provinsi	Gubernur Riau
2.	Piagam	Peringkat Kedua pada Kluster Utama Evaluasi atas Implementasi SAKIP Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023. 	Kota	Pemerintah Kota Dumai

1.1.4.8 Kecamatan Dumai Barat

1.1.4.8.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam table dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 229
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	Sasaran		2022		2023			Predikat Capaian
	Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,91	114,83	87	82,84	95,21	Sangat berhasil
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	81,50	81,50	100	99,01	99,01	Sangat berhasil
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	97,02	97,02	100	98,33	98,33	Sangat berhasil

**1.1.4.8.2 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 230
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87	99.91	82.84	114.83	95.21
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	100 %	81.50 %	99.01 %	81.50	99,01
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	100 %	97.02 %	98.33 %	97,02	98,33

1.1.4.8.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 231
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	82.84	4.16
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	99.01	0.99
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	98.33	1.67



1.1.4.8.4 perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM)

Tabel 232
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			REALISASI NASIONAL		
		TARGET TAHUNAN (%)	REALISASI TAHUN 2023 (%)	REALISASI (%)	TARGET TAHUNAN (%)	REALISASI TAHUN 2023 (%)	REALISASI (%)
1	2	4	5	6	6	7	8
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	82.84	82.84	-	-	-
2.	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	99.01	99.01	-	-	-
3.	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	98.33	98.33	-	-	-

1.1.4.8.5 akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 10.524.299.300,- (Sepuluh Milyar Lima ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Dumai dan Bantuan Keuangan Khusus Pemprov Riau dengan Realisasi 10.156.509.099,00 atau 96.51%.

1.1.4.8.6 Pencapaian kinerja dan anggaran

Tabel 233
Pencapaian kinerja dan anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	96,51%	96,51 %	10.524.299.300	10.156.509.099	96,51
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	82,84	95,21	217.902.500	180.500.300	82,84
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	96,56	96,56	120.000.000	120.000.000	99,01



Kecamatan Dumai Barat	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	89,77	89,77	1.118.997.800	1.100.307.200	98,33
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	9.066.399.000	8.755.701.599	98,57
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %	217.902.500	180.500.300	82,84
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	100 %	100 %	1.118.997.800	1.100.307.200	98,33
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	101.000.000	100.000.000	99,01
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	100

1.1.4.8.7 Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2022 sebagaimana uraian tersebut di atas, Kecamatan Sungai Sembilan menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 234
Efisiensi penggunaan Sumber Daya

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KETERANGAN
1	2	3	4	5	6		7
1.	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,21%	82,84%	1,14	Efisien	-
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	96,56%	96,56%	1,00	Efisien	
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	89,77%	89,77%	1,00	Efisien	-

**1.1.4.8 Prestasi dan penghargaan****Tabel 235**
Prestasi dan penghargaan

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Lomba Pelaksana Terbaik Keluarga Sehat, Tanggap Tangguh Bencana	Harapan 1	Provinsi Riau	Ketua PKK Provinsi Riau
2.	Desa Cinta Statistik	Terbaik III	Provinsi Riau	Ka. BPS Provinsi Riau

1.1.4.9 Kecamatan Bukit Kapur**1.1.4.9.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023**

Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai telah menetapkan 1 Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 236
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Bukit Kapur	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87	103,2	89,87	86,33	96,06	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100	100%	100%	100	Sangat Berhasil

1.1.4.9.2 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 237
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	89,87	89,87	86,33	103,2	96,06
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100	100

**1.1.4.9.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 238
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87	86,33	96,06
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%

1.1.4.9.4 perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 239
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,	3,87 (Skala Likert 1-4)	Sangat Baik

1.1.4.9.5 akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kecamatan Bukit Kapur Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar **Rp 14.757.315.520** (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Lima ratus Dua Puluh Rupiah*) bersumber dari APBD Kota Dumai Anggaran tersebut terdiri dari *Belanja Operasional* sebesar Rp. 12.835.146.900 (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dan *Belanja Modal* sebesar Rp. 172.207.500 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Ribu lima Ratus Rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp Rp14.337.570.369** (*Empat Belas miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Liam Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah*)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:



Tabel 240
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	232.182.688	228.996.750	98,6%	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	103.000.000	102.104.000	99,1%	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.000.000	34.989.900	100 %	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.381.570.200	1.189.943.400	86,1%	

1.1.4.9.6 Pencapaian kinerja dan anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 241
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Kualitas pelayanan publik, pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum Dan penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100			
Sasaran : Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	97	100,14			
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	100	100			
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	100	100			



Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Bukit Kapur	100%	100%	100%	232.182.688	228.996.750	98,6%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Bukit Kapur	100%	100%	100%	103.000.000	102.104.000	99,1%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayah	100%	100 %	100 %	35.000.000	34.989.900	100 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Bukit Kapur	100%	95%	95%	1.381.570.200	1.189.943.400	86,1%

1.1.4.9.7 Efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pada *Indikator Kinerja Utama* Indeks Kepuasan Masyarakat persentase capaian kinerja tahun 2023 (96,06%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (97,15 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
- 2) Pada *Indikator Kinerja* Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum persentase capaian kinerja tahun 2023 (100 %) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,55 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
- 3) Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat persentase tingkat efisiensinya adalah 110% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (95) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (86,1). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**

1.1.4.9.8 Prestasi dan penghargaan

Pada tahun 2023 Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 242
Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Penilaian Lomba Hkg Tingkat Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2023	Juara Umum	Kota dumai	Walikota Dumai
2	Paaredi Kader Pkk Tingkat Provinsi Tahun 2023	Juara 2	Propinsi Riau	Gubernur Riau

**1.1.4.10 Kecamatan Dumai Kota****1.1.4.10.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023**

Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai telah menetapkan 1 Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 243
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87	103,2	89,87	86,33	96,06	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100	100%	100%	100	Sangat Berhasil

1.1.4.10.2 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 244
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	89,87	89,87	86,33	103,2	96,06
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100	100

1.1.4.10.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 245
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87	86,33	96,06
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%

1.1.4.10.4 realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 246
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87	3,87 (Skala Likert 1-4)	Sangat Baik

1.1.4.10.5 akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Dumai Kota Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp12.325.495.500,00 (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) bersumber dari Dana transfer umum dan Dana bagi hasil Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 11.645.033.700,00 (Sebelas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp 680.461.800,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 11.852.520.103,00 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tiga Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp 11.324.610.103,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Seratus Tiga Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp 527.910.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah.)

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:



Tabel 247
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	232.182.688	228.996.750	98,6%	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	103.000.000	102.104.000	99,1%	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	35.000.000	34.989.900	100 %	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.381.570.200	1.189.943.400	86,1%	

1.1.4.10.6 Pencapaian kinerja dan anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 248
Pencapaian kinerja dan anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Kualitas pelayanan publik, Pemberdayaan Masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum Dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100			
Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	89,87 100 100	86,33 100 100	96,06 100 100			



Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Kota	100%	100%	100%	232.182.688	228.996.750	98,6%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota	100%	100%	100%	103.000.000	102.104.000	99,1%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayah	100%	100 %	100 %	35.000.000	34.989.900	100 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Dumai Kota	100%	95%	95%	1.381.570.200	1.189.943.400	86,1%

1.1.4.10.7 efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat persentase capaian kinerja tahun 2023 (96,06%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,6 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori EFISIEN
- Pada Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum persentase capaian kinerja tahun 2023 (100 %) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,55 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori EFISIEN
- Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat persentase tingkat efisiensinya adalah 110% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (95) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (86,1). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori EFISIEN

1.1.4.10.8 prestasi dan penghargaan

Pada tahun 2023 Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 249
Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Piagam	Juara III Lomba Desadan Kelurahan Tingkat Regional 1 (Satu) Tahun 2023	Nasional	Mentri Dalam Negeri
2	Piagam	Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023	Nasional	Kepala BKKBN

**1.1.4.11 Kecamatan Medang Kampai****1.1.4.11.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023**

Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai telah menetapkan 1 Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 250
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	85	87	87	87	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100	100%	100%	100	Sangat Berhasil

1.1.4.11.2 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengantahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 251
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87	96,39	95,82	110,80	110,14
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100	100

1.1.4.11.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan medang kampai Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 252
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 100 %	- -	- -
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	-	-
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	88 100 %	- -	- -

1.1.4.11.4 realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 253
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87	3,87 (Skala Likert 1-4)	Sangat Baik

1.1.4.11.5 akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Medang Kampai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 9.054.048.938, 00 (Sembilan milyar lima puluh empat juta empat puluh delapan sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) bersumber dari DPA APBDP Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 8.067.797.938, 00 (Delapan milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 986.251.000, 00. (Sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.876.182.851,58 (Delapan milyar delapan ratus tujuh puluh enam seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu lima puluh delapan rupiah) , terdiri dari Belanja Operasi Rp. 131.145.850,00 (seratus tiga puluh satu seratus empat puluh lima delapan ratus lima puluh rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 13.440.000,00 (Tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) .Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:



Tabel 254
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	182.674.480,00	175.041.950,00	95,82	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	100	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	104.370.800,00	104.370.800,00	100	
		Program Pemberdayaan Kelurahan	1.106.979.000,00	1.089.888.500,00	98,45	
		TOTAL	1.396.524.280,00	1.371.801.250,00	98,23	

1.1.4.11.6 Pencapaian kinerja dan anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 255
Pencapaian kinerja dan anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	9.054.048.938,00	8.876.182.851,58	98,03
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87	100%	182.674.480,00	175.041.950,00	95,82
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	100 %	100 %	104.370.800,00	104.370.800,00	100
	Persentase Pelaksanaan	100 %	100 %	100 %	30.456.100,00	30.456.100,00	100



	Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	100 %	7.657.524.658,00	7.504.381.601,58	98,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %	182.674.480,00	175.041.950,00	95,82
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	100 %	100 %	1.106.979.000,00	1.809.888.500,00	98,45
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	104.370.800,00	104.370.800,00	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	2.500.000,00	2.500.000,00	100

1.1.4.11.7 efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat persentase capaian kinerja tahun 2023 (96,06%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,6 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori EFISIEN
- Pada Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum persentase capaian kinerja tahun 2023 (100 %) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,55 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori EFISIEN
- Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat persentase tingkat efisiensinya adalah 110% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (95) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (86,1). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori EFISIEN

1.1.4.11.8 prestasi dan penghargaan

Pada tahun 2023 Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 256
Prestasi dan Penghargaan Tahun 2023

NO	JENIS PENGHARGAAN	PRESTASI	TINGKAT	DIBERIKAN OLEH
1.	Parade Deville	Juara III	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
2.	Yel -yel	Juara Harapan	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
3.	Menu B2SA	Juara II	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
4.	Penilaian Lomba Posyandu Tingkat Kota	Juara I	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
5.	Mars Germas	Juara I	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
6.	Cerdas Cermat	Juara III	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
7.	Senam Germas	Juara I	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
8.	Mars Germas	Juara I	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
9.	Cerdas Cermat	Juara I	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
10.	Rangking I	Juara I	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
11.	Outbond	Juara I	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
12.	Senam Germas	Juara II	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
13.	Mars Germas	Juara II	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
14.	Cerdas Cermat	Juara II	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
15.	Rangking I	Juara II	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
16.	Outbond	Juara II	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
17.	Senam Germas	Juara III	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
18.	Mars Germas	Juara III	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
19.	Cerdas Cermat	Juara III	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
20.	Rangking I	Juara III	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
21.	Outbond	Juara III	Kecamatan	Ketua TP. PKK Kota Dumai
22.	Administrasi dan Dasawisma Mars PKK	Juara I	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
23.	Pola asuh anak dan remaja di era Digital (PAAREDI) = Jingle PAAREDI	Juara II	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
24.	Tanggap Tangguh Bencana	Juara II	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai
25.	Aku Hatinya PKK	Juara II	Kota Dumai	Ketua TP. PKK Kota Dumai

1.1.4.12 Kecamatan Dumai Selatan

1.1.4.12.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai telah menetapkan 1 Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 257
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			Predikat Capaian
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	87%	94,19	100	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100	100%	100%	100	Sangat Berhasil

1.1.4.12.2 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 258
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	87	100	94,19	100	95
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100	100

1.1.4.12.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Kecamatan Dumai selatan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 259
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	94,19%	100%
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%

1.1.4.12.4 realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 260
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87	3,87 (Skala Likert 1-4)	Sangat Baik

1.1.4.12.5 akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Dumai Selatan Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp12.127.953.813,00 (Dua Belas Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah) bersumber dari Dana transfer umum dan Dana bagi hasil Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 11.297.371.413,00 (Sebelas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp 830.582.400,00 (Delapan Ratus Tiga puluh Juta lima Ratus Delapan puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 11.826.532.808,00 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Delapan Ratus Delapan Rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp 11.001.382.808,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Seratus Tiga Rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp 825.150.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:



Tabel 261
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	138.830.000	136.376.500	98,23%	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	113.549.000	112.742.000	99,29%	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42.560.000	42.550.000	99,98%	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.295.835.117	1.220.517.825	94,19%	

1.1.4.12.6 Pencapaian kinerja dan anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Dumai selatan Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 262
Pencapaian kinerja dan anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100			
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	94,19	95			
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	100	100			
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	100	100			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai selatan	100 %	100%	100%	138.830.000	136.376.500	98,23%



Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai selatan	100 %	100%	100%	113.549.000	112.742.000	99,29%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayah	100 %	100 %	100 %	42.560.000	42.550.000	99,98%
Program Pemberdayaan Masyarakat DesaDan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Dumai selatan	100 %	95%	95%	1.295.835.117	1.220.517.825	94,19%

1.1.4.12.7 efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat persentase capaian kinerja tahun 2023 (94.19%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (95%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori EFISIEN
- Pada Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum persentase capaian kinerja tahun 2023 (100 %) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,29%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori EFISIEN
- Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat persentase tingkat efisiensinya adalah 100% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,23%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori EFISIEN

1.1.4.12.8 prestasi dan penghargaan

Pada tahun 2023 Kecamatan Dumai selatan Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 263
Prestasi dan Penghargaan Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Piagam	Juara I lomba Poskamling Tingkat Nasional	Nasional	Mentri Dalam Negeri
2	Piagam	Juara II Lomba Devile Tingkat Kota	Kota	PKK Kota
3	Piagam	Juara I lomba Penyuluhan Tingkat Kota	Kota	PKK Kota
4	Piagam	Juara I Lomba Yel-Yel Tingkat kota	Kota	PKK Kota
5	Piagam	Juara I lomba Poskamling Tingkat Kota	Kota	Walikota

**1.1.4.13 Kecamatan Sungai Sembilan****1.1.4.13.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023**

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai telah menetapkan 1 Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 264
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			Predikat Capaian
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai 9	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,18	101.36	87	88,90	102,18	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	93,16	93,16	100	96,56	96,56	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	99,15	99,15	100	89,77	89,77	Sangat Berhasil

1.1.4.13.2 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 265
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87	99.91	82.84	114.83	95.21
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	100 %	81,50 %	99,01 %	81,50 %	99,01 %
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	100 %	97,02 %	98,33 %	97,02	98,33

1.1.4.13.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Sungai sembilan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Kecamatan sungai sembilan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026



ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 266
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	40,25	44.23
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	37,94	37,94
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	37,86	37,86

1.1.4.13.4 realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 267
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87	3,87 (Skala Likert 1-4)	Sangat Baik

1.1.4.13.5 akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp **13.082.258.840,00,-** (Tiga belas milyar delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) bersumber dari APBD Kota Dumai dan Bantuan Keuangan Khusus Pemprov Riau dengan Realisasi **12.584.658.948,00** atau **96.20%**.

1.1.4.13.6 Pencapaian kinerja dan anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan sungai 9 Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 268
Pencapaian kinerja dan anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	96,20 %	96,20 %	13.082.258.840	12.584.658.948	96,20
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	88,90	102,18	306.267.970	286.167.631	93,44
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	96,56	96,56	140.000.000	135.425.811	96,73
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	89,77	89,77	1.563.483.440	1.430.733.900	91,51
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	100 %	10.965.364.930	10.626.363.606	96,91
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %	370.107.770	343.476.831	90,51
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	100 %	100 %	1.606.786.140	1.479.392.700	95,51
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	100.000.000	96.560.200	96,56
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	40.000.000	38.865.611	97,16



1.1.4.13.7 efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat efisiensinya adalah 0,91 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (102,18%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (93,44%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori KURANG EFISIEN;
- Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum adalah 1,00 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (96,56%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (96,73%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- Pada Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat tingkat efisiensinya adalah 1,02 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (89,77%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (91,51%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;

1.1.4.13.8 prestasi dan penghargaan

Pada tahun 2023 Kecamatan sungai 9 Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 269
Prestasi dan Penghargaan Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Implementasi SAKIP internal di Lingkungan Pemerintah Kota Duai Tahun 2023	Peringkat 1 pada Kluster Tambahan	Kota Dumai	Walikota Dumai
2	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kota Dumai Tahun 2023	Juara I	Kota Dumai	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai

1.1.4.14 Kecamatan Dumai Timur

1.1.4.14.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai telah menetapkan 1 Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel dan dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 270
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			Predikat Capaian
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	103,44 %	87	91,72	105,42 %	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %	100	100%	100 %	100	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100 %	100	100%	100 %	100	Sangat Berhasil

1.1.4.14.2 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 271
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	187	887	990	91,7	103,44	105,42
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100	100

1.1.4.14.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Kecamatan Dumai timur Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:



Tabel 272
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	91,7	96,06
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%

1.1.4.14.4 realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 273
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Dumai Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	90	-	Tidak ada target nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Kecamatan Dumai Timur
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	-	
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	100	-	

1.1.4.14.5 akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Dumai Timur Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 12.763.150.960,- (Dua belas milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) bersumber dari APBD dan Bankeu Provinsi. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 11.668.738.708,- (Sebelas milyar enam



ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp1.094.412.252,- (Satu milyar Sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 12.572.858.329,- (Dua belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah), terdiri dari Belanja Operasi Rp11.483.756.385,- (sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan Belanja Modal terealisasi Rp 1.089.101.944,-. (Satu milyar delapan puluh Sembilan juta seratus satu ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 274
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Dumai Timur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	143.512.700	138.895.000	96,78%	
2		Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100.000.000	99.620.900	99,62%	
3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.398.119.300	1.378.870.450	98,62%	

1.1.4.14.6 Pencapaian kinerja dan anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Dumai timur Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 275
Pencapaian kinerja dan anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10	98,51 %	98,51%	12.763.150.960	12.572.858.329	98,51%
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan	87	91,72	105,42%			



Kecamatan Dumai Timur	Kecamatan Dumai Timur							
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	10	100	100%				
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	10	100	100%				
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	10	100	100 %	143.512.700	138.895.000	96,78%	
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	10	100	100 %	1.398.119.300	1.378.870.450	98,62%	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur	10	100	100%	100.000.000	99.620.900	99,62%	

1.1.4.14.7 efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pada Indikator Kinerja Utama 1 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur tingkat efisiensinya adalah 1 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (105,42%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (90%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- Pada Indikator Kinerja Utama 2 yaitu Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur tingkat efisiensinya adalah 100 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (100%).
- Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- Pada Indikator Kinerja Utama 3 yaitu Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Kewilayahan Kecamatan Dumai Timur tingkat efisiensinya adalah 100 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (100%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber



Daya termasuk dalam kategori EFISIEN.

1.1.4.14.8 prestasi dan penghargaan

Pada tahun 2023 Kecamatan Dumai timur Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 276
Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Dumai timur Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Sertifikat & Penghargaan	Juara 2 Realisasi PBBP2 Kota DUMai	Wajib Pajak Terbaik Kota Dumai	Kecamatan Dumai TImur
2	Uang	Juara 2 Gelari Pelangi	HKG PKK Kota Dumai	Kelurahan Tanjung Palas
3	Uang	Juara 3 Tangguh tanggap bencana keluarga	HKG PKK Kota Dumai	Kelurahan Jaya MUkti
4	Sertifikat,Piala, uang	Juara 2 Lomba Jambore Kader PKK	Jambore Kader PKK	Kelurahan Teluk Binjai
5	Sertifikat,Piala, uang	Juara Harapan 1 Lomba Administrasi PKK	HKG PKK Tingkat Provinsi Riau	Kelurahan Tanjung Palas
6	Sertifikat,Piala, uang	Juara 1 Mars Germas	Germas dari Dinas kesehatan	Kelurahan Teluk Binjai
7	Sertifikat,Piala, uang	Juara 2 Mars Germas	Germas dari Dinas kesehatan	Kelurahan Jaya MUkti
8	Sertifikat,Piala, uang	Juara 2 Mars Germas	Germas dari Dinas kesehatan	Kelurahan Bukit Batrem
9	Sertifikat,Piala, uang	Juara 1 Ranking 1	HKG PKK Kota Dumai	Kelurahan Buluh Kasap
10	Sertifikat,Piala, uang	Juara 2 Lomba Mars Germas	HKG PKK Kota Dumai	Kelurahan Jaya MUkti
11	Sertifikat,Piala, uang	Juara 1 Senam	HKG PKK Kota Dumai	Kelurahan Teluk Binjai



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum

Dasar hukum bagi Tugas Pembantuan Yang diterima adalah :

1. SP-DIPA Nomor : SP DIPA-018.04.4.099315/2023 dari Direktorat Jendral Hortikultura dan DIPA PD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Riau Tanggal 30 November 2022 TA 2023
2. SP-DIPA Nomor : SP DIPA-018.03.4.099314/2022 tanggal 30 November 2022 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan DIPA PD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau TA 2023

2. Gambar Umum Tugas Pembantuan

1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah :

- 1.1 Direktorat Jenderal Hortikultura
- 1.2 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

2. Bidang Urusan Tugas Pembantuan Yang Diberikan

- 2.1 Urusan Ketahanan Pangan
- 2.2 Urusan Ketahanan Pangan

3. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah :

- 3.1 Program dan Kegiatannya yakni pengembangan bawang merah dan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura
- 3.2 Program dan Kegiatannya yakni biaya pengawalan sarana pasca panen tanaman pangan, biaya belanja gedung dan bangunan, biaya koordinasi, bimtek, monev dan honor tim teknis untuk tanaman pangan

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

- 3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota
Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten / Kota :



3.1.1 Target Kinerja

Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target
NIHIL			

3.1.2 Realisasi

Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target
NIHIL			

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1 Target Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT	TAR GET	KET.
1	2	3	4	6
1.	Program pengembangan Bawang Merah 10 Ha	- Kelompok Tani penerima Bantuan	10 Ha	
2.	Program pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura berupa pembangunan bangsal pengolahan pasca panen, kendaraan bermotor roda 3 dan sarana prasarana pengolahan hortikultura	- KWT Sangkis Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan	1 Kelompok	



3.	Program Biaya pengawalan sarana pasca panen tanaman pangan	- Biaya sarana	100%	
4.	Program Biaya belanja gedung dan bangunan (bangunan UPH)	- Uang kegiatan sarana pengolahan hasil tanaman pangan diserahkan kepada masyarakat	Target 2 unit	
5.	Program Biaya koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi	- Biaya bimtek	100%	
6.	Program Honor Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk tanaman pangan	- Biaya Honor tim	100%	

3.2.2 Realisasi

- Program Pengembangan Bawang Merah 10 Ha
Pagu Anggaran Kegiatan Pengembangan Bawang Merah 10 Ha sebesar Rp.62.375.000,- dengan realisasi sebesar Rp.62.375.000,- atau 100%.
- Program pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura berupa pembangunan bangsal pengolahan pasca panen, kendaraan bermotor roda 3 dan sarana prasarana pengolahan hortikultura, Pagu Anggaran Kegiatan pembangunan bangsal pengolahan pasca panen, kendaraan bermotor roda 3 dan sarana prasarana pengolahan hortikultura sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.200.000.000,- atau 100%.
- Program Biaya pengawalan sarana pasca panen tanaman pangan dengan alokasi anggaran Rp. 4.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.4.200.000,- atau 100%.
- Program Biaya belanja gedung dan bangunan (bangunan UPH) untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk Uang kegiatan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dengan alokasi anggaran untuk Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- atau 100%
- Program Biaya koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dengan alokasi anggaran Rp. 3.600.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.600.000,- atau 100%
- Program Honor Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk tanaman pangan dengan alokasi anggaran Rp. 9.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- atau 100%



Tabel.277
Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Propinsi

No.	K/LPNK	Dasar pelaksanaan	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	PD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1.	Direktorat Jenderal Hortikultura	SP-DIPA-018.04.4.099 315/2023 Tanggal 30 November 2022	a. Pengembangan Bawang Merah b. Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura berupa pembangunan bangsal pengolahan pasca panen, kendaraan bermotor roda 3 dan sarana prasarana pengolahan hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	262.375.000	262.375.000	100		100	
2.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	SP-DIPA-018.03.4.099 314/2022 Tanggal 30 November 2022	a. Biaya pengawalan sarana pasca panen tanaman pangan b. Biaya belanja gedung dan bangunan (bangunan UPH) untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk Uang kegiatan sarana pengolahan hasil tanaman pangan c. Biaya koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi d. Honor Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk tanaman pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	116.000.000	116.000.000	100		100	

3.3 Permasalahan dan Kendala

No.	Subbidang	Permasalahan
1.	Pengembangan Bawang Merah	• Tidak ada permasalahan
2.	Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura berupa pembangunan bangsal pengolahan pasca panen, kendaraan bermotor roda 3 dan sarana prasarana pengolahan hortikultura	• Tidak ada permasalahan
3.	Biaya pengawalan sarana pasca panen tanaman pangan	• Tidak ada permasalahan
4.	Biaya belanja gedung dan bangunan (bangunan UPH) untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk Uang kegiatan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	• Tidak ada permasalahan
5.	Biaya koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi	• Tidak ada permasalahan
6.	Honor Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk tanaman pangan	• Tidak ada permasalahan



3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 butir 9 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Secara Administratif di Kota Dumai tidak terdapat adanya wilayah Desa melainkan wilayah Kelurahan. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota Dumai dalam wilayah Kerja Kecamatan. Oleh karenanya maka tidak terdapat tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Penerapan dan Penetapan SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kota Dumai berdasarkan antara lain :

- a. Kesesuaian kewenangan, SPM diterapkan sesuai dengan kewenangan Daerah kabupaten/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- b. Ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal;
- c. Keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh setiap Warga Negara;
- d. Kesenambungan, SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara terus-menerus;
- e. Keterukuran, SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara; dan
- f. Ketepatan sasaran, SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

Table.278
Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
Permerintahan Kabupaten/Kota

SPM PENDIDIKAN (Kabupaten/Kota) Pasal 5 PP 2/2018			
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR
1	Pendidikan anak usia dini	warga negara usia 5 s.d. 6 tahun.	standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	warga negara usia 7 s.d. 18 tahun.	standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
3	Pendidikan Dasar	warga negara usia 7 s.d. 15 tahun.	petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;

4.1.2 Target Pencapaian SPM Daerah

Table.279
Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini

No.	Indikator	Elemen Data	Target
1	Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100%
		jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun	

Tabel.280
Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar

No.	Indikator	Elemen Data	Target
1	Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	100%
		jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun	

Tabel.281
Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan

No.	Indikator	Elemen Data	Target
1	Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	100%
		jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	

4.1.3 Realisasi Pencapaian SPM

Capaian pelaksanaan penerapan SPM bidang Pendidikan Tahun 2023 di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel.282
Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			84.07 %	
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini					84.20 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5436	5436	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					4.20 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	20.98 %	
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	54.48	45.52	54.48 %	
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	100	50	50	50.00 %	
	3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	100	56.21	43.79	56.21 %	
	4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU INI
	5. Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0.00 %	Simpan Batal Kembali

5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
6 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	28.1	71.9	28.10 %	TUTUP MUTU BGD
8 . Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
9 . Pengalaman pelatihan guru	%	0	0	0	0.00 %	

Sumber : E-SPM Bangda Kemendagri

Tabel.283
Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar

SMP						
1 . Angka partisipasi kasar	%	100	106.94	-6.94	100.00 %	TUTUP MUTU BGD
2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	93.97	6.03	93.97 %	
3 . Angka partisipasi murni	%	100	93.74	6.26	93.74 %	TUTUP MUTU BGD
4 . Kemampuan literasi	Nilai	100	72.56	27.44	72.56 %	
5 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	48.96	51.04	48.96 %	
6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	69.95	30.05	69.95 %	TUTUP MUTU BGD
9 . Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas	%	100	62.71	37.29	62.71 %	TUTUP MUTU BGD
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
13 . Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
14 . Pengalaman pelatihan guru	%	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD

Sumber : E-SPM Bangda Kemendagri

Tabel.284
Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan
























3 . Pendidikan Kesetaraan					80.19 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1267	1267	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					0.19 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	0.96 %	
1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	13.43	86.57	13.43 %	
3 . Angka partisipasi murni	%	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
4 . Kemampuan literasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
5 . Kemampuan numerasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
9 . Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas	Nilai	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0.00 %	TUTUP MUTU BGD















































Sumber : E-SPM Bangda Kemendagri

4.1.4 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung tercapainya SPM bidang Pendidikan di Kota Dumai alokasi anggaran untuk urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel.285
Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan TA.2023

NO	PROG RAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	PERSENTASE	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					54,544,910,299	53,128,637,923	97.40 %	
1			PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI					
	1		Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD		0	0	0.00 %	
		1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	0	0	nan %	 
		2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	0	0	nan %	 
		3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik	0	0	nan %	 
		4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik	0	0	nan %	 
		5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	nan %	 
		6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	nan %	 
	2		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan		811,251,200	695,319,240	85.71 %	
		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	611,251,200	583,047,240	97.02 %	 
		2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	97.02 %	 
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	97.02 %	 
		4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	97.02 %	 
		5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	200,000,000	102,272,000	51.14 %	 
	3		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)		0	0	0.00 %	
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	51.14 %	 
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	nan %	 
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	nan %	 
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	nan %	 

	5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	nan %	 
	6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	nan %	 
	7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini		0	0	nan %	 
	4	Penenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)		1,627,545,217	1,571,545,777	96.56 %	
	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	1,627,545,217	1,571,545,777	96.56 %	 
	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	96.56 %	 
	3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	96.56 %	 
	2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR					
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)		25,308,347,541	24,798,146,474	97.98 %	
	1	Pendaftaran warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	96.56 %	 
	2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	1,081,127,200	1,081,049,050	99.99 %	 
	3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	24,227,220,341	23,717,097,424	97.89 %	 
	4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, tertular, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	97.89 %	 
	2	Penenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)		0	0	0.00 %	
	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	97.89 %	 
	2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	97.89 %	 
	3	Penenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)		8,189,068,489	8,041,331,942	98.20 %	
	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	97.89 %	 
	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	97.89 %	 
	3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	4,815,472,689	4,775,401,750	99.17 %	 
	4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	3,373,595,800	3,265,930,192	96.81 %	 
	3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	97.35 %	 
	3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETERAAN					
	1	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)		0	0	0.00 %	
	1	Pendaftaran warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	97.35 %	 
	2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	0	0	97.35 %	 
	3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	97.35 %	 
	4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, tertular, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	97.35 %	 
	2	Penenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)		0	0	0.00 %	
	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	97.35 %	 
	2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	97.35 %	 

3	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)		0	0	0.00 %	
1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	97.35 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	97.35 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	0	0	97.35 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	97.35 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
4	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)		0	0	0.00 %	
1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	97.35 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	97.35 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	97.35 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	97.35 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	97.35 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	97.35 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	97.35 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
5	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)		0	0	0.00 %	
1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	97.35 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	97.35 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	97.35 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA					
1.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa untuk Peningkatan Literasi dan Numerasi (SD/SMP)		1,089,268,044	1,087,487,600	99.84 %	<input type="button" value="HAPUS"/> <input type="button" value="SIMPAN"/>
NAMA KEGIATAN	#TAMBAH KEGIATAN		0	0		<input type="button" value="TAMBAH DATA"/>

Sumber : E-SPM Bangda Kemendagri

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan melibatkan seluruh Bidang, Sub Bagian dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel .286
Susunan Organisasi dan Data Tenaga Pendidik Kota Dumai Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 orang
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 orang
3	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	1 orang
4	Kepala Bidang Sekolah Dasar	1 orang
5	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama	1 orang
6	Kasi PAUD dan TK	1 orang

7	Kasi Pendidikan Non Formal dan Informal	1 orang
8	Pengembang Penilai Pendidik	1 orang
9	Kasi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Dasar	1 orang
10	Kasi Kurikulum, Peserta Didik dan Kelembagaan Sekolah Dasar	1 orang
11	Pengembang Teknologi Pembelajaran	1 orang
12	Kasi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 orang
13	Kasi Kurikulum, Peserta Didik dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama	1 orang
14	Analisis Kebijakan	1 orang
15	Pendidik PAUD	480 orang
16	Pendidik PAUD D-IV/S1	216 orang
17	Pendidik PAUD Bersertifikasi	86 orang
18	Pendidik SD	2.409 orang
19	Pendidik SD D-IV/S1	2.128 orang
20	Pendidik SD Bersertifikasi	1.053 orang
21	Pendidik SMP	964 orang
22	Pendidik SMP D-IV/S1	861 orang
23	Pendidik SMP Bersertifikasi	428 orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2023

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pelaksanaan penerapan SPM Pendidikan tahun 2023.

Permasalahan

1. Masih belum tersedianya data anak tidak sekolah, data siswa miskin, dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, sebaran kebutuhan jumlah satuan pendidikan, kebutuhan ruang kelas, kebutuhan rombongan belajar, dan data sekolah pada jenjang Raudhatul Athfal (RA), Pendidikan Dasar (MI, MTs) yang menjadi kewenangan Kemenag;
2. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat belum terwujud sepenuhnya dan belum maksimal.
3. Masyarakat yang berpandangan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini tidak penting.
4. Terbatasnya jumlah tenaga pendidik yang berkualitas/berkompeten.
5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa.

Solusi

1. Solusi permasalahan pertama adalah meningkatkan kualitas data pada Dapodik Satuan Pendidikan dan menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama untuk data dan EMISI, serta bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam menuntaskan anak tidak sekolah;
2. Solusi permasalahan kedua adalah menyalurkan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
3. Solusi permasalahan ketiga adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya Pendidikan untuk anak usia dini
4. Solusi permasalahan keempat adalah memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas guru;
5. Solusi permasalahan kelima adalah menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa seperti pojok baca, penambahan buku pada perpustakaan sekolah.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 470/SK/Dinkes Tahun 2019 tentang Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Dumai Terdapat jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai yaitu :

Tabel.287
JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai Standar Pelayanan	Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai Standar Pelayanan Pesalinan	Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL)	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

4	Pelayanan Kesehatan Balita	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	Jumlah Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Sesuai Standar Skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak pada Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun	Jumlah orang usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Jumlah Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun	Jumlah Penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus usia ≥ 15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Sesuai Standar Pelayanan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terduga Tuberkulosis	Sesuai Standar pelayanan kesehatan TB	Orang dengan terduga TB	Jumlah Orang dengan terduga TB yang dilakukan pemeriksaan penunjang
12	Pelayanan Kesehatan Orang	Sesuai Standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang Berisiko terinfeksi	Jumlah Orang Berisiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan

	Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV		HIV	sesuai standar
--	------------------------------------	--	-----	----------------

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Tabel. 288
TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET CAPAIAN	TAHUN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2023
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2023
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2023
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2023
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2023
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2023
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2023
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara Penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2023
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah warga negara Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2023

10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga negara Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2023
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara Dengan Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2023
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV	Jumlah warga negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2023

4.2.3 Realisasi Pencapaian SPM

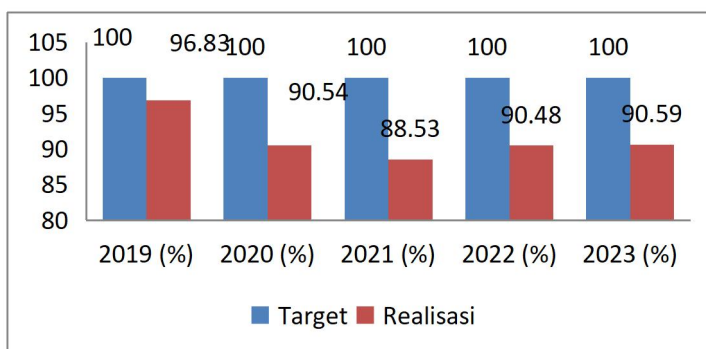
Realisasi pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kota Dumai pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dikatakan standar apabila ibu hamil mendapatkan pelayanan standar antenatal yang meliputi standar kuantitas dan kualitas. Standar Kuantitas adalah ibu hamil melakukan kunjungan minimal 4 empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester. Sedangkan standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10T yaitu:

- a. Pengukuran berat badan
- b. Pengukuran tinggi badan
- c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA)
- d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- e. Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
- f. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi
- g. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet
- h. Tes Laboratorium
- i. Tatalaksana/penanganan kasus
- j. Temu Wicara (konseling)

Grafik 5
Pencapaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Tahun 2019 s.d 2023

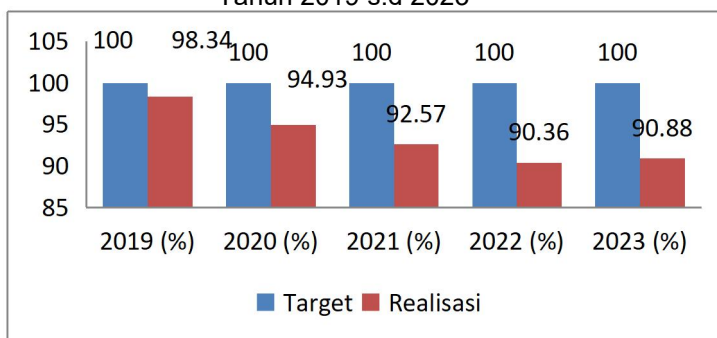


Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian pelayanan kesehatan ibu hamil masih dibawah target nasional dengan pencapaian sebesar yaitu 90.59% dan terjadi peningkatan dari tahun 2022

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi

Grafik 6
Pencapaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Tahun 2019 s.d 2023

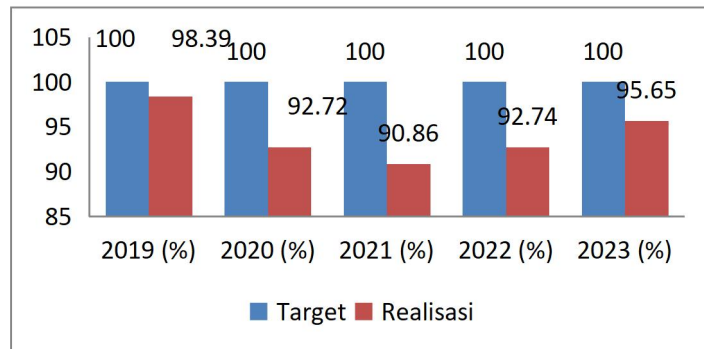


Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin dibawah target nasional dengan pencapaian sebesar yaitu 90.88% dan terjadi sedikit penurunan dari tahun 2022

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada pelayanan neonatal esensial sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis anak yang mempunyai Surat Tanda Register (STR).

Grafik 7
Pencapaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Tahun 2019 s.d 2023

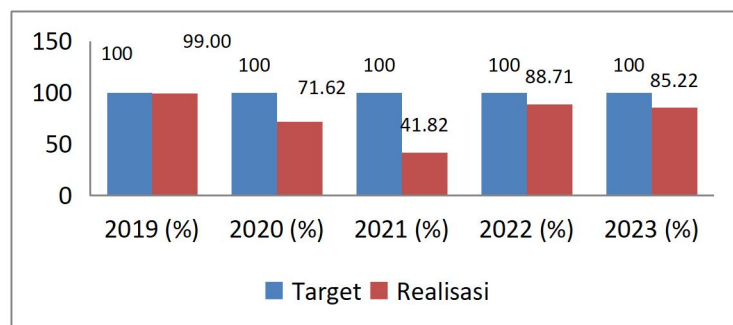


Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir dibawah target nasional dengan pencapaian sebesar yaitu 95.65% dan terjadi peningkatan dari tahun 2022

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis anak yang mempunyai Surat Tanda Register (STR) dan diberikan difasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

Grafik 8
Pencapaian Pelayanan Kesehatan Balita
Tahun 2019 s.d 2023

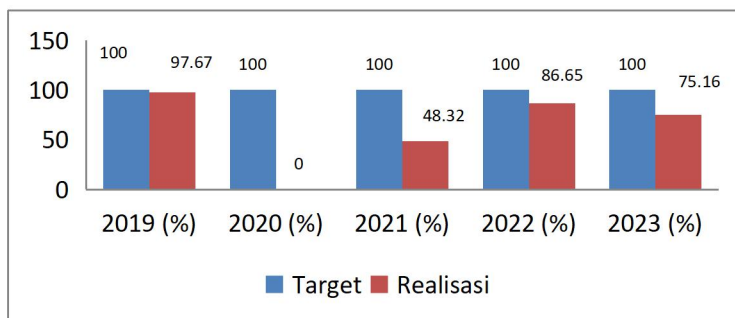


Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian pelayanan kesehatan ibu balita dibawah target nasional dengan pencapaian sebesar yaitu 85.22% dan terjadi peningkatan dari tahun 2022

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah penjangiran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 sampai dengan kelas 9 disekolah dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

Grafik 9
Pencapaian Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar
Tahun 2019 s.d 2023



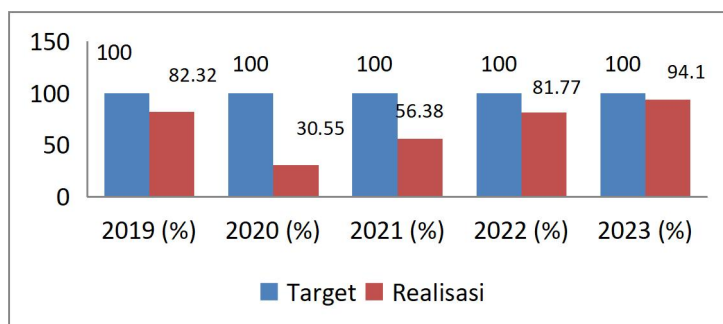
Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasardibawah target nasional dengan pencapaian sebesar yaitu 75.16% dan terjadi penurunan dari tahun 2022

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pelayanan kesehatan pada usia produktif meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining factor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM. Sedangkan pelayanan skrining factor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan tidak menular meliputi :

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b. Pengukuran tekanan darah
- c. Pemeriksaan gula darah
- d. Anamnesa perilaku beresiko

Grafik 10.
Pencapaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Tahun 2019 s.d 2023



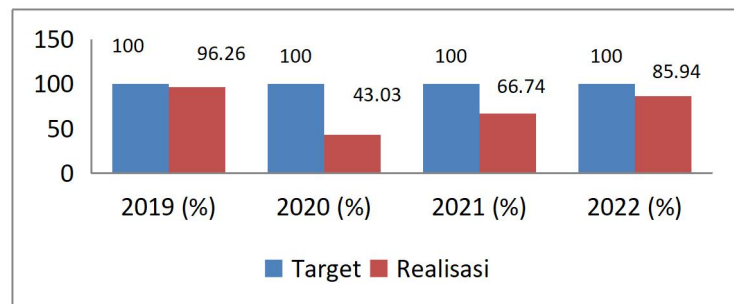
Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif dibawah target nasional dengan pencapaian sebesar yaitu 94.10% dan terjadi peningkatan dari tahun 2022

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta skrining factor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b. Pengukuran tekanan darah
- c. Pemeriksaan gula darah
- d. Pemeriksaan gangguan mental
- e. Pemeriksaan gangguan kognitif
- f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g. Anamnesa perilaku berisiko

Grafik 11.
Pencapaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Tahun 2019 s.d 2023

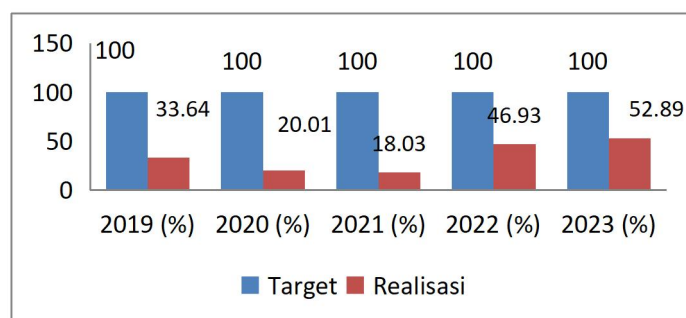


Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut dibawah target nasional dengan pencapaian sebesar yaitu 93.66% dan terjadi peningkatan dari tahun 2022.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat dan melakukan rujukan jika diperlukan

Grafik 12.
Pencapaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Tahun 2019 s.d 2023

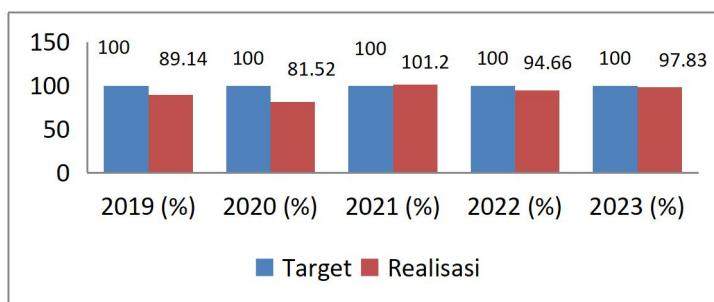


Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi dibawah target nasional dengan pencapaian sebesar yaitu 52.89% dan terjadi peningkatan dari tahun 2022

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus

Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi dan melakukan rujukan jika diperlukan

Grafik 13.
Pencapaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus Tahun 2019 s.d 2023

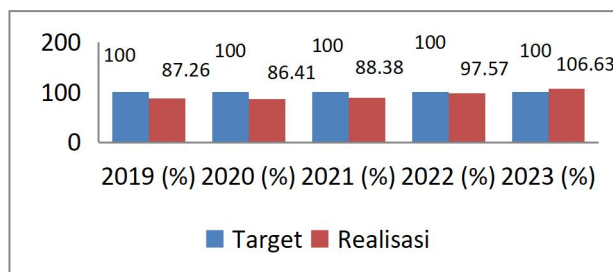


Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian pelayanan kesehatan penderita diabetes militus dibawah target nasional dengan pencapaian sebesar yaitu 97.83% dan terjadi penurunan dari tahun 2022

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Pelayanan kesehatan jiwa meliputi pemeriksaan status mental, wawancara, edukasi kepatuhan minum obat dan melakukan rujukan jika diperlukan

Grafik 14.
Pencapaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Tahun 2019 s.d 2023



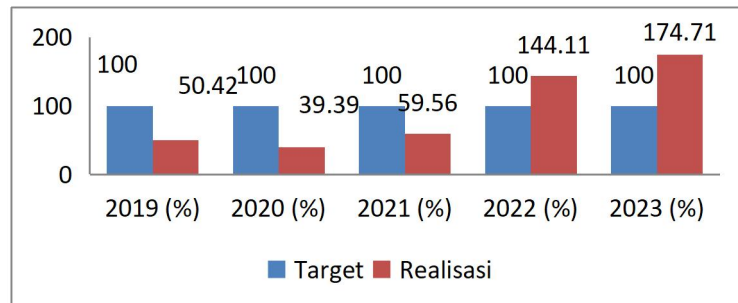
Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat dibawah target nasional dengan pencapaian sebesar yaitu 106.63% dan terjadi penurunan dari tahun 2022.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terduga Tuberkulosis

Pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, edukasi. Pelayanan yang diberikan sesuai pedoman penanggulangan TB yang berlaku antara lain:

- Penegakkan diagnose TB dilakukan secara beakteriologi dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjanglainnya
- Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan kahir pengobatan
- Pengobatan dengan menggunakan obat anti tuberkulosis (OAT) denganpanduan OAT standar

Grafik. 15
Pencapaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terduga Tuberkulosis
Tahun 2019 s.d 2023



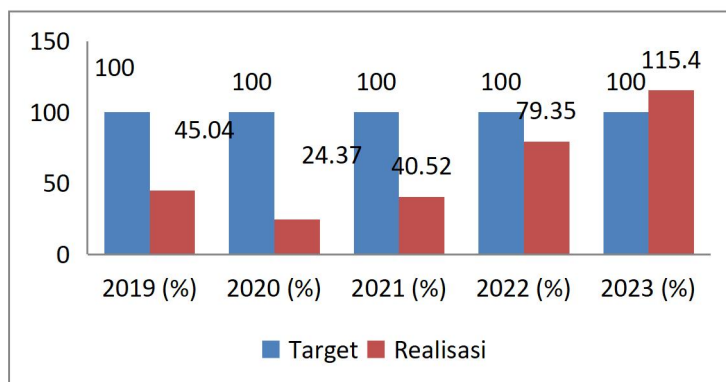
Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosissudah mencapai target nasional dengan pencapaian sebesar yaitu 100% dan terjadi peningkatan dari tahun 2022

12. Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Pelayanan kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) edukasi perilaku beresiko dan skrining. Orang dengan resiko terinfeksi virus HIV yaitu:

- a. Ibu hamil
- b. Pasien TBC
- c. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS)
- d. Penjaja Seks
- e. Lelaki yang berhubungan dengan lelaki (LSL)
- f. Transgender/waria
- g. Pengguna Napza Suntik (Penasun)
- h. Warga Bunaan Perumahan (WBP)

Grafik 16
Pencapaian Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Tahun 2019 s.d 2023



Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian pelayanan kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) masih jauh dari target nasional yaitu 115.40% dan terjadi peningkatan dari tahun 2022

Tabel 289
Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2023
Dinas Kesehatan Kota Dumai

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS PRATAMA			78.52 %	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					83.31 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	64.13 %		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9590	7888	1902	80.17 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.18 %		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	95.88 %		
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	1158	1158	0	100.00 %		
	2. Tablet tambah darah	Tablet	3075	3075	0	100.00 %		
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil ; Test Kehamilan	Paket	3075	3075	0	100.00 %		
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil ; Pemeriksaan HB	Paket	3075	3075	0	100.00 %		
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil ; Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	3075	3075	0	100.00 %		
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil ; Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	3075	3075	0	100.00 %		
	7. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3075	3075	0	100.00 %	Simpang Batal / Kembali	
	8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	1259	1259	0	100.00 %		
	9. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	93	93	0	100.00 %		
	10. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	312	312	0	100.00 %		
	11. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	188	188	0	100.00 %		
	12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	9590	4845	4745	50.52 %		



PEMCO DUMAI

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					83.30 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	63.30 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang	9154	7243	1911	79.12 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
1. Formulir Partograf	Formulir		2912	2912	0	100.00 %
2. Kartu ibu (rekam medis)	Paket		2912	2912	0	100.00 %
3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		1259	1259	0	100.00 %
4. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang		93	93	0	100.00 %
5. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		312	312	0	100.00 %
6. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		188	188	0	100.00 %
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						80.22 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	63.12 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang	8718	6878	1840	78.89 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						17.10 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	85.50 %
1. Vaksin Hepatitis B0	Vaksin		8282	2971	5311	35.87 %
2. Vitamin K1 injeksi	Ampul		8282	2787	5495	33.65 %
3. Salep/tekes mata antibiotik	Orang		2632	2632	0	100.00 %
4. Formulir bayi baru lahir	Formulir		2632	2632	0	100.00 %
5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang		2632	2632	0	100.00 %
6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		1257	1257	0	100.00 %
7. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang		93	93	0	100.00 %
8. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		312	312	0	100.00 %
9. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		188	188	0	100.00 %
4. Pelayanan Kesehatan Balita						82.56 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	68.17 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang	44931	35289	6642	85.22 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						14.39 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	71.93 %
1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen		0	0	0	0.00 %
2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir		21903	21903	0	100.00 %
3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku		1257	1257	0	100.00 %
4. Vitamin A Biru	Kapsul		21903	21903	0	100.00 %
5. Vitamin A Merah	Kapsul		21903	21903	0	100.00 %
6. Vaksin imunisasi dasar: HB0	Vaksin		8282	2971	5311	35.87 %
7. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin		8107	2714	5393	33.48 %
8. Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang		8107	2946	5161	36.34 %
9. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin		8107	3348	4759	41.30 %
10. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin		8107	2948	5159	36.36 %
11. Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin		8107	3294	4813	40.63 %
12. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin		8107	3294	4813	40.63 %
13. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin		2179	1472	707	67.55 %
14. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin		2179	1331	848	61.08 %
15. Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin		2179	1331	848	61.08 %
16. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakal (BHP)	Unit		10	10	0	100.00 %
17. Peralatan Anafilaktik	Paket		10	10	0	100.00 %
18. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang		93	93	0	100.00 %
19. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		312	312	0	100.00 %
20. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		188	188	0	100.00 %
21. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang		24	24	0	100.00 %
22. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang		990	990	0	100.00 %
23. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang		135	135	0	100.00 %



PEMKO DUMAI

5 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					76.44 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	64.77 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	47393	38373	9020	80.97 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					11.67 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	58.33 %
1 . Buku raport kesehatanku	Buku	0	0	0	0.00 %
2 . Buku pemantauan kesehatan	Buku	0	0	0	0.00 %
3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	0	0	0	0.00 %
4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	0	0	0	0.00 %
5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	0	0	0	0.00 %
6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	93	93	0	100.00 %
7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	312	312	0	100.00 %
8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	93	93	0	100.00 %
9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	188	188	0	100.00 %
10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	18	18	0	100.00 %
11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	0	0	0	0.00 %
12 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	31	31	0	100.00 %
13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	0	0	0	0.00 %
6 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					92.15 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.28 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	209297	196946	12351	94.10 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.87 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	84.35 %
1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	10	10	0	100.00 %
2 . Alat ukur berat badan	Unit	10	10	0	100.00 %
3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	10	10	0	100.00 %
4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	10	10	0	100.00 %
5 . Alat : Tensimeter	Unit	10	10	0	100.00 %
6 . Alat : Glukometer	Unit	10	10	0	100.00 %
7 . Alat : Tes strip gula darah	Unit	3819	1295	2524	33.91 %
8 . Alat : Lancet	Unit	10	10	0	100.00 %
9 . Alat : Kapas alkohol	Unit	10	10	0	100.00 %
10 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	10	10	0	100.00 %
11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	0	0	0	0.00 %
12 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	93	93	0	100.00 %
13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	312	312	0	100.00 %
14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	188	188	0	100.00 %
15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	24	24	0	100.00 %
16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	31	31	0	100.00 %
17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	0	0	0	0.00 %
7 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					88.25 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.92 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	15356	14380	976	93.64 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					13.33 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	66.67 %
1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	10	10	0	100.00 %
2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (PPG)	Paket	0	0	0	0.00 %
3 . Buku kesehatan lansia	Buku	0	0	0	0.00 %
4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	93	93	0	100.00 %
5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	312	312	0	100.00 %
6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	188	188	0	100.00 %
7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	24	24	0	100.00 %
8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	31	31	0	100.00 %
9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	0	0	0	0.00 %



PEMCO DUMAI

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					57.31 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					42.31 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :					
Orang	72563	38375	34188	52.89 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					75.00 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	0	0	0	0.00 %
2. Tensimeter	Unit	10	10	0	100.00 %
3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	0	0	0	0.00 %
4. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	93	93	0	100.00 %
5. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	312	312	0	100.00 %
6. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	188	188	0	100.00 %
7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	31	31	0	100.00 %
8. Obat Hipertensi	Paket	10	10	0	100.00 %
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					94.93 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					78.26 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :					
Orang	3819	3736	83	97.83 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.67 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					83.33 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
1. Alat : Glukometer	Unit	10	10	0	100.00 %
2. Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	10	10	0	100.00 %
3. Alat : Kapas Alkohol	Unit	10	10	0	100.00 %
4. Alat : Lancet	Unit	10	10	0	100.00 %
5. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	0	0	0	0.00 %
6. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	0	0	0	0.00 %
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					86.86 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :					
Orang	498	531	-33	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					6.86 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					34.29 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	0	0	0	0.00 %
2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	0	0	0	0.00 %
3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	10	10	0	100.00 %
4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	20	20	0	100.00 %
5. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	10	2	8	20.00 %
6. Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	10	2	8	20.00 %
7. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	0	0	0	0.00 %
8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	188	188	0	100.00 %
9. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	24	24	0	100.00 %
10. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	31	31	0	100.00 %
11. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	990	990	0	100.00 %
12. Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	135	135	0	100.00 %

TUTUP MUTU BIK

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							96.92 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :				Orang	8208	14340	-6132 100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)							16.92 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	84.62 %
1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media		1	1	0	100.00 %	
2. Reagen Zn TB	Paket		1	1	0	100.00 %	
3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket		1	1	0	100.00 %	
4. Pot dahan, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bursen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket		1	1	0	100.00 %	
5. Catridge tes cepat molekuler	Paket		1	1	0	100.00 %	
6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen		10	10	0	100.00 %	
7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen		10	10	0	100.00 %	
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)							20.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	0.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :				Orang	9851	0	9851 0.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)							20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media		10	10	0	100.00 %	
2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket		6000	6000	0	100.00 %	
3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/vacuuliner dan Jarum Sesuai	Paket		1	1	0	100.00 %	
4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan, Nomor KTP/NIK	Paket		10	10	0	100.00 %	
5. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang		93	93	0	100.00 %	
6. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		188	188	0	100.00 %	
7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		312	312	0	100.00 %	
8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang		18	18	0	100.00 %	
9. Tenaga kesehatan masyarakat	Orang		31	31	0	100.00 %	
10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang		2	2	0	100.00 %	

3 pemberitahuan baru

SUMBER : E-SPM BANGDA KEMENDAGRI

4.2.4 Alokasi Anggaran

Tabel. 290

ALOKASI ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM

NO	PROG	KEGI	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	PERSENTASE	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3,662,849,402	2,862,006,922	78.14 %	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3,662,849,402	2,862,006,922	78.14 %	
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil		Orang	614,838,900	531,508,645	86.45 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin		Orang	84,604,000	79,461,000	93.92 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir		Orang	110,157,402	109,669,100	99.56 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita		Orang	298,307,300	277,360,500	92.98 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Orang	232,537,400	210,734,400	90.62 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif		Orang	127,300,000	122,670,830	96.36 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN BNI"/>

7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	219,515,500	197,840,500	90.13 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN INI"/>
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	15,000,000	14,076,900	93.85 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN INI"/>
9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Orang	308,975,900	294,915,000	95.45 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN INI"/>
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	75,858,000	68,398,000	90.17 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN INI"/>
11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1,082,272,500	503,633,387	46.53 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN INI"/>
12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	493,482,500	451,738,860	91.54 %	<input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="TUTUP KEGIATAN INI"/>
13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	0	0	91.54 %	<input type="button" value="SILAKAN KEMBALI KEGIATAN INI"/>
14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen	0	0	91.54 %	<input type="button" value="SILAKAN KEMBALI KEGIATAN INI"/>
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINNYA						
NAMA KEGIATAN	#TAMBAH KEGIATAN		0	0		<input type="button" value="TAMBAH DATA"/>

Sumber : E-SPM BANGDA KEMENDAGRI

4.2.5 Dukungan Personil

Adapun jumlah tenaga yang ada seperti pada table berikut:

Tabel. 291
Jumlah Tenaga Medis Di Puskesmas Kota Dumai
Tahun 2020 S/D 2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Dokter Umum	57	77	93	89
2	Dokter Spesialis	0	0	0	0
3	Dokter Gigi	14	14	17	17
4	Dokter Gigi Spesialis	0	0	0	0

Tabel. 292
Jumlah Para Medis Di Puskesmas Kota Dumai
Tahun 2020 S/D 2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Perawat	174	167	176	179
2	Perawat Gigi	13	12	12	12
3	Bidan	316	291	310	302
4	Tenaga Teknis Kefarmasian	10	11	24	24
5	Apoteker	8	6	12	11
6	Kesehatan Masyarakat	31	34	31	29
7	Kesehatan Lingkungan	12	15	16	16
8	Gizi	17	22	24	24
9	Ketarapian Fisik	2	2	2	2
10	Keteknisian Medis	21	20	30	29

4.2.6 Permasalahan Dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi yang ditemui adalah sebagai berikut:

1. Untuk pelayanan Kesehatan Ibu Hamildi sebabkan karena kurangnya pemahaman defenisi operasional terhadap pelayanan yang diberikan sehingga angka yang di input tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
2. Untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin di sebabkan karena mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga persalinan dilakukan di luar wilayah tidak tercatat di MPDN/e-Kohort (tidak dilaporkan) baik di faskes maupun sesuai alamat wilayah kerja
3. Untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir di sebabkan karena kesehatan neonatal tidak dilaksanakan pada hari ke 8-28 karena mobilitas ibu bersalin yang tinggi (tidak ditempat) dan kurangnya sweeping dari bidan kelurahan
4. Untuk pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar disebabkan karena Penjaringan anak sekolah untuk siswa bari sudah dilaksanakan oleh seluruh puskesmas namun penjaringan berkala ada beberapa puskesmas yang tidak melakukan penjaringan berkala karena persiapan akreditasi.
5. Untuk Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di karenakan kesadaran penderita hipertensi untuk datang ke fasilitas layanan kesehatan sangat rendah terutama penderita hipertensi yang tidak mempunyai gejala

Adapun Tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Memberikan umpan balik laporan bulanan baik secara langsung maupun secara tertulis sehingga dpat dikoreksi setiap bulannya oleh pemegang program ibu di dinas kesehatan dan puskesmas
2. Menghimbau seluruh fasyankes untuk menginput angka kelahiran di MPDN dan E-Kohort
3. Mengaktifkan kembali tupoksi bidan kelurahan serta melakukan kunjungan rumah untuk pemeriksaan kesehatan neonatus
4. Menghimbau puskesmas untuk melaksanakan kegiatan penjaringan berkala mesti ada kegiatan lainnya agar target tetap tercapai.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

Bidang urusan Pekerjaan Umum ini dilaksanakan oleh OPD yaitu antara lain; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.3.1 Jenis Pelayanan

Kebijakan umum pembangunan daerah Tahun 2021 – 2026 menggambarkan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan tahun 2021-2026, Pemerintah Daerah telah menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan

Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung Penerapan SPM adalah sebagai Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPM
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum sub bidang air minum Daerah kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari dan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri atas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, sebagaimana tertuang pada Table sebagai berikut;

Tabel.293
Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan Air Limbah Domestik	100 %	Setiap Tahun

Indikator, Mutu Pelayanan dan Penerima Pelayanan.

Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam Tabel dibawah ini:

Tabel. 294
Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

No.	Indikator	Sub.Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antarlain: a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidakbening. b. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warnalainnya. c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalamair d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupuntidak. e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan MenteriKesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

$$SPM \text{ Kabupaten, Kota} = \frac{\sum \text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Jumlah Rumah Tangga Kabupaten, Kota}} \times 100\%$$

Pembilang : adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi didalam sebuah kabupaten/kota;

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten/kota tersebut.;

Penerima pelayanan dasar air minum sehari-hari yaitu Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

4.3.2 Target Pencapaian SPM Daerah

Adapun target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel. 295
Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Idikator Capaian	Target Capaian Nasional	Target Capaian Daerah	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4		5
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	100 %	2023
2	Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik	Jumlah total yang harus dilayani	100 %	100 %	2023

Perhitungan Kebutuhan dan Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan perhitungan kebutuhan pelayanan dasar sub air minum daerah kabupaten/Kota kelengkapan data yang dibutuhkan:

- a. Data Dokumen Kebijakan dan Strategi Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir
- b. Dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM kabupaten/kota yang disusun dalam waktu 15 s/d 20 tahun terakhir
- c. Data Akses dan Kondisi Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan dikabupaten/kota;
- d. Data jumlah rumah tangga diwilayah administrasi kabupaten/kota.
- e. Data rumah tangga yang mendapatkan pelayanan terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi; dan
- f. Data rumah tangga yang tidak mendapatkan pelayanan terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
- g. Data presentase GAP pelayanan dasar air minum dalam rangka peningkatan pemenuhan layanan dasar air minum domestik oleh setiap pemerintah kabupaten/kota.

Data kondisi sarana dan prasarana SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi dikelompokkan berdasarkan sumber air utama untuk minum

yang digunakan pada setiap rumah tangga diwilayah administratif kabupaten/kota ditunjukkan Tabel dibawah ini.

Tabel. 296
Perhitungan Kebutuhan Pelayanan Dasar Air Minum

Total Rumah Tangga dalam Wilayah	Total Penduduk dalam wilayah	Pelayanan Air Minum				GAP pelayanan dasar air minum
		Mendapat Pelayanan Air Minum Layak	Persentase (%)	Tidak Mendapat Pelayanan Air Minum Layak	Persentase (%)	
97.423	323.452	92.676	95,13	4.747	4,87	30.026

Sumber Data :

- Total Rumah Tangga dalam Wilayah (Database DKB Kemendagri Semester 2 2022/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai)
- Total Penduduk dalam Wilayah (Database DKB Kemendagri Semester 2 2022/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai)

Perhitungan Kebutuhan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Total Rumah Tangga dalam Wilayah	Total Penduduk dalam wilayah	Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				GAP pelayanan dasar air minum
		Mendapat Pelayanan	Persentase (%)	Tidak Mendapat Pelayanan Air Minum Layak	Persentase (%)	
323.452	323.452	300.260	92,83	23.192	7,17	56.120



Tabel. 297

Kondisi Sarana dan Prasarana SPAM Jaringan Perpipaan Kota Dumai

Jenis Sumber Air	Unit Air Baku			Unit Produksi			Unit Distribusi			Unit Pelayanan		Keterangan
	Nama Sumber Air	Lokasi Unit Sumber Air Baku	Kapasita Intake (L/d)	Kapasitas Unit Produksi (L/d)	Kapasitas Idle (L/d)		Jenis Pipa	Dimensi		Jumlah Sambungan Rumah	Jumlah Hidran Umum	
								Panjang (m)	Diameter (mm)			
Sungai	Sungai Mesjid	Bukit Timah KM.9 (KPBU)	450	200	-		HDPE	6.430	630	2641	-	Beroperasi (Rencana bertambah Produksi menjadi 400 l/d masih dalam rencana)
								9.540	400			
								1.282	315			
								14.484	250			
								18.766	160			
								34.732	110			
								82.201	90			
148.163	63											
Sungai	Sungai Mesjid	Bukit Timah KM.12 (NUWSP)	67	50	-		HDPE	16.276	315	1707	-	Beroperasi
								2450	250			
								4.980,2	160			
								8.102	110			
								17.131	90			
								32.097,1	63			
							GIP	14,5	100			
10	70											



PEMKO DUMAI

Sungai	Sungai Rokan	Rokan Hilir (Durolis)	500	150	-		HDPE	13202	500	-	-	Beroperasi dengan kapasitas Produksi 150 L/df
							HDPE	7380	400			
							HDPE	-	250			
							HDPE	-	160			
							HDPE	-	110			
							HDPE	-	90			
							HDPE	-	63			
Sungai	Sungai Kemeli	Medang Kampai	125	125	-		HDPE	-	160	-	-	Beroperasi
								-	110			
								-	90			
								-	63			
Sumur	Sumur Bor (DAK)	Tersebar di Kota Dumai	(30 lokasi)	1	-		PVC	-	63	2309	-	Beroperasi

4.3.3 Realisasi Penerapan SPM

Indikator kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Perhitungan kinerja penerapan SPM Kota Dumai:

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Jumlah Rumah Tangga Kabupaten/Kota}} \times 100$$

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{92.676}{97.423} \times 100$$

- SPM Kabupaten/Kota = 95,13%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Realisasi	Persen	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4		5
1.	Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga Terlayani	300.260	92,83 %	2023
		Jumlah Rumah Tangga Kabupaten/Kota	323.452		

Tabel. 298

Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			84.20 %	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					79.46 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.10 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	97423	92676	4747	95.13 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					3.36 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	16.80 %	
	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	950	150	800	15.79 %	
	2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	100	33	67	33.00 %	
	3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	97423	4636	92787	4.76 %	🔴 TULUP MUTU BELUM
	4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	97423	13288	84135	13.64 %	🔴 TULUP MUTU BELUM



PEMKO DUMAI

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					88.93 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.26 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang	323452	300260	23192	92.83 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						14.67 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	73.33 %
1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	652	652	0	100.00 %	
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	Rumah Tangga	652	652	0	100.00 %	TUTUP MUTU INI
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	2	1	1	50.00 %	TUTUP MUTU INI
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	3	2	1	66.67 %	TUTUP MUTU INI
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	2	1	1	50.00 %	TUTUP MUTU INI

Sumber : E-SPM BANGDA KEMENDAGRI

4.3.4 Alokasi Anggaran

Tabel. 299

Alokasi Anggaran yang mendukung Pencapaian SPM

NO	PROG RAM	KEGI ATIAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	PERSENTASE	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					13,429,078,000	13,251,417,327	98.68 %	
1			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
	1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		12,735,500,000	12,688,574,214	99.63 %	
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	192,564,000	178,583,615	92.74 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/pertuasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	92.74 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	92.74 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Pedesaan	SR	2,322,600,000	2,290,245,985	98.61 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	98.61 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Pedesaan		0	0	98.61 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
		7	Pertuasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	10,220,336,000	10,219,744,614	99.99 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Pedesaan		0	0	99.99 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		0	0	99.99 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	99.99 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	99.99 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	99.99 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	99.99 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0	0	99.99 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	99.99 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Pedesaan	Unit	0	0	99.99 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI



PEMKO DUMAI

	17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	99,99 %			
	18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	99,99 %			
	19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	99,99 %			
	20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	99,99 %			
	21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	99,99 %			
2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		693,578,000	562,843,113	81.15 %			
	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	397,268,000	355,853,003	89,58 %			
	2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	89,58 %			
	3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	89,58 %			
	4	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	89,58 %			
	5	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	89,58 %			
	6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	89,58 %			
	7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	89,58 %			
	8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	89,58 %			
	9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	89,58 %			
	10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	89,58 %			
	11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		0	0	89,58 %			
	12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	0	0	89,58 %			
	13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	89,58 %			
	14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	296,310,000	206,990,110	69,86 %			
	15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	69,86 %			
	16	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	69,86 %			
	17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	69,86 %			
2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA									
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINNYA									
	NAMA KEGIATAN	#TAMBAH KEGIATAN		0	0				

Sumber : E-SPM BANGDA KEMENDAGRI

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil/pegawai yang masih aktif pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari 66 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 300
**PNS Dinas PUPR Kota Dumai
 Menurut Tingkat Pendidikan Formal**

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Org)	%
1	Strata III (S-3)	0	0
2	Strata II (S-2)	4	6
3	Strata I (S-1)	41	62
4	Diploma III / Sarjana Muda	5	8
5	SLTA Sederajat	16	24
JUMLAH		66	66

Tabel. 301
**PNS Dinas PUPR Kota Dumai
 Menurut Jabatan Tahun 2023**

NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH (Org)	%
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	6	10
3.	Eselon IV	8	13
4.	Jabatan Fungsional	13	19
4.	Staf/Non Struktural	38	57
JUMLAH		66	100

Tabel. 208
**PNS Dinas PUPR
 Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2023**

NO	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH (Org)	%
1.	Gol. IV	4	6
2.	Gol. III	52	78
3.	Gol. II	10	16
JUMLAH		66	100

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala yang muncul dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Air Minum di Dinas PUPR Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan data belum optimal yang dipengaruhi oleh kesulitan mendapatkan data/laporan SPM dari perangkat daerah terkait. Akibatnya terjadi keterlambatan dalam analisis data dan pelaporan tidak tepat waktu sesuai yang diharapkan.



2. Belum tersedianya data konkret guna menunjang pencapaian dan implementasi SPM.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara khusus hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur Pengelolaan air limbah domestic baik itu dengan system setempat maupun dengan system Terpusat.
4. Pendanaan pembangunan infrastruktur bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Sanitasi.
5. Belum adanya anggaran untuk mendanai kegiatan mulai dari pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi terutama pendanaan dari APBD.
6. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar merupakan jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel. 302

INDIKATOR DAN NILAI SPM SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM SECARA NASIONAL

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

4.4.2 Target Pencapaian SPM Daerah

Table. 302
TARGET CAPAIAN SPM DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Waktu Capaian
1	2	3	4	6
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/ Kota	Jumlah warga Negara Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi pemerintah Daerah Kab/ Kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

4.4.3 Realisasi Pencapaian SPM













Table. 304
REALISASI CAPAIAN SPM DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			90.00 %	
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					80.00 %	
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					0.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	0.00 %	
	1. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0	0	0	0.00 %	
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %	
Tidak Ada Relokasi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah							
Upload Surat Keterangan Tidak Relokasi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Download Dokumen yang telah di upload 1472-20240119105013SURAT PERNYATAAN BENCANA.pdf Dokumen Sudah Di Setujui UPLOAD DOKUMEN							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0	0	0	100.00 %	TUTUP MUTU BG Tidak Boleh Semua Mutu Ditutup
	2. Subsidi uang sewa	Rumah	0	0	0	100.00 %	TUTUP MUTU BG Tidak Boleh Semua Mutu Ditutup
	3. Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0	0	0	100.00 %	TUTUP MUTU BG Tidak Boleh Semua Mutu Ditutup

Sumber : E-SPM BANGDA KEMENDAGRI

4.4.4 Alokasi Anggaran

Tabel. 305
Alokasi Anggaran yang Mendukung Capaian SPM

NO	PROG RAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	PERSENTASE	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					377,400,000	357,406,962	94.70 %	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				277,400,000	269,442,462	97.13 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	221,950,000	218,287,862	98.35 %	 
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	45,450,000	45,354,600	99.79 %	 
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	10,000,000	5,800,000	58.00 %	 
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	58.00 %	 
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	58.00 %	 
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	58.00 %	 

Sumber : E-SPM BANGDA KEMENDAGRI

4.4.5 Dukungan Personil

Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai didukung dengan sumber daya manusia dengan personil kepegawaian sebanyak 60 orang, yang terdiri atas:

Golongan IV / Eselon II	= 1 orang
Golongan IV / Eselon III	= 1 orang
Golongan III / Eselon III	= 3 orang
Golongan III / Eselon IV	= 1 orang
Golongan IV / Fungsional	= 1 orang
Golongan III / Fungsional	= 8 orang
Golongan III / Pelaksana	= 10 orang
Golongan II / Pelaksana	= 2 orang
Honorar (Non PNS)	= 33 orang

Berdasarkan Golongan Ruang, pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Data Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Unit Kerja (Bagian/Bidang)	Golongan (Ruang)				Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		IV	III	II	I	L	P	
1.	Sekretariat	1	9	-	-	7	3	10
2.	Perumahan Rakyat	1	3	2	-	5	2	6
3.	Kawasan Pemukiman	1	6	1	-	7	1	8
4.	Pertanahan	-	4	-	-	3	1	4
5.	UPT	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja (Bagian/Bidang)	Pendidikan						Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		SD	SMP	SMA	D-III	S-1	S-2	L	P	
1.	Sekretariat	-	-	-	-	8	2	6	4	10
2.	Perumahan Rakyat	-	-	1	-	4	1	5	2	6
3.	Kawasan Pemukiman	-	-	1	-	6	1	7	1	8
4.	Pertanahan	-	-	-	-	3	1	3	1	4

arkan disiplin ilmu, pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Disiplin Ilmu

No.	Disiplin Ilmu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Sarjana Teknik	10	4	14
2.	Sarjana Sosial	5	-	5
3.	Sarjana Ekonomi	2	-	2
4.	Sarjana Ilmu Pemerintahan	1	1	2
5.	Sarjana Arsitektur	-	1	1
6.	Sarjana Sains	1	-	1
7.	Diploma III Ekonomi	1	-	1

4.4.6 Permasalahan Dan Solusi

a) Kendala dan Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain:



PEMKO DUMAI

1. Setelah dilakukan konsultasi ke BPBD dan DPUPRPKPP Provinsi Riau di simpulkan bahwa Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana direncanakan untuk korban kebakaran rumah di Kota Dumai, tetapi sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa kebakaran rumah bukan merupakan bencana. Sementara pada Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 ditetapkan nomenklatur sub kegiatan yaitu Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana. Oleh karena itu, kegiatan fisik ini belum dapat dilaksanakan.
2. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;

b) Solusi

Sebagai langkah dalam menunjang pencapaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman diperlukan:

1. Tersedianya sinkronisasi nomenklatur program kegiatan untuk mendukung capaian target SPM kedalam renstra OPD termasuk pengalokasian anggaran dengan jumlah anggaran yang wajar dan patut berdasarkan ketentuan yang ada, meskipun Kota Dumai bukan termasuk dalam wilayah rawan bencana. Dalam hal ini program kegiatan yang dimaksud sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019;
2. Pada tahun 2023 tidak terjadi bencana sesuai UU No. 24 Tahun 2007 maupun program relokasi pemerintah Kabupaten Kota, sehingga menurut amanat dari Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 Dinas Perkimtan melaksanakan persiapan pendahuluan yakni:
 - a. Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
 - b. Identifikasi Lahan Potensial sebagai Relokasi Perumahan
 - c. Detail Engineering Design (DED) Perumahan bagi korban bencana
3. Peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman SDM terkait SPM dengan mengikuti rapat, pelatihan, seminar, workshop atau lainnya.

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

4.5.1 Jenis Pelayanan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, pada BAB II pasal 3 disebutkan Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:



PEMKO DUMAI

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 16 tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja pada Pasal 1 Ayat (6), Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk tertulis mengenai prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Permendagri tersebut, Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
- b. Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Kepala Daerah;

Dan dalam pada Pasal 3 Ayat (2) Permendagri tersebut, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi :

- c. Standar Operasional Prosedur Deteksi dan Cegah dini;
- d. Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Penyuluhan;
- e. Standar Operasional Prosedur Patroli;
- f. Standar Operasional Prosedur Pengamanan;
- g. Standar Operasional Prosedur Pengawasan;
- h. Standar Operasional Prosedur Penertiban;
- i. Standar Operasional Prosedur Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

Standar Sarana Prasarana Satpol PP

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 7 mengatur mengenai Standar Sarana dan prasarana minimal Satpol PP meliputi:

- a. gedung kantor, paling sedikit terdiri dari:
 - ruang kerja pimpinan dan staf;
 - ruang pos jaga;



PEMKO DUMAI

- ruang rapat;
 - ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
 - ruang penyimpanan barang/gudang;
 - ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;
 - ruang sidang majelis kode etik;
 - tempat apel/upacara; dan halaman parkir.
- b. kendaraan operasional;
- sepeda motor,
 - mobil jenis offroad/jeep,
 - mini bus,
 - truk kecil,
 - truk sedang,
 - truk besar,serta jenis kendaraan lain.
- c. perlengkapan operasional, paling sedikit terdiri dari:
- perorangan;
 - beregu;
 - patroli; dan
 - penegakan Perda dan Perkada.

Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 5 dijelaskan Pengembangan kompetensi dan keahlian dalam rangka pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:

- a. pendidikan dasar Pol PP secara berjenjang;
- b. pendidikan dan pelatihan teknis penunjang; dan
- c. pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota pada pasal 5 ayat (1) dijelaskan Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pelayanan kerugian materil; dan
- b. pelayanan pengobatan

4.5.2 Target Pencapaian SPMDaerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian Nasional	Target Capaian Daerah	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4		5
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum perda dan perkada kabupaten/kota	100 %	100 %	2023

Sedangkan mutu minimal layanan dasar Standar Pelayanan Minimal yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut

Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Satuan
Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	100	%
Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	100	%
Standar operasional prosedur Satpol PP	7	SOP
Standar sarana prasarana Satpol PP	43	Unit
Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	15	Orang
Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100	%

4.5.3 Realisasi Pencapaian SPM

Secara umum, Pencapaian Persentase Penerima Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 306
Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)

KATEGORI PENCAPAIAN TRANTIBUM						
NO	INDIKATOR KIBERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA		92.40 %	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				92.40 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PEKERJA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	244	244	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.40 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	62.02 %
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	43	31	12	72.09 %
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	6	6	0	100.00 %
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	9	9	0	100.00 %
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	0	0	0	0 %
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0 %
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	2	2	0	100.00 %

Sumber : E-SPM BANGDA KEMENDAGRI

a. Capaian Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, Standar Operasional Prosedur telah ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Dumai dengan Nomor 213/ORG/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, terdiri dari:

1. SOP Penegakan Peraturan Daerah
2. SOP Pembinaan dan Penyuluhan
3. SOP Penindakan Preventif Non Yustisial
4. SOP Pelaksanaan Operasional Patroli
5. SOP Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa Kerusuhan Massa
6. SOP Operasi Penertiban Paksa

Capaian standar Operasional Prosedur Satpol PP Tahun 2023 dapat di lihat dalam tabel berikut:

Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase
Standar operasional prosedur Satpol PP	7	7	0	100

b. Capaian Standar Sarana Prasarana Satpol PP

Saat ini Satpol PP Kota Dumai telah memiliki Gedung Kantor yang Berlokasi di Jalan H.R Soebrantas Kota Dumai (Eks. Gedung Serbaguna)

a. Gedung Kantor

No	Standar Minimal Gedung Kantor	Ada/ Tidak Ada	Keterangan
1	Ruang Kerja Pimpinan dan Staf		
	1 Ruang Kepala Satuan	Ada	
	2 Ruang Sekretaris	ada	
	3 Ruang Kepala Bidang	Ada	3 Ruang Kepala Bidang
	4 Ruang Sekretariat	Ada	
2	Ruang Pos Jaga	Ada	
3	Ruang Rapat	Tidak Ada	Belum tersedia Ruang Rapat Khusus, Rapat dilaksanakan di ruangan Kepala Satuan.
4	Ruang Layanan Pengaduan/ Pemeriksaan	Tidak Ada	Belum ada ruang khusus pemeriksaan
5	Ruang Penyimpanan Barang/ Gudang	Ada	
6	Ruang Sekretariat PPNS	Tidak Ada	Belum ada ruang Sekretariat PPNS
7	Ruang Sidang Majelis Kode Etik	Tidak Ada	Belum ada ruang Sidang Kode Etik
8	Tempat Apel/ Upacara	Ada	
9	Halaman Parkir	Ada	
		Gedung Kantor Satpol PP Kota Dumai belum memenuhi Standar Minimal Sebagaimana Permendagri Nomor 17 Tahun 2019	

b. Kendaraan Operasional;

No	Standar Kendaraan Operasional	Ada/ Tidak ada	Jumlah	Keterangan
1	Sepeda Motor	Ada	4 Unit	
2	mobil jenis offroad/ jeep	Tidak Ada	0	
3	Mini Bus	Ada	3 Unit	- 1 Unit Mobil Dinas Kepala satuan - 2 Unit Mobil penunjang Operasional (1 Unit Rusak Berat)
4	Truck Kecil	Ada	3 Unit	- 1 Unit Mobil Double Cabin (1 Rusak Berat) - 2 Unit Mobil Patroli - 1 Unit Mobil Double Gardan (Bantuan dari BPBD untuk Tim Reaksi Cepat)

5	Truck Sedang	Ada	2 Unit	- 2 Unit Truck Dalmas (1 Unit Dipinjam Pakaikan ke Kodim 0320)
6	Truck Besar	Tidak Ada	0	
				Kendaraan Dinas yang dimiliki Satpol PP Kota Dumai belum memenuhi Standar Minimal Sebagaimana Permendagri Nomor 17 Tahun 2019

c. Perlengkapan operasional

No	Perlengkapan Dinas Perorangan	Ada/ Tidak Ada	Keterangan
1	Pakaian Dinas		
	1 PDH	Ada	
	2 PDL I, PDL II	Ada	
	3 PDU I, PDU II	Tidak Ada	
2	Tonfa & Holster Tonfa	Ada	Hanya digunakan Pada Kegiatan Tertentu (Cth : Pengamanan Unjuk rasa)
3	Borgol	Tidak Ada	
4	Tameng	Ada	Hanya digunakan Pada Kegiatan Tertentu (Cth : Pengamanan Unjuk rasa)
5	Senter	Ada	
6	Ferplas	Tidak Ada	
7	Tas Ransel	Tidak Ada	
8	Sleeping Bag	Tidak Ada	
9	Jacket	Ada	
10	Rompil/ Body Protector	Tidak Ada	
11	Masker	Ada	

1. Beregu;

Perlengkapan Operasional Beregu merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu, antara lain berupa matras, tenda peleton, peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi.

2. Patroli;

Perlengkapan Operasional Patroli merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan patroli.

3. Penegakan Perda dan Perkada.

Perlengkapan Operasional Patroli merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Perkada. Perlengkapan tersebut terdiri atas perlengkapan perorangan, peralatan komunikasi, dan perlengkapan penegakan Perda yustisial.

Capaian Standar Sarana Prasarana Satpol PP Kota Dumai Tahun 2023 dapat di lihat dalam tabel berikut:

Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase
Standar Sarana Prasarana Satpol PP	43	31	12	72,09

c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat

Pada Tahun 2023, Standar peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dianggarkan untuk Belanja Perjalanan Dinas Diklat Fungsional bagi pejabat Fungsional Pertama Satpol PP Sebanyak 15 (lima belas) orang.

Capaian Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP Kota Dumai Tahun 2023 dapat di lihat dalam tabel berikut:

Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase
Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP	15	15	0	100

d. Capaian Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada

Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja berupa Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota ditargetkan bagi Warga Negara yang terkena Dampak akibat Penegakan Hukum Perda dan Perkada. Untuk di Kota Dumai sendiri, pada tahun 2023, Upaya Penegakan Perda dan Perkada tidak ada Warga Negara yang terkena dampak kerugian, baik secara fisik, maupun materil.

Namun hal itu tidak lantas berarti Capaian indikator tersebut menjadi tidak tercapai. Justru Hal itu menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP, sehingga dalam penegakan Perda/ Perkada tidak menimbulkan kerugian.



Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase
Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	0
Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	0
Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	0	0	0	0

Akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai merupakan perwujudan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dengan keterbatasan alokasi APBD untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai tahun 2023, keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

4.5.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022 alokasi APBD Kota Dumai untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sebesar Rp. 9.603.365.028,-(Sembilan Milyar enam ratus tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah)dialokasikan Rp.462.443.804,- (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah)untuk program urusan wajib dengan penyerapan anggaran sebesarRp. 445.519.055,-(empat ratus empatpuluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu lima puluh lima rupiah)atau 99,5%. Uraian pencapaian realisasi keuangan berdasarkan program urusan wajib tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 307
Pencapaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Dumai Tahun 2023

NO	PROG RAM	KEGI ATAH	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	PERSENTASE	AKSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					6.891.564.757	6.334.069.469	91.91 %		
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)								
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				688.622.800	685.801.500	99.59 %	
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	Kasus	470.626.700	470.526.700	99.98 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI	
		2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	15.000.000	15.000.000	100.00 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI	
		3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	72.300.000	72.215.000	99.88 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI	
		4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	99.544.000	97.531.000	97.98 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI	
		5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Orang	16.130.000	15.506.700	96.14 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI	
		6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	15.022.100	15.022.100	100.00 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI	
		7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	100.00 %	BUKA KEMBALI KEGIATAN INI	
		8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	100.00 %	BUKA KEMBALI KEGIATAN INI	

Sumber : E-SPM Bangda Kemendagri

4.5.5 Dukungan Personil

Adapun dukungan personal / Pegawai aktif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai terhitung 31 Desember 2023 adalah 139 Orang, terdiri dari 52 orang PNS, dan 87 orang Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak). Menurut Jenjang Pendidikan PNS dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Pasca Sarjana (S.2) : 5 Orang
- b. Sarjana (S.1) : 25 Orang
- c. SLTA : 22 Orang

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Pada PNS Satpol PP Kota Dumai didominasi oleh tingkat SLTA 54%, S1 sebanyak 42%, dan S.2 10%.

Sedangkan menurut golongan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Golongan IV : 2 Orang
- b. Golongan III : 40 Orang
- c. Golongan II : 10 Orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri:

1. Minimnya personil PPNS(Saat Ini PPNS Satpol PP Kota Dumai Berjumlah 1 Orang)

Solusi :

Memberikan kesempatan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan PPNS guna mengoptimalkan penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran PERDA.

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Saat ini kendaraan Operasional Patroli yang dimiliki Satpol PP Berupa :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Truk Dalmas Tahun 2002 (Rusak Berat);
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Truk Dalmas Tahun 2023 (Kondisi Baik);
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Minibus MPV Tahun 2015 (Kondisi Kurang Baik,dikarenakan pemakaian sudah lama);
- 2 (Dua) Unit Mobil Pick Up Patroli (Tahun 2006 dan 2012); (Kondisi Kurang Baik, dikarenakan pemakaian sudah lama);
- 2 (satu) Unit Mobil Double Cabin, 1 Unit Tahun 2013 (Kondisi Rusak Berat),
- 1 Unit bantuan dari BPBD untuk Tim Reaksi Cepat (Kondisi Baik)

Dengan keterbatasan yang ada serta kondisi beberapa kendaraan yang sudah cukup tua mengakibatkan progress Kinerja yang dicapai belum maksimal.

Solusi :

Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional

3. Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran PERDA. Dengan minimnya pagu anggaran yang dimiliki mengakibatkan Satpol PP Kota Dumai belum bisa secara Khusus mengalokasikan anggaran Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan.

Solusi :

Mengusulkan penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional lapangan;

4. Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat.

Solusi :

Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

5. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi terkait.

Solusi :

Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada Bab II pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan: disebutkan bahwa Jenis Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum, Sub Urusan Bencana sebagai berikut :

- a. Pelayanan informasi rawan Bencana
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan Merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak Diperoleh setiap warga negara Mutu Pelayanan Dasar Adalah ukuran kuantitas dan Kualitas Barang dan atau jasa kebutuhandasar sertapemenuhannya secara minimal dalam pelauyanan dasar sesuai dengan syandar teknis agar hidup secara layak

Kemudian diatur lebih rinci didalam dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi:

1. Pelayanan informasi rawan bencana, terdiri dari ;
 - a. penyusunan kajian risiko bencana;
 - b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. pembuatan rencana kontinjensi;
 - c. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana :
 - a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
 - b. respon cepat darurat bencana;
 - c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;



- e. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- 4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - a. layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
 - b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
 - d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran;
 - e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Renstra BPBD Kota Dumai 2021-2026 yang sudah disusun untuk periode 2021 sampai dengan 2026 pada awalnya masih menggunakan target lama Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota, dan selanjutnya dilakukannya perubahan Substansi Renstra BPBD Kota Dumai sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan selanjutnya dilakukannya penyesuaian sehubungan dengan kebijakan nasional berupa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dan setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka BPBD Kota Dumai berupaya untuk melakukan penyesuaian Target dan Indikator penerima layanan standar pelayanan minimal walaupun belum sepenuhnya dilakukan sebagai berikut :

Tabel. 308
Target Capaian SPM Daerah Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun



3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

Dan Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rumus perhitungan Indikator
	1	2	3	4	5
A.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk Dokumen yang sah/legal	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 % Paling lama 1(satu) Tahun	X= kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y= Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan $\frac{X}{Y} \times 100 \%$
B.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 % Paling lama 1(satu) Tahun	X = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana. Y= Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana $\frac{X}{Y} \times 100 \%$

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rumus perhitungan Indikator
	1	2	3	4	5
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 % Paling lama 1(satu) Tahun	X= kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y= Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan $\frac{X}{Y} \times 100 \%$



B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 % Paling lama 1(satu) Tahun	X= kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y= Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan $\frac{X}{Y} \times 100\%$
C	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Persentase (%) jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	100 % Paling lama 1(satu) Tahun	X= Jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan Y= Jumlah aparatur dan warga Negara di kawasan rawan bencana $\frac{X}{Y} \times 100\%$
D	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnyawarga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang ikut pelatihan	100 % Paling lama 1(satu) Tahun	X= Jumlah warga Negara yang ikut pelatihan Y= Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana $\frac{X}{Y} \times 100\%$
E	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100 % Paling lama 1(satu) Tahun	X= Jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdalops Y= Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana $\frac{X}{Y} \times 100\%$

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rumus perhitungan Indikator
	1	2	3	4	5
A.	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit / wabah zoonosis prioritas	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 Jam	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 Jam untuk setiap status KLB (%)	100 % Paling lama 1(satu) Tahun	X= Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 Jam untuk setiap penetapan KLB Y= Jumlah seluruh penetapan status KLB $\frac{X}{Y} \times 100\%$
B.	Aktivasi system Komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi system komando oleh pudalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100 % Paling lama 1(satu) Tahun	X= Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Y= Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana $\frac{X}{Y} \times 100\%$



		bencana			
C.	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah korban berhasil di cari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 % Paling lama 1(satu) Tahun	X= Jumlah warga Negara yang berhasil dicari, ditolong dan di evakuasi Y= Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana $\frac{X}{Y} \times 100 \%$

4. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rumus perhitungan Indikator
	1	2	3	4	5
A.	Indikator Utama Layanan SPM Sub urusan kebakaranLayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh pemadam kebakaran dan penyelamatan	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran	Persentase (%)	100 % Paling lama 1(satu) Tahun	X= Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (respon time) oleh pemadam kebakaran dan penyelamatan Y= Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten /Kota Pada Tahun X $\frac{X}{Y} \times 100 \%$
B	Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang di bentuk/di bina oleh perangkat daerah yang menangani sub urusan kebakaran	Warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran	Persentase (%)	100 % Paling lama 1(satu) Tahun	X=Jumlah layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang di bentuk/di bina oleh perangkat daerah yang menangani sub urusan kebakaran Y= Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten /Kota Pada Tahun X $\frac{X}{Y} \times 100 \%$
C.	Indikator Penunjang layanan capaian SPM sub urusan kebakaran Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan Manusia (operasi darurat non kebakaran)	Warga Negara yang mengalami kondisi membahayakan (non kebakaran)	Jumlah dan Jenis	1 (satu) Tahun	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Kabupaten/Kota dalam Tahun X

Target capaian Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

Tabel. 309
Target Capaian SPM Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas waktu pencapaian	Satuan Kerja penanggung jawab
		Indikator	Nilai		
1.	Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)	a. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	2023	BPBD

4.5.3 Realisasi

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Perhitungan
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	772	772	0	100
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	7	7	0	100
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana (Kebencanaan)	772	772	0	100
4.	Layanan Pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	7	7	0	100

Realisasi capaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut ;



PEMKO DUMAI

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS UTAMA			98.61 %	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					99.84 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	772	772	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.84 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	99.18 %	
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00 %	
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	7	7	0	100.00 %	
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	4090	3956	134	96.72 %	
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	40	40	0	100.00 %	
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7	7	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %	
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	unit	28	33	-5	100.00 %	
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	19	19	0	100.00 %	
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					96.00 %	
	ya		Ya Terjadi Bencana			UPLOAD SK BENCANA	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	772	772	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	80.00 %	
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam persiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1	1	0	100.00 %	
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	772	772	0	100.00 %	
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %	
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	0 %	TUTUP MUTU BNI
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	2	2	0	100.00 %	
KATEGORI PENCAPAIAN DAMKAR							
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS UTAMA			94.22 %	
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					94.22 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7	7	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.22 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	71.11 %	
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	52	47	5	90.38 %	TUTUP MUTU BNI
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	3	2	1	66.67 %	
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	18	11	7	61.11 %	
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	251	31	220	12.35 %	
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	26	25	1	96.15 %	TUTUP MUTU BNI
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	2	2	0	100.00 %	TUTUP MUTU BNI

Pada Tahun 2023 BPBD Kota Dumai dan pihak terkait lainnya telah melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah administrasi Kota Dumai dengan Luas wilayah Kota Dumai adalah 2.066,72 Km²:

Tabel.310
Luas Kecamatan Kota Dumai Tahun 2023

LUAS WILAYAH KOTA DUMAI MENURUT KECAMATAN (Km2)		
NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM2)
1.	BUKIT KAPUR	336,04
2.	MEDANG KAMPAI	169,74
3.	SUNGAI SEMBILAN	1423,79
4.	DUMAI BARAT	36,01
5.	DUMAI SELATAN	66,96
6.	DUMAI TIMUR	28,81
7.	DUMAI KOTA	4,24
JUMLAH		2.065,59

Dari luasan wilayah Kota Dumai yang menjadi target Cakupan Wilayah Penanganan Bencana adalah 56,42% yaitu 1.166,12 km², ketercapaian Cakupan Wilayah Penanganan Bencana pada tahun 2023 adalah sebesar 54,85% dengan perhitungan jumlah luasan wilayah penanganan bencana berdasarkan luasan kecamatan yaitu kecamatan bukit kapur, kec, medang kampai, kec, Dumai Barat, Kec, Dumai Selatan, Kec, Dumai Timur, Kec, Dumai Kota dan 1/4 dari luasan wilayah kecamatan sungai sembilan yang bisa di akses melalui jalur darat masih termasuk kedalam wilayah penanganan bencana, atau dapat di julahkan sebagai berikut :

Jumlah wilayah kecamatan bukit kapur, kec, medang kampai, kec, Dumai Barat, Kec, Dumai Selatan, Kec, Dumai Timur, Kec, Dumai Kota dan setengah dari luasan wilayah kecamatan sungai sembilan $\frac{\text{Luas Wilayah Kota Dumai}}{\text{Luas Wilayah Kota Dumai}} \times 100 \%$

$$\frac{(339,26 + 163,49 + 36,16 + 66,08 + 35,52 + 5,29 + 355,23)}{2066,72} \times 100 \% = 48,44\%$$

Ketercapain Target dengan Realisasi Cakupan Wilayah Penanganan Bencana pada Tahun
2023

$$\frac{(48,44)}{54,85} \times 100 \% = 97,21\%$$

Adapun terget ketercapaian target Response Time Rate Kejadian Kebakaran diwilayah Manajemen Penanganan Bencana atau Wilayah Manajemen Kebakaran dari



PEMKO DUMAI

kejadian kebakaran pemukiman yang dapat ditangani dalam waktu Kurang dari 15 Menit dapat dilihat dari data kebakaran pemukiman sebagai berikut :

DATA KEBAKARAN TAHUN 2023

NO	HARI/TANGGAL	LOKASI	OBJEK YANG TERBAKAR	RESPON TIME
1	02 Januari 2023	Jl. Lintas Pelintung, Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai.	1 (satu) Unit Bengkel dan empat Unit sepeda motor	21 MENIT
2	06 Januari 2023	Jl. Datuk laksamana Rt 1, Kel. Buluh kasap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai.	1 (satu) rumah (Bagian pelapon, dan perabot) Rumah tidak berpenghuni	04 MENIT
3	01 Februari 2023	Jl. Rela Rt 1, Kel. Purnama, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai.	1 (satu) rumah/kedai (Bagian pintu, dinding dan pelapon dalam kedai)	08 MENIT
4	04 Februari 2023	Jl. MH Thamrin Gg. Durian Kel. STDI, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai.	kabel yang melintas dari tiang ke arah rumah	07 MENIT
5	11 Februari 2023	Jl. Prof. M Yamin, Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai.	1 (satu) Ruko Elektronik	13 MENIT
6	18 Februari 2023	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Bukit Kayu Kapur, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai.	1 (satu) unit warung/kios (jualan bbm)	10 MENIT
7	18 Februari 2023	Gg. Kenari Purnama, Kel. Purnama, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai.	bedeng batu bata	25 MENIT
8	09 Maret 2023	Jl. Pangeran Hidayat Kelurahan Bintang Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai.	kebakaran kabel listrik	05 MENIT
9	12 Maret 2023	Jl. Tunas muda Kelurahan Bukit datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.	kebakaran regulator tabung Gas 3 kg	05 MENIT
10	16 Maret 2023	Jl. Soekarno-Hatta Gg. Serumpun Rt. 015 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.	kebakaran 2 unit Mobil Tangki CPO dan Bengkel Las	10 MENIT
11	24 Maret 2023	Jl. Bintang Kelurahan Bintang Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai.	Kebakaran Dapur kedai	03 MENIT
12	01 April 2023	Jl. Putri Tujuh, Kel. Tanjung Palas, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai.	Area Make Up Gas Compressor HCU-211	10 MENIT



PEMKO DUMAI

13	08 April 2023	Jl. Sultan Hasanuddin GG. kemiri Kelurahan Rimba sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai.	5 Petak Rumah perabotan permanen	06 MENIT
14	13 April 2023	Jl. Pangkalan Sena Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.	korsleting lisrik	09 MENIT
15	15 April 2023	Jl. Jawa Gg. Mempelam 1 Rt 04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.	Panti Asuhan Peduli Bersama Asrama Pria Lantai 2 dan 1 unit sepeda motor	08 MENIT
16	21 April 2023	Jl. Sisingamangaraja Gg. Mulia No. 04 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.	kebakaran 3 unit rumah papan dan 1 Unit ruko Rumah Makan	05 MENIT
17	02 Mei 2023	Jl. Daeng taugik Gg. Kopi Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.	1 Unit Rumah (Bagian Kamar)	15 MENIT
18	06 Mei 2023	Jl. Makmur Gg. Tanjung RT. 06 Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.	1 Unit Rumah (Bagian Dapur)	15 MENIT
19	07 Mei 2023	Jl. Soekarno Hatta Gg. Sentosa Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.	1 Unit Rumah (Bagian Kamar dan Dapur)	15 MENIT
20	09 Mei 2023	Jl. Abdul Rab Khan Gg. Family Rt. 15 Kelurahan Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.	1 Unit rumah papan	17 MENIT
21	30 Mei 2023	JL. BANDES KELURAHAN MUNDAM KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI.	GUDANG PENYIMPANAN ALAT ALAT TENDA	19 MENIT
22	01 Juni 2023	JL. PENDOWO GG. NURI RT. 08 KELURAHAN BUKIT BATREM KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI	1 UNIT RUMAH PETAK (BAGIAN DAPUR)	15 MENIT
23	09 Juni 2023	JL. SULTAN HASANNUDIN KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL IHSAN KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI.	KEBAKARAN KABEL TRAVO LISTRIK	10 MENIT
24	18 Juni 2023	JL. KESUMA GG. MESJID KELURAHAN JAYA MUKTI KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI.	GUDANG	10 MENIT



PEMKO DUMAI

25	20 Juni 2023	JL. PARIT BUGIS KELURAHAN PELINTUNG KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI.	RUMAH SEMI PERMANEN	-
26	01 Juli 2023	JL.PEMBANGUNAN RT. 16 KELURAHAN LUBUK GAUNG KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI.	2 UNIT RUKO	10 MENIT
27	03 Juli 2023	JL.TANJUNG SARI KELURAHAN TANJUNG PALAS KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI.	KABEL TIANG TRAVO	09 MENIT
28	06 Juli 2023	JL. BINTAN KELURAHAN SUKAJADI KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI.	RUMAH 2 TINGKAT	05 MENIT
29	19 Juli 2023	JL. RAJA ALI HAJI KELURAHAN PURNAMA KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI	1 (SATU) UNIT RUMAH PETAK (DI PERGUNAKAN UNTUK GUDANG)	15 MENIT
30	24 Juli 2023	JL. SUDIRMAN KELURAHAN TELUK BINJAI KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI.	KENDARAAN RODA EMPAT (SUZUKI ESCUDO)	04 MENIT
31	03 Agustus 2023	JL. TANJUNG JAYA NO. 22 RT. 09 KELURAHAN TANJUNG PALAS KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI.	1 (SATU) UNIT RUMAH PERMANEN	05 MENIT
32	11 Agustus 2023	JL. PEMBANGUNAN KELURAHAN PELINTUNG KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI.	KEBAKARAN 2 (DUA) UNIT RUMAH PAPAN DAN 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR	05 MENIT
33	19 Agustus 2023	JL. PERJUANGAN RT.10 KELURAHAN BUKIT BATREM KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI.	3 (TIGA) UNIT RUMAH PETAK PERMANEN	04 MENIT
34	22 Agustus 2023	JL. GUNUNG SELAMET RT. 04 KELURAHAN BUMI AYU KECAMATAN DUMAI SELATAN	KEBAKARAN KOMPOR	03 MENIT
35	29 Agustus 2023	JL. CUT NYAK DIEN KELURAHAN PANGKALAN SESAI KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI.	KEBAKARAN KENDARAAN RODA EMPAT	05 MENIT
36	01 September 2023	JL. PERTANIAN KELURAHAN JAYA MUKTI KECAMATAN DUMAI TIMUT KOTA DUMAI.	KEBAKARAN KABEL WIFI	05 MENIT
37	11 September 2023	JL. PERTANIAN KELURAHAN JAYA MUKTI KECAMATAN DUMAI TIMUT KOTA DUMAI.	KEBAKARAN TABUNG GAS	05 MENIT



PEMKO DUMAI

38	20 September 2023	JALAN PROF. M. YAMIN GG. MURAI KELURAHAN LAKSAMANA KECAMATAN DUMAI KOTA DUMAI.	KEBAKARAN BANTAL	05 MENIT
39	21 September 2023	JALAN UTAMA KARYA RT. 14 KELURAHAN BUKIT BATREM 2 KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI.	KEBAKARAN 1 (SATU) UNIT RUMAH BULATAN	12 MENIT
40	30 September 2023	JALAN DEMPO KELURAHAN BUMI AYU KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI.	KEBAKARAN 1 (SATU) UNIT RUMAH BULATAN (2 LANTAI)	05 MENIT
41	30 Oktober 2023	JALAN SEJAHTERA KELURAHAN TELUK BINJAI KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI.	KEBAKARAN 3 (TIGA) UNIT RUMAH PETAK	03 MENIT
42	06 November 2023	JALAN SIMPANG SIAK KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN BUKIT KAPURKOTA DUMAI.	KEBAKARAN RUMAH	06 MENIT
43	06 November 2023	JALAN CUT NYAK DIEN KELURAHAN PANGKALAN SESAI KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI.	KEBAKARAN KENDARAAN RODA DUA (HONDA BEAT)	06 MENIT
44	23 November 2023	JALAN CUT NYAK DIEN JALAN PUNAK KELURAHAN PURNAMA KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI.	KEBAKARAN DOORSMEER	06 MENIT
45	07 Desember 2023	JALAN SUDIRMAN GG SURYA KELURAHAN BINTAN KECAMATAN DUMAI KOTA DUMAI.	KEBAKARAN KENDARAAN RODA DUA (HONDA VARIO 150)	09 MENIT
46	12 Desember 2023	JALAN PETAK PANJANG KELURAHAN LAKSAMANA KECAMATAN DUMAI KOTA DUMAI.	KEBAKARAN 22 RUMAH DAN SEPEDA MOTOR	05 MENIT
JUMLAH TOTAL KEJADIAN				46 KALI KEJADIAN
JUMLAH PENANGANAN YANG KEBAKARAN KURANG DARI 15 MENIT				42 KEJADIAN
JUMLAH PENANGANAN YANG MELIBIHI DARI 15 MENIT				4 KEJADIAN

Ketercapain Target Response Time Rate Kurang dari 15 Menit pada Tahun 2023 dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran Pemukiman yang ditangani kurang dari 15 menit di wilayah manajemen Kebakaran}}{\text{Jumlah Kejadian kebakaran Pemukiman}} \times 100 \%$$

$$\frac{(48,44)}{54,85} \times 100 \% = 97,21\%$$

Adapun penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan di Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut :

Luasan lahan yang terbakar pada tahun 2023

No.	Kecamatan	Kelurahan	luas (Ha)
1	2	3	4
1.	Sungai Sembilan	LubukGaung Batu Teritip Tanjung Penyembal Geniot	3,5 4,8 1 0,7
2	MedangKampai	Mundam Teluk Makmur Guntung pelintung	0,8 15,3 0,5 66,25
3.	Bukit Kapur	Bukit Nenas Bukit Kayu Kapur Bagan Besar Gurun Panjang	1 3 1 8
4.	Dumai Barat	Bagan keladi	2,2
5.	Dumai Timur	Tanjung Palas Bukit Batrem	7,95 2,8
6.	Dumai Selatan	Bukit Datuk Mekar Sari	0,8 0,25
JumlahKeseluruhan		17 Kelurahan	119,85

Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2023 sebanyak 34 kali kejadian dengan luasan are terbakar 119,85 Ha, dengan 34 kali laporan kejaidan kebakaran yang terjadi di 6 kecamatan dari 7 kecamatan yang berada di Kota Dumai, dengan kebakaran yang terluas berada di kecamatan Medang Kampai kelurahan Pelintung sebesar 66,25 Ha



PEMKO DUMAI

4.5.4 Alokasi Anggaran

Tabel 311
Pencapaian Realisasi Kinerja dan Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023

2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBERCAMAAM)					
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			2,344,484,173	2,029,178,700	86.55 %
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	475,821,000	340,599,748	71.58 %
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	1,868,663,173	1,688,579,952	90.36 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			593,045,180	529,474,720	89.28 %
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	90.36 %
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	90.36 %
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	41,189,000	40,551,000	98.69 %
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	98.69 %
	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	0	0	98.69 %
	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	98.69 %
	7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		0	0	nan %
	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	451,855,180	391,672,720	86.68 %
	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	86.68 %
	10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	86.68 %
	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	86.68 %
	12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		100,000,000	97,151,000	97.15 %
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			0	0	0.00 %
	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	97.73 %
	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	97.73 %
3	Investigasi Kejadian Kebakaran			0	0	0.00 %
	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	97.73 %
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			0	0	0.00 %
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	0	0	97.73 %
	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		0	0	97.73 %
	3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	97.73 %



PEMKO DUMAI

3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1,838,043,416	1,702,439,100	92.62 %	
1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan	0	0	97.15 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	97.15 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	97.15 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	97.15 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	1,838,043,416	1,702,439,100	92.62 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	92.62 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		173,254,000	150,028,354	86.59 %	
1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	92.62 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	92.62 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
3	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	92.62 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	92.62 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	92.62 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	173,254,000	150,028,354	86.59 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		0	0	0.00 %	
1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	97.73 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	97.73 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	97.73 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
4	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	97.73 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA					
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINNYA						
NAMA KEGIATAN	#TAMBAH KEGIATAN		0	0		TAMBAH DATA
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PERYELAMATAN KEBAKARAN DAN PERYELAMATAN NON KEBAKARAN (DANKAR)					
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		871,338,188	862,397,295	98.97 %	
1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	86.59 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	754,768,188	748,305,795	99.14 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	99.14 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	99.14 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	nan %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	16,570,000	16,358,500	98.72 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
7	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	Dokumen	0	0	98.72 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	98.72 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
9	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	98.72 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	100,000,000	97,733,000	97.73 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI

4.5.5 Dukungan Personil

Adapun dukungan personil Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 96 Orang, terdiri dari 42 Orang PNS, dan 54 orang Non Pegawai Negeri Sipil dan Menurut Jenjang Pendidikan PNS dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Pasca Sarjana (S.2) : 4 Orang
- b. Sarjana (S.1) : 18 Orang
- c. Diploma (D.II) : 2 Orang
- d. SLTA : 70 Orang
- e. SD : 2 Orang

Sedangkan menurut golongan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Golongan IV : 2 Orang
2. Golongan III : 27 Orang
3. Golongan II : 13 Orang

4.5.6 Permasalahan Dan Solusi

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dalam mewujudkan ketentraman ketertiban umum masyarakat pada sub urusan bencana Kabupaten/Kota. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Belum dilakukannya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal yang akan menjadi acuan dalam penyusunan regulasi atau peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. Belum adanya Rencana Kontijensi (RENKON) yang didukung dengan peraturan Walikota perjenis ancaman bencana;
3. Belum adanya penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P);
4. Belum adanya Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang melibatkan Unsusr Fentahelix (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media);



PEMKO DUMAI

5. Kurangnya peningkatan kapasitas dan penyadartahuan masyarakat dikawasan rawan bencana dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana menuju masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana;
6. Masih tergabungnya dua Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan dengan masih tergabungnya UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai;
7. Belum tepenuhinya kebutuhan jumlah personil tenaga lapangan kebencanaan dan Tenaga lapangan kebakaran;
8. Belum optimalnyasarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.

Solusi :

1. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi dan Rencana Operasi (Ren Op) serta menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P);
2. Menyusun Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang melibatkan Unsusr Fentahelix (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media) dalam kesiapsiagaan menuju masyarakat Kota Dumai yang Tangguh dalam menghadapi Bencana;
3. Meningkatkan kapasitas dan penyadartahuan masyarakat dikawasan rawan bencana dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana;
4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Petugas kebencanaan dan melengkapi sarana prasarana kebencanaan sesuai karakteristik bencana daerah yang ditangani;
5. Memisahkan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan dengan mendirikan UPT, Pemadam Kebakaran menjadi Dinas, sehingga pencapaian Standar Pelayanan Minimal bisa lebih maksimal pada sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran dan penyelamtan;
6. Meriviu ulang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemadam Kebakaran dan Penyeleamatan dan IKU Badan Penanggulangan Bencana. Untuk IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yaitu sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Kawasan Rawan bencana dengan target pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana, dan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA);
 - b. Meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan 71 Indikator dan 284 target yang menjadi dasar penilaian sesuai dengan karakteristik bencana daerah yang terjadi.

4.6 URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM Dinas Sosial di Kota Dumai dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Dumai sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.



PEMKO DUMAI

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Dinas Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Dinas Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat diatur dalam :

1. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional



Tabel. 312
Indikator dan Nilai SPM serta
Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Nilai	Batas Waktu Pencapaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1 Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1 Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1 Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1 Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kab/kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	1 Tahun

4.6.2 Target Pencapaian SPM Daerah

Nilai rata-rata pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2023 adalah 100% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel. 313
Pencapaian SPM Dinas Sosial
Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota	
		Indikator Kinerja		Target (%)	Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti <i>(Disabilitas Mental / ODGJ)</i>	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	2023	100%	100%
		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti	2023	100%	100%
		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti	2023	100%	100%
		Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi			



PEMKO DUMAI

		kebutuhan dasarnya di luar panti			
4	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	2023	100%	0%
		Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kab/kota	2023	100%	100%
		Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota			
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Dinas Sosial Kota Dumai (%)					100%

* Capaian SPM Berdasarkan Anggaran APBD

4.6.2 Realisasi Pencapaian SPM

Nilai rata-rata pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Dumai Tahun 2023 adalah 100% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel.314
Realisasi Pencapaian SPM Dinas Sosial
Kota Dumai Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			(4)	(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			DUMAI LUMAH			94,18 %	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERJINIA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		456	456	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDH		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100,00 %	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	25	25	0	100,00 %	
	2. Penyediaan layanan ke darurat / layanan reaksi cepat	Orang	8	8	0	100,00 %	
	3. Penyediaan pemakanan	Orang	456	456	0	100,00 %	
	4. Penyediaan sandang	Orang	25	25	0	100,00 %	
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	28	28	0	100,00 %	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P30)	Orang	18	18	0	100,00 %	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	11	11	0	100,00 %	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar	Orang	24	24	0	100,00 %	
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100,00 %	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	25	25	0	100,00 %	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10	10	0	100,00 %	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	0	100,00 %	
	13. Layanan rujukan	Orang	17	17	0	100,00 %	



PEMKO DUMAI

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					96.67 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PEKERJAAN LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :					
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
		16	16	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.67 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDH					83.33 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
1. Layanan data dan pengaduan	Orang	16	16	0	100.00 %
2. Penyediaan layanan keaduratan/ layanan reaksi cepat	Orang	0	0	0	0.00 %
3. Penyediaan pemakanan	Orang	12	12	0	100.00 %
4. Penyediaan sandang	Orang	12	12	0	100.00 %
5. Pemberian bimbingan fisk, mental, spiritual dan sosial	Orang	12	12	0	100.00 %
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	12	12	0	100.00 %
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	12	12	0	100.00 %
8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Buktai dokumen kependudukan	Orang	0	0	0	0.00 %
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	8	8	0	100.00 %
10. Pemberian pelayanan penyesuaian keluarga	Orang	12	12	0	100.00 %
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	0	100.00 %
12. Layanan rujukan	Orang	4	4	0	100.00 %
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					96.92 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PEKERJAAN LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :					
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
		1616	1652	-36	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.92 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDH					84.62 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
1. Layanan data dan pengaduan	Orang	7	7	0	100.00 %
2. Penyediaan layanan keaduratan / layanan reaksi cepat	Orang	1652	1652	0	100.00 %
3. Penyediaan pemakanan	Orang	1652	1652	0	100.00 %
4. Penyediaan sandang	Orang	1652	1652	0	100.00 %
5. Penyediaan alat bantu	Orang	50	50	0	100.00 %
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	7	7	0	100.00 %
7. Pemberian bimbingan fisk, mental, spiritual dan sosial	Orang	2	2	0	100.00 %
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	0	0	0	0.00 %
9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Buktai dokumen kependudukan	Orang	0	0	0	0.00 %
10. Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitas layanan kesehatan	Orang	7	7	0	100.00 %
11. Pemberian pelayanan penyesuaian keluarga	Orang	5	5	0	100.00 %
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %
13. Layanan rujukan	Orang	7	7	0	100.00 %













4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tunas Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					93.33 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :					100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					13.33 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					66.67 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi
1.	Layanan data dan pengaduan	Orang	93	93	0 100.00 %
2.	Penyediaan layanan keaduan / layanan reaksi cepat	Orang	0	0	0 0.00 %
3.	Penyediaan pemukiman	Orang	93	93	0 100.00 %
4.	Penyediaan sandang	Orang	93	93	0 100.00 %
5.	Penyediaan perbelanjaan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	0	0	0 0.00 %
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	46	46	0 100.00 %
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	93	93	0 100.00 %
8.	Facilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kebaharian, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	0 0.00 %
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	0	0	0 0.00 %
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	38	38	0 100.00 %
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	8	8	0 100.00 %
12.	Layanan rujukan	Orang	62	62	0 100.00 %
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					84.00 %
Ya Terjadi Bencana					▼
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :					100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					4.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi
1.	Penyediaan pemukiman	Orang	212	212	0 100.00 %
2.	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0 0.00 %
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0 0.00 %
4.	Peranginan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0 0.00 %
5.	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0 0.00 %

Sumber : E-SPM BANGDA KEMENDAGRI

4.5.5 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Dumai adalah sebagai berikut :

Tabel. 315
Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM
Dinas Sosial Kota Dumai

NO	PROG RAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	PERSENTASE	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					3,600,358,700	3,545,332,858	98.47 %	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				3,523,998,700	3,470,356,630	98.48 %
		1	Penyediaan pemukiman	Orang	311,248,240	309,682,000	99.50 %	 
		2	Penyediaan sandang	Orang	34,361,000	34,361,000	100.00 %	 
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	50,000,000	49,955,000	99.91 %	 
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	30,808,300	30,642,300	99.46 %	 
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	272,832,860	268,216,850	98.31 %	 
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	0	0	98.31 %	 



PEMKO DUMAI

	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	98.31 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	98.31 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	98.31 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	2,649,641,800	2,606,167,480	98.36 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	35,817,500	32,600,000	91.02 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	139,289,000	138,732,000	99.60 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			76,360,000	74,976,228	98.19 %	
	1	Penyediaan makanan	Orang	68,000,000	66,617,228	97.97 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
	2	Penyediaan sandang	Orang	5,185,000	5,185,000	100.00 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	100.00 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	3,175,000	3,174,000	99.97 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	99.97 %	SIMPAN TUTUP KEGIATAN INI
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINNYA							
	NAMA KEGIATAN	#TAMBAH KEGIATAN		0	0		TAMBAH DATA

Sumber : E-SPM BANGDA KEMENDAGRI

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- a. PNS = 16 orang
- b. Non PNS = 16 orang

No	Unit Kerja	Pendidikan					PNS/Non PNS	
		S3	S2	S1	Diploma	< Diploma	PNS	Non PNS
1	Sekretariat	-	1	4	-		5	7
2	Bidang Rehabilitasi Sosial	-	1	3	1		5	6
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	3		3		6	3
Jumlah			5	7	4		16	16



PEMKO DUMAI

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 antara lain :

- a. Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Sarana dan Prasarana Kantor yang belum lengkap/ belum memadai.
- c. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial.
- d. Kurangnya kerjasama antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dengan pihak luar seperti Dinas terkait dan Dunia Usaha/CSR dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
- f. Kota Dumai merupakan daerah rawan bencana sehingga diperlukan banyak persediaan logistik dalam penanganan Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kota Dumai

Solusi

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 antara lain :

- a. Adanya kerjasama antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dan Dinas terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Perlunya diadakan pelatihan terhadap SDM Kesejahteraan Sosial baik terhadap SDM Pegawai/TKPK di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai maupun terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- c. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Dumai dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1 URUSAN PENDIDIKAN

Dalam rangka percepatan pencapaian SPM, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai pada tahun 2023 melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan terutama pendidikan dasar Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian SPM pada tahun 2023 antara lain yaitu :

Tabel. 223
Realisasi Program Kegiatan Penunjang SPM
Tahun Anggaran 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan b. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak 2. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus b. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung 2. Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) <ol style="list-style-type: none"> a. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat



PEMKO DUMAI

		<ul style="list-style-type: none">b. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran <ul style="list-style-type: none">3. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)<ul style="list-style-type: none">a. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan4. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)<ul style="list-style-type: none">a. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
--	--	--



PEMKO DUMAI

4.7.2 URUSAN KESEHATAN

Program Dan Kegiatan Yang Terkait Dengan Penerapan Spm

Tabel. 224
Program Urusan Wajib Bidang Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil b. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin c. Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir d. Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif g. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut h. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi i. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus j. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat k. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis l. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV



PEMKO DUMAI

4.7.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program Kegiatan Dinas PUPR dalam mendukung SPM Bidang Air Minum dan Pengolahan Air Limbah Domestic dengan Rincian Kinerja Sebagai Berikut :

Tabel. 225
Program Urusan Bidang Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota2. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM3. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan4. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota<ol style="list-style-type: none">a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kotab. Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja



PEMKO DUMAI

4.7.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Adapun program pada Dinas Perkimtan dalam mendukung capaian SPM Perumahan Rakyat TA 2023 antara lain:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
3. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani
4. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana
5. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
6. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus

2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
3. Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana
4. Pembangunan rumah bagi korban bencana
5. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
6. Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota

4.7.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pada Tahun 2023 Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan SPM masih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta beberapa kali perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut

Tabel. 226
PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2023

NO	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
A.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
1.	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab/Kota	475.821.000
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota	1.868.663.173
B.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
1.	Pengendalian Operasi dan penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	41.189.000
2.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	451.856.180
3.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100.000.000
C.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
1.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.838.043.416
D.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
1.	Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	173.254.000
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	
A	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam daerah Kab/Kota	
1.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kab/Kota	754.768.188
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	16.570.000
3.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	100.000.000
JUMLAH TOTAL		16.370.749.743

Untuk menunjang pelaksanaan SPM dibidang Pemerintahan Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai menetapkan Program dan kegiatan sebagai berikut:

B. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari kegiatan :

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :
 1. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
 2. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
 3. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
 4. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
 5. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 6. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sub Kegiatan :
 1. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 3. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 1. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

4.7.6 URUSAN SOSIAL

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Dinas Sosial adalah sebagai berikut :



Tabel. 227
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan
dan Pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Dumai
Serta Realisasinya Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	100%	Rp 3.523.998.200
	1 Penyediaan Permakanan	100 Orang	Rp 311.248.240
	2 Penyediaan Sandang	100 Orang	Rp 34.361.000
	3 Penyediaan Alat Bantu	76 Orang	Rp 50.000.000
	4 Pemberian Layanan Reunifikasi Kluarga	100 Orang	Rp 30.808.300
	5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100 Orang	Rp 272.832.360
	6 Pemberian Layanan Kedaruratan	2123 Orang	Rp 2.649.641.800
	7 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50 Orang	Rp 35.817.500
	8 Pemberian Layanan Rujukan	50 Orang	Rp 139.289.000
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
	2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	Rp 76.360.000
	1 Penyediaan Makanan	150 Orang	Rp 68.000.000
	2 Penyediaan Sandang	15 Orang	Rp 5.185.000
	3 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	10 Orang	Rp 3.175.000
TOTAL			Rp 3.600.358.200



PEMKO DUMAI

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Dumai Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Didalam Laporan ini dijelaskan tentang Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi yang meliputi Prioritas Urusan Wajib dan Prioritas Urusan Pilihan, dan penyelenggaraan Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan, yang diuraikan melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan, jumlah anggaran, sarana dan prasarana yang digunakan, dan permasalahan yang ditemukan serta solusi yang diharapkan.

Sangat disadari bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan maupun kendala sehingga Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, baik permasalahan maupun kendala yang dihadapi dapat diselesaikan sehingga tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada. Permasalahan, kendala maupun kelemahan-kelemahan yang ada pada Tahun Anggaran 2023 dijadikan sebagai pemicu dan pemacu untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah khususnya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang.

Kita berharap pada tahun mendatang, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, sukses sebagaimana yang diharapkan.

Dumai, Maret 2024

WALIKOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM, MARS